



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL: Saat Terjadi Poli-Krisis



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK





Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL: Saat Terjadi Poli-Krisis



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-18-5 (PDF)



9

786347

695185

KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL : Saat Terjadi Poli-Krisis

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-634-7695-18-5 (PDF)

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Di tengah gejolak ekonomi global pasca-pandemi, perang dagang, dan transisi energi, kebijakan ekonomi internal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis bagi setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan. Dalam era ketidakpastian global yang ditandai oleh pandemi COVID-19, fragmentasi ekonomi, dan persaingan geopolitik multipolar, pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi internal menjadi kunci bagi bangsa-bangsa untuk menavigasi tantangan kontemporer. Buku *Kebijakan Ekonomi Internal* ini hadir sebagai panduan komprehensif yang mengintegrasikan teori, sejarah, dan praktik untuk menganalisis bagaimana negara-negara merespons dinamika ekonomi dunia, sambil memperkuat kedaulatan domestik mereka.

Buku ini terstruktur dalam 13 bab yang saling terkait, Bab 1: Kebijakan Ekonomi Internasional – Teori dan Praktik memperkenalkan fondasi globalisasi, teori politik internasional, dinamika perdagangan, dan daya saing ekonomi, menjelaskan bagaimana negara-negara membentuk strategi ekspor-impor di era interkoneksi.

Bab 2: Reset Besar dan Tataan Ekonomi Global Baru menelusuri sejarah dari Kongres Wina hingga persaingan empat poros ekonomi (AS, Eropa, Tiongkok, Rusia), menganalisis risiko multikompleks dan "reset besar" yang mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan global. Bab 3: Peluang & Tantangan Global mengupas peluang globalisasi kontemporer beserta ancamannya, termasuk dampak ketidaksetaraan sosial-ekonomi di dunia interkoneksi, dengan ringkasan implikasi bagi kebijakan nasional.

Bab 4: Realisme Ekonomi dan Tataan Dunia Baru membahas tantangan tataan baru, model ekonomi pasar sebagai organisasi nasional, reposisi peran negara-pasar, dan transformasi menuju Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Bab 5: Fragmentasi Ekonomi Global dan Dampak Sistemik menganalisis perpecahan geopolitik, langkah-langkah persaingan ekonomi, dan keretakan sistemik yang mengancam stabilitas rantai pasok global.

Bab 6: Sistem Keuangan Internasional versus Stabilitas Ekonomi mengeksplorasi hubungan sektor keuangan-riil, paradigma keamanan ekonomi, peran kebijakan negara, serta dilema globalisme versus kedaulatan dalam mencari model ekonomi baru. Bab 7: Stabilitas Perbankan Era Pasca-Pandemi merinci kebijakan makroprudensial, instrumennya, dampak pandemi-perang terhadap perbankan, respons dinamis kredit, dan penggunaan penyangga untuk ketahanan sektor keuangan.

Bab 8: Krisis Polikritis dan Ekonomi Politik Sumber Daya Alam membahas peran SDA abad ke-21, ketersediaan bahan baku kritis, ekonomi politik SDA, dan tantangan transisi energi yang memengaruhi ketergantungan global. Bab 9: Kekuatan Global & Keamanan Internasional menganalisis faktor keamanan nasional modern, evaluasi metode, dan ekonomi sebagai penentu kekuatan militer, menyoroti interseksi pertahanan-ekonomi.

Bab 10: Dampak Global COVID-19 pada Ekonomi & Sosial menelaah indikator pembangunan global, dampak pandemi pada pasar saham regional-nasional, dan transformasi sosio-ekonomi pasca-krisis. Bab 11: Pembangunan Berkelanjutan Pasca-Pandemi memaparkan

model sosio-ekonomi arus utama, integrasi pembangunan berkelanjutan, dan strategi pasca-pandemi untuk ketahanan jangka panjang.

Bab 12: Sisi Gelap Pajak Penghasilan dalam Kebijakan Ekonomi Dunia mengkritik sistem PPh di OECD, ketidakadilan schedular, tekanan politik PPh pribadi, dan ketimpangan beban pajak dalam persaingan global. Bab 13: Mendanai Global Commons di Era Antroposen menawarkan perspektif ekonomi Antroposen, konvensi kepemilikan bersama, inefisiensi metode tradisional, triangulasi strategis, dan keunggulan Pareto untuk solusi modern.

Karya ini bukan sekadar kompilasi pengetahuan, melainkan panggilan untuk refleksi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif historis, analisis empiris, dan proyeksi masa depan, buku ini bertujuan mendorong pembaca merumuskan kebijakan ekonomi internal yang tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan nasional.

Semoga buku ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi siapa pun yang peduli dengan masa depan ekonomi global dan domestik. Kritik dan saran konstruktif sangat dihargai untuk pengembangan edisi mendatang

Semarang, Mei 2026

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL – TEORI DAN PRAKTIK	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Globalisasi Dan Integrasi Internasional	2
1.3 Teori-Teori Politik Internasional.....	5
1.4 Kebijakan Ekonomi Internasional	7
1.5 Dinamika Perdagangan Internasional.....	10
1.6 Daya Saing & Pengaruh Ekonomi Global	15
1.7 Kesimpulan	24
BAB 2 RESET BESAR DAN TATANAN EKONOMI GLOBAL BARU	26
2.1 Pendahuluan.....	26
2.2 Sejarah Eropa Berdasarkan Kongres Wina	27
2.3 Peran Keputusan Eropa Tentang Keberlanjutan	27
2.4 Pertimbangan Tentang Fenomena Risiko Multikompleks	29
2.5 Persaingan Empat Poros Ekonomi Global.....	34
2.6 Reset Besar	39
2.7 Dimensi Tantangan Tiongkok.....	40
2.8 Kesimpulan	45
BAB 3 PELUANG & TANTANGAN GLOBAL.....	47
3.1 Pendahuluan.....	47
3.2 Peluang Dan Ancaman Yang Menyertai Proses Globalisasi Kontemporer	49
3.3 Dampak Ketidaksetaraan Sosial-Ekonomi Di Dunia Interkoneksi Global	55
3.4 Ringkasan.....	60
BAB 4 REALISME EKONOMI DAN TATANAN DUNIA BARU.....	61
4.1 Pendahuluan.....	61
4.2 Tantangan Tatanan Dunia Baru.....	61
4.3 Model Ekonomi Pasar Sebagai Pola Untuk Organisasi Ekonomi Nasional	62
4.4 Model-Model Pengembangan Utama Ekonomi Pasar	63
4.5 Reposisi Peran Negara Dan Pasar Dalam Tatanan Ekonomi Baru	64
4.6 Transformasi Ekonomi Pasar Menuju Agenda 2030.....	65
4.7 Ringkasan.....	72
BAB 5 FRAGMENTASI EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAK SISTEMIK	73
5.1 Pendahuluan.....	73
5.2 Perpecahan Dan Keretakan	76
5.3 Langkah-Langkah Persaingan	82
5.4 Ringkasan.....	89
BAB 6 SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL VERSUS STABILITAS EKONOMI	91
6.1 Pendahuluan.....	91
6.2 Hubungan Antara Sektor Keuangan Dan Ekonomi Riil	91

6.3	Paradigma Keamanan Dan Stabilitas Sistem Ekonomi Dan Keuangan	97
6.4	Sistem Keuangan Dalam Kebijakan Negara	100
6.5	Dampak Pembangunan Struktur Dari Kebijakan Ekonomi Negara	102
6.6	Globalisme Vs Kedaulatan Ekonomi Negara.....	104
6.7	Tantangan Pencarian Model Ekonomi Baru	107
6.8	Ringkasan.....	110
BAB 7	STABILITAS PERBANKAN ERA PASCA-PANDEMI.....	113
7.1	Pendahuluan.....	113
7.2	Kebijakan Makroekonomi Terhadap Krisis Global	114
7.3	Aspek Mikro Dan Makroprudensial Dari Stabilitas Sektor Perbankan	114
7.4	Kebijakan Makroprudensial – Definisi Dan Prinsip Dasar Pelaksanaannya.....	115
7.5	Instrumen Kebijakan Makroprudensial	116
7.6	Dampak Pandemi Dan Perang Terhadap Stabilitas Perbankan	119
7.7	Respons Makroprudensial Terhadap Pandemi Dan Perang	121
7.8	Dinamika Kredit Pasca Guncangan Eksternal	122
7.9	Penggunaan Penyangga Makro-Prudensial	123
7.10	Ringkasan.....	126
BAB 8	KRISIS POLIKRITIS DAN EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM	128
8.1	Pendahuluan.....	128
8.2	Peran Dan Pentingnya Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Abad Ke-21	129
8.3	Ketersediaan Bahan Baku Kritis	135
8.4	Ekonomi Politik Sumber Daya Alam	137
8.5	Ekonomi Politik Di Masa Transisi Energi	142
8.6	Ringkasan.....	148
BAB 9	KEKUATAN GLOBAL & KEAMANAN INTERNASIONAL.....	150
9.1	Pendahuluan.....	150
9.2	Faktor Keamanan Nasional Modern Dan Metode Evaluasinya	151
9.3	Ekonomi Sebagai Penentu Kekuatan Militer Global	153
9.4	Ringkasan.....	170
BAB 10	DAMPAK GLOBAL COVID-19 PADA EKONOMI & SOSIAL	172
10.1	Pendahuluan.....	172
10.2	Indikator Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Global	173
10.3	Pembangunan Sosial-Ekonomi Negara.....	173
10.4	Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pasar Saham Regional Dan Nasional.....	189
10.5	Ringkasan.....	195
BAB 11	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA-PANDEMI	197
11.1	Pendahuluan.....	197
11.2	Memahami Model Sosio-Ekonomi	197
11.3	Model Sosio-Ekonomi Arus Utama.....	202
11.4	Pembangunan Berkelanjutan Dalam Model Sosio-Ekonomi.....	207
11.5	Pembangunan Berkelanjutan Pasca-Pandemi.....	211
11.6	Ringkasan.....	215
BAB 12	SISI GELAP PAJAK PENGHASILAN DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DUNIA	217
12.1	Pajak Penghasilan Di Negara-Negara OECD.....	217

12.2	Ketidakadilan Pajak Dalam Sistem PPH Schedular	219
12.3	Pajak Penghasilan Pribadi – Penekanan Politik Yang Kuat	222
12.4	Ketimpangan Beban Pajak Dalam Persaingan Global.....	223
12.5	Ringkasan.....	225
BAB 13	MENDANAI GLOBAL COMMONS DI ERA ANTROPOSEN	227
13.1	Ekonomi Berbeda Di Era Antroposen	227
13.2	Kepemilikan Bersama Sebagai Konvensi Sosial	229
13.3	Inefisiensi Dan Kelemahan Metode Tradisional	232
13.4	Triangulasi Strategis Yang Ramah	234
13.5	Keunggulan Pareto Dalam Tren Solusi Modern.....	236
13.6	Ringkasan.....	238
DAFTAR PUSTAKA		240

BAB 1

KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL – TEORI DAN PRAKTIK

1.1 PENDAHULUAN

Secara teori, kebijakan ekonomi internasional mencakup studi tentang berbagai aliran pemikiran ekonomi dan politik, seperti liberalisme ekonomi, proteksionisme, teori neraca perdagangan, dan pendekatan berdasarkan teori permainan dan teori institusional. Secara praktik, hal ini mengacu pada tindakan spesifik yang diambil oleh negara dan lembaga internasional untuk mengelola hubungan ekonomi mereka dengan negara lain, perusahaan global, dan lembaga internasional. Ini termasuk pelaksanaan kebijakan makroekonomi yang, sampai batas tertentu, independen dalam konteks global, negosiasi dan pembuatan perjanjian perdagangan, intervensi pemerintah pada isu-isu yang dipengaruhi oleh daya saing dan perdagangan, pengelolaan nilai tukar, dan memengaruhi kebijakan moneter dan pajak.

Dalam wacana teoretis, kebijakan ekonomi internasional berbeda dari dimensi praktisnya, meskipun fungsi pembenaran teori ekonomi neoklasik yang sederhana telah tertanam dalam wacana politik beberapa dekade terakhir. Bahkan dapat dikatakan bahwa ekonomi neoliberal dengan gagasan pasar bebas¹ dan indikator kemajuan yang cacat yang tercermin dalam PDB telah memainkan peran kunci dalam politik dan pembentukan hubungan ekonomi internasional. Bagaimanapun, efisiensi alokatif mencerminkan penggunaan sumber daya yang tersedia tetapi hanya secara selektif memaksimalkan kesejahteraan, sedangkan efisiensi kuasi-kompetitif sering ditentukan oleh intervensi negara daripada pasar bebas. Akhirnya, kebijakan ekonomi internasional bukan hanya tentang daya saing yang berpusat pada produktivitas ekonomi tetapi juga permainan politik dan pasar yang keras yang didukung oleh ideologi tertentu dan proteksionisme yang kuat, atau bahkan kekuatan ekonomi atau militer secara langsung.

Bab ini menyajikan proses yang membentuk globalisasi dan integrasi internasional sebagai perluasan ekonomi internasional dan teorinya, kebijakan perdagangan internasional dari perspektif sistemik, dan ekonomi politik dalam wacana analisis global makroekonomi dan signifikansinya dalam kebijakan ekonomi internasional. Makalah ini mengusulkan definisi baru tentang deglobalisasi dan menguraikan teori-teori politik internasional, karakteristik kebijakan ekonomi internasional, teori-teori perdagangan internasional dalam kebijakan ekonomi internasional, dan klasifikasi model untuk mengukur dan menganalisis kebijakan ekonomi internasional.

Makalah ini diakhiri dengan analisis daya saing dalam kebijakan ekonomi internasional, dengan negara-negara yang disebut sebagai negara adidaya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, India, dan Rusia, yang diidentifikasi berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya tentang subjek tersebut dalam hal potensi ekonomi dan militer. Berdasarkan data agregat dari basis data Bank Dunia yang mencerminkan semua variabel untuk studi ekonomi dunia, enam variabel diidentifikasi berdasarkan signifikansi korelasional: (1) PDB (dalam miliar, tingkat pertumbuhan ekonomi); (2) PDB per kapita (PPP, tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita



menurut paritas daya beli); (3) M EXP (pengeluaran militer); (4) TRADE S (perdagangan jasa); (5) TRADE (total perdagangan suatu negara, yaitu ekspor dan impor); dan (6) TNR (total sewa sumber daya alam, persentase PDB suatu negara relatif terhadap indeks ketidakpastian (Indeks Ketidakpastian Dunia – WUI, disingkat U-index²), dengan WUI berdasarkan model aditif dengan efek tetap yang bergantung pada enam variabel ekonomi. Tujuan fase pertama penelitian ini adalah untuk membangun model panel ekonomi dunia berdasarkan hampir 1.500 parameter dari basis data Bank Dunia, mencari model efek tetap (FE) dan model efek acak (RE). Tidak ditemukan hubungan yang signifikan sebagai hasil pemodelan, sehingga model regresi linier terpisah dilakukan untuk lima entitas/negara yang diteliti (termasuk Uni Eropa). Berdasarkan koefisien regresi, hal ini memungkinkan untuk menentukan kekuatan pengaruh variabel yang diteliti dan signifikansinya.

1.2 GLOBALISASI DAN INTEGRASI INTERNASIONAL

Globalisasi memiliki sejarah lebih dari seribu tahun dan berakar dari konflik bersenjata dan perebutan kekuasaan antar negara, meskipun tidak diberi nama selama berabad-abad. Baru pada abad ke-15 kata benda "globe" muncul dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan bumi yang bulat (bola). Istilah adjektiva untuk lingkup global mulai digunakan pada abad ke-17 (dan secara global pada abad ke-19). Istilah "globalisme" baru mulai beredar secara global pada tahun 1940-an. Dalam istilah internasionalis, globalisasi, melalui politik internasional, perdagangan internasional, dan kerja sama ekonomi (termasuk investasi), mengacu pada dunia yang lebih global dan saling terhubung di mana batas-batas fisik antar negara semakin kabur mengingat semakin meluasnya arus informasi, barang, jasa, modal, investasi, dan manusia.

Globalisasi melekat pada kekuatan politik yang menyertai penaklukan dan munculnya jaringan perdagangan internasional selama berabad-abad. Prinsip-prinsip globalisasi berasal dari dominasi, pada waktu tertentu, dari sebuah negara adidaya tertentu yang memaksakan nilai-nilai dan hukumnya kepada negara-negara lain. Contoh negara adidaya tersebut dalam sejarah termasuk Kekaisaran Mongol, yang secara teritorial terbesar dalam sejarah (abad ke-13), Kekaisaran Ottoman (abad ke-15 dan ke-16), Monarki Habsburg Spanyol (abad ke-16 dan ke-17), Kekaisaran Inggris (abad ke-18 dan ke-19), dan yang disebut kekuatan-kekuatan Eropa yang bersekutu, yaitu Prancis, Jerman, dan Rusia (abad ke-19). Abad ke-20 menjadi milik dua negara adidaya – Amerika Serikat, yang secara ekonomi tak tertandingi, dan Rusia (Uni Soviet), yang dibebani oleh masalah perubahan rezim. Abad ke-21 dipandang sebagai abad beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, India, Rusia, dan Jepang, yang terakhir tidak memiliki subjektivitas negara adidaya tetapi tetap menjadi pemain kunci dalam politik internasional karena posisi politik dan ekonominya.

Berkat perkembangan perdagangan, pusat-pusat keuangan global pun lahir. Amsterdam (1780–1794) kehilangan dominasinya dalam perdagangan maritim setelah kalah dalam perang angkatan laut (1784) dan menyerahkan kekuasaannya kepada London. Pelabuhan London berkonsentrasi pada perdagangan barang, kegiatan perbankan khusus berdasarkan Bank of England yang didirikan pada tahun 1694, dan asuransi maritim.



Perdagangan melalui London secara langsung didukung oleh koloni-koloni Kekaisaran Britania, yang antara tahun 1784 dan 1840 meliputi British Raj (India, Pakistan, dan Bangladesh saat ini), Kanada, Australia (termasuk New South Wales, Victoria, dan Wales, antara lain), Selandia Baru, koloni-koloni di Afrika (Zimbabwe, Zambia, Kenya, dan Nigeria saat ini, antara lain), dan Karibia (termasuk Jamaika, Barbados, dan Trinidad dan Tobago, antara lain). Pendapatan dari perdagangan luar negeri membuktikan kekuatan negara, dan pengeluaran militer merupakan bagian terbesar dari pengeluaran publik selama berabad-abad, tidak hanya di negara-negara Eropa. Bea cukai atas perdagangan luar negeri di bawah Raja Henry VI dari Inggris pada abad ke-15 mencapai 50% dari pendapatan publik. Pada abad ke-18, pengeluaran militer Inggris mewakili 70% dari pengeluaran publik. Pada saat itu, Inggris sedang berjuang untuk dominasi kolonial dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dunia dengan Austria, Prancis, Spanyol, dan Rusia, yang berpuncak pada Perang Tujuh Tahun (1756–1763).

Perang tersebut berakhir dengan kemenangan Inggris (dengan Prusia sebagai mitra koalisinya) dan melemahnya Prancis dan Spanyol. Dalam arti tertentu, Inggris memonopoli impor barang ke koloni melalui apa yang disebut Undang-Undang Navigasi. Mereka hanya mengizinkan pedagang dan produsen dari negara penjajah untuk mengimpor barang ke koloni, sementara semua barang lain yang diproduksi di negara selain negara penjajah (Inggris Raya) tidak hanya harus melewati pelabuhan penjajah tetapi juga dikenakan pajak di sana dengan tarif 20% (yang disebut royal fifth) dan tarif tinggi lainnya, yang sebagian besar diterapkan hingga pertengahan abad ke-19. Model kebijakan industri dan perdagangan yang jauh dari liberal dalam integrasi internasional ini diterapkan pada abad ke-19 oleh Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat.

Faktanya, hingga Perang Dunia I, Paris adalah pusat keuangan terbesar kedua di dunia setelah London dan kekaisaran kolonial terbesar kedua di dunia. Perang Dunia II secara signifikan melemahkan peran ekonomi dan keuangan Berlin dan London, menjadikan New York sebagai pusat keuangan global dunia antara tahun 1945 dan 1980 (dalam persaingan konstan dengan London). Periode dari tahun 1981 hingga 2009 ditandai dengan meningkatnya globalisasi (tidak hanya keuangan), dengan Hong Kong, San Francisco, Singapura, Los Angeles, Shanghai, Beijing, Paris, dan Tokyo menjadi pemain utama dalam lingkup pusat keuangan global di tahun-tahun berikutnya (selain para pemimpin, yaitu New York dan London). Perubahan sistemik baru-baru ini dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekali saja, seperti Brexit, pandemi COVID-19, perang dagang AS-Tiongkok, dan perang skala penuh Rusia dengan Ukraina, kemungkinan akan menyebabkan pelemahan lebih lanjut pusat keuangan global di London demi Amsterdam, Dublin, Frankfurt, dan Paris (dan mungkin Warsawa). Pusat-pusat baru ini juga melemahkan pemain utama di Amerika Serikat (New York), yang juga melemah karena pengaruh China, asalkan mereka membangun koalisi negara-negara yang bergantung dan bekerja sama yang semakin efektif. Dominasi Singapura di Asia tampaknya sama mungkinnya, dengan Hong Kong semakin kehilangan posisinya sebagai pusat keuangan global.

Pada intinya, globalisasi menyangkut kategori ekonomi, politik, dan budaya di mana peran tatanan dunia yang berpusat pada Barat telah dipertanyakan, terutama pada dekade kedua abad ke-21. Ini disebut re-globalisasi atau deglobalisasi di mana, mengingat



keseimbangan kekuatan yang baru, konsep globalisasi itu sendiri sedang didefinisikan ulang, arahnya diubah, dan berbagai proses direvisi. Narasi lain tentang globalisasi mendefinisikan pendekatan berikut:

- a. Hiper-globalisasi – percepatan arus lintas batas penduduk, modal, budaya, ide, atau teknologi yang memengaruhi kebijakan sosial-ekonomi suatu negara dan berdampak negatif terhadap kedaulatan nasional (literatur didominasi oleh tinjauan dan komentar, pendekatan kritis, dan antusias);
- b. Anti-globalisasi – pendekatan dan tren neoliberal terhadap globalisasi dan penanggulangan dampak negatif globalisasi;
- c. Alter-globalisasi – penggabungan keadilan sosial, inklusivitas, dan mode globalisasi yang dianggap demokratis;
- d. Re-globalisasi – respons globalis terhadap populisme dan sikap nasionalis, yang mempromosikan arah globalisasi pasca-neoliberal.

Dalam arti tertentu, ekonomi global bertentangan dengan gagasan negara bangsa, meskipun dapat berfungsi dengan baik dalam sistem tersebut. Terserah negara bangsa untuk memutuskan sistem politik mana yang akan mereka pilih. Dalam hal ini, mereka harus menyadari bahwa globalisasi ekonomi dapat dihindari tetapi dengan harga membatasi sifat global pasar. Perlu dicatat bahwa tidak mungkin untuk mendamaikan tiga variabel globalisasi: demokrasi politik, kedaulatan nasional, dan kapasitas penuh untuk penentuan nasib sendiri dengan hiper-globalisasi. Upaya untuk mendamaikan variabel-variabel ini akan selalu menyebabkan beberapa defisit, besar atau kecil, dalam pengambilan keputusan, kedaulatan, dan demokrasi.

Narasi tandingan, yang muncul lebih luas pada tahun 1990-an dan berpusat pada arah globalisasi selanjutnya, adalah deglobalisasi. Karya perintis di bidang ini dikembangkan oleh S. Amin, yang mempertanyakan kebijakan pembangunan yang sepenuhnya didasarkan pada subordinasi strategi pembangunan suatu negara terhadap tujuan globalisasi. Ia mengusulkan autosentrisme dan rekonstruksi internal ekonomi nasional, mengabaikan faktor global dan menolak model neoliberal globalisasi demi pembangunan kedaulatan ekonomi, penguatan kerja sama antar negara berkembang (yang disebut kerja sama Selatan-Selatan), dan demokratisasi hubungan internasional sebagai bagian dari peningkatan partisipasi negara berkembang dalam sistem kelembagaan internasional.

Deglobalisasi umumnya dianalisis dalam tiga dimensi: (a) sebagai serangkaian proses yang membalikkan globalisasi; (b) sebagai desentralisasi Barat; dan (c) sebagai gelombang perubahan sementara dalam politik global. Deglobalisasi adalah dunia yang kurang saling terhubung, atau dunia yang saling terhubung secara berbeda, di mana lembaga-lembaga internasional global yang selama ini dikenal masih ada, tetapi peran mereka ditentukan tidak hanya oleh pemikiran yang berpusat pada Barat. Tampaknya jelas bahwa deglobalisasi akan paling menguntungkan negara-negara yang secara militer dan ekonomi paling kuat dan bahwa proses deglobalisasi itu sendiri mungkin terlepas dari keadilan sosial.

Dalam hal kebijakan ekonomi internasional dan ketidakamanan geopolitik, deglobalisasi dapat berarti penggunaan faktor produksi domestik yang lebih besar untuk



kebutuhan ekonomi sendiri dan pengurangan ketergantungan pada investasi asing langsung dan produksi ekspor. Namun, sementara bagian pertama dari tesis ini mungkin benar di bawah asumsi tertentu, bagian kedua menyiratkan tantangan, yang mendorong identifikasi risiko polikrisis global, yang dipahami sebagai terjadinya secara bersamaan setidaknya tiga risiko sistemik dalam sistem global sosial dan alam, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan drastis prospek umat manusia. “Polikrisis global, jika terjadi, akan mewarisi empat sifat inti dari risiko sistemik – kompleksitas ekstrem, nonlinieritas tinggi, kausalitas lintas batas, dan ketidakpastian yang mendalam – sekaligus menunjukkan sinkronisasi kausal di antara risiko-risiko tersebut”. Kompleksitas ini tentu lebih dekat dengan era deglobalisasi, yang didefinisikan secara beragam, daripada hiperglobalisasi.

Oleh karena itu, bab ini mendefinisikan ulang deglobalisasi dalam kebijakan ekonomi internasional sebagai proses pluralisasi polikrisis dari fungsi ekonomi nasional individu – yang tergabung dalam manifestasi proteksionisme, preferensi, dan tujuan perdagangan global yang lebih besar – di mana produksi domestik lebih mandiri atau, sebaliknya, bergantung pada negara lain, ekspansi asing ditargetkan, dan investasi asing langsung bergantung pada kelompok afiliasi, kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer, serta hubungan dengan kekuatan global utama. Perlu juga dicatat bahwa dampak peristiwa geopolitik terhadap penarikan globalisasi perdagangan belum terbukti, tetapi sifat globalisasi itu sendiri berbeda.

Globalisasi telah berkali-kali dinyatakan mati, tetapi tidak satu pun dari prediksi tersebut yang terwujud. Integrasi global telah lama berkembang secara bergelombang – dan perkembangan terkini yang dipicu oleh pandemi dan gejolak geopolitik bukanlah pengecualian. Indikator globalisasi yang banyak digunakan, seperti perdagangan internasional dan arus modal, telah pulih dengan kuat, meskipun ada kekhawatiran akan fragmentasi diskriminatif dan proteksionisme.

Skenario yang paling mungkin untuk perdagangan internasional adalah perkembangan ekonomi digital dan kemitraan digital. Terlepas dari peningkatan signifikan hambatan bea cukai terhadap perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir (58,9%), dominasi hambatan teknologi atas hambatan bea cukai terlihat jelas. Selain itu, pertumbuhan dinamika teknologi tinggi (74,94%) terlihat jelas, yang dalam skenario ini mendorong peningkatan indeks globalisasi dan peningkatan daya saing digital. Terobosan teknologi dari negara produsen terbesar di dunia (China) akan berdampak positif, pada tingkat mikro dan meso, dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok asing bagi perusahaan-perusahaan China di sektor produk bernilai tambah tinggi (HVAP). Ini berarti bahwa Tiongkok, dengan beradaptasi dengan rantai pasokan yang terus berkembang, akan bertaruh pada pembiayaan terobosan teknologi dan selanjutnya secara signifikan meningkatkan pangsa pasarnya di pasar teknologi tinggi global.

1.3 TEORI-TEORI POLITIK INTERNASIONAL

Teori-teori politik internasional telah dan terus memainkan peran kunci dalam hubungan internasional. Mungkin teori-teori kunci tersebut meliputi realisme (dan kemudian



neorealisme struktural Kenneth Waltz), liberalisme, konstruktivisme, teori hegemoni, teori ketergantungan, dan teori permainan dalam hubungan internasional. Berdasarkan atau sejajar dengan teori-teori tersebut, teori-teori lain telah berkembang, seperti teori keamanan (studi keamanan), teori dialog budaya, teori interseksional, teori pascakolonial, dan teori internasional feminis.

Pemikiran realis yang berfokus pada sentralitas kekuasaan, daya saing antar negara, dan adopsi keutamaan tindakan negara melalui kepentingan diri dan keamanan sudah mulai terbentuk pada abad ke-16 dan ke-17 berkat Niccolò Machiavelli dan Thomas Hobbes. Namun, pengakuannya terhadap kanon hubungan internasional terwujud pada pertengahan abad ke-20 melalui salah satu pendahulunya yang utama, Hans Morgenthau.³⁵ Dalam realisme, negara-negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, yang berupaya menegaskan kekuasaan, keamanan, dan kelangsungan hidup. Mereka selalu menunjukkan kecenderungan terhadap konflik dan persaingan, menolak keberadaan pusat kekuasaan internasional. Paruh kedua abad ke-20 secara jelas menunjukkan munculnya struktur sentris internasional di mana kekuasaan mulai didistribusikan di antara negara-negara dan stabilitas ditentukan oleh keberadaan dan pengaruh hegemon global. Hal ini melahirkan neorealisme struktural Kenneth Waltz pada tahun 1980-an. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap realisme klasik dan pengembangan serta modifikasi realisme klasik, yang mengidentifikasi struktur internasional sebagai penentu utama perilaku negara, mengesampingkan karakteristik individual mereka.

Liberalisme memiliki episode-episodenya pada abad ke-18 melalui Immanuel Kant, tetapi konsep-konsep liberal dalam politik internasional telah dibentuk sejak akhir abad ke-19 dan seterusnya dengan penekanan pada promosi demokrasi, hak asasi manusia, kerja sama internasional, dan pasar serta perdagangan bebas. Liberalisme juga menyiratkan interdeterminisme yang menurutnya negara-negara aktif dalam membentuk tatanan internasional dan tidak hanya tunduk pada kekuatan struktural.

Konstruktivisme dalam hubungan internasional muncul pada tahun 1980-an. Pendekatan ini berfokus pada pentingnya gagasan, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku aktor internasional dan dalam menciptakan sistem dan institusi internasional. Dalam pendekatan ini, konstruksi sosial ditentukan oleh nilai-nilai, pengalaman, dan kepercayaan serta dibentuk melalui evolusi, sementara situasi dan peristiwa tertentu dilihat dari perspektif identifikasi dan persepsi, dengan penekanan pada identitas individu dan kolektif.

Teori hegemoni dalam politik internasional, yang berkontribusi pada pengembangan karya dan analisis kunci, dikembangkan pada abad ke-20. Teori ini mengkaji peran satu negara atau kelompok negara (hegemon) dalam membentuk tatanan internasional dan dampak dominasi ini terhadap stabilitas dan fungsi sistem internasional. Asumsi utamanya adalah adanya negara dominan (hegemon), yang merupakan aktor sentral dengan keunggulan militer, ekonomi, teknologi, budaya, atau politik yang signifikan dibandingkan aktor lain dalam sistem internasional. Dalam model ini, hegemon memainkan peran penstabil dan memberikan keamanan, tetapi sebagai imbalannya, memaksakan norma dan nilainya sendiri. Hegemon memastikan keseimbangan sistem internasional dengan mengendalikan dan memengaruhi



tindakan negara-negara lain yang dapat mengancam tatanan dunia yang ada. Teori ini mengasumsikan sifat siklus dari siklus hegemoni, yang berarti bahwa perubahan dalam struktur sistem internasional mengakibatkan perubahan dalam kondisi dan keseimbangan kekuasaan serta munculnya hegemon baru.

Teori ketergantungan dalam politik internasional berfokus pada analisis ketidaksetaraan antara negara maju dan negara berkembang yang dihasilkan dari proses sejarah, kolonialisme, dan imperialisme serta pada dampak hubungan di antara mereka terhadap pembentukan tatanan internasional. Teori ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global mempertahankan ketidaksetaraan struktural dan ketergantungan ekonomi yang ditentukan oleh hubungan ekonomi dengan negara-negara dominan. Ketidaksetaraan dipertahankan melalui mekanisme yang menimbulkan utang luar negeri, hubungan investasi asimetris, dan harga komoditas yang rendah di negara-negara dominan dalam eksploitasi tenaga kerja murah, pasar, dan sumber daya alam. Teori ketergantungan mengkritik pendekatan tradisional terhadap pembangunan, menekankan perlunya perubahan struktur sosial-ekonomi untuk mengatasi ketidaksetaraan internasional.

Teori permainan dalam hubungan internasional menerapkan model permainan dari teori permainan untuk menganalisis interaksi antar negara dan pengambilan keputusan mereka dalam konteks internasional. Asumsi utamanya adalah bahwa terdapat interaksi strategis antar negara di mana keputusan yang dibuat oleh satu negara memengaruhi keputusan negara lain dan sebaliknya. Teori permainan menganalisis risiko dan imbalan dari strategi tertentu dengan mengasumsikan bahwa negara-negara bersifat rasional (yang dengan sendirinya harus diperdebatkan) dan berupaya memaksimalkan kepentingan mereka dalam konteks kondisi dan kendala tertentu. Perlu dicatat bahwa teori permainan menggunakan berbagai model permainan, seperti permainan zero-sum, permainan non-zero-sum, permainan berulang, permainan kooperatif, dan permainan non-kooperatif. Model-model ini membantu menganalisis berbagai skenario interaksi internasional dan memprediksi kemungkinan hasilnya. Teori permainan dalam hubungan internasional merupakan alat analisis yang berguna untuk mempelajari dan memprediksi perilaku aktor internasional dan hasil interaksi mereka. Dengan menerapkan model matematika dan pola inferensi yang sesuai, akan lebih mudah untuk memahami dinamika hubungan internasional, proses pengambilan keputusan, dan kemungkinan konsekuensinya terhadap stabilitas dan keamanan global.

1.4 KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL

Kebijakan ekonomi internasional negara-negara non-kekuatan dapat ditentukan oleh dua prioritas utama – stabilitas di kawasan dan pemeliharaan kedaulatan teritorial dan politik sebagai aspek terpenting dari keamanan. Lebih lanjut, “kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk tujuan keamanan nasional atau geopolitik, kadang-kadang disebut *geoekonomi*, dapat membuat negara-negara lebih lemah, lebih miskin, dan kurang aman”.

Pembagian kebijakan ekonomi internasional saat ini berpusat pada dua negara adidaya (China dan Amerika Serikat) dan dua negara adidaya yang disebut kekuatan lunak (Uni Eropa dan India). Rusia, yang tentu saja dianggap sebagai negara adidaya karena potensi nuklirnya



tetapi, karena ketergantungan tertentu pada China, agak terpinggirkan, juga mencalonkan diri untuk posisi ini. Kebijakan ekonomi internasional, yang dipahami melalui lensa globalisasi dan pergerakan barang, ide, modal, dan orang yang semakin bebas sebagai bagian dari integrasi sosial dan ekonomi yang lebih besar yang telah berkembang menjadi fragmentasi dan deglobalisasi, secara konvensional dapat dibagi menjadi enam tahap:

- a. Era Industrialisasi (1870–1914) – periode perkembangan industri yang berawal di Inggris dan terjadi di bawah apa yang disebut standar emas, yang dominan di Eropa, Amerika Utara, Australia, Argentina, dan Kanada. Era ini berkontribusi pada pengembangan mesin pemintal, mesin uap, dan jalur perakitan, yang memengaruhi efisiensi ekonomi. Era ini menyaksikan transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri, dengan pengembangan sistem transportasi dan pemisahan kelas sosial baru (kelas pekerja dan kelas kapitalis).
- b. Era Antar Perang (1914–1945) – periode pembalikan tren dan arah globalisasi yang menyaksikan regionalisasi dan hambatan perdagangan diskriminatif sebagai akibat dari dua perang dunia dan munculnya rezim totaliter di Jerman, Italia, dan Uni Soviet. Perubahan politik dan geo-ekonomi yang bergejolak pada periode ini ditandai oleh Revolusi Rusia tahun 1917, transformasi Rusia menjadi negara komunis, penandatanganan Perjanjian Versailles tahun 1919, peraturan yang mewajibkan Jerman untuk melucuti senjata, membayar ganti rugi, dan menyerahkan sebagian wilayahnya, Depresi Besar (1929–1939), yaitu, penurunan ekonomi yang dipicu oleh jatuhnya pasar saham tahun 1929, dan Perang Saudara Spanyol (1936–1939).
- c. Era Bretton Woods (1945–1980) – tujuan utama perjanjian Bretton Woods adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dampak utama perjanjian tersebut termasuk pembentukan lembaga internasional global untuk mengejar kebijakan sosial-ekonomi yang terkoordinasi dan meningkatkan kerja sama internasional (misalnya Dana Moneter Internasional – IMF) dan untuk memastikan stabilitas nilai tukar dengan memberikan bantuan keuangan jangka pendek kepada negara-negara anggota untuk meringankan kesulitan pembayaran. Lembaga lain termasuk Bank Dunia, lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, terutama yang terkena dampak kehancuran perang, dan Komite Moneter Tetap untuk memantau nilai tukar dan membantu menjaga stabilitas internasional. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara peserta berjanji untuk mempertahankan nilai tukar tetap terhadap dolar, dan dolar AS disamakan dengan harga emas. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1970-an ketika runtuh karena berbagai ketegangan ekonomi.
- d. Liberalisasi (1980–2008) – berakhirnya Perang Dingin dan penghapusan hambatan perdagangan dalam kerja sama ekonomi internasional, yang pada akhirnya mengarah pada kerja sama ekonomi internasional terbesar, terutama melalui Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berikutnya (sejak 1995). Periode ini menyaksikan deregulasi dan privatisasi, yang mengarah pada peningkatan daya saing di satu sisi dan integrasi global yang lebih



dalam di sisi lain, terutama melalui pengembangan pasar negara berkembang yang besar, seperti India, Cina, Rusia, dan Brasil. Kawasan perdagangan bebas baru diciptakan di bawah Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Perlu dicatat bahwa periode liberalisasi menciptakan ketidakseimbangan perdagangan dan ekonomi secara bersamaan serta kesulitan adaptasi bagi banyak negara dan sektor ekonomi.

- e. Slowbalisasi (2008–2015) – pergeseran dari liberalisasi menuju proses perdagangan internasional, integrasi ekonomi, dan investasi asing yang lebih lambat. Momen kunci yang menandai awal periode ini adalah Krisis Keuangan Global (GFC) 2008+, yang secara langsung menyebabkan peningkatan sikap proteksionis dan tren dalam arus perdagangan, investasi asing, dan arus modal. Gejala pertama GFC adalah krisis keuangan yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam utang publik, yang sangat akut bagi Amerika Serikat, Yunani, Portugal, Spanyol, Hongaria, Islandia, dan Italia. Negara-negara ini mengamati penurunan produktivitas yang didorong oleh utang di awal periode ini. Proteksionisme dikombinasikan dengan nasionalisme ekonomi, melindungi kepentingan ekonomi nasional, teknologi, dan produksi. Akibatnya, produksi dipindahkan kembali ke negara asal atau, lebih dekat, ke pasar, mengubah pola perdagangan dan mengurangi rantai pasokan global. Beberapa masyarakat menyadari bahwa globalisasi dan peningkatan kebijakan ekonomi internasional juga membawa dampak negatif, seperti degradasi lingkungan dan peningkatan ketidaksetaraan.

- f. Deglobalisasi (2018–sekarang) – tanggal ini bersifat kontraktual, menandai fragmentasi ekonomi global. Proses ini dimulai dengan pengumuman AS tentang perang dagang dengan China pada tahun 2018 (tetapi didahului dua tahun sebelumnya oleh pengumuman Presiden AS saat itu, Donald Trump, tentang rencana untuk melawan praktik perdagangan tidak adil oleh China).

Pada awal tahun 2018, AS menaikkan tarif pada beberapa barang impor besar – mesin cuci, panel surya, baja, dan aluminium. Meskipun tarif ini tidak membedakan berdasarkan asal, segera menjadi jelas bahwa kebijakan perdagangan AS menargetkan China. AS kemudian meningkatkan tarif pada ribuan produk dari China antara tahun 2018–19, yang pada akhirnya menargetkan sekitar Rp.3,5 kuadriliun impor dari negara tersebut. China membalas dengan beberapa gelombang tarif, menargetkan sekitar Rp.1 kuadriliun ekspor AS. Kedua pihak menandatangani perjanjian untuk menghentikan peningkatan tarif lebih lanjut pada Januari 2020, tetapi tarif yang ada tetap berlaku hingga tahun 2021.

Periode ini menyaksikan krisis globalisasi yang dipicu oleh Brexit Inggris berdasarkan referendum Brexit pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Amerika Serikat dan Inggris kehilangan posisi mereka sebelumnya dalam tatanan sosial-ekonomi internasional demi Tiongkok (dan Rusia) dan kekuatan-kekuatan negara aktor internasional lainnya yang sedang berkembang, yang kedaulatan nasionalnya jauh dari legitimasi kekuasaan demokratis dan di mana politik kekuatan otoriter memutuskan, dalam pembelaan



kedaulatan nasionalnya sendiri, tentang kedaulatan negara lain. Deglobalisasi termanifestasi dalam proteksionisme perdagangan yang lebih besar dan penyempitan pasar tenaga kerja, dan penyimpangan dari perjanjian global, misalnya, penarikan AS dari Kemitraan Trans-Pasifik pada tahun 2017, Perjanjian Paris pada tahun 2017, Kesepakatan Iran pada tahun 2018, dan Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah NIL pada tahun 2018. Tahun 2019, dan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tanda lain dari deglobalisasi adalah pandemi COVID-19, yang mempercepat tren deglobalisasi dan perubahan kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Perlu ditekankan bahwa deglobalisasi didorong oleh faktor-faktor ketahanan dan keamanan nasional yang sulit diukur dan bukan oleh efisiensi ekonomi, seperti halnya globalisasi. Perlu dicatat bahwa ekonomi laissez-faire yang mendorong globalisasi pada akhir abad ke-20 perlu direvisi secara signifikan, terutama dalam konteks membatasi dampak negatif globalisasi. Model faktor deglobalisasi mencakup delapan komponen: globalisasi, pandemi (COVID-19), migrasi, nasionalisme, perdagangan internasional, ketidaksetaraan pendapatan, manufaktur, dan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi internasional ditentukan oleh kebijakan luar negeri, yang diwakili baik dalam arus kelembagaan maupun aktivitas perusahaan multinasional. Hal ini merujuk pada proses konseptualisasi dan pemenuhan serta implementasi agenda politik dan ekonomi tertentu sesuai dengan visi dunia yang diwakili, pada saat tertentu, dalam pemerintahan suatu negara atau dalam badan-badan pengambil keputusan kelompok integrasi internasional. Dimensi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, sosial, dan psikologis, seringkali terpisah dari rasionalitas teori realis dan keinginan kuat untuk membentuk asimetri dalam hubungan ekonomi.

1.5 DINAMIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Antara tahun 1600 dan 1700, perdagangan global tumbuh dengan laju 1% per tahun. Pada abad ke-19, dinamika perdagangan meningkat secara signifikan menjadi 4% per tahun. Pada tahun 2022, perdagangan barang global tumbuh 10% (y/y) dan perdagangan jasa global mencatat pertumbuhan 15% (y/y). Seperti yang dikemukakan Rodrik (2015) dengan tepat, integrasi ekonomi internasional yang semakin luas merupakan hasil dari adopsi ide-ide liberal oleh pemerintah masing-masing serta penggunaan pola ekspansi yang telah berkembang secara historis. Sulit untuk membantah bahwa pembukaan perdagangan meningkatkan ekspor bagi perusahaan-perusahaan yang mengekspor (barang, jasa, dan modal) dan dengan demikian meningkatkan cadangan devisa suatu negara, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar.

Studi empiris telah berulang kali menunjukkan bahwa integrasi ekonomi di tingkat global mengarah pada maksimalisasi keuntungan, memengaruhi produksi khusus dan penyederhanaan yang lebih besar. Perdagangan internasional yang dihasilkan dari hambatan perdagangan yang lebih rendah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Namun, keterbukaan perdagangan hanya sebagian



memengaruhi daya saing global karena juga didorong oleh faktor-faktor seperti modal manusia yang dimiliki, investasi asing langsung, teknologi, sistem keuangan, tingkat inovasi ekonomi, dan status ekonomi dalam kelompok negara yang terintegrasi oleh perjanjian perdagangan dan/atau asosiasi.

Secara sederhana, teori perdagangan terdiri dari teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Teori perdagangan klasik meliputi hal-hal berikut:

- a. Merkantilisme, yang dominan di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18, meyakini bahwa kekayaan suatu negara diukur dari kepemilikan emas dan perakunya, dan menganjurkan kebijakan seperti tarif dan subsidi untuk mendorong ekspor dan membatasi impor guna mencapai surplus perdagangan.
- b. Teori Keunggulan Absolut yang diusulkan oleh Adam Smith mengasumsikan produksi barang yang lebih efisien melalui spesialisasi dan keunggulan absolut atas negara lain.
- c. Teori Keunggulan Komparatif, berdasarkan konsep keunggulan absolut, mengasumsikan bahwa meskipun suatu negara dapat memproduksi semua barang lebih efisien daripada negara lain, kedua negara tersebut masih dapat memperoleh manfaat dari perdagangan jika mereka berspesialisasi dalam produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif (yaitu, di mana mereka memiliki biaya peluang produksi terendah).
- d. Model Heckscher–Ohlin berpendapat bahwa negara-negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara mereka secara intensif, sementara mengimpor barang dengan penggunaan faktor produksi yang langka secara intensif.

Teori perdagangan modern meliputi hal-hal berikut:

- a. Teori perdagangan baru mengasumsikan fleksibilitas produksi dan skala ekonomi, diferensiasi produk yang menghasilkan berbagai harga dan perbedaan preferensi pelanggan, pembangkitan efek jaringan untuk perusahaan yang terletak di sepanjang rantai pasokan, dan peningkatan skala perdagangan internal pada skala global berdasarkan pola internal yang berkembang, termasuk pengembangan kluster industri dan konsentrasi produksi.
- b. Model faktor spesifik perdagangan merupakan perluasan dari model Heckscher–Ohlin. Model ini mengasumsikan keberadaan dua faktor produksi (misalnya tenaga kerja dan modal), mobilitas salah satu faktor produksi antar sektor ekonomi, teknologi produksi tetap yang menjamin invariabilitas skala, dan spesifisitas faktor produksi untuk industri atau sektor ekonomi tertentu. Model ini memperhitungkan spesifisitas faktor produksi dengan menganalisis pergeseran faktor dalam pola perdagangan internasional.
- c. Model berbasis gravitasi berfokus pada faktor-faktor yang lebih kompleks, seperti diferensiasi produk, penskalaan produksi, efek jaringan, dan geografi perdagangan.

Secara umum, model gravitasi sering digunakan dalam literatur untuk menganalisis pola perdagangan internasional, migrasi, pariwisata, dan aliran modal lintas batas. Karena tingkat pendapatan sebagai fungsi proporsional dari ukuran ekonomi dan volume aliran perdagangan neraca tidak sepenuhnya menjelaskan proses geopolitik dan geoekonomi, maka perlu untuk



melengkapi model-model ini dengan perluasan variabel sosial dan ekonomi lainnya. Namun, literatur dan praktik kebijakan ekonomi internasional kontemporer menggunakan sejumlah pendekatan teoretis dan pemodelan, yang seringkali saling melengkapi sebagai bagian dari metodologi interdisipliner dan pembuktian konsep. Oleh karena itu, bab ini mengusulkan daftar asli teori perdagangan internasional sebagai model untuk mengukur dan menganalisis kebijakan ekonomi internasional (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Model untuk mengukur dan menganalisis kebijakan ekonomi internasional.

Nama model/kategori model	Karakteristik/parameter yang dipelajari
Model Heckscher– Ohlin– Samuelson (HOS).	Model ini mengeksplorasi pola perdagangan internasional, dengan fokus pada sumber daya produktif negara-negara. Model ini berkonsentrasi pada perbedaan dalam faktor endowmen (seperti tenaga kerja dan modal) sebagai penentu perdagangan. Model ini lebih bersifat teoritis dalam kebijakan ekonomi tetapi memungkinkan untuk mengukur efek terkait dengan (a) alokasi sumber daya, (b) struktur produksi, dan (c) pendapatan.
Model gravitasi perdagangan	Hal ini mirip dengan hukum gravitasi, yang mengasumsikan bahwa negara-negara yang lebih mirip secara geografis, ekonomi, dan budaya lebih cenderung untuk berdagang satu sama lain. Contoh: model gravitasi Rose, dan model gravitasi perdagangan Anderson–Wincoop.
Model nilai tukar	Faktor-faktor memengaruhi nilai tukar antar negara. Kategori ini mencakup sejumlah model, seperti model keseimbangan jangka pendek dan model keseimbangan jangka panjang. Nilai tukar diperiksa terhadap (a) kebijakan moneter (Paritas Suku Bunga) serta (b) kebijakan fiskal, krisis keuangan, kebijakan perdagangan, dan kebijakan stabilisasi.
Model permintaan modal	Model ini menjelaskan bagaimana investasi asing tertarik melalui perbedaan tingkat modal, suku bunga, dan aspek daya tarik investasi lainnya. Permintaan modal diperiksa terhadap suku bunga, risiko investasi, perdagangan modal dan liberalisasi keuangan, serta faktor-faktor makroekonomi lainnya. Contoh: model spesialisasi produksi, model perbedaan suku bunga riil, model permintaan aset, model angkatan kerja, dan model persamaan simultan.
Model kebijakan perdagangan	Dampak berbagai tindakan perdagangan, seperti tarif, subsidi, dan perjanjian perdagangan terhadap perekonomian suatu negara diperhitungkan. Model teoretis meliputi model koefisien arah Linder, teori perdagangan internasional baru Krugman, model dinamika ekspektasi kebijakan perdagangan, dan model kelompok negara. Model lain meliputi model empiris, analisis kebijakan perdagangan, dan model proteksionis.
Model kurva Phillips	Model ini menganalisis hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Model ini dapat digunakan dalam konteks internasional untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi lapangan kerja dan inflasi. Model ini dibagi menjadi lima sub-model dasar (jangka pendek, tingkat pengangguran alami, ekspektasi inflasi, adaptasi, dan volatilitas tingkat inflasi dan tingkat pengangguran selama periode waktu yang berbeda).



Model makroekonomi global (dengan guncangan)	Mereka mengintegrasikan data makroekonomi dari berbagai negara, memungkinkan analisis tren global, seperti siklus bisnis global dan saling ketergantungan ekonomi (termasuk sebagai bagian dari guncangan ekonomi). Model-model tersebut meliputi model Global VAR (Vector Autoregression), model Global Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), model Global Computable General Equilibrium (CGE), model Global Trade Analysis Project (GTAP), Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF), Oxford Global Model (OxGEM), United Nations Global Policy Model (UNGPM), dan Federal Reserve Board's Global Model (FRB/Global).
Model pengembangan	Mereka berfokus pada analisis dan peramalan proses pembangunan di negara-negara berkembang. Mereka mencakup berbagai faktor, seperti modal manusia, struktur kelembagaan, dan kebijakan ekonomi. Contohnya: model kebijakan pembangunan, model teori perdagangan internasional, model transfer teknologi, model teori pertumbuhan ekonomi, dan model indikator makroekonomi.
Model efek limpahan	Analisis ini membahas bagaimana perubahan dalam satu perekonomian memengaruhi perekonomian lain, baik secara positif maupun negatif. Contoh: model Mundell–Fleming, model interaksi kebijakan perdagangan, dan model limpahan regulasi keuangan.
Model ekonomi globalisasi	Mereka meneliti dampak globalisasi terhadap perekonomian negara, menganalisis integrasi ekonomi, arus modal, perdagangan internasional, dan fenomena lain yang terkait dengan globalisasi. Contoh: tata kelola globalisasi multi-level, globalisasi jaringan, model desa global, model nilai dan budaya global, model globalisasi modal, dan pemodelan struktural interpretatif globalisasi/deglobalisasi.
Model untuk tindakan politik dalam perdagangan internasional	Analisis ini membahas faktor-faktor politik yang memengaruhi pembentukan hubungan perdagangan antar negara, seperti dampak keputusan pemerintah terhadap kebijakan ekonomi internasional. Contoh: model teori derajat, model teori perdagangan strategis, model teori permainan untuk negosiasi perdagangan, model teori pengaruh kelompok kepentingan, model teori anti-dumping, dan model pembangkitan konflik/perang dagang.
Model risiko politik	Analisis ini membahas dampak faktor politik terhadap investasi asing, perdagangan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Contoh: model kelembagaan, model perubahan politik dan ketidakpastian, model geopolitik, model makroekonomi, dan model risiko politik untuk perdagangan internasional.
Model ekonometrika panel	Metode ini menggunakan data panel (observasi untuk unit temporal dan spasial yang berbeda) untuk menganalisis hubungan antara variabel ekonomi dan politik. Contoh: model efek tetap, model efek acak, model perbedaan-dalam-perbedaan, model deret waktu efek tetap, dan model efek umum.
Model perkembangan manusia	Mereka menggunakan indikator, seperti angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi dan sosial. Contohnya: model kebebasan (model Amartya Sen), model indikator pembangunan manusia (HDI), model modal sosial, model pembangunan berkelanjutan, dan model pembangunan sosial-ekonomi.



Model latar belakang kelembagaan	Teori ini menganalisis peran lembaga-lembaga, seperti hukum, korupsi, dan sistem regulasi, dalam membentuk perekonomian. Contoh: model teori perdagangan institusional, model lembaga keuangan, model lembaga politik, model lembaga regulasi, dan model lembaga internasional.
Model ekonomi digital	Mereka berfokus pada analisis dampak digitalisasi, teknologi informasi, dan inovasi terhadap kebijakan ekonomi internasional. Contohnya: model platform digital, model inovasi digital, model ekonomi platform dan berbagi, model e-commerce dan globalisasi, serta model pertumbuhan ekonomi digital.
Model konvergensi	Model ini mengkaji proses konvergensi atau divergensi antar negara dalam hal standar hidup, produksi, dan indikator lainnya. Contoh: model Solow-Swan, model teori pertumbuhan baru, model konvergensi beta, model konvergensi absolut, model konvergensi bersyarat, dan model keseimbangan mendalam.
Model permainan politik dan ekonomi	Analisis ini membahas interaksi antara keputusan politik dan ekonomi, khususnya dalam konteks negosiasi internasional dan perjanjian perdagangan. Contoh: model teori permainan untuk negosiasi perdagangan, model dilema tahanan, model persaingan Cournot, model hegemoni Hegel, model persaingan Bertrand, dan model barang publik.
Model pembangunan berkelanjutan	Mereka menganalisis dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan keberlanjutan, menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contoh: model “tiga dimensi keberlanjutan” (lebih luas maknanya daripada ESG), model pembangunan inklusif, model ekonomi berbasis sumber daya, model konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan model tanggung jawab sosial perusahaan.
Model ekonomi perang	Mereka meneliti dampak peperangan terhadap perekonomian negara-negara yang terlibat, dengan mempertimbangkan perubahan dalam produksi, perdagangan, inflasi, dan lapangan kerja. Contohnya: model sumber daya perang, model biaya konflik, model ekonomi terorisme, model efek perdagangan, model efek keuangan, dan model konsekuensi ekonomi pascaperang.

20 kelompok model untuk mengukur dan menganalisis kebijakan ekonomi internasional menunjukkan tidak hanya banyaknya pendekatan metodologis untuk evaluasi pemecahan masalah isu-isu sosial-ekonomi di tingkat negara dan perusahaan, tetapi juga kebutuhan untuk menggunakan pendekatan analitis yang berbeda secara paralel. Hal ini berlaku tidak hanya untuk dampak yang direncanakan terhadap neraca perdagangan, pertumbuhan investasi, dan daya saing, tetapi juga untuk respons terhadap efek negatif dari asimetri manfaat, impor dumping, eksklusif, dan hilangnya kedaulatan regulasi dan perdagangan. Integrasi ke dalam sistem ekonomi global dapat berarti deindustrialisasi, distorsi dalam rezim nilai tukar (jika mata uang sendiri digunakan), dan/atau pembatasan daya beli serta hilangnya kebijakan perdagangan independen.

Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas multilateral (FTA), yang dibebani dengan periode implementasi yang panjang untuk prosedur liberalisasi, yang bukanlah



pendorong manfaat ekonomi yang adil dan merata bagi semua negara anggota sebagai mitra penandatanganan. Akan selalu ada pemenang dan pecundang dalam perjanjian ini. Namun, kekalahan atau kemenangan sepihak dalam semua kebijakan perdagangan dan spesialisasi utama tidak selalu terjadi (bahkan, biasanya tidak). Perlu diingat bahwa, di dunia dengan zona-zona terpolarisasi yang berpusat pada kekuatan-kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, kekuatan-kekuatan tersebut berupaya untuk mengerahkan pengaruh sebanyak mungkin dan lebih memilih, sebagai aturan, untuk membuat perjanjian bilateral daripada perjanjian multilateral, yang membutuhkan negosiasi lebih lama dan pertimbangan berbagai kepentingan. Negara-negara lain harus ingat bahwa pilihan ekonomi atau pilihan untuk keamanan tidak harus menjadi satu-satunya pilihan, dan perlu mencari alternatif melalui kompromi dan keseimbangan dalam menyediakan keamanan multilateral dan hubungan ekonomi multilateral. Perjanjian yang dinegosiasikan dengan baik atau penggunaan model persaingan Bertrand dapat menjadi alternatif tersebut. Dalam kasus seperti itu, negara yang secara teoritis lebih lemah secara ekonomi, yang ingin menyeimbangkan dampak buruk dari perjanjian tersebut, harus menyediakan produksi yang terdiferensiasi daripada produksi yang homogen.

1.6 DAYA SAING & PENGARUH EKONOMI GLOBAL

Daya saing dalam kebijakan ekonomi internasional mengacu pada produktivitas faktor, yaitu, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hal ini mencakup ketahanan terhadap guncangan dan efisiensi dalam fungsi rantai nilai global, stabilitas keuangan yang secara langsung menghasilkan manajemen risiko yang efektif, dan fokus pada kualitas.

Faktor struktural utama daya saing internasional ekonomi nasional meliputi tingkat diversifikasi struktur produksi dan kekuatan keterkaitan produksi domestik, yang secara langsung terkait dengan struktur teknologi ekspor yang dihasilkan dari tingkat perkembangan teknologi dan industri suatu ekonomi. Dengan asumsi bahwa Nilai Tambah Domestik yang Berteknologi Maju dalam Ekspor (TADVA) pada dasarnya mencerminkan faktor-faktor struktural di atas, dengan memasukkan analisis input-output dan rantai nilai global dalam metodologi penelitian ini, ekonomi-ekonomi di puncak peringkat daya saing struktural internasional adalah sebagai berikut: Jepang, Taiwan, Jerman, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok (India berada di peringkat 28 dan Rusia di peringkat 38 menurut TADVA). Dalam indeks daya saing Eropa (ECI), ekonomi Tiongkok hanya berada di peringkat ke-17, India sedikit lebih buruk daripada di TADVA (peringkat ke-35), dan Rusia berada di posisi yang sama (peringkat ke-39), yang menunjukkan bahwa daya saing internasional ekonomi Rusia rendah, terlepas dari ukuran yang digunakan. Perlu juga dicatat bahwa penelitian ini mencerminkan data dari tahun 2014 dan banyak yang telah berubah dalam ekonomi global sejak saat itu.

Indeks daya saing secara keseluruhan pada tahun 2023 terlihat berbeda dibandingkan dengan neraca transaksi berjalan (% dari PDB, data 2022), yang membuktikan bahwa ada pemenang dan pecundang dalam perdagangan internasional. Kelompok pertama (pemenang) termasuk Taiwan, UEA, Arab Saudi, Qatar, Norwegia, dan negara-negara lain di Asia dan Asia Barat, Pasifik, Afrika, dan Asia Selatan yang meningkatkan tingkat daya saing mereka (neraca



transaksi berjalan positif). Kelompok pecundang termasuk Inggris, Hongaria, Peru, Estonia, dan sejumlah besar negara-negara ekonomi Eropa Timur. Baik Amerika Serikat maupun Tiongkok berada di tengah indeks tersebut. Polikrisis dalam daya saing internasional ekonomi individu diakibatkan oleh ketidakstabilan dalam produksi energi domestik, rantai pasokan yang bergejolak, dan neraca transaksi berjalan yang negatif.

Tampaknya, terlepas dari gagasan-gagasan besar dan tidak selalu masuk akal terkait penyesuaian kebijakan lingkungan dan ekonomi dengan segala cara untuk mengurangi emisi CO₂ dan mencapai nol karbon (yang hanya bersifat deklaratif dan bukan faktual), geopolitik makroekonomi dan pendekatan pragmatis terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan akan menang (setidaknya dalam jangka pendek dan menengah) dengan menerapkan realisme kebijakan ekonomi pada kebijakan ekonomi internasional. Namun, akan ada pemenang dan pecundang di sini juga. Hal ini disebabkan oleh distribusi manfaat globalisasi yang tidak merata serta pengucilan dan marginalisasi masyarakat atau wilayah tertentu. Dengan asumsi bahwa daya saing dapat disamakan dengan kekuatan pengaruh ekonomi dan relevansinya terhadap negara lain dalam sistem global, wajar untuk membandingkan statistik PDB (PPP), tingkat pertumbuhan persentase tahunan PDB, perdagangan (pangsa dalam PDB), perdagangan jasa (dolar AS), total pendapatan sumber daya alam, data pengeluaran militer sebagaimana didefinisikan oleh NATO (posisi), dan PDB per kapita (dolar AS) di lima negara yang diteliti, termasuk kelompok integrasi negara (Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Uni Eropa) dari tahun 1990 hingga 2022 (Gambar 1.1, Gambar 1.2, Gambar 1.3, Gambar 1.4, Gambar 1.5, Gambar 1.6, Gambar 1.7), dan menggunakan model ekonometrik regresi linier untuk menentukan koefisien regresi yang signifikan (Gambar 1.8, Gambar 1.9, Gambar 1.10, Gambar 1.11, Gambar 1.12, Gambar 1.13, Gambar 1.14, Gambar 1.15).

Untuk aktor yang diteliti, model regresi linier dilakukan, dan parameter berikut ditandai pada grafik:

- Indeks U (indeks ketidakpastian);
- PDB G (miliar) – pertumbuhan PDB %;
- PDB (PPP) – PDB nominal;
- M EX – pengeluaran militer;
- TRADE S – perdagangan jasa;
- TRADE – neraca perdagangan;
- TNR – total pendapatan sumber daya alam (% PDB);
- PDB PC – PDB per kapita.

Dinamika PDB nominal komparatif untuk Tiongkok, Amerika Serikat, India, Rusia, Uni Eropa, dan zona euro dari tahun 1990 hingga 2022 menunjukkan bahwa Rusia dan India mencatat pertumbuhan ekonomi moderat relatif terhadap kelompok pembanding selama periode yang diteliti. Yang patut diperhatikan adalah lintasan pertumbuhan ekonomi dinamis Tiongkok sejak tahun 1995 dan seterusnya, yang sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sejak tahun 2012 (Gambar 1.1). Namun, kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai per kapita (PDB per kapita) menciptakan empat area pengelompokan: (a) pemimpin (Amerika Serikat), (b) Uni Eropa dan zona euro, (c) Rusia dan Tiongkok, dan (d) India (Gambar



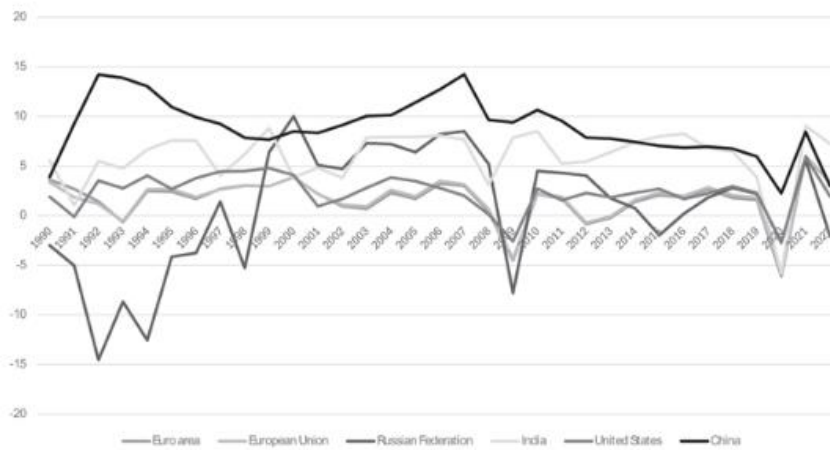
1.2). Bagi Tiongkok, tren ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan persentase tahunan PDB pada harga pasar berdasarkan mata uang lokal konstan (dolar AS) dari tahun 2004 hingga 2022. Bagi Rusia, dinamika variabel ini sangat menyimpang pada tahun 1990–2000 (Gambar 1.3). Perdagangan negara-negara yang diteliti sebagai bagian dari PDB (Gambar 1.4) menunjukkan bahwa Uni Eropa dan zona euro mendominasi secara global dalam model ini dibandingkan negara-negara lain dalam kelompok sebanding, menunjukkan hubungan tren berbanding terbalik pada tahun 2011–2019.

Kategori dominasi Uni Eropa dan zona euro yang sama berlaku untuk perdagangan jasa pada tahun 2009–2019 (Gambar 1.5). Pemimpin dalam menghasilkan total pendapatan sumber daya alam sebagai persentase dari PDB suatu negara adalah Rusia (Gambar 1.6) yang ekonominya mencerminkan kontribusi sektor bahan baku, termasuk produksi dan ekspor minyak, gas, logam, kayu, dan sumber daya alam lainnya, terhadap total pendapatan nasional. Volatilitas tinggi kategori ini disebabkan oleh paparan sektor bahan baku terhadap fluktuasi harga global, yang dapat menyebabkan volatilitas pendapatan dan kerentanan terhadap perubahan global dalam penawaran dan permintaan. Selain itu, ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada ekspor sumber daya alam dapat menghambat perkembangan sektor ekonomi lainnya dan membuat ekonomi kurang terdiversifikasi serta lebih rentan terhadap guncangan eksternal jika pasar baru tidak ditemukan tepat waktu dan produksi tidak terdiversifikasi.

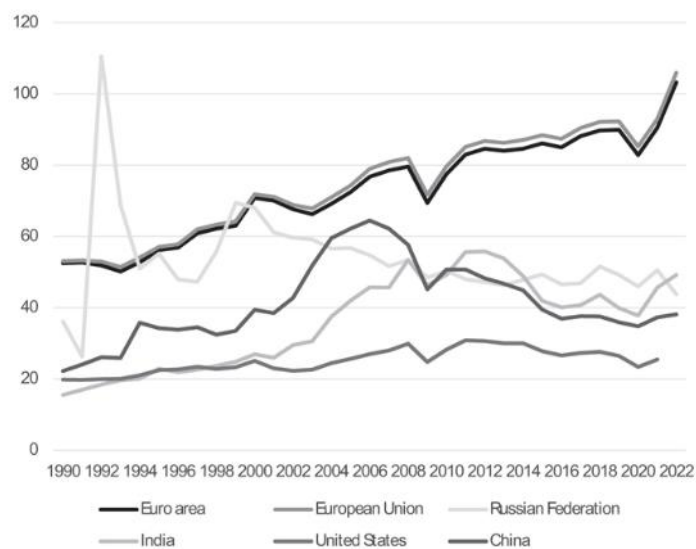


Gambar 1.1 Dinamika PDB nominal komparatif (dalam miliar dolar AS).

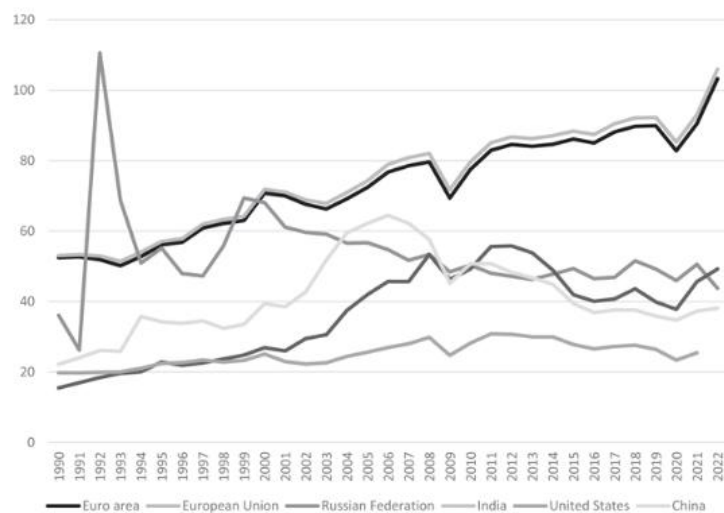




Gambar 1.2 PDB per kapita (dolar AS).

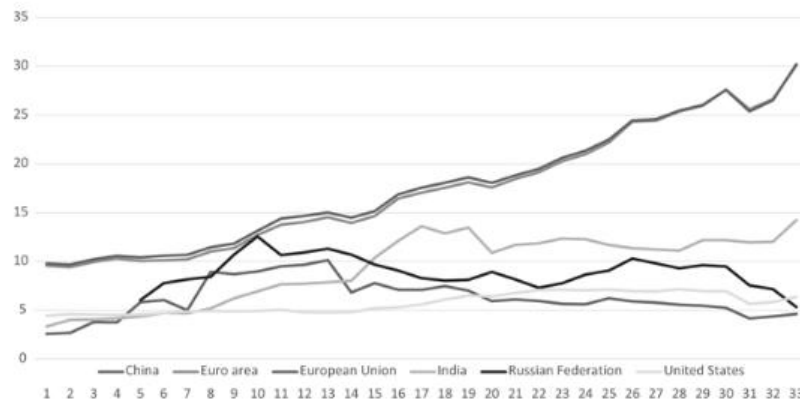


Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB – tingkat pertumbuhan persentase tahunan PDB pada harga pasar berdasarkan mata uang lokal konstan (%).

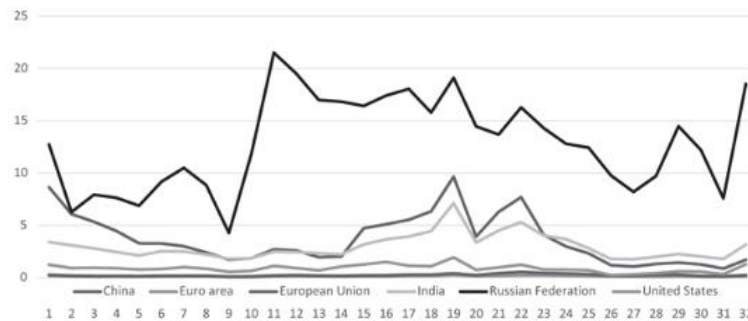


Gambar 1.4 Neraca perdagangan (% PDB).

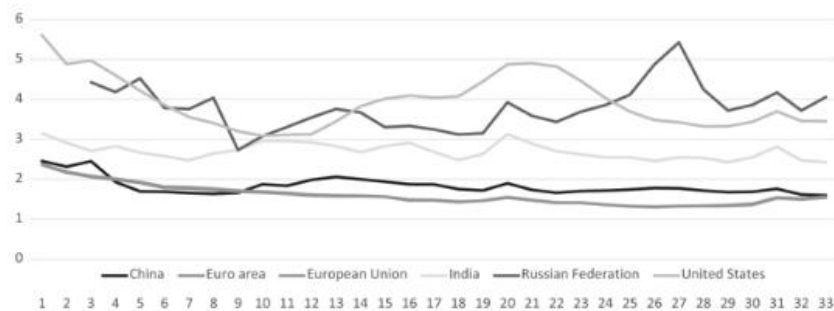




Gambar 1.5 Perdagangan jasa (% PDB/USD).



Gambar 1.6 Total pendapatan sumber daya alam (% PDB/USD).



Gambar 1.7 Data pengeluaran militer sebagaimana didefinisikan oleh NATO (% PDB/USD).



Gambar 1.8 Pengaruh variabel yang dipelajari terhadap indeks ketidakpastian.



Variabel lain yang dianalisis adalah pengeluaran militer, yang dihitung menurut definisi NATO, di mana Rusia selama bertahun-tahun dapat bersaing dengan Amerika Serikat. Namun, sejak dimulainya aneksasi Krimea pada tahun 2014, Rusia telah menggulingkan Amerika Serikat dan menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam pengeluaran militer (Gambar 1.7).

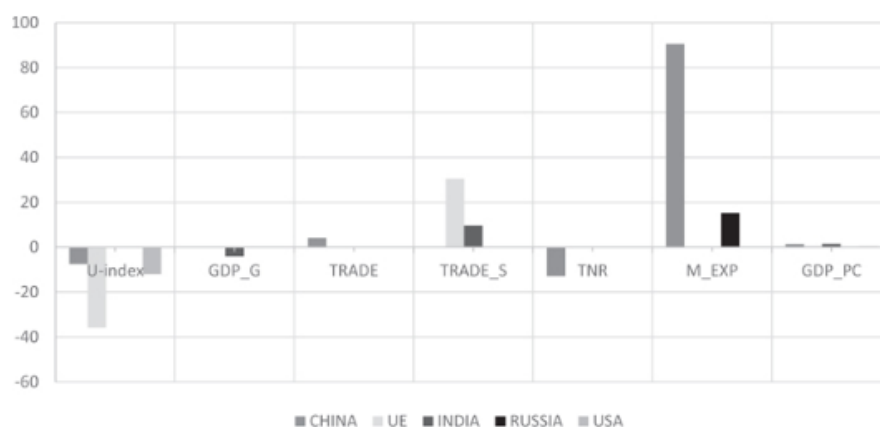
Berdasarkan model ekonometrik regresi linier, koefisien regresi yang signifikan ditentukan untuk variabel yang dipelajari dalam lima kelompok (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, dan Uni Eropa).

Untuk Tiongkok dan Rusia, pengeluaran militer memiliki dampak positif terkuat terhadap pertumbuhan indeks ketidakpastian. Untuk Amerika Serikat, pengeluaran militer memiliki arah ketergantungan negatif terkuat. Amerika Serikat juga merupakan satu-satunya negara/kelompok negara dengan dampak negatif terkuat pada indeks ketidakpastian "perdagangan jasa". Perlu dicatat bahwa dalam kasus Rusia, hanya pengeluaran militer yang memiliki dampak signifikan pada tingkat indeks ketidakpastian.

Tingkat PDB secara signifikan mengurangi indeks ketidakpastian (Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok), paling besar di Tiongkok dan paling kecil di Uni Eropa. Kekayaan negara yang dihitung sebagai PDB per kapita secara signifikan meningkatkan tingkat indeks ketidakpastian, paling besar di Tiongkok dan paling kecil di Uni Eropa.

Di Tiongkok dan India, PERDAGANGAN merupakan stimulan signifikan bagi indeks ketidakpastian, dan TNR merupakan destimulan signifikan.

Peningkatan indeks ketidakpastian secara signifikan mengurangi nilai PDB (PPP) di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Uni Eropa adalah kelompok negara yang paling sensitif terhadap faktor ini. Peningkatan pengeluaran militer memiliki stimulasi PDB positif terkuat di Tiongkok dan Rusia. PERDAGANGAN memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat PDB hanya di Tiongkok. Perdagangan jasa secara signifikan menstimulasi PDB di Uni Eropa dan India. TNR merupakan destimulan signifikan hanya di Tiongkok.



Gambar 1.9 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap PDB nominal.

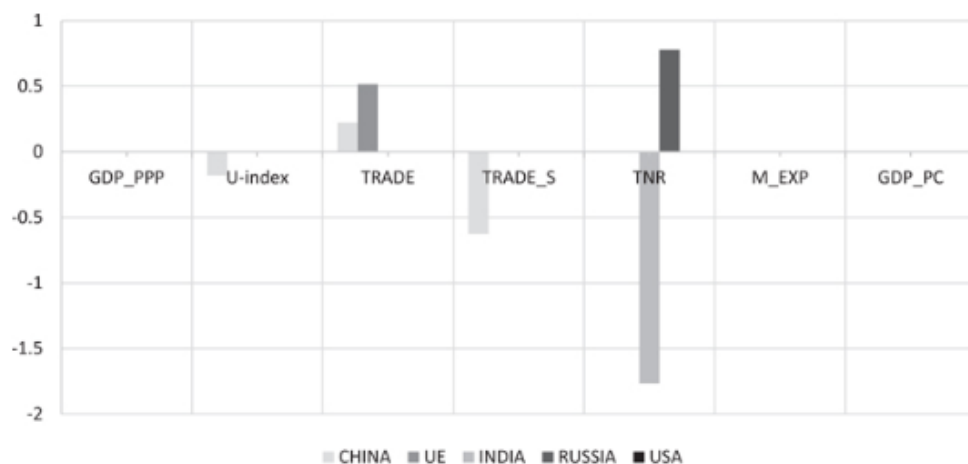
China paling terpengaruh oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dalam variabel yang diteliti (sebanyak tiga variabel, yaitu, total pendapatan sumber daya alam [% PDB], neraca



perdagangan, dan perdagangan jasa). Indeks ketidakpastian dan perdagangan jasa secara signifikan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara PERDAGANGAN secara signifikan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB_G). Total pendapatan sumber daya alam sebagai persentase dari PDB suatu negara memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diukur oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB_G), di India dan Rusia, tetapi dalam arah yang berlawanan, positif di Rusia dan negatif di India (sumber daya alam dan eksploitasi berlebihan dari cadangan alam memiliki efek destimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi). Di Uni Eropa, tingkat pertumbuhan ekonomi dirangsang oleh perdagangan (peningkatan nilai Perdagangan sebesar satu unit memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,5 unit).

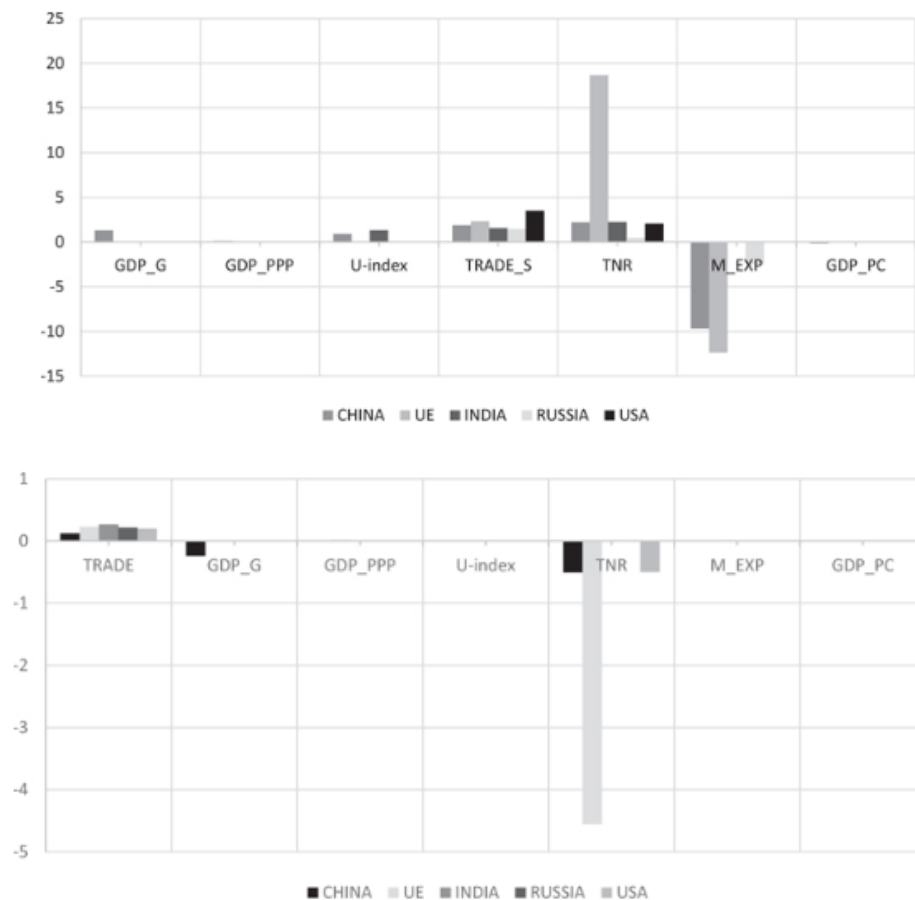
Semua variabel secara signifikan memengaruhi tingkat neraca perdagangan (Perdagangan) di China. Tingkat TNR (Trade Resources and Resources) secara positif memengaruhi Perdagangan, paling besar di Uni Eropa dan paling kecil di Rusia. Perdagangan jasa memiliki efek stimulasi terkuat di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dampak pengeluaran militer terhadap tingkat neraca perdagangan (Perdagangan) bersifat destimulasi dan paling kuat di Uni Eropa dan Tiongkok.

Jelas lebih banyak faktor yang memiliki dampak statistik signifikan terhadap tingkat perdagangan jasa di Uni Eropa. Tingkat pengeluaran militer dan indeks ketidakpastian tidak memiliki efek signifikan di negara/kelompok negara mana pun. Di semua negara, tingkat perdagangan jasa secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh perdagangan (paling besar di India dan Uni Eropa). Ini berarti bahwa jika suatu negara di Uni Eropa memiliki sumber daya alam, negara tersebut kurang tertarik untuk mengembangkan produksi yang maju dan sangat diproses.



Gambar 1.10 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB).



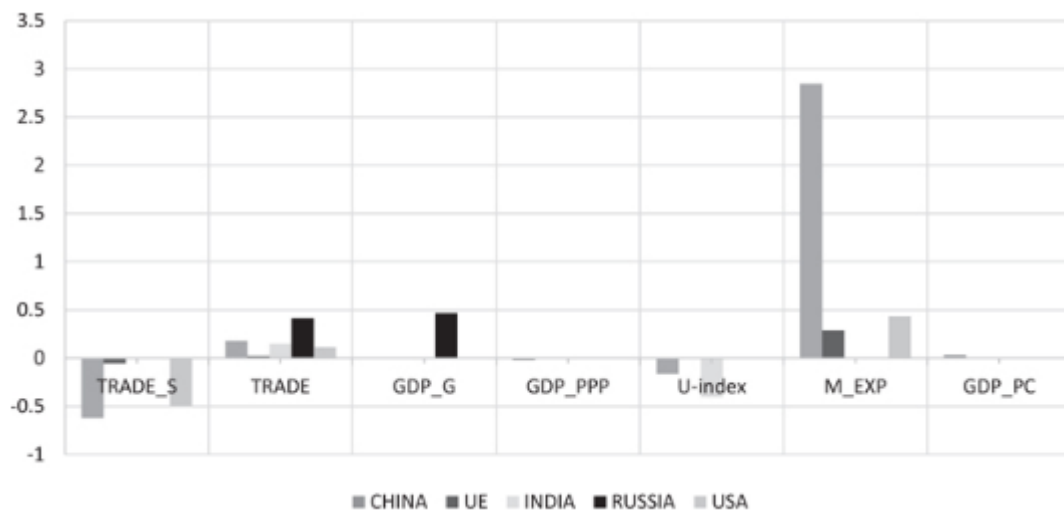


Gambar 1.12 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap perdagangan jasa.

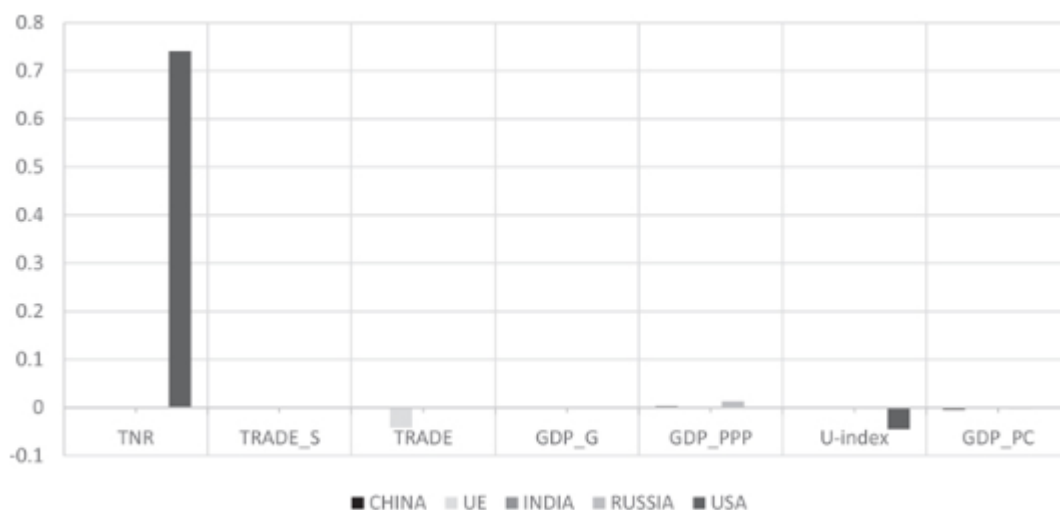
Korelasi antara pengeluaran militer dan total pendapatan sumber daya alam (TNR) di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa adalah yang terkuat. Seiring meningkatnya pengeluaran militer, tekanan ke atas pada ekspor sumber daya alam meningkat (TNR: dampak terkuat di Tiongkok dan Amerika Serikat). Baik peningkatan indeks ketidakpastian maupun peningkatan perdagangan jasa mengurangi tingkat TNR secara rata-rata. Indeks ketidakpastian memiliki dampak terkuat di India. Tingkat perdagangan jasa terkuat di Tiongkok dan Amerika Serikat.

Di Rusia, pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan neraca perdagangan (Perdagangan) dan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan ketergantungan tinggi ekonomi Rusia pada sumber daya alam.





Gambar 1.13 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap total pendapatan sumber daya alam (TNR).



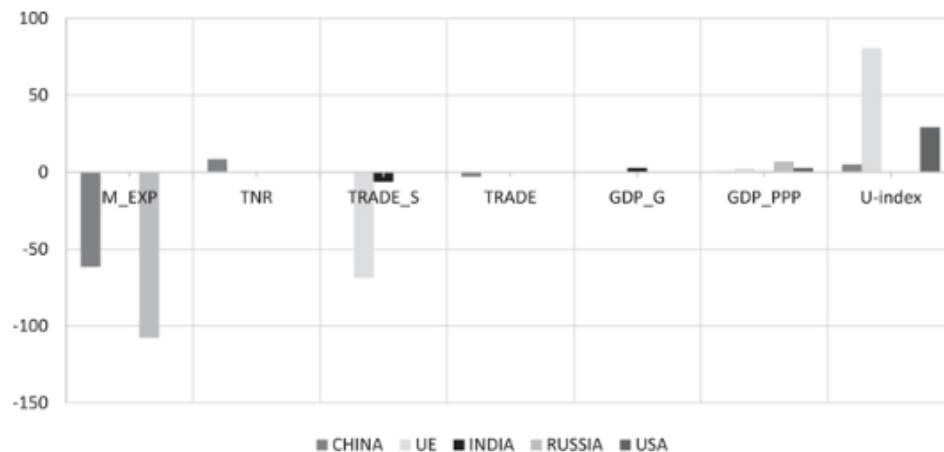
Gambar 1.14 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap pengeluaran militer.

Negara dengan dampak faktor makroekonomi terkuat terhadap tingkat pengeluaran militer adalah Amerika Serikat. Peningkatan TNR sangat meningkatkan tingkat pengeluaran militer, sementara peningkatan indeks ketidakpastian mengurangi pengeluaran militer (kebijakan konservatif AS). Dalam kasus Uni Eropa sebagai kelompok negara-negara yang terkonsentrasi secara ekonomi, peningkatan tingkat pengeluaran militer dan peningkatan tingkat neraca perdagangan (Perdagangan) secara signifikan mengurangi pengeluaran militer. Hanya di Rusia peningkatan PDB nominal (PDB_PPP) menyebabkan peningkatan tingkat pengeluaran militer.

Pengeluaran militer di Rusia dan Tiongkok secara signifikan mengurangi PDB per kapita. Di Rusia, dampak ini lebih kuat daripada di Tiongkok (pengeluaran militer yang lebih tinggi berkontribusi pada dinamika kemiskinan yang lebih tinggi). Di Uni Eropa dan Amerika Serikat, indeks ketidakpastian memiliki efek stimulasi terkuat. Di Uni Eropa, faktor penghambat terkuat



berkaitan dengan perdagangan jasa (anehnya, perdagangan jasa menyebabkan penurunan riil PDB per kapita dan bukan peningkatan dinamika PDB per kapita). Peningkatan indeks ketidakpastian di Uni Eropa menghasilkan tingkat lindung nilai yang lebih besar terhadap ketidakpastian dan manajemen keuangan rumah tangga dan bisnis yang lebih efisien, yang memengaruhi tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.



Gambar 1.15 Pengaruh variabel yang diteliti terhadap PDB per kapita.

1.7 KESIMPULAN

Dunia memasuki era baru persaingan ekonomi polikritikal, dan kebutuhan akan kemitraan ekonomi yang tidak setara tampak jelas. Sejumlah besar negara harus memutuskan blok politik dan ekonomi mana yang ingin mereka ikuti, terutama di sekitar orbit Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, satu hal yang pasti: setiap penurunan hubungan ekonomi global pasti akan membuat setiap negara di dunia lebih miskin daripada di dunia globalisasi yang berkembang pesat. Beberapa negara atau kelompok sosial akan menderita lebih sedikit daripada yang lain. Tetapi secara umum, mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa ekonomi global yang terbuka hampir tidak mungkin dilakukan. Ini berarti bahwa dunia memasuki era kemakmuran yang lebih rendah, ketidakstabilan yang lebih tinggi, dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Semakin dalam perpecahan baru ini, semakin kuat dampak negatifnya.

Ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat tidak kondusif untuk fragmentasi kebijakan ekonomi di seluruh dunia karena risiko kebijakan dan regulasi pemerintah untuk masa depan yang dekat sangat signifikan, dan kausalitasnya berfluktuasi. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah struktural ekonomi AS, yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, dan tingkat efektivitas geoekonomi yang bervariasi terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan internasional dalam geopolitik.



Studi ekonometrik tentang kebijakan ekonomi internasional dari negara-negara yang disebut negara adidaya, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan India, menunjukkan perbedaan besar dalam potensi ekonomi masing-masing negara. Tingkat peningkatan dinamika pengeluaran militer menunjukkan rasa tidak aman, yang terutama memengaruhi tingkat neraca perdagangan di Uni Eropa. Dampak pengeluaran militer terhadap tingkat neraca perdagangan bersifat destimulasi dan paling kuat di Uni Eropa dan Tiongkok, yang menyebabkan tekanan ke atas pada ekspor sumber daya alam, terutama di Tiongkok dan Amerika Serikat. Hanya di Rusia peningkatan PDB nominal menyebabkan peningkatan tingkat pengeluaran militer, yang menyebabkan dinamika kemiskinan yang lebih besar di Rusia dan Tiongkok.

Total pendapatan dari sumber daya alam sebagai persentase dari PDB suatu negara memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di India dan Rusia, tetapi dengan arah yang berlawanan, positif di Rusia dan negatif di India (sumber daya alam dan eksploitasi berlebihan terhadap cadangan alam memiliki efek destimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi India). Di Uni Eropa, tingkat pertumbuhan ekonomi didorong oleh perdagangan di mana peningkatan satu unit dalam neraca perdagangan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,5 unit. Kekuatan Uni Eropa (UE) jelas terletak pada kemampuannya untuk berdagang, sebagaimana dibuktikan oleh data dan posisinya sebagai pemimpin dunia dalam perdagangan barang dan jasa industri. Potensi perluasan konflik bersenjata Rusia-Ukraina ke negara-negara Eropa akan melemahkan posisi UE sebagai mitra dagang global utama, yang mengarah pada upaya negara-negara adidaya lain dan negara-negara yang bekerja sama dengan negara-negara adidaya tersebut untuk mengambil alih pasar ini. Lebih lanjut, peningkatan signifikan dalam dinamika pengeluaran militer di negara-negara UE dapat melemahkan posisi dan neraca perdagangan UE.

Namun, jika narasi ekonomi terkoordinasi diterapkan, di mana pengeluaran militer membangun potensi pencegahan dengan memengaruhi hubungan internasional dan stabilitas global, hal itu dapat mengarah pada peningkatan peran Uni Eropa dalam hubungan ekonomi global. Pengeluaran ini harus dilihat sebagai investasi yang melindungi kepentingan Komunitas dan warganya dengan membangun kekuatan pencegahan yang dapat dikerahkan sebagai elemen perdamaian yang merangsang inovasi teknologi yang menjadikan entitas tersebut independen.



BAB 2

RESET BESAR DAN TATANAN EKONOMI GLOBAL BARU

2.1 PENDAHULUAN

24 Februari 2022 adalah hari yang tak terlupakan dalam sejarah Eropa dan seluruh dunia. Serangan Rusia terhadap Ukraina dimulai. Tidak ada yang menduga kekerasan semacam ini. Eropa dan negara-negaranya telah berhasil melewati 70 tahun tanpa perang, dan ini adalah peristiwa yang tak terbayangkan dan mengejutkan dalam sejarah Eropa dalam hal ini. Dengan demikian, kebangkitan Tiongkok dan perang di Ukraina mengakhiri hegemoni global Amerika Serikat. Apakah hari ini, 24 Februari 2022, benar-benar mengarah pada tatanan dunia global baru? Atau apakah sesuatu terjadi sebelumnya, yang mengarah pada kemungkinan koreksi tatanan dunia yang kita kenal?

Terlepas dari dampak perang ini terhadap Eropa, perang ini memengaruhi seluruh dunia. Tiongkok, Afrika, Amerika Serikat, India, dan bekas kekuatan kolonial, seperti Inggris dan Prancis, memang telah terpengaruh. Negara-negara ini akan dibahas secara individual dalam konteks ini nanti.

Pertanyaan menarik lainnya adalah apakah perang melawan Ukraina memicu semua kekurangan, kelemahan, dan kelemahan ataukah itu hanyalah puncak gunung es – misalnya, bagian kecil yang menyebabkan dunia runtuh.

Pertama-tama, bab ini akan membahas sejarah Eropa, menunjukkan tahapan bagaimana negara-negara mencapai perdamaian. Situasi di Eropa setelah perang 30 tahun akan dianalisis. Pada saat itu, negara-negara di Eropa lelah berperang dan membuat keputusan untuk membagi wilayah. Selanjutnya, bab ini akan berfokus pada dampak keputusan Eropa terhadap keberlanjutan, dengan mempertimbangkan persyaratan disiplin baru keberlanjutan dan metode penerapannya menggunakan industri perbankan.

Berikutnya, penelitian mengenai risiko multikompleks dan pandangan baru tentang perkembangan risiko akan dibahas, termasuk contoh krisis dan perkembangannya serta perspektif risiko baru yang bertanggung jawab atas perubahan dalam perekonomian. Kekuatan ekonomi dunia saat ini akan dieksplorasi di bagian keempat bab ini, dengan analisis ekonomi global terpenting berdasarkan krisis sebelumnya. Selain itu, situasi tatanan ekonomi baru akan disorot.

Bagian terakhir bab ini akan berfokus pada Great Reset, dengan mempertimbangkan hasil yang ditentukan di bagian sebelumnya untuk melihat apakah ada pengembalian ke nol. Analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai situasi ekonomi dari beberapa negara besar terpilih karena Great Reset adalah konsep yang saat ini sangat memengaruhi banyak politisi dan akademisi. Dan akhirnya, akan diajukan pertanyaan apakah kita harus mengharapkan tatanan ekonomi global baru – analisis ekonomi lebih lanjut akan memberikan jawaban mengenai subjek tatanan ekonomi baru tersebut.



2.2 SEJARAH EROPA BERDASARKAN KONGRES WINA

Untuk lebih memahami tatanan dunia sebelum perang di Ukraina, melihat sejarah Eropa sangat membantu, dan akhir Revolusi Prancis adalah contoh yang bagus untuk menunjukkan jalur mana yang ditempuh untuk perdamaian pada saat itu. Sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789, Eropa dipengaruhi oleh konflik-konflik yang bersifat perang antara Prancis dan penguasa absolut di benua itu, misalnya, raja atau pangeran.

Setelah kekalahan Napoleon dalam Pertempuran Leipzig pada tahun 1813, kekuatan absolut Austria, Prusia, Rusia, dan Britania Raya kembali memegang peran utama di Eropa. Pada tahun 1814, Napoleon dikalahkan, dan Perjanjian Paris Pertama pada 30 Mei 1814 mengakhiri periode panjang peperangan di benua itu. Sebagai pemimpin tentara revolusioner Prancis, Napoleon Bonaparte mampu secara bertahap memperluas supremasinya. Akibatnya, antara tahun 1792 dan 1813, Prancis menaklukkan sebagian besar Eropa dalam apa yang disebut Perang Koalisi. Negara-negara yang ditaklukkan adalah Spanyol, Italia, dan negara-negara Jerman. Dengan demikian, peta politik benua yang terstruktur baru muncul. Namun, tahun-tahun dominasi Napoleon dan ekspansi teritorial Prancis meninggalkan jejaknya di Eropa, dan dengan demikian kekacauan teritorial dan politik merajalela.

Kongres Wina berlangsung dari tanggal 18 September 1814 hingga 9 Juni 1815 di Palais di Ballhausplatz di Wina. Ini adalah kongres perdamaian para penguasa Eropa di mana masa depan Eropa setelah berakhirnya dominasi Napoleon diputuskan. Peserta penting dalam Kongres tersebut adalah Inggris Raya, Prusia, Rusia, dan Austria. Pada langkah selanjutnya, Prancis juga diikutsertakan. Pada intinya, setelah sekitar sembilan bulan, isu-isu berikut ditetapkan:

1. Pemulihan "tatanan lama";
2. Reorganisasi teritorial;
3. Keseimbangan kekuatan;
4. Pemeliharaan perdamaian, yaitu, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengamankan perdamaian jangka panjang di Eropa.

Hanya keempat hal ini yang memungkinkan perdamaian akhirnya kembali ke Eropa. Oleh karena itu, di setiap abad, di mana konflik bersenjata atau konflik di bawah tekanan ekonomi muncul, selalu ada satu elemen yang diperlukan untuk mengubah jalannya sejarah – orang-orang yang bertanggung jawab dengan harapan yang mendalam bahwa orang-orang dapat hidup bersama tanpa perkelahian dan perang. Hanya jika itu terjadi, barulah dapat terjadi perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

2.3 PERAN KEPUTUSAN EROPA TENTANG KEBERLANJUTAN

Mari kita lihat lebih dekat rentang waktu peristiwa dan konsep-konsep yang sangat penting bagi Eropa. Terlepas dari perang di Ukraina, Uni Eropa telah mempercepat pemenuhan persyaratan untuk mengurangi suhu iklim dunia. Di sini, industri perbankan akan ditekan untuk mendukung tujuan iklim Eropa dan internasional. Tanpa memperhitungkan krisis global yang sedang berlangsung, Bank Sentral Eropa mempertahankan tujuannya untuk memimpin industri keuangan dalam mendukung tujuan iklim melalui penerapan peraturan perbankan



yang relevan. Tabel 2.1 menyajikan gambaran umum tentang tujuan regulator dan jenis senjata yang mereka miliki terkait persyaratan di sektor perbankan. Semua persyaratan yang disebutkan di atas harus diimplementasikan oleh industri perbankan, yang berada di bawah yurisdiksi Bank Sentral Eropa. Dalam hal ini, pengawas perbankan Eropa tidak memperhitungkan risiko multikompleks yang saat ini dihadapi oleh semua pelaku ekonomi utama.

Tabel 2.1 Peta jalan terperinci Eropa tentang tindakan terkait perubahan iklim.

No.	Subjek	2021	2022	2023	2024
1.	Proyeksi makroekonomi staf Eurosystem/ECB	Memperkenalkan asumsi teknis tentang penetapan harga karbon untuk perkiraan.	Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terkait iklim secara berkala pada dasar proyeksi makroekonomi.	-	-
2.	Pemodelan makroekonomi dan analisis skenario	-	Mengintegrasikan risiko iklim ke dalam model utama ECB dan menilai dampaknya terhadap potensi pertumbuhan.	Melakukan analisis skenario mengenai kebijakan transisi.	Memodelkan implikasi perubahan iklim bagi transmisi kebijakan moneter.
3.	Data statistik untuk analisis risiko perubahan iklim	-	Mengembangkan indikator pada instrumen keuangan hijau.	Membangun indikator paparan lembaga keuangan terhadap risiko fisik melalui portofolio mereka.	Mengembangkan koleksi statistik baru terkait perubahan iklim dan jejak karbon portofolio.
4.	Konsep netralitas dan efisiensi pasar dalam operasi kebijakan moneter	-	Menilai potensi bias dalam alokasi pasar di tengah inefisiensi pasar dan opsi alokasi alternatif.	Membuat proposal konkret untuk tolok ukur alternatif, khususnya untuk CSPP.	-
5.	Pengungkapan sesuai kebijakan UE sebagai syarat kelayakan	Proposal dan adopsi regulasi pengungkapan UE.	Merancang kebijakan yang memadai dan persiapan hukum/operasional.	Berlaku. Periode adaptasi bagi emiten.	Pengungkapan peraturan pertama (mencakup data 2023). Berlaku.
6.	Uji stres iklim neraca Eurosystem	Menyiapkan data dan metodologi.	Melakukan uji stres percontohan (ekonomi luas & bank individual).	-	Membangun berdasarkan uji percontohan dan memperkenalkan uji stres reguler.
7.	Risiko perubahan iklim dalam peringkat kredit	-	Menilai pengungkapan lembaga pemeringkat dan cara mereka memasukkan risiko iklim.	-	Memasukkan persyaratan ke dalam ECAF terkait risiko iklim, jika diperlukan.
8.	Risiko perubahan iklim dalam kerangka kolateral	-	Meninjau kerangka penilaian kolateral dan kontrol risiko. Menilai	-	Memantau kecukupan kerangka kerja. Terapkan



			inovasi keuangan berkelanjutan.		perubahan jika diperlukan.
9.	Risiko perubahan iklim dalam CSPP	-	Melakukan <i>due diligence</i> yang ditingkatkan dan menyiapkan pengungkapan CSPP.	Mengembangkan proposal untuk adaptasi kerangka CSPP.	Mengadaptasi kerangka kerja CSPP secara penuh.

Terkait isu keberlanjutan, hal ini akan menyebabkan biaya tambahan yang besar dan proses yang menantang bagi industri perbankan, yang akan secara langsung memengaruhi klien bisnis – perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa akan mengalami kerugian kompetitif besar yang pada akhirnya akan menjadi hambatan yang signifikan. Namun, banyak negara lain, terutama Tiongkok dan pasar negara berkembang, akan semakin berkembang meskipun, atau mungkin justru karena, peran keberlanjutan di negara-negara ini sampai batas tertentu diabaikan. Hal ini akan menempatkan perusahaan-perusahaan Eropa pada kerugian kompetitif yang menentukan.

Tidak dapat disangkal, penting untuk membahas isu keberlanjutan dan emisi CO₂ dengan mempertimbangkan pemanasan global; Meskipun demikian, tekanan yang diberikan kepada perusahaan dan bank yang beroperasi di Uni Eropa untuk melaporkan hasil tertinggi tidak akan menyebabkan tercapainya target CO₂ yang diperlukan. Oleh karena itu, pengukuran dan target yang tepat akan diperlukan di sini. Untuk melakukan hal tersebut, risiko multikompleks harus diperiksa, dan Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat dianggap sebagai ekonomi utama yang menderita risiko multikompleks dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.

2.4 PERTIMBANGAN TENTANG FENOMENA RISIKO MULTIKOMPLEKS

Konsep kompleksitas, karena sifatnya sendiri, sulit dipahami dan didefinisikan. Psikolog Herbert Simon mendefinisikan kompleksitas sebagai berikut: “Secara kasar, yang saya maksud dengan sistem kompleks adalah sistem yang terdiri dari sejumlah besar bagian yang berinteraksi dengan cara yang tidak sederhana”.⁶ Hingga saat ini, dunia hanya terbiasa berurusan dengan risiko individual, yaitu risiko yang muncul secara individual berdasarkan kategori risiko. Ini dapat berupa, misalnya, risiko lingkungan dan iklim, seperti hujan es, badai petir dan topan, banjir, krisis ekonomi, dan perang. Krisis ekonomi adalah kategori risiko lainnya. Krisis ekonomi sebagian besar terjadi sejak abad ke-20 dan seterusnya. Contohnya termasuk Depresi Besar tahun 1929, krisis real estat dan krisis keuangan, seperti pada tahun 2007. Berikut adalah beberapa krisis yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

2006: Krisis real estat AS

Selama bertahun-tahun, bank-bank hipotek AS, untuk merangsang pertumbuhan domestik, menawarkan pinjaman rumah murah, dan sering kali kepada peminjam yang tidak mampu membayar. Akibatnya, permintaan real estat meningkat dan harga rumah naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Setelah suku bunga pinjaman naik, jumlah pembeli rumah anjlok dan gelembung itu pecah – kekosongan menumpuk, harga mulai turun, dan semakin banyak peminjam yang tidak lagi mampu membayar utang mereka.



2007: Krisis perbankan global – Lehmann Brothers Inc.

Gagal bayar pinjaman akibat krisis hipotek juga membebani bank-bank hipotek AS. Bank, dana, dan perusahaan asuransi di hampir semua negara di dunia terpengaruh. Alasannya adalah derivatif keuangan terkait dari semua jenis, yang diperdagangkan secara internasional dari bank ke bank. Ini menciptakan efek domino yang belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak bank mengalami kesulitan. Akibatnya, Lehmann Brothers harus mengajukan permohonan kepailitan pada tahun 2007.

Instrumen dan metode juga dikembangkan untuk mengatasi hal ini dan keluar dari mode krisis.⁹ Misalnya, negara memberikan keringanan pajak, dana bantuan modal dibentuk, dan program stimulus ekonomi diluncurkan dan disertai dengan kebijakan bank sentral masing-masing. Untuk menyelamatkan bank, paket penyelamatan bank Jerman saja membantu dengan volume 480 miliar euro (batas atas untuk bantuan dalam bentuk modal ekuitas dan jaminan pinjaman).

Selama bertahun-tahun, perang sayangnya juga menjadi bagian dari jenis krisis yang harus dikelola oleh negara-negara. Negara-negara yang terdampak menerima dukungan dari negara lain dan para mediator berupaya membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Tujuannya selalu untuk memperbaiki situasi bagi semua pihak yang terlibat dan untuk mengurangi atau menghentikan konflik bersenjata. Faktor penentu lainnya adalah bahwa, kecuali Perang Dunia II, perang sejauh ini cenderung terjadi secara lokal. Sejauh ini, perang tersebut belum menimbulkan tantangan khusus bagi ekonomi global dalam hal bagaimana menanganinya dan dampaknya. Contohnya adalah perang di Irak, Yugoslavia, dan Yaman. Konflik bersenjata selalu ada dan akan selalu ada. Namun, dampaknya sejauh ini belum memberikan pengaruh signifikan pada ekonomi-ekonomi terkemuka di dunia.

Krisis keuangan, seperti yang terjadi pada tahun 2006, berdampak besar pada masalah keuangan. Dampaknya sangat besar, terutama pada sistem keuangan ekonomi-ekonomi terkemuka. Penyebabnya saat itu adalah transaksi derivatif oleh bank Amerika Lehmann Brothers, yang mengguncang dunia secara finansial. Namun, jenis krisis ini tidak melibatkan bahan baku, rantai pasokan, atau penghentian produksi karena pembekuan pasokan internasional. Bank sentral dengan bijaksana mengelola sistem keuangan dan akhirnya krisis ini pun berhasil diatasi. Telah terjadi krisis dengan berbagai jenis dan kualitas secara terus-menerus. Namun, krisis-krisis ini selalu terbatas pada area yang dapat didefinisikan. Dalam hal ini, krisis bukanlah hal yang luar biasa, melainkan hal yang umum dan dapat dikelola. Dalam situasi saat ini, berbagai krisis terjadi bersamaan.

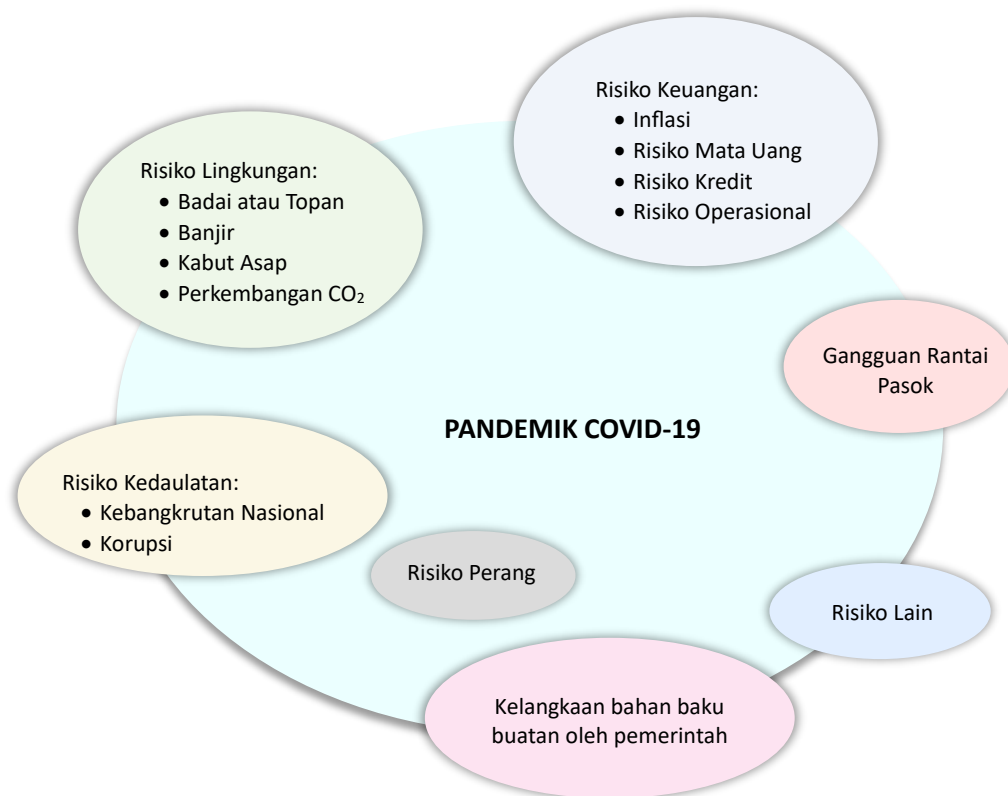
Gambar 2.1 melibatkan pemilihan risiko. Gambar ini tidak menyajikan semua risiko yang mungkin terjadi. Sebaliknya, diagram ini berfungsi untuk memahami bahwa saat ini banyak risiko lain muncul secara paralel dan harus diperhitungkan. Ekonomi-ekonomi utama dunia memiliki rencana tentang apa yang harus dilakukan ketika risiko-risiko tersebut terjadi. Nilai empiris untuk ini tersedia. Risiko yang berkorelasi juga diketahui dan dibuat transparan melalui simulasi. Penyebab dan akibatnya juga ditunjukkan.

Ketika risiko cuaca terjadi, kerusakan yang disebabkan diperbaiki dengan cepat dan profesional, orang-orang yang terkena dampak didukung, dan langkah-langkah lebih lanjut



diambil untuk mengambil tindakan pencegahan guna melindungi dari kejadian serupa di masa mendatang. Misalnya, dalam kasus banjir, bendungan ditinggikan, bendungan baru dibangun, atau ladang yang lebih tua dibangun kembali. Manajemen krisis semacam ini merupakan tantangan besar tentang bagaimana menangani peristiwa saat peristiwa tersebut terjadi.

Berkaitan dengan situasi dunia saat ini, terdapat banyak risiko berbeda yang terlibat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Oleh karena itu, pilihan tindakan juga sangat sulit untuk diimplementasikan. Dalam konteks ini, yang disebut adalah risiko multikompleks. Risiko multikompleks terjadi bersamaan sedemikian rupa sehingga pengetahuan manajemen risiko sebelumnya tidak lagi cukup untuk mengelolanya. Model statistik atau algoritmik pun tidak ada untuk hal ini. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah alasan mengapa terdapat kekhawatiran besar tentang bagaimana mengatasi situasi tersebut oleh para politisi, manajer, atau orang lain yang memegang posisi bertanggung jawab.



Gambar 2.1 Berbagai jenis risiko yang muncul.

Akibatnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, risiko inflasi, pandemi, kegagalan rantai pasokan, risiko geopolitik, masalah likuiditas yang muncul, dan perang di Ukraina telah menyebabkan risiko multikompleks. Selain itu, Eropa memutuskan pasokan gas dari Rusia, yang mengakibatkan kekurangan energi. Tantangan bagi sebagian besar perekonomian adalah mengelola risiko-risiko ini secara optimal pada saat yang bersamaan; namun, hal ini hanya mungkin dilakukan dengan jeda waktu dan kesabaran karena saat ini risiko-risiko tersebut menyebabkan masalah besar bagi seluruh dunia. Untuk menjawab pertanyaan apakah situasi



global baru dapat diperkirakan sebagai akibat dari perang di Ukraina, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang krisis yang saling terkait.

Sekilas, terdapat krisis geopolitik yang menjadi inti permasalahan terkait Rusia dan Ukraina. Singkatnya, Rusia menuntut wilayah dari negara lain. Mereka mencoba memaksakan hal ini dengan dua cara: pertama, secara militer, dan kedua – dengan mencegah Ukraina mengeksport pangan. Selain itu, banyak negara telah memprotes keras aneksasi tersebut. Tabel 2.2 menunjukkan negara-negara yang mendukung Ukraina secara finansial, militer, dan melalui bantuan kemanusiaan. Rusia secara tegas menolak tindakan para pendukung Ukraina. Kebijakan Rusia menggunakan kekuasaannya atas sumber dayanya. Aliran gas ke Eropa telah sepenuhnya terputus dan sumber daya minyak juga terbatas.

Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan konsekuensi bencana bagi Eropa. Terjadi kekurangan energi dan harga yang meroket di daerah-daerah tersebut. Sebelum perang, Eropa menerima banyak impor dari Ukraina. Hal ini hampir tidak mungkin sekarang karena sebagian produksi Ukraina terhenti akibat perang. Perusahaan-perusahaan telah diinstruksikan untuk melakukan transformasi baru dengan sangat cepat terkait rantai pasokan mereka. Dan ini sulit karena hampir tidak ada solusi yang memadai terkait kuantitas pasokan yang dibutuhkan pada jalur pasokan. Di latar belakang, terdapat krisis virus corona, dan krisis ini masih berlanjut. Krisis ini dimulai dengan kekuatan penuh pada tahun 2021 dan memengaruhi seluruh dunia. Pandemi virus corona telah menjadi sorotan utama dan terus mencengkeram dunia dan kekuatan ekonomi terkemuka sejak tahun 2020.

Sebagai pandemi, virus corona mengamuk di seluruh dunia dan menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dekade terakhir dan saat ini hingga pertengahan tahun 2022. Di satu sisi, kerusakan ini bersifat kemanusiaan dengan banyak korban jiwa; di sisi lain, bersifat ekonomi. Semua negara telah menderita dampak ekonomi yang parah. Hingga saat ini, dampak tersebut belum teratasi, meskipun banyak negara telah menerapkan program bantuan virus corona. Saat dunia perlahan pulih dari krisis tersebut, dengan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, dimensi krisis baru memengaruhi kekuatan ekonomi terpenting.

Akibat pandemi, rantai pasokan terganggu dan pengiriman dihentikan, terutama dari negara-negara Asia. Hingga saat ini, pemerintah Tiongkok masih berjuang melawan virus corona. Sebagian besar negara telah mengatasi tantangan virus tersebut; Pandemi ini ditangani oleh vaksin, dan infeksi sekarang jarang berujung fatal.

Tabel 2.2 Perang Ukraina: bantuan militer dan keuangan yang diberikan oleh negara-negara terpilih kepada Ukraina (per 3 Oktober 2022; dalam jutaan euro).

Negara	Nilai	Negara	Nilai
Amerika Serikat	15.178	Belanda	349
Prancis	800	Portugal	250
Jerman	1.150	Spanyol	200
Uni Eropa (Komisi dan Dewan)	12.323	Swedia	141
Britania Raya	2.545	Finlandia	82



Kanada	1.812	Denmark	50
Norwegia	1.034	Latvia	15
Polandia	1.018	Austria	10
Jepang	607	Lituania	5
Italia	510		

Sebagai pertimbangan ketiga, dampak lain terhadap produksi ekonomi telah ditimbulkan oleh berbagai bank sentral. Federal Reserve AS telah secara berturut-turut menaikkan suku bunga sejak tahun 2021. Bank Sentral Eropa, yang mengendalikan stabilitas mata uang euro, jauh tertinggal dalam hal ini. Akibat hiruk pikuk situasi krisis individu, yaitu risiko geopolitik, perang, dan krisis ekonomi serta pandemi, ECB tidak mulai menaikkan suku bunga hingga akhir tahun 2022, tetapi kemudian melakukannya secara besar-besaran. Salah satu efek dari pengendalian pasokan uang ini adalah pasar properti mengalami penurunan yang cepat, dan ini terjadi setelah bertahun-tahun mengalami booming properti. Akibatnya, bangunan baru di Eropa tiba-tiba dihancurkan karena peminjam tidak lagi mampu membayar suku bunga yang lebih tinggi. Dikombinasikan dengan biaya bahan baku yang meroket, harga bahan bangunan juga meningkat secara paralel. Hal ini juga menyebabkan pendinginan pasar properti yang lebih besar lagi.

Dengan demikian, skenario krisis multikompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini sedang berlangsung. Skenario krisis multikompleks ini sebelumnya tidak dikenal oleh perekonomian dunia. Lebih jauh lagi, perbedaan politik di Uni Eropa turut berperan, yang menghancurkan kemampuan untuk mengelola krisis dengan baik di tingkat Eropa. Perpecahan tidak pernah menjadi penasihat yang baik.

Melihat Amerika Serikat, kita dapat melihat bahwa persaingan antara Partai Republik dan Demokrat terus berkobar dan membahayakan konsistensi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri AS. Dan dengan rezim Korea Utara, yang dipimpin oleh pemimpin totaliter Kim Jong Un, kita memiliki situasi lain yang menyebabkan diktator atau otokrat menjadi lebih lazim di dunia kita lagi. Diktator semacam itu tidak dapat diprediksi dan ingin menerapkan perintah mereka dengan seluruh kekuatan dan egoisme mereka.

Singkatnya, sangat sulit untuk bereaksi dengan tepat dalam pandangan keseluruhan dari krisis multikompleks saat ini. Alasannya adalah dogma negara-negara individual dan perilaku negara-negara besar, seperti Rusia. Dengan demikian, fenomena risiko multikompleks yang digambarkan sebagai krisis telah terjadi, di mana pengelolaan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua negara terkait memengaruhi dunia kita. Gambar 2.1 menunjukkan situasi saat ini. Ini dapat dibandingkan dengan rumah kartu yang runtuh. Tetapi dengan rumah kartu, hanya ada satu alasan untuk runtuh, dan itu adalah kurangnya statika. Dalam krisis keseluruhan saat ini, ada banyak alasan, yang membuat sulit untuk mengelola krisis. Sejauh mana peristiwa-peristiwa ini memiliki implikasi bagi tatanan global baru akan disajikan di bagian selanjutnya.



2.5 PERSAINGAN EMPAT POROS EKONOMI GLOBAL

Untuk menilai efek risiko multikompleks di dunia, kekuatan keuangan ekonomi terkemuka telah dianalisis. Pandemi virus corona digambarkan di depan tanda kurung. Bagian ini meneliti perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir, termasuk krisis virus corona dan perang Ukraina sebagai pendorong keruntuhan ekonomi di seluruh dunia. Langkah pertama adalah melihat Tiongkok sehubungan dengan sistem politiknya. Ada jaringan hubungan yang erat antara partai dan lembaga negara. Perlu ditekankan bahwa presiden negara, yang juga merupakan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Komisi Militer Pusat, memiliki kekuasaan yang besar.

Pada Maret 2018, Kongres Rakyat Tiongkok secara bulat menghapus batasan masa jabatan presiden. Aturan bahwa "presiden dan wakil presiden tidak boleh menjabat lebih dari dua periode berturut-turut" dihapus dari konstitusi. Hal ini menjadikan Xi Jinping politisi paling berkuasa di Tiongkok sejak Mao Zedong, dan ia selanjutnya dapat tetap menjadi presiden seumur hidup. Di bawah aturan sebelumnya, presiden dapat menjabat maksimal dua periode lima tahun.

Dengan penguasa saat ini Xi Jinping, komunitas dunia demokratis menemukan seorang penguasa yang ingin secara besar-besaran memperluas peran Tiongkok dan bentuk pemerintahannya. Salah satu tujuannya adalah untuk mencaplok Taiwan kembali ke Tiongkok dalam dua tahun ke depan. Hal ini telah dikomunikasikan dan didefinisikan sebagai tujuan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi sekali lagi, krisis geopolitik sudah mulai terlihat saat ini.

Peran Tiongkok dalam konteks negara-negara demokratis juga luar biasa karena alasan lain. China adalah pemasok obat-obatan, panel surya, dan bahan baku penting lainnya untuk sebagian besar Eropa dan dunia Barat. Jika ekspansi China terjadi dengan mengorbankan negara lain dalam bentuk aneksasi, ini akan berarti bahaya dan serangan berikutnya terhadap ekonomi utama dunia. Penghentian ekspor pasokan tersebut akan kembali mempersulit negara-negara demokratis di dunia Barat. Di sini juga, seperti halnya dengan Rusia, kita memiliki ketergantungan dalam hal sumber daya yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, sudah diketahui bahwa China memperoleh pengetahuan di Eropa melalui akuisisi perusahaan dan secara besar-besaran memperluas ketergantungan Eropa pada China. Berkaitan dengan Afrika, China telah dengan terampil berhasil mengamankan lahan dan bahan baku. Lebih lanjut, China sedang dalam perjalanan untuk mengamankan akses pelabuhan penting di seluruh dunia melalui pembelian. Saat ini, pelabuhan penting Yunani di Piraeus sudah menjadi milik China.

Dalam analisis Tabel 2.3, terdapat perbandingan antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa terkait populasi, struktur usia, energi, penelitian dan pengembangan, penggunaan teknologi, produk domestik bruto, pangsa perdagangan, hubungan perdagangan (ekspor), dan hubungan perdagangan (impor).

Meringkas Tabel 2.3, Tiongkok sedang menuju menjadi negara adidaya yang membuat negara-negara bergantung padanya dan mengamankan bahan baku untuk dirinya sendiri, secara bertahap menarik pengetahuan teknis dari negara-negara terkait dengan membeli



perusahaan di Barat dan mengamankan pelabuhan geopolitik di seluruh dunia. Ini adalah bahaya bagi Eropa dan dunia Barat yang tidak boleh diremehkan.

Untuk lebih memahami bagaimana Tiongkok melanjutkan penentuan nasib sendiri, contoh berikut ini sesuai berdasarkan contoh Zambia. Ketika Tiongkok mulai memenuhi kebutuhan bahan baku di luar negeri pada pergantian milenium, Zambia adalah salah satu negara pertama yang menjadi fokus perhatian Beijing. Chambishi datang pertama. Pada tahun 1998, sebuah perusahaan Tiongkok membeli tambang tembaga yang saat itu tidak digunakan di pintu masuk desa. Sebagai informasi tambahan, populasi di Chambishi hanya sedikit di atas 11.000 jiwa. Segera setelah itu, tambang kedua ditambahkan, dan kemudian sebuah pabrik peleburan. Setelah itu, hanya butuh beberapa tahun bagi Tiongkok untuk memperluas radius pengaruhnya selangkah demi selangkah. Seperti yang dicatat oleh sejarawan Inggris Niall Ferguson selama kunjungannya ke Copperbelt pada tahun 2010, di sini, di titik buta politik global ini, kita menyaksikan awal mula sebuah kekaisaran. Dia benar. Hari ini, bendera merah dengan bintang kuning berkibar di atas puluhan tambang di wilayah tersebut. Di mana perusahaan pertambangan Barat mendominasi selama beberapa dekade, perusahaan Tiongkok sekarang yang memegang kendali.

Tabel 2.3 Gambaran Umum Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa (dengan Inggris masih termasuk).

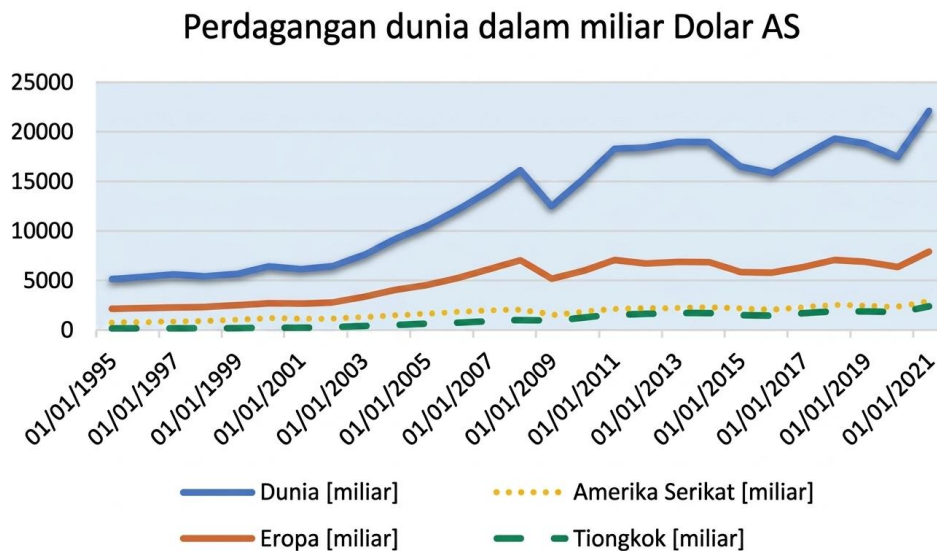
Indikator	Deskripsi & Data (Terjemahan)
Perkembangan Populasi	Antara 1960-2017, populasi meningkat sekitar 105 juta (naik 25,8%) di EU-28, hampir 138 juta (naik 73,7%) di AS, dan sekitar 752 juta (naik 114,3%) di Tiongkok.
Struktur Usia	Di UE, AS, dan Tiongkok, kelompok usia di bawah 15 tahun semakin mengecil, sementara proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas terus meningkat.
Bauran Energi	Tiongkok menyumbang lebih dari seperlima konsumsi energi global, jauh di atas AS dan UE-28. Tiongkok terutama mengonsumsi batu bara (64,8%) dan minyak (18,4%) pada data 2016.
Penelitian dan Pengembangan (R&D)	Dari 2.500 perusahaan dengan pengeluaran R&D tertinggi di dunia (2017), perusahaan yang bermarkas di AS berinvestasi hampir sebanyak gabungan negara-negara UE dan Tiongkok.
Sektor Teknologi	Dalam bidang R&D, sektor teknologi tinggi di Amerika Serikat memiliki pangsa pengeluaran R&D di atas rata-rata, yakni sebesar 78,0% pada tahun 2017.
Produk Domestik Bruto (PDB)	Pada 2017, EU-28 menyumbang 23,5% PDB dunia, AS 21,8% , dan Tiongkok 12,7% . Sebagai perbandingan, pada 1970 pangsa UE adalah 35,2% dan Tiongkok hanya 1,0%.
Pangsa Perdagangan	Pangsa ekspor barang Tiongkok meningkat dari 5,2% menjadi 16,2% antara tahun 2000-2017. Pangsa impor barangnya juga naik dari 4,4% menjadi 12,7%.



Hubungan Dagang – Ekspor	AS dan UE adalah pasar penjualan yang lebih penting bagi Tiongkok daripada sebaliknya. Pada 2017, Tiongkok mengekspor 19,0% barangnya ke AS dan 16,4% ke UE.
Hubungan Dagang – Impor	Seperlima dari impor UE dan AS berasal dari Tiongkok pada 2017. Sedangkan untuk impor Tiongkok, 14,4% berasal dari UE, diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan AS (9,1%).

Contoh ini memperjelas bagaimana Tiongkok bertindak. Mereka mengamankan lahan, mineral, dan sumber daya mentah di benua lain. Mereka menduduki negara tersebut dengan penduduk lokal mereka sendiri. Ini menciptakan semacam dominasi dan memastikan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki pilihan untuk bertindak. Ini adalah cara paling efektif untuk mendominasi dunia. Dengan demikian, jenis dominasi dunia baru telah muncul.

Pada langkah kedua, analisis pada Gambar 2.2 menunjukkan kepada kita bahwa ketergantungan pada Tiongkok ada di Eropa dan Amerika Serikat. Seiring waktu, ketergantungan ini sangat terlihat di Eropa. Selama pandemi virus corona, seluruh Eropa tiba-tiba mendapati bahwa sebagian besar persediaan medis, seperti masker dan sarung tangan, dipasok oleh Tiongkok. Karena situasi pandemi di Tiongkok, hal-hal ini tiba-tiba menjadi faktor penghambat. Hal yang sama berlaku untuk obat-obatan dan barang-barang lainnya. Demikian pula, Tiongkok, bersama dengan negara-negara Asia Timur lainnya, adalah salah satu negara terkemuka di pasar semikonduktor yang menguntungkan.

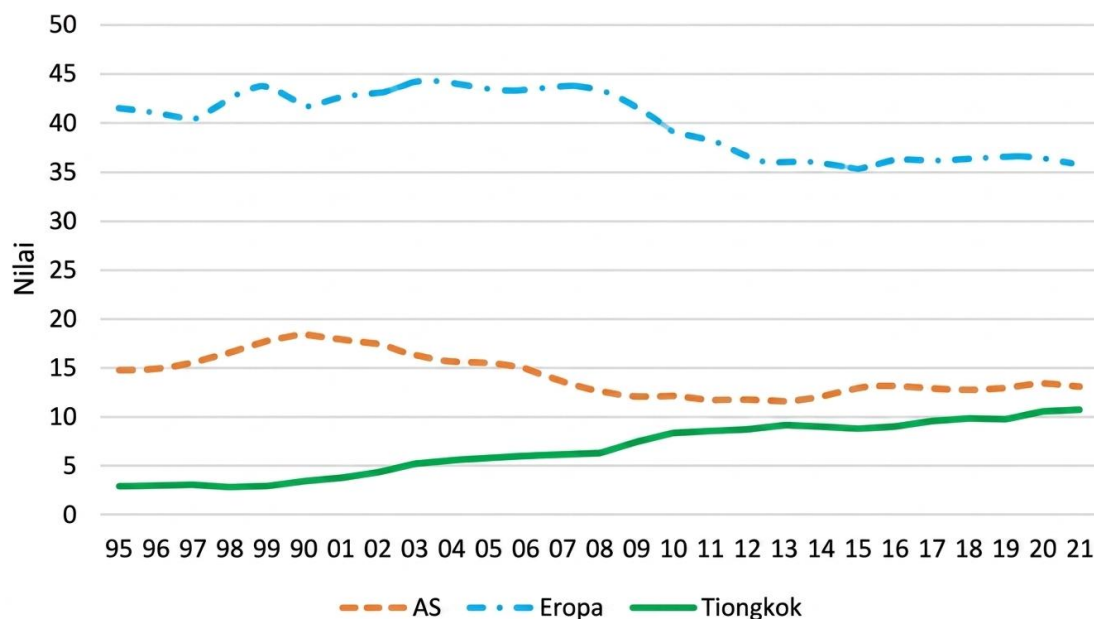


Gambar 2.2 Perdagangan dunia secara global: Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, dalam dolar AS.

Sebagai langkah ketiga, Gambar 2.3 menunjukkan deret waktu dari jumlah bauran perdagangan ekspor barang dagangan yang berkaitan dengan produk dan jasa dari tahun 1995 hingga 2021. Gambar 2.3 diurutkan berdasarkan persentase perdagangan dunia global. Merujuk pada Gambar 2.3, perlu diketahui bahwa di ketiga posisi statistik tersebut, Eropa memiliki pangsa yang jauh lebih tinggi terkait total perdagangan dunia dibandingkan Amerika



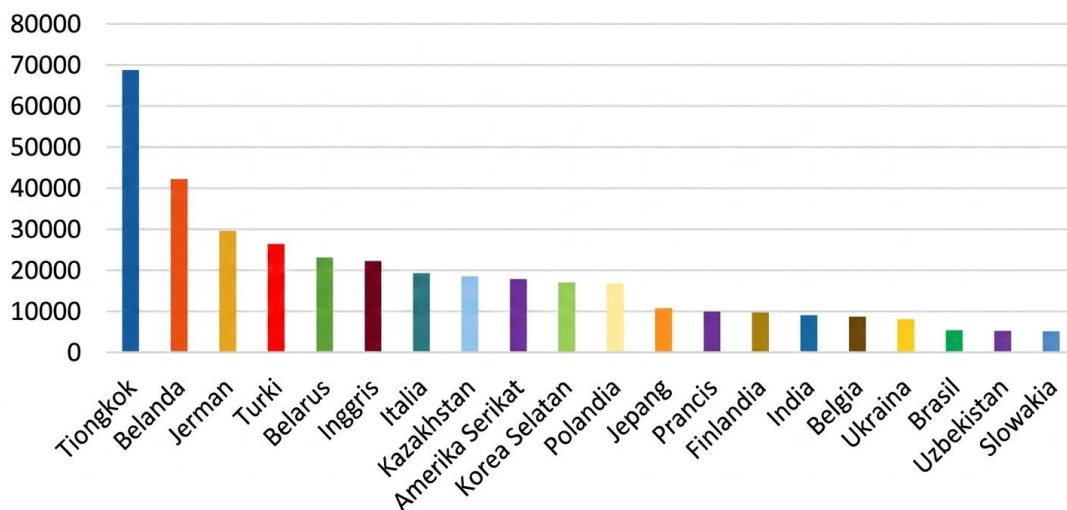
Serikat dan Tiongkok. Alasannya adalah perdagangan intra-Eropa juga termasuk untuk Eropa dan tidak untuk kedua negara tersebut. Statistik ini menunjukkan bahwa output ekonomi akan sedikit mendingin menjelang akhir tahun 2022. Namun demikian, kehancuran total ekonomi nasional tidak akan terjadi dalam pandangan perkiraan. Mengingat perang di Ukraina dan pandemi, ekonomi yang dianalisis seharusnya mengalami tren negatif jauh lebih awal. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan tren penurunan sehubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa dan tren kenaikan sehubungan dengan Tiongkok. Dengan menafsirkan grafik ini, dapat dilihat bahwa Tiongkok telah meningkatkan ekspornya, dan Amerika Serikat serta Eropa telah menurunkan ekspor mereka.



Gambar 2.3 Perkembangan perdagangan dunia: Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok – perdagangan dunia dalam kaitannya dengan seluruh perdagangan dunia dalam persen per tahun.

Sebagai langkah ketiga, dalam konteks ini, penting untuk mengetahui peran Rusia terkait ekspor. Pada tahun 2021, mitra dagang utama Rusia adalah Tiongkok, dengan volume perdagangan ekspor dan impor antara kedua negara mencapai hampir Rp.1,41 kuadriliun. Tiongkok merupakan negara asal impor dan tujuan ekspor utama Rusia. Jerman, Belanda, Belarus, dan Amerika Serikat melengkapi daftar lima mitra utama tersebut.





Gambar 2.4 Nilai ekspor barang dari Rusia pada tahun 2021 menurut negara tujuan utama (dalam miliar dolar AS).

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa lima mitra ekspor utama Rusia pada tahun 2021 adalah Tiongkok, Belanda, Jerman, Turki, dan Belarus. Nilai total ekspor dari Rusia ke mitra dagang utamanya – Tiongkok – mencapai hampir Rp.690 triliun pada tahun 2021.

Mengenai perdagangan antara Rusia dan Tiongkok, Tiongkok bukan hanya tujuan ekspor utama komoditas Rusia tetapi juga mitra impor utama negara tersebut. Hingga tahun 2018, nilai impor Rusia dari Tiongkok melebihi nilai ekspor Rusia ke negara tersebut. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya, neraca perdagangan Rusia dengan Tiongkok menjadi positif dan mencapai sekitar Rp.26 triliun. Produk mineral dan energi, yang merupakan barang ekspor utama Rusia, juga merupakan komoditas yang paling banyak diimpor oleh Tiongkok dari negara tersebut.

Tiongkok bukan hanya tujuan ekspor utama komoditas Rusia tetapi juga mitra impor utama negara tersebut. Hingga tahun 2018, nilai impor Rusia dari Tiongkok melebihi nilai ekspor Rusia ke negara tersebut. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya, neraca perdagangan Rusia dengan China menjadi positif dan mencapai sekitar Rp.26 triliun. Produk mineral dan energi, yang merupakan barang ekspor utama Rusia, juga merupakan komoditas yang paling banyak diimpor oleh China dari negara tersebut.

Setelah penurunan signifikan dalam arus perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa dari tahun 2015 hingga 2017, angka-angka tersebut mengalami dinamika positif selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai ekspor Rusia ke Uni Eropa melebihi Rp.1,88 kuadriliun – kira-kira Rp.940 triliun lebih besar daripada nilai impor Uni Eropa ke Rusia pada tahun yang sama. Jerman adalah importir utama barang-barang Rusia di kawasan tersebut dan mitra impor terbesar kedua Rusia pada tahun 2021.

Setelah penurunan signifikan dalam arus perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa dari tahun 2015 hingga 2017, angka-angka tersebut mengalami dinamika positif selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai ekspor Rusia ke Uni Eropa melebihi Rp.1,88 kuadriliun – kira-kira Rp.940 triliun lebih besar daripada nilai impor Uni Eropa ke Rusia pada tahun yang



sama. Jerman adalah importir utama barang-barang Rusia di kawasan tersebut, dan juga mitra impor terbesar kedua Rusia pada tahun 2021.

Dalam evaluasi Gambar 2.4, disimpulkan bahwa Rusia memainkan peran penting dalam ekspor dengan negara lain. Sehubungan dengan perang di Ukraina, perlu dicatat bahwa negara-negara perdagangan terpenting telah menghentikan perdagangan dengan Rusia. Bagi Rusia, ini berarti, pertama, mata uang tidak akan lagi mengalir ke negara tersebut. Kedua, barang-barang yang diproduksi harus dijual ke negara-negara yang belum memberlakukan embargo perdagangan terhadap Rusia. Embargo perdagangan yang diberlakukan terhadap Rusia oleh banyak negara akan lebih memukul Rusia daripada negara-negara yang telah menerima barang dari Rusia.

Singkatnya, telah terbukti bahwa kekuatan-kekuatan dunia utama saling terkait secara ekonomi melalui globalisasi dan internasionalisasi. Ekspor bahan baku Rusia sangat dibatasi oleh dunia Barat melalui embargo perdagangan. Dengan demikian, Rusia harus beralih ke negara-negara yang dipimpin oleh diktator lain. Demikian pula, Rusia akan mencoba memasok ke negara-negara Afrika. Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan konflik dengan Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang. Tiongkok ingin memperluas posisi kekuatan dunianya dalam segala keadaan. Untuk berhasil dalam hal ini, Tiongkok tidak akan menunjukkan pertimbangan kepada negara mana pun di dunia.

Meskipun demikian, perlu dikatakan bahwa sebagian besar dunia tetap bersatu. Terlihat bahwa komunitas dunia menunjukkan solidaritas dan saling membantu, dan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa melakukan upaya terbesar untuk mentransformasi rantai pasokan mereka. Dapat dinyatakan bahwa terjadi redistribusi peran dalam ekonomi nasional dunia. China akan terus berkembang dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Negara-negara Barat harus bergerak lebih dekat secara politik dan ekonomi untuk menghindari pergeseran global dalam posisi dunia. Rusia telah menarik diri dari perdagangan ekonomi dengan Barat sebagai akibat dari perang. Potensi konflik antara Rusia dan China dapat diperkirakan di masa depan.

2.6 RESET BESAR

Reset makro akan terjadi dalam konteks tiga kekuatan sekuler yang dominan yang membentuk dunia kita saat ini, yaitu saling ketergantungan, kecepatan, dan kompleksitas. Trio ini mengerahkan kekuatannya, dalam tingkatan yang lebih besar atau lebih kecil, kepada kita semua, siapa pun kita atau di mana pun kita berada.

Tata Ekonomi Global Baru didasarkan pada Kekuatan Ekonomi Dunia yang paling penting, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia, dan saling ketergantungan para pemain ekonomi besar telah ditunjukkan sebelumnya. Akan melampaui cakupan bab ini untuk menganalisis semua negara ekonomi, tetapi dengan negara-negara yang diteliti, dapat dilihat bahwa ada saling ketergantungan yang besar dari sudut pandang ekonomi.

Dari perspektif saat ini, tidak akan ada pengaturan ulang besar-besaran (great reset). Untuk membuktikan hal ini, pertama, ada pemeriksaan topik Donald Trump dan Amerika



Serikat. Pertanyaannya adalah apakah Donald Trump telah memulai pengaturan ulang besar-besaran dengan kebijakan *America First*-nya. Mengacu pada Donald Trump, ia adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 dari 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021. Dari sini, banyak hal dimulai dengan dampak yang mendalam pada internasionalisasi dan globalisasi. Tetapi bahkan sebelum Donald Trump, sudah jelas bahwa perdagangan global dua arah sedang mendingin. Oleh karena itu, internasionalisasi dan globalisasi mengalami stagnasi. Itu berarti Donald Trump bukanlah penyebab utama, melainkan hanya sebagai pendorong. Sebaliknya, ia hanya menjadi katalisator bagi terus menurunnya perdagangan dunia selama masa jabatannya. Merujuk pada Gambar 2.3, tren penurunan di negara-negara ekonomi utama terlihat jelas. Hal ini terutama berlaku untuk Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa terjadi pendinginan perdagangan yang stabil pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintahan Trump dengan cepat menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa perjanjian bilateral dan multilateral hanya berlaku sampai batas tertentu. Pemerintahan selanjutnya dengan Joe Biden, Presiden AS petahana, saat ini sedang dalam proses menetralkan keputusan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya terkait perjanjian perdagangan internasional.

Salah satu contohnya adalah paket miliaran dolar untuk mengurangi emisi CO₂ di Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah penguatan Ketahanan Iklim Global, termasuk penggandaan janji AS kepada Dana Adaptasi menjadi Rp.1 triliun dan pengumuman lebih dari Rp.1,5 triliun dukungan baru untuk mempercepat upaya Rencana Darurat Presiden untuk Adaptasi dan Ketahanan (PREPARE) di seluruh Afrika. Dapat disimpulkan bahwa perubahan pemerintahan juga dapat menyebabkan koreksi cepat terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bermotivasi politik.

Pengamatan lebih dalam terhadap Tiongkok saat ini penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara tersebut beroperasi.

2.7 DIMENSI TANTANGAN TIONGKOK

Bukan hal baru bahwa kebangkitan Tiongkok menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara lain dan organisasi internasional karena mengguncang hubungan kekuasaan regional dan global yang mapan dan memperkuat alternatif ideologis terhadap konsep tatanan Barat. Namun, menarik untuk melihat bagaimana setiap aktor dalam politik internasional menyesuaikan diri dengan hal ini, tergantung pada bidang tanggung jawabnya, konstitusi internalnya, dan berbagai cara yang memengaruhinya. NATO dan anggotanya dapat terpengaruh oleh beberapa aspek perilaku Tiongkok.

Pertama, ada upaya Beijing untuk mengintegrasikan perusahaan teknologi Tiongkok ke dalam infrastruktur digital negara-negara Barat dan dengan demikian memberikan pengaruh pada mereka. Hal ini sangat relevan dengan perdebatan yang sedang berlangsung di Eropa tentang teknologi nirkabel generasi kelima (5G).

Isu kedua adalah meningkatnya minat Tiongkok untuk berinvestasi di infrastruktur penting Eropa. Selain jaringan listrik, jaringan 5G, proyek kota pintar, kabel bawah laut, dan banyak lagi, perusahaan milik negara Tiongkok dan anak perusahaannya, beberapa di



antaranya menyamar sebagai perusahaan swasta, menunjukkan minat yang tinggi pada pelabuhan, terutama di negara-negara NATO Eropa. Perusahaan pelayaran milik negara Tiongkok, Cosco, dan perusahaan afiliasinya, China Merchant, telah memiliki terminal atau memegang saham di operator pelabuhan di 14 pelabuhan Eropa. Masih harus dilihat apakah negara-negara NATO dapat menggunakan pelabuhan-pelabuhan ini secara andal dan apakah mereka harus membentuk aliansi untuk membela Eropa. Paling tidak, tidak dapat dipastikan bahwa pemilik Tiongkok akan mengizinkan mereka untuk mengisi bahan bakar, memasok, atau memperbaiki kapal di pelabuhan-pelabuhan ini. Mitra NATO Eropa semakin menyadari kendala potensial ini.

Ketiga, anggota NATO sangat prihatin dengan upaya Tiongkok untuk memengaruhi posisi Eropa dalam isu-isu politik dan memperdalam perbedaan antar negara-negara Eropa, misalnya, dengan mengeksploitasi ketergantungan ekonomi yang telah diciptakannya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Dengan demikian, upaya Beijing untuk memikat pemerintah Eropa dengan investasi Tiongkok bertujuan untuk menciptakan perpecahan di dalam Uni Eropa, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Keempat, serangan siber Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika serta bentuk-bentuk spionase militer-teknis lainnya telah meningkat secara masif. Menurut laporan Kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Konstitusi tahun 2020, dalam beberapa tahun terakhir aktivis siber Tiongkok telah menunjukkan kemajuan teknologi yang cukup besar dalam menyamarkan serangan mereka. Di masa lalu, serangan oleh aktivis siber Tiongkok terutama berfokus pada lembaga-lembaga ekonomi. Sejak 2019, serangan terhadap target politik oleh entitas Tiongkok yang dicurigai telah bergabung dalam jajaran tersebut.

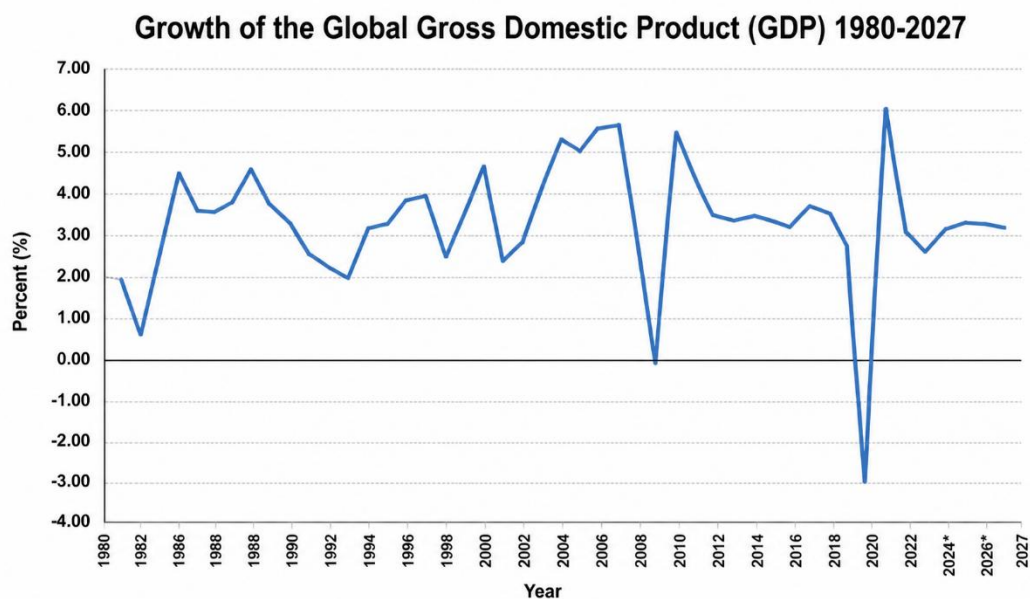
Kelima, kekhawatiran terbesar, dalam arti keamanan yang paling sempit, adalah meningkatnya kedekatan antara Tiongkok dan Rusia, terutama kerja sama militer antara kedua negara. Lingkup kerja sama militer Rusia dan Tiongkok masih sangat terbatas dan tidak mencerminkan komitmen strategis di kedua pihak. Pada tahun 2015, tiga kapal angkatan laut Tiongkok bergabung dengan angkatan laut Rusia di Mediterania Timur untuk latihan angkatan laut selama lima hari, yang merupakan kerja sama pertama antara Tiongkok dan Rusia di wilayah pinggiran Eropa. Pada tahun 2017, Tiongkok mengirimkan sebuah kapal perusak, sebuah fregat, dan sebuah kapal pasokan ke eksklave Rusia di Kaliningrad sebagai bagian dari latihan selama delapan hari. Ini adalah latihan militer pertama jenis ini di Laut Baltik dan sejauh ini tetap menjadi satu-satunya. Kerja sama angkatan darat hingga saat ini juga dapat dikelola – untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara tersebut beroperasi.

Meskipun demikian, konvergensi kepentingan dan koordinasi strategis yang semakin meningkat antara Tiongkok dan Rusia tidak dapat diabaikan – semakin meningkat juga di Eropa. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kerja sama militer dan militer-teknis tetapi juga untuk ekstraksi bahan mentah di Arktik, perluasan sensor internet, pengembangan jaringan 5G (di mana Rusia telah menerima Huawei sebagai penyedia tepercaya), dan teknologi penggunaan ganda, seperti sistem ruang angkasa, navigasi satelit, pengembangan perangkat lunak, dan sistem tanpa awak. Rusia dan China juga semakin membuka kerja sama strategis mereka kepada negara ketiga. Misalnya, latihan angkatan laut trilateral Rusia-China-Afrika Selatan



pertama berlangsung pada November 2019, diikuti oleh latihan angkatan laut Rusia-China-Iran di Samudra Hindia pada bulan berikutnya.

Selain itu, ambisi militer China di Asia, dan khususnya di kawasan Indo-Pasifik, memengaruhi anggota NATO dan, yang terpenting, Amerika Serikat. China menggunakan peningkatan partisipasinya dalam misi perdamaian PBB untuk memberikan pengalaman operasional kepada tentaranya; namun, pada saat yang sama, hal itu juga berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di wilayah krisis, terutama di Afrika. Di sisi lain, di wilayah sekitarnya, Republik Rakyat China memicu konflik dengan negara-negara tetangganya, misalnya dengan India di wilayah perbatasan China-India, dengan negara-negara pesisir di Laut China Timur dan Selatan, dan dengan Taiwan, yang secara aktif diancam oleh China.



Gambar 2.5 Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global dari tahun 1980 hingga 2022, dengan perkiraan hingga tahun 2027 (dibandingkan dengan tahun sebelumnya).

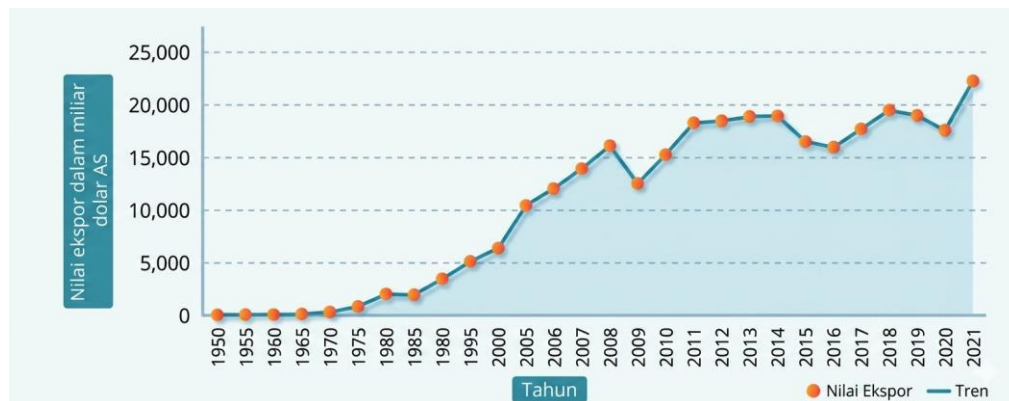
Singkatnya, Tiongkok sedang mendefinisikan perannya sendiri di masa depan. Ini untuk memperluas peran politik dan ekonominya. Tujuannya adalah untuk mendominasi dunia. Dan semua hal di atas adalah tujuan strategis. Tidak seperti kekuatan lain di dunia, Tiongkok tidak terlalu mempermasalahkan apa tujuan-tujuan tersebut. Yang menarik adalah semua negara sedang mengamati, dan butuh waktu lama untuk memahami bahwa Tiongkok berada di jalur menuju kemenangan.

Mengevaluasi Great Reset yang kompleks, juga disebut kembali ke nol, perlu dipertimbangkan data statistik ekonomi. Dari sini, dapat disimpulkan sejauh mana Great Reset benar-benar dapat dinilai. Pertama, produk domestik bruto global akan dianalisis. Grafik tersebut berasal dari Dana Moneter Internasional.

Merujuk pada Gambar 2.5, pada sebagian besar tahun sejak 1980, pertumbuhan produk domestik bruto global relatif konsisten. Umumnya berfluktuasi antara pertumbuhan 2% dan 5% dari tahun ke tahun. Pengecualian yang paling mencolok adalah selama Resesi

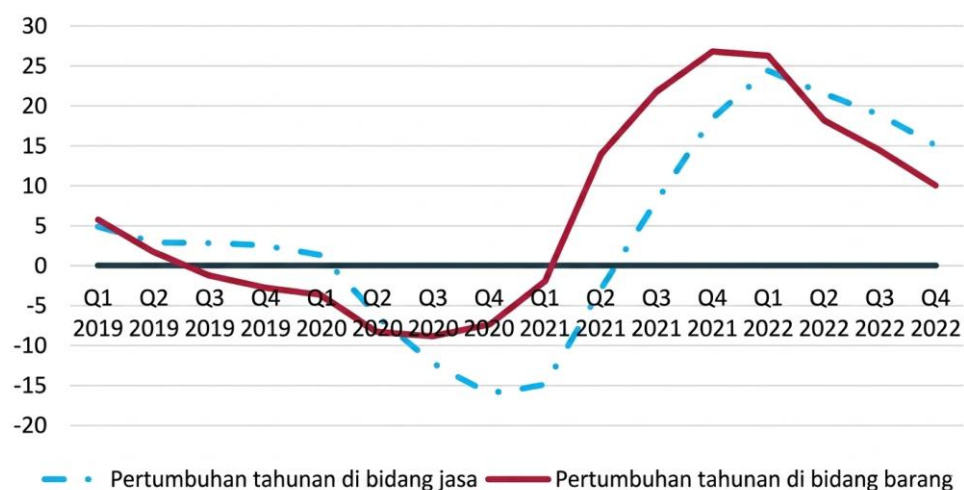


Besar pada tahun 2009. Resesi Besar 2008–2009 adalah periode kontraksi ekonomi global, yang dipicu oleh krisis keuangan yang melanda Wall Street dan sistem keuangan global yang dimulai pada musim panas 2007. Resesi besar lainnya terjadi pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19, di mana ekonomi global menyusut. Karena ekonomi dunia terus menghadapi dampak ekonomi dari pandemi, serta dampak dari invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, masa depan tetap tidak pasti. Namun, perkiraan saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan akan kembali stabil pada angka sekitar 3,3% pada tahun 2024.



Gambar 2.6 Tren nilai ekspor global perdagangan barang dari tahun 1950 hingga 2021 (dalam miliar dolar AS); perdagangan: nilai ekspor di seluruh dunia antara tahun 1950 dan 2021.

Mengenai Gambar 2.6, nilai perdagangan global barang yang diekspor ke seluruh dunia mencapai sekitar Rp.223 kuadriliun pada harga saat ini pada tahun 2021. Sebagai perbandingan, angka ini berada di sekitar Rp.64,5 Kuadriliun pada tahun 2000. Kenaikan nilai barang yang diekspor ke seluruh dunia ini mencerminkan perkembangan dalam perdagangan internasional, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks perdagangan ekspor, perdagangan global mengacu pada pertukaran modal, barang, dan jasa antara berbagai negara dan wilayah. Ekspor barang dagangan mengacu pada barang yang dijual secara internasional yang ditanam, diproduksi, atau dibuat di negara lain.



Gambar 2.7 Perdagangan global melambat.

Mengenai importir dan eksportir barang dagangan terkemuka pada tahun 2020, Tiongkok adalah sumber terbesar barang yang diekspor di seluruh dunia, dengan total ekspor barang dagangan senilai sekitar Rp26 Kuadriliun. Pada tahun itu, Tiongkok bertanggung jawab atas hampir 15% dari seluruh barang dagangan yang diekspor di seluruh dunia. Amerika Serikat adalah eksportir barang terbesar kedua pada tahun itu dan merupakan importir barang dagangan terkemuka di dunia pada tahun 2020. Pada tahun itu, negara adidaya global ini menyumbang 13,5% dari impor barang dagangan dunia.

Volume perdagangan ini menandakan permintaan yang tangguh, jadi tidak semua berita suram. Meskipun terjadi perlambatan nilai perdagangan, volume perdagangan secara keseluruhan terus tumbuh sepanjang tahun 2022, yang merupakan sinyal permintaan global yang tangguh, kata laporan tersebut. “Sebagian dari penurunan nilai perdagangan internasional selama paruh kedua tahun 2022 disebabkan oleh penurunan harga produk primer”, katanya.

Laporan tersebut juga menyoroti faktor positif dari perjanjian perdagangan baru, seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika, dan peningkatan logistik. “Pelabuhan dan perusahaan pelayaran kini telah menyesuaikan diri dengan tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19”, katanya. “Tarif angkutan dan kargo masih lebih tinggi daripada rata-rata sebelum pandemi”, “dan trennya menurun”. Dilihat dari perkembangan terkini yang dijelaskan sebelumnya, situasi ekonomi global akan kembali normal.

Sebagai rangkuman bab ini, perlu dicatat bahwa globalisasi, internasionalisasi, dan liberalisasi, yang berkembang secara konsisten pada awal tahun 2000-an, kini mengalami semacam kemunduran meskipun ada analisis perkembangan ekonomi sehubungan dengan diagram dalam bab ini. Perkembangan ekonomi terpenting, termasuk Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan beberapa negara lainnya, akan terus berlanjut. Berdasarkan COVID-19 dan perang melawan Ukraina, pandangan dan perilaku negara serta kebijakan mereka telah berubah. Ketidakpercayaan timbal balik telah muncul kembali. Donald Trump dan kebijakan "America First"-nya berkontribusi pada hal ini. Kemudian, sebagai langkah selanjutnya, invasi Ukraina oleh Rusia menyebabkan pembatalan banyak kontrak dan perjanjian internasional. Tidak satu pun dari langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk masa depan.

Jika semua aspek dalam subjudul ini diperhitungkan, kembalinya total ke nol atau pengaturan ulang besar-besaran tidaklah jelas. Produksi barang dan jasa di seluruh dunia, seperti yang ditunjukkan dalam diagram, terus berlangsung dengan kecepatan yang lebih besar atau lebih kecil. Meskipun demikian, akan ada banyak pertimbangan di masa mendatang terkait pemikiran baru tentang perilaku, kontrak, rantai pasokan, dan banyak lagi. Ada satu masalah yang akan tetap dihadapi semua orang. Ekonomi-ekonomi terkemuka akan didorong oleh masalah lain di masa depan, yaitu pemanasan global dan emisi CO₂. Ini mungkin menjadi ujian kekuatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini,



para pembuat kebijakan memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa tahun mendatang dalam hal persuasi.

2.8 KESIMPULAN

COVID-19 dan perang di Ukraina telah memicu banyak hal. Terkait dengan Bank Sentral Eropa, telah ditunjukkan bahwa persyaratannya cukup besar. Ini berkaitan dengan emisi CO₂ dan pemanasan global. Persyaratan bagi negara-negara Uni Eropa, perusahaan, dan bank sangat besar. Mereka sangat sibuk dengan situasi pencari suaka, inflasi, dan kenaikan suku bunga, termasuk proses transformasi dan kenaikan biaya energi. Kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan oleh ECB berdampak negatif pada para pemangku kepentingan yang disebutkan di atas. Selain itu, perang melawan Ukraina masih berlangsung.

Meskipun demikian, bidang aksi ini yang harus dilakukan di masa depan sangat penting bagi generasi umat manusia yang akan datang. Negara-negara industri akan mendominasi tantangan ini di tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, negara-negara berkembang masih jauh dari mengendalikan masalah CO₂. Secara khusus, Tiongkok menganggap dirinya sebagai pasar berkembang, dengan tujuannya untuk mendapatkan keringanan terkait kebijakan iklim dunia. Tantangan terbesar bagi semua orang adalah risiko multikompleks yang muncul.

Hal-hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Bab 3, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko geopolitik, risiko ekonomi, risiko moneter, klaim teritorial, penegakan doktrin sendiri, klaim dominasi dunia atas bentuk pemerintahan sendiri, diktator yang tidak dapat diprediksi, ketidakpatuhan terhadap perjanjian masa lalu, tantangan bencana ekologis yang disebabkan oleh pemanasan global, inflasi, pandemi, dan perang. Semua risiko ini saat ini saling berinteraksi dan menyebabkan perubahan dan tantangan besar. Karena krisis dan tantangan besar saat ini, perebutan supremasi masih berlangsung. Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi ujian kekuatan politik domestik antara Partai Republik dan Demokrat. Hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan domestik dan keterbatasan kemampuan dalam kebijakan luar negeri. Negara-negara Uni Eropa juga tidak bersatu di dalam diri mereka sendiri. Arus politik yang berbeda menghambat pengambilan keputusan dan mencegah terbentuknya front persatuan dalam menghadapi ekonomi-ekonomi utama.

Semua ini menunjukkan bahwa tatanan dunia sedang dibentuk ulang. Pertama dan terutama, kemungkinan besar China yang akan berupaya untuk mendominasi dunia baru. Tidak seperti Rusia, yang mencoba mendorong perubahan melalui perang, China dapat diprediksi. Berbeda dengan Rusia, Tiongkok terus berkembang secara konsisten. Tiongkok telah menyusun rencana multi-tahun tentang apa yang ingin dicapainya, dan akibatnya, hal ini diketahui oleh kita semua. Jadi, dalam segala hal yang dilakukannya, terdapat transparansi, dan Tiongkok melakukannya dengan terampil.

Mereka bekerja secara diam-diam, tenang, dan berkesinambungan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan dominasi dunianya. Tiongkok mengamankan lahan, industri kunci, teknologi, dan lokasi di negara-negara penting di dunia. Dalam konteks ini, kita dapat berbicara tentang titik balik dalam hubungan internasional kekuatan-kekuatan terpenting di dunia. Hal ini berarti bahwa banyak perubahan sedang terjadi saat ini, yang pada gilirannya menyebabkan



tindakan yang berbeda oleh para pemimpin individu di ekonomi-ekonomi utama. Berdasarkan analisis dalam karya ini, Tiongkok memiliki peluang bagus untuk menentukan arah di masa depan. Sekarang setelah hal ini diketahui oleh kita semua, dapat diasumsikan bahwa langkah-langkah akan diinisiasi oleh negara-negara ekonomi terkemuka. Tujuannya adalah untuk menstabilkan dan menyeimbangkan dunia. Jika komunitas global tidak berhasil dalam hal ini, hasilnya akan berupa Great Reset dan tatanan ekonomi global baru.



BAB 3

PELUANG & TANTANGAN GLOBAL

3.1 PENDAHULUAN

Untuk menentukan awal globalisasi, perlu untuk memahami dan mendefinisikan proses ini. Bukti bahwa globalisasi telah ada sejak zaman dahulu kala dapat ditemukan dalam migrasi dan penyebaran tanaman dan ternak di seluruh dunia, dan dalam fakta bahwa manusia menggunakan salah satu dari dua sistem penulisan, yaitu, alfabet yang berasal dari Timur Tengah atau ideogram yang berasal dari bahasa Cina. Dalam literatur dunia, periode Belle Époque paling sering dianggap sebagai fase pertama globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. Seluruh rangkaian proses globalisasi mencapai tingkat kematangan yang jelas pada pergantian abad ke-20 dengan pembukaan pasar nasional secara luas untuk perdagangan internasional, perkembangan migrasi massal, dan menghubungkan banyak wilayah dunia yang sebelumnya terisolasi, menggunakan jaringan komunikasi dan transportasi yang berbasis pada telegraf, kereta api, dan transportasi maritim.

Ekspansi intensif negara-negara Eropa ke bagian lain dunia menghilangkan isolasi ekonomi, politik, dan budaya mereka. Definisi lain dari fase pertama termasuk apa yang disebut fase awal antara tahun 1750 dan 1875 dan munculnya "imajinasi global" pada abad ke-18 dan globalisasi awal antara tahun 1850 dan 1950. Teori lain menyatakan bahwa asal usul globalisasi terletak pada runtuhnya tatanan internasional bipolar yang membagi dunia menjadi lingkup pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dan munculnya tatanan unipolar, yang menurutnya dunia lahir pada tahun 1989 setelah runtuhnya Tembok Berlin.

Terdapat juga perbedaan mengenai fase-fase berturut-turut dalam sejarah globalisasi. Tabel 3.1 menunjukkan fase-fase globalisasi yang paling sering digunakan oleh para ahli di bidang ini. Terdapat banyak definisi globalisasi dalam literatur yang kaya tentang subjek ini. Globalisasi adalah sebuah proses yang sulit didefinisikan secara jelas karena kompleksitas, dimensi, dan sifatnya yang beragam, serta manifestasi dan konsekuensi yang dihasilkannya. Sulit untuk diukur dan tidak memiliki batasan yang jelas. Kesulitan dalam mendefinisikan globalisasi secara menyeluruh terutama disebabkan oleh fakta bahwa globalisasi melampaui ilmu-ilmu sosial (ekonomi dan keuangan, geografi sosial-ekonomi dan manajemen spasial, ilmu keamanan, komunikasi sosial dan ilmu media, ilmu politik dan administrasi, ilmu manajemen dan kualitas, ilmu hukum, ilmu sosiologi, pedagogi, hukum kanon, dan psikologi). Para ahli di bidang ini sering merujuk pada definisi R. Robertson, yang menyatakan bahwa globalisasi adalah "sekumpulan proses yang membentuk satu dunia". Dalam pandangan ini, globalisasi pada dasarnya adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memperkecil waktu dan budaya. Dalam refleksinya, Robertson menekankan pentingnya dimensi sosial globalisasi, meskipun definisinya tentang globalisasi cukup universal. Dalam literatur Polandia, definisi Zygmunt Bauman sering dikutip.

Menurut Bauman, globalisasi adalah suatu keadaan yang digerakkan oleh kekuatan anonim yang beroperasi di ruang hampa "tanah tak bertuan" dengan modal ekstrateritorial



yang memberikan tekanan yang tidak dapat ditolak oleh negara bangsa mana pun. Oleh karena itu, globalisasi disamakan dengan pencabutan hak waris. Pencabutan hak waris merampas kekuasaan otonom suatu negara dan akibatnya tunduk pada kekuatan pasar global. Karena itu, globalisasi adalah fenomena yang telah menciptakan Kekacauan Dunia Baru daripada Tatanan Dunia Baru di mana pemikiran tradisional dalam hal ekonomi nasional adalah fiksi.

Tabel 3.1 Fase-fase globalisasi.

Tokoh	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Roland Robertson	1750–1875 Fase Awal (<i>Incipient phase</i>)	1875–1925 Fase Lepas Landas (<i>Take-off phase</i>)	1925–1969 Fase Perjuangan Hegemoni (<i>Struggle-for-hegemony phase</i>)	Mulai 1969 Fase Ketidakpastian (<i>Uncertainty phase</i>)
Jan Scholte	Hingga 1800 Imajinasi Global	1850–1950 Globalisasi Awal	Mulai 1960 Globalisasi Skala Penuh	—
Clyde Prestowitz	1425–1947	1947–2000	Mulai 2000	—

Globalisasi mengalami percepatan pesat pada tahun 1990-an, yang tidak diragukan lagi menghasilkan karakter spesifiknya di dunia kontemporer.

globalisasi sebagai kategori luar biasa dari ilmu ekonomi, sosial, dan politik akan mempertahankan alasan keberadaannya karena gangguan dalam proses tersebut tidak akan mengganggu atau membalikkannya. Hanya biaya dan manfaatnya yang akan didistribusikan secara berbeda. Pergerakan arus dan sumber daya yang menentukan struktur dan dinamika pembangunan sosial-ekonomi akan dibentuk secara berbeda. Semua ini akan penting, tetapi ini hanyalah perubahan kuantitatif yang terjadi dalam kerangka kualitas yang sama. Agar skenario seperti itu mungkin terjadi, evaluasi ulang yang luas dan koordinasi aktivitas umat manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah harus dilakukan. Meninggalkan globalisasi sebagai kategori pembangunan akan membutuhkan penolakan terhadap esensinya, baik dengan kembali ke status quo sebelumnya atau dengan lompatan lain ke masa depan.

Dunia modern, yang ditentukan oleh proses globalisasi, dicirikan oleh pembangunan yang dinamis dan ketidaksetaraan yang tumbuh secara dinamis.

Selain fenomena yang positif bagi peradaban, konflik sosial dengan berbagai asal (agama, etnis, ras, atau ideologi) juga dipengaruhi oleh globalisasi. Terlebih lagi, patologi, seperti terorisme atau kejahatan terorganisir, semakin mendunia. Pasar global tidak berdaya menghadapi faktor-faktor ini. Proses itu sendiri dapat menjadi patologis jika tidak ada negara dan instrumen yang efektif dan terorganisir dengan baik yang dimiliki negara untuk memengaruhi realitas internasional.



Perubahan di banyak pasar bersifat revolusioner, yang membuat globalisasi di abad ke-21 berbeda dari proses integrasi ekonomi dunia di masa lalu. Tatanan dunia "lama" akan segera berakhir, dan kita membutuhkan kebijakan yang tepat yang bertujuan untuk merancang tatanan dunia "baru" sejauh mungkin. Proses ini tidak akan mudah karena besarnya kekuatan yang berperan. Saat ini, ruang untuk kesalahan sangat terbatas, dan kita perlu memahami dengan baik dampak negatif dari tatanan dunia "lama", apa yang telah dihasilkan oleh tatanan tersebut, dan dampak apa yang ditimbulkannya.

Dalam bab ini, para penulis berupaya menganalisis masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Tatanan Dunia Lama dan memberikan ruang untuk refleksi tentang ciri-ciri Kebijakan Ekonomi Internasional yang diperlukan untuk pengembangan Tatanan Dunia Baru.

Pembahasan ini membahas proses sosial-ekonomi global dalam kaitannya dengan Tatanan Dunia Baru. Pembahasan ini menyajikan aspek-aspek terpilih mengenai peluang dan ancaman terhadap proses sosial-ekonomi global di dunia pada abad ke-21.

Pertanyaan pembahasannya adalah sebagai berikut: Apakah peluang dan ancaman dari proses sosial-ekonomi global berperan dalam terciptanya Tatanan Dunia Baru?

Pertanyaan pembahasan spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Peluang dan ancaman apa yang menyertai proses globalisasi?
2. Apa dampak utama dari ketidaksetaraan sosial-ekonomi di dunia interkoneksi global?

Dua tesis akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tesis-tesis ini menentukan ruang lingkup pembahasan teoretis dan pembahasan empiris.

1. Peluang dan ancaman globalisasi modern tidak terdistribusi secara merata. Globalisasi memungkinkan beberapa negara, wilayah, kelompok sosial dan profesional, serta individu untuk berkembang pesat dan pada saat yang sama menciptakan hambatan bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik bagi yang lain. Globalisasi di abad ke-21 bersifat asimetris, dengan kekayaan yang tak terhitung dan kemiskinan ekstrem.
2. Dampak globalisasi terhadap tingkat diferensiasi sosial-ekonomi di dalam suatu negara bergantung pada sikap otoritas negara terhadap kondisi global, lamanya waktu mereka berpartisipasi dalam proses global, dan jenis pengaruh global. Diferensiasi pendapatan tumbuh paling cepat dalam hal globalisasi modal dan teknologi di negara-negara yang telah sepenuhnya menyerah pada tekanan global pada tahap pertama pembukaan diri terhadap pengaruh internasional.

Pembahasan ini menggunakan metode teoretis dan empiris, termasuk metode komparatif, metode sistem, metode historis, dan pendekatan hukum institusional. Pembahasan ini juga menggunakan metode yang mensintesis informasi dan pengamatan yang tersebar dan merumuskan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip analisis dan deduksi logis.

3.2 PELUANG DAN ANCAMAN YANG MENYERTA PROSES GLOBALISASI KONTEMPORER

Globalisasi menghadirkan peluang dan ancaman bagi dunia.

Secara umum, globalisasi membawa manfaat bagi negara-negara yang memiliki daya tawar yang kuat, dengan pasar yang reseptif, angkatan kerja yang terdidik, dan sumber

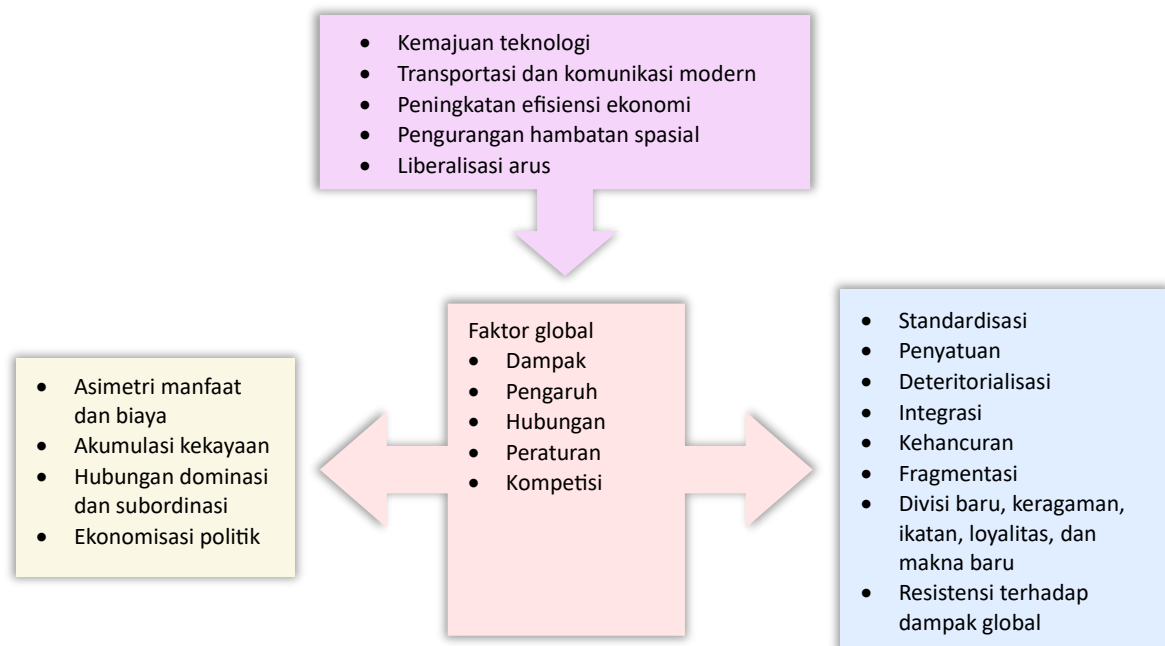


daya energi, serta berlokasi di wilayah-wilayah strategis penting di dunia sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari bantuan negara-negara maju dalam hal bantuan pembangunan dan akses ke pasar teknologi Barat. Faktor penting lainnya termasuk sistem politik yang stabil dan sikap yang tepat dari pihak pemerintah.

Dunia modern, yang berada di ambang dekade ketiga abad ke-21, dibentuk oleh proses globalisasi yang ditandai dengan perkembangan dinamis dan kesenjangan yang tumbuh secara dinamis.

Menurut S. Sadowski dan W. Jakubowski, “globalisasi adalah proses di mana batas-batas negara bangsa mulai kehilangan signifikansinya; pentingnya fenomena ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam perkembangan masyarakat nasional meningkat, dan dampaknya bersifat global”. Thomas Friedmann membagi globalisasi menjadi tiga era besar:

1. periode dari ekspedisi Columbus hingga awal abad ke-19 (globalisasi yang diilhami oleh negara);
2. periode dari awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-20 (dengan perusahaan multinasional sebagai penggerak utama);
3. dari awal abad ke-21 (dengan individu sebagai agen utama proses tersebut).



Gambar 3.1 Inti dari proses globalisasi.

Gambar 3.1 mengilustrasikan esensi proses globalisasi. Dampak dari proses globalisasi modern meliputi:

- kecenderungan integrasi dan disintegrasi (fragintegrasi);
- asimetri dalam pembangunan sosial-ekonomi;
- migrasi tenaga kerja;



- Tingkat NEET (pemuda yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah dan tidak mengikuti pelatihan);
- prekarisasi tenaga kerja.

Tren integrasi dan disintegrasi

Salah satu ciri utama globalisasi adalah mendorong integrasi di satu sisi dan merangsang kecenderungan desentralisasi dan disintegrasi di sisi lain. Kedua tren yang berlawanan ini mengakibatkan penggabungan dunia, menyusutnya planet ini menjadi seukuran desa global, dan membagi panggung internasional menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh terbaik dari hal ini adalah terburu-burunya pembentukan negara-negara bangsa dan peningkatan jumlahnya.

Pada tahun 1945, PBB terdiri dari 51 negara anggota; saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota. Negara anggota termuda adalah Sudan Selatan, yang diterima pada Juli 2011. Selain itu, saat ini terdapat lebih banyak negara daripada sebelum era dekolonisasi dan pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Terdapat pula pandangan umum bahwa proses integrasi di dalam Uni Eropa, NAFTA, dan ASEAN sebenarnya bukanlah alternatif bagi globalisasi karena proses tersebut justru mendukung, bukan menghambat, pembentukan hubungan global yang lebih erat dalam jangka panjang.

Kemampuan untuk memengaruhi keputusan organisasi politik global diperkuat oleh berbagai kelompok lobi, yang pengaruhnya meningkat di era globalisasi baik melalui aktivitas korporasi dan aktivitas ilegal lainnya maupun tekanan menggunakan kekuatan cerdas. Tindakan pengalihan terhadap organisasi internasional juga digunakan oleh kekuatan besar. Ketika mempertimbangkan peluang dan ancaman yang menyertai proses globalisasi kontemporer dalam kaitannya dengan integrasi atau disintegrasi, perlu untuk menyoroti pentingnya lembaga internasional, yaitu PBB dan NATO, yang mana Amerika Serikat telah menjadi penciptanya. Di sisi positif, NATO adalah pusat dari jaringan kemitraan yang luas dan berkembang sebagai sistem aliansi terbesar di dunia, yang saat ini terdiri dari 30 negara. Sekarang dapat dilihat bahwa PBB dan NATO memiliki pengaruh yang menurun terhadap komunitas internasional. Kesimpulannya, setelah periode yang panjang, keseimbangan kekuatan berubah, dengan meningkatnya kekuatan peradaban non-Barat, meskipun Amerika Serikat dan negara-negara NATO masih mendominasi secara militer. Pentingnya pemerintah dan organisasi internasional sebagai lembaga independen semakin menurun. Kekuatan dunia jelas-jelas memaksakan kontrol dan memperluas kekuasaan sekarang. Semua ini berdampak pada melemahnya prinsip-prinsip dasar kebebasan dan hak asasi manusia.

Dorongan disintegrasi yang diprakarsai oleh demokrasi liberal yang mengambil keputusan di bawah pengaruh harapan publik yang diungkapkan tetap merupakan fenomena yang relatif baru. Opini publik memengaruhi keputusan politisi untuk menarik diri, sepenuhnya atau sebagian, dari badan-badan internasional karena sebagian besar masyarakat mendukung tindakan unilateral di bidang-bidang tertentu, yang menimbulkan biaya partisipasi dalam struktur multilateral. Keputusan disintegrasi ditandai dengan tingkat otorisasi demokratis yang cukup tinggi yang mengakibatkan pengurangan kebijakan publik komunitas. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan runtuhnya struktur integrasi di bawah pengaruh dorongan elektoral



referendum yang dipicu oleh keputusan publik negara-negara anggota yang menentang gagasan pendalaman rezim Uni Eropa, yang seharusnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi.

Asimetri dalam pembangunan sosial-ekonomi

Sifat asimetris globalisasi terletak pada kenyataan bahwa liberalisasi transfer modal tidak sepenuhnya disertai dengan pergerakan bebas barang dan tenaga kerja dalam skala global. Secara khusus, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli di bidangnya, terdapat ketidakharmonisan antara pasar modal global yang bebas dan pasar tenaga kerja yang restriktif yang membatasi kemungkinan mempekerjakan penduduk negara-negara miskin di negara-negara kaya, dan dengan demikian memiliki efek anti-egalitarian.

Meningkatnya asimetri sosial-ekonomi pada skala global dapat menyebabkan berbagai risiko, seperti meningkatnya bahaya sosial, potensi psikologis untuk frustrasi dan iri hati, dan melemahkan rasa keadilan yang mendasar. Di masa lalu, sebagian besar negara tidak terpengaruh oleh perubahan cepat di pasar lain.

Keamanan terkait dengan perkembangan sosial dan peradaban, sehingga perlu juga dilihat sebagai kebutuhan utama manusia dan lembaga-lembaga yang mereka ciptakan. Namun, dampak globalisasi terhadap keamanan global tidak jelas dan searah. Terlepas dari bahaya yang ditimbulkan oleh semakin dalamnya berbagai kesenjangan, proses ini berkontribusi pada munculnya banyak kontradiksi etnis dan perdagangan, memengaruhi transfer konflik lokal atau regional ke tingkat global, dan mendorong munculnya hubungan dan kelompok sosial (teroris) lintas batas. Di sisi lain, beberapa ahli globalisasi berpendapat bahwa jalinan saling ketergantungan di seluruh dunia yang semakin erat membuat penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa internasional menjadi usang.

Migrasi tenaga kerja

Migrasi tenaga kerja terjadi ketika warga negara asal pindah untuk tinggal lebih lama atau permanen (emigrasi) dan ketika orang menetap di negara tujuan (imigrasi).

Migrasi internasional telah terjadi sejak lama, tetapi sifat, ukuran, arah, penyebab, dan konsekuensinya terus berubah. Penyebab migrasi berakar pada tingkat pertumbuhan penduduk, proporsi kaum muda dalam populasi dan pendidikan mereka, kesempatan kerja, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, sarana komunikasi, transportasi, kebebasan manusia, dan tingkat urbanisasi. Tantangan sebenarnya adalah mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan strategi untuk membendung migrasi yang tidak diinginkan ke Utara dan mendorong pembangunan ekonomi di Selatan dalam konteks globalisasi secara keseluruhan. Sampai tahun 2007, emigrasi dipandang dalam dua cara:

- Sebagai dampak positif karena penurunan tingkat pengangguran di negara asal, perekrutan pekerja baru, dan kemungkinan kenaikan upah;
- Sebagai dampak negatif karena ancaman eksodus staf yang berkualitas dan dengan demikian hilangnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan mereka.

Demikian pula, imigrasi diperlakukan dalam dua cara:

- Sebagai dampak positif karena potensi untuk mengurangi kekurangan karyawan di sektor-sektor ekonomi tertentu;



- Sebagai Dampak Negatif Karena Biaya Produksi Yang Lebih Rendah Dan Upah Yang Lebih Rendah Untuk Staf Lokal.

Kiriman uang migran dari negara berkembang memainkan peran penting dalam neraca perdagangan negara asal mereka, di mana nilai kiriman uang tumbuh lebih cepat daripada nilai ekspor (Mesir, Maroko, dan Suriah).

Terlepas dari bagaimana emigrasi dan imigrasi dipandang, keduanya secara langsung terkait dengan proses sosial-ekonomi globalisasi. Keduanya muncul sebagai dampak dari perbatasan terbuka dan memiliki dampak langsung pada ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Di Polandia, misalnya, warga negara Ukraina merupakan kelompok imigran terbesar, yang harus diperhitungkan dalam perencanaan strategi manajemen dan penerapan praktis budaya dan etika dalam proses tersebut. Jumlah izin kerja yang dikeluarkan untuk warga negara asing di Polandia terus meningkat. Dari 457.000 warga negara asing yang memiliki izin tinggal yang berlaku pada 1 Januari 2021, kelompok terbesar terdiri dari warga negara dari negara-negara berikut:

- Ukraina – 244,2 ribu;
- Belarusia – 28,8 ribu;
- Jerman – 20,5 ribu;
- Rusia – 12,7 ribu;
- Vietnam – 10,9 ribu;
- India – 9,9 ribu;
- Italia – 8,5 ribu;
- Georgia – 7,9 ribu;
- Tiongkok – 7,1 ribu;
- Inggris Raya – 6,6 ribu.

Peningkatan terbesar jumlah warga asing yang menetap di Polandia, dibandingkan dengan tahun 2020, diamati pada warga negara dari negara-negara berikut :

- Ukraina – sebanyak 29,4 ribu;
- Belarus – sebanyak 3,2 ribu;
- Georgia – sebanyak 2,4 ribu;
- Moldova – sebanyak 1,2 ribu;
- Korea Selatan – sebanyak 0,5 ribu.

Saat ini, dua pertiga migran yang memasuki Eropa secara ilegal tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan internasional. Namun, pengembalian mereka ke negara asal menimbulkan kesulitan besar. Banyak ahli percaya bahwa hal ini justru menarik migran ilegal. Sebagian besar dari mereka akan tetap berada di Uni Eropa untuk waktu yang lama, yang secara terukur akan berujung pada proses-proses yang tidak diinginkan lebih lanjut di Area Schengen, seperti tinggal ilegal dan bekerja ilegal.

Tingkat NEET (pemuda yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah dan tidak mengikuti pelatihan)

Definisi resmi yang mengikat tentang tingkat pemuda yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah dan tidak mengikuti pelatihan (NEET) dapat ditemukan dalam Peraturan Parlemen



Eropa dan Dewan (UE) No. 1304/2013 tanggal 17 Desember 2013. Peraturan tersebut menunjukkan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan pemuda sebagai generasi NEET:

- Orang-orang yang tidak bekerja (pengangguran atau tidak aktif secara ekonomi);
- orang-orang yang tidak sedang menempuh pendidikan (tidak mengikuti pendidikan formal);
- orang-orang yang tidak mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

Kriteria ini menunjukkan bahwa orang-orang NEET sepenuhnya menarik diri dari pasar kerja dan banyak kegiatan sosial, misalnya karena kurangnya pendapatan dan terbatasnya kontak sosial yang biasanya terjadi di tempat kerja atau belajar.

Pembahasan menunjukkan bahwa orang-orang NEET tidak menggunakan waktu luang mereka dengan cara yang sama seperti rekan-rekan mereka, meskipun mereka memiliki lebih banyak waktu luang daripada mereka yang bekerja, belajar, mengembangkan diri, atau aktif secara sosial. Mereka tidak menggunakan budaya; mereka lebih jarang membaca buku dan tidak mengambil bagian aktif dalam masyarakat.

Pada tahun 2020, 22,4% anak muda di dunia menganggur; mereka juga tidak belajar atau mengikuti kursus atau pelatihan apa pun. Perempuan menyumbang dua dari tiga orang ini dan laki-laki – hanya satu. Dalam sebuah dokumen yang membahas NEET di seluruh dunia pada tahun 2020, Organisasi Buruh Internasional menguraikan tindakan yang diusulkan dan bagaimana tindakan tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan pengangguran kaum muda. Organisasi Buruh Internasional telah memperkenalkan pembagian lebih lanjut dari kategori NEET:

- NEET yang putus asa;
- NEET dengan tanggung jawab rumah tangga;
- NEET dengan disabilitas;
- NEET heterogen (lainnya).

Kelompok NEET ada terutama karena ketidaksetaraan kesempatan.

Prekarisasi pekerjaan

Dengan proses globalisasi yang sedang berlangsung, pekerjaan yang stabil dan permanen mulai menghilang di masyarakat, yang terutama terkait dengan perubahan strategi perekrutan. Para pemberi kerja semakin mempertimbangkan bentuk-bentuk pekerjaan fleksibel yang sebelumnya tidak lazim, di mana mereka dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan modal dan menjelaskan hal ini dengan meningkatnya ketidakamanan finansial dan sosial karyawan. Telah ditunjukkan bahwa prekarisasi proses kerja terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi, peningkatan pentingnya pekerjaan tidak berwujud, dan pengurangan stok dan skala penggunaan perlindungan hukum bagi pekerja. Prekariat disajikan sebagai kelompok sosial-ekonomi baru yang berbeda yang muncul sebagai respons terhadap pasar tenaga kerja yang tidak stabil, kurangnya pekerjaan yang sesuai, dan kebutuhan untuk mengambil pekerjaan yang tidak berkorelasi dengan aspirasi karir yang dihasilkan dari pendidikan yang diperoleh.

Prekariat adalah orang-orang yang menderita karena kurangnya tujuh bentuk jaminan terkait tenaga kerja “yang dituntut oleh kaum sosial demokrat, partai buruh, dan serikat



pekerja untuk kelas pekerja atau proletariat industri setelah Perang Dunia II, memperlakukannya sebagai program kewarganegaraan era industri”. Bentuk-bentuk jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasar tenaga kerja – peluang untuk pekerjaan yang menguntungkan;
2. Pekerjaan – perlindungan terhadap pemecatan, penetapan peraturan perekrutan dan pemecatan, dan pengenaan sanksi kepada mereka yang menyimpang dari aturan dan kebijakan perusahaan;
3. Pekerjaan – mempertahankan posisi dalam pekerjaan dan kemungkinan kemajuan sosial dalam hal pendapatan dan status;
4. Keselamatan kerja – perlindungan terhadap kecelakaan dan penyakit di tempat kerja;
5. Reproduksi keterampilan – kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui magang atau pelatihan;
6. Pendapatan – memastikan pendapatan yang terlindungi, memadai, dan berkelanjutan;
7. Representasi – memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyampaikan pendapat mereka, misalnya, melalui serikat pekerja.

Untuk mengatasi prekarisasi, G. Standing mengusulkan pendapatan terjamin universal yang dapat meminimalkan pengucilan sosial dan ekonomi. Pendapatan terjamin G. Standing akan terdiri dari pembentukan dana negara yang terdiri dari dana yang dikumpulkan, upeti, dan pendapatan yang dikenai pajak dari pensiun, termasuk paten dan hak cipta, serta bentuk pendapatan lain yang tumbuh pesat. G. Standing percaya bahwa pendapatan terjamin harus dibayarkan dari dana negara. Ia juga menekankan bahwa dana yang dikumpulkan harus dikelola secara demokratis, independen dari pemerintah, dan bahwa dana tersebut tidak boleh dibentuk dengan mengorbankan kenaikan pajak masyarakat atau dengan menghilangkan bentuk-bentuk bantuan sosial lainnya. Pendapatan dasar yang dijamin akan menghapus tunjangan. Setiap wanita di atas usia 16 atau 18 tahun berhak menerimanya, dan anak-anak di bawah usia tersebut akan menerima setengah dari jumlah tersebut.

Dalam hal migran, mereka hanya berhak menerimanya setelah mereka menghabiskan periode tertentu yang telah ditentukan di negara tersebut. Ia berpendapat bahwa “orang-orang yang memiliki rasa aman dasar akan bekerja lebih banyak, bukan lebih sedikit. Mereka lebih termotivasi dan tidak jatuh ke dalam perangkap kemiskinan. Pendapatan yang dijamin meningkatkan kecenderungan untuk bekerja”.

3.3 DAMPAK KETIDAKSETARAAN SOSIAL-EKONOMI DI DUNIA INTERKONEKSI GLOBAL

Pada awal dekade ketiga abad ke-21, sejumlah perkembangan penting telah terjadi, tidak hanya di Eropa tetapi juga di seluruh dunia. Perubahan-perubahan ini telah dan akan terus berdampak signifikan pada interkoneksi sosial-ekonomi global.

Ketidaksetaraan yang dipahami sebagai kebalikan dari kesetaraan dapat berupa ekonomi (materiil), sosial, pekerjaan, pendidikan, digital, hukum, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Dalam teori ekonomi, ketidaksetaraan sosial-ekonomi merupakan bagian integral dari fungsi ekonomi dan masyarakat.



Penyebaran teori ini menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar tentang apa yang diprediksi sebagai dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan di negara maju dan negara berkembang. Teori tersebut memprediksi bahwa globalisasi dapat memiliki efek yang menguntungkan, tidak menguntungkan, atau tidak signifikan terhadap ketidaksetaraan pendapatan atau penghasilan.

Ketidaksetaraan adalah pelanggaran terhadap martabat manusia; itu adalah penghalang terhadap kapasitas bawaan setiap orang untuk berkembang. Menekankan bahwa ketidaksetaraan memiliki banyak bentuk dan berbagai konsekuensi (kematian dini, kemiskinan, stres, kecemasan, rasa tidak aman, kurang percaya diri, kurangnya kesempatan hidup, dll.). Untuk memahami ketidaksetaraan, perlu dipahami bahwa orang berbeda dalam banyak dimensi dan hal ini menyebabkan konflik. Untuk menghindari konflik, dimensi-dimensi ini harus ditentukan. Dalam pembahasannya, peraih Nobel tersebut menunjukkan, agak kontroversial, bahwa ada juga argumen untuk keberadaan ketidaksetaraan. Ia percaya bahwa ketidaksetaraan memiliki ciri-ciri berikut:

- Tidak dapat dihindari untuk mempertahankan dan menjaga motivasi untuk bekerja dan berwirausaha;
- Penting bagi keputusan-keputusan sosial penting untuk dibuat oleh sekelompok kecil orang dengan kompetensi yang tepat (prinsip ini tidak dapat diterapkan tanpa ketidakseimbangan kekuasaan).

Dalam sosiologi, isu ketimpangan menempati posisi sekunder hingga tahun 1960-an, ketimpangan secara resmi diakui sebagai subjek pembahasan sosiologis yang utuh.

Tren menuju pelebaran ketimpangan sosial-ekonomi di sebagian besar negara saat ini merupakan salah satu sumber ketegangan utama dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena warisan ketidaksetaraan sosial-ekonomi menghambat pencapaian tujuan-tujuan terpenting Uni Eropa, baik tujuan sosial maupun ekonomi. Asumsi ideologis yang didasarkan pada arus ideologi elitis, meritokratis, dan egaliter mengkondisikan munculnya tiga pendekatan terhadap ketidaksetaraan ini. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- *Melegitimasi ketidaksetaraan ekonomi*: Menurut teori ini, ekonomi perlu didesosialisasikan dan ketidaksetaraan secara etis dianggap adil, meskipun keadilan etis tidak dapat dinilai secara abstrak dari norma dan pola yang diadopsi oleh masyarakat. Dalam hal ini, harapan keadilan direduksi menjadi hak dan hak milik, dan legitimasi ketidaksetaraan membantu individu kaya karena membenarkan kekayaan mereka.
- *Ketidaksepakatan dengan ketidaksetaraan*: Teori-teori yang berkaitan dengan ketidaksepakatan dengan ketidaksetaraan dalam fungsi masyarakat dan ekonomi tidak berhasil dan didiskreditkan setelah runtuhnya sistem komunis. Teori-teori tersebut ternyata merupakan utopia dan tidak mengarah pada keadilan sosial yang lebih besar.
- *Penerimaan bersyarat terhadap ketidaksetaraan ekonomi*: Teori-teori ini membenarkan keberadaan ketidaksetaraan hanya dengan asumsi bahwa kondisi-kondisi berikut dijamin, antara lain: minimum ekonomi, kesempatan yang sama, dan



peningkatan posisi individu yang paling rentan. Teori-teori ini memberikan perhatian yang sama pada ketidaksetaraan kepemilikan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab individu pengambil keputusan atas keputusan, komitmen, bakat, atau upaya mereka. Dalam pendekatan ini, ketidaksepakatan dengan meningkatnya ketidaksetaraan menjadi jelas. Terlalu banyak ketidaksetaraan ekonomi mengakibatkan terhambatnya pembangunan sosial-ekonomi.

“Tergantung pada asumsi ideologis, ketidaksetaraan sosial-ekonomi dianggap sebagai dasar berfungsinya sistem sosial atau sebagai masalah yang tidak diinginkan”. Globalisasi menyebabkan peningkatan kesenjangan pendapatan antara negara-negara termiskin dan terkaya. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hampir 60 tahun yang lalu, pada tahun 1965, pendapatan per kapita negara-negara terkaya (G7) dua kali lebih tinggi daripada pendapatan per kapita tujuh negara termiskin. Rasio pendapatan per kapita negara terkaya dan termiskin adalah 50:1. Pada tahun 2009, kesenjangan pendapatan antara negara terkaya dan termiskin meningkat menjadi 74:1.

Tingkat ketidaksetaraan di Uni Eropa sangat bervariasi. Tentu saja tidak mungkin untuk mengenali satu “model Eropa” untuk kesenjangan pendapatan. Selain itu, perbedaan dalam skala dan efisiensi redistribusi penting dalam konteks ketidaksetaraan dan arah perubahan ketidaksetaraan. Situasi di Selatan tidak akan membaik dalam jangka pendek oleh lembaga-lembaga internasional penting, permohonan bantuan, sumber daya untuk bantuan, dan migrasi orang miskin dari Selatan ke negara-negara kaya di Utara. “Dunia telah terpecah; telah menjadi multipolar dan penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, dengan pecahnya konflik lokal dan ketidakamanan yang meluas”.

Ketidaksetaraan sosial-ekonomi tidak hanya melemahkan kohesi sosial dalam dimensi sosial (ketidaksetaraan yang terlalu besar menimbulkan biaya sosial dan fenomena sosial negatif) dan dimensi ekonomi (ketidaksetaraan yang terlalu besar berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan) tetapi juga memengaruhi aspek ekologis pembangunan berkelanjutan karena ketidaksetaraan meningkatkan tekanan pada sumber daya yang terbatas dan kondisi lingkungan. Untuk bergerak menuju pembangunan pro-lingkungan, investasi dalam sumber energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemulihan bencana lingkungan diperlukan. Diperkirakan bahwa peningkatan tingkat investasi global antara tahun 2015 dan 2050 dari 24% menjadi 36% sebagai bagian dari PDB akan diperlukan untuk mencapai hal ini. Peningkatan investasi akan membutuhkan pengurangan pengeluaran konsumen, dan ini membawa risiko resistensi dan ketegangan sosial yang meningkat seiring dengan meningkatnya ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Ketidaksetaraan muncul sebagai akibat dari struktur sosial dalam masyarakat serta distribusi pendapatan dan prestise sosial yang tidak merata. Salah satu akar penyebab ketidaksetaraan adalah hak istimewa. Hak istimewa hanya dapat diterima jika bersifat sementara. Pertimbangan kontemporer yang berkaitan dengan ketidaksetaraan, termasuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi, harus lebih berfokus pada pertumbuhan kuantitatif dan kualitatifnya.



Penilaian yang optimis namun hati-hati tentang keberlanjutan prinsip-prinsip substantif dasar tatanan dunia kontemporer (sentrisme negara dan liberalisme ekonomi) dan kekhawatiran yang lebih serius tentang tantangan terhadap prinsip prosedural dasar multilateralisme berbasis aturan. Alasan serius untuk khawatir tentang masa depan tatanan dunia. Tatanan dunia masih cukup kokoh. Optimisme yang hati-hati bahwa tatanan dunia akan bertahan. Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa tatanan dunia telah berulang kali terbukti tangguh dalam menghadapi tantangan serius. Tatanan dunia dan prinsip-prinsip dasarnya berada dalam keadaan krisis permanen sepanjang era pasca-perang dan berhasil berubah dan beradaptasi dari dalam. Dalam setiap dekade, dimulai pada tahun 1950, peristiwa-peristiwa berikut terjadi:

- Kegagalan institusional yang serius, misalnya, kegagalan IMF untuk melaksanakan tugas awalnya dalam mengelola nilai tukar tetap dan kegagalan berkala dan berulang PBB dalam mengelola masalah keamanan kolektif;
- Amandemen ad hoc, misalnya, Rencana Marshall atau intervensi NATO di Balkan;
- Keruntuhan sebagian, misalnya, berakhirnya sistem moneter emas-dolar Bretton Woods pada tahun 1971–1973;
- Pengalihan fungsi lembaga untuk misi baru, seperti kebangkitan IMF sebagai pemberi pinjaman krisis global sejak tahun 1980-an dan seterusnya;
- Periode panjang di mana lembaga-lembaga kunci menjadi tidak aktif, misalnya, stagnasi negosiasi WTO, atau mengalami penurunan jangka panjang, misalnya, Bank Dunia saat ini dibandingkan dengan penyedia bantuan luar negeri lainnya.

Menurut penulis Krisis Ketidaksetaraan: Menggeser Kekuasaan untuk Kontak Ekososial Baru, tidak ada contoh yang lebih baik tentang

bagaimana tatanan dunia kita saat ini cenderung pada ketidakadilan selain pandemi COVID-19, yang begitu meluas dan dialami secara berbeda dari orang ke orang dan tempat ke tempat. Periode sejak virus pertama kali terdeteksi pada awal tahun 2020 ditandai dengan banyak kematian, penurunan ekonomi yang parah, kemunduran banyak indikator pembangunan manusia, dan peningkatan kemiskinan secara keseluruhan.

Namun,

hal ini juga membawa manfaat signifikan bagi sejumlah kecil orang karena konsentrasi kekayaan di puncak telah meningkat sejak awal pandemi. Peningkatan penderitaan manusia yang ekstrem seperti itu, disertai dengan peningkatan keuntungan dan hak istimewa yang sama ekstremnya, adalah keluhan yang menyedihkan yang terus berulang dalam sejarah krisis baru-baru ini dan semakin lantang setiap tahunnya.

Dengan berfokus terutama pada ketidaksetaraan, para penulis laporan tersebut berasumsi bahwa sistem di mana krisis kesehatan global dapat menggandakan kekayaan sepuluh orang terkaya di dunia sementara menjerumuskan lebih dari 120 juta orang ke dalam kemiskinan



ekstrem menunjukkan keretakan dalam kontrak sosial, meninggalkan terlalu banyak orang di belakang dan gagal melindungi planet ini.

Baru-baru ini pada tahun 2015, dunia tampaknya menuju ke jalur yang lebih optimis. Komunitas internasional yang menangani pembangunan menyepakati agenda ambisius untuk “mengubah dunia kita” dengan visi pembangunan yang luas dan transformatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diabadikan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Berbeda dengan era Tujuan Pembangunan Milenium, agenda baru ini mencakup komitmen yang jelas untuk mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 10. Dengan kurang dari tujuh tahun tersisa untuk mencapai tujuan ini, konteks untuk mencapai visi Agenda 2030 tidak pernah lebih menakutkan karena sejumlah tantangan mendesak, seperti yang disebutkan di bawah ini:

- Kemajuan yang berbeda dalam pengurangan kemiskinan;
- Tingkat ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan yang tinggi dan terus meningkat;
- Keberlanjutan ketidaksetaraan multidimensi lainnya, termasuk bentuk-bentuk berbasis gender;
- Krisis iklim dan kerusakan lingkungan;
- Ketidakpastian dan konflik;
- Migrasi dan pengungsi paksa;
- Pekerjaan yang tidak tetap;
- Perubahan demografis dan teknologi yang semakin cepat.

Sebagian besar negara bergumul dengan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di bidang yang serupa. Ini termasuk mengatasi kesenjangan, yang sangat penting bagi kepentingan pemerintah dan bukan hanya individu yang terkena dampaknya karena fenomena ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Solusi utamanya adalah sebagai berikut:

- Investasi dalam modal manusia;
- Investasi dalam infrastruktur;
- Investasi dalam modal sosial.

Pada awal dekade ketiga abad ke-21, mungkin tampak bahwa dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dinamis serta dampak globalisasi yang meluas yang menyebabkan percampuran antarbudaya yang tak terhindarkan, hak-hak warga negara yang tidak setara atau contoh perlakuan yang tidak setara tidak ada atau tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Namun, ini tidak demikian. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi justru merupakan salah satu masalah sosial paling serius yang dihadapi generasi modern.

Sebuah kolom yang diterbitkan oleh Institute of Civil Affairs mengkonfirmasi prediksi dari sebuah laporan yang disusun oleh Dewan Intelijen Nasional AS berjudul *Global Trends 2025: A Transformed World*, yang menyatakan bahwa dunia multipolar dengan banyak pusat pemerintahan sedang muncul, diliputi oleh masalah global yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkup satu negara, bahkan negara sekuat Amerika Serikat.



3.4 RINGKASAN

Penilaian terhadap peluang dan ancaman dari proses sosio-ekonomi bervariasi. Namun, hal tersebut tentu memainkan peran penting dalam penciptaan Tatanan Dunia Baru. Tidak sedikit pendukung globalisasi dan penentang yang terang-terangan di antara para ahli di bidang ini. Refleksi tentang isu-isu yang dibahas dalam bab ini tentu tidak lengkap. Refleksi ini hanya mewakili sebagian dari diskusi tentang subjek tersebut.

Ada banyak peluang dan ancaman dari proses sosio-ekonomi global. Manfaat sosial potensial yang paling nyata mencakup berbagai tawaran bagi masyarakat baik dalam bidang material maupun spiritual. Masyarakat kontemporer memiliki kebebasan memilih dan akses informasi yang semakin meningkat, dapat bergerak secara sosial dan spasial, dan dapat membentuk kehidupan mereka sesuai keinginan mereka. Kontak sosial tidak lagi bergantung pada lokasi. Peluang ekonomi potensial yang paling nyata bagi negara-negara meliputi masuknya modal asing, akses informasi, pengembangan teknologi modern, perluasan penawaran produk di pasar, kebangkitan investasi, lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat dari proses sosial-ekonomi global tidak terdistribusi secara merata. Globalisasi perdagangan mengurangi kesenjangan pendapatan sementara globalisasi modal dan teknologi berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Efek globalisasi dapat berupa peningkatan kekayaan negara dan masyarakat maupun pengayaan negara dengan kemiskinan sebagian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan standar hidup mayoritas penduduk. Perusahaan-perusahaan kaya yang berinvestasi di negara-negara miskin sering menghadapi masalah sosial-ekonomi (konflik sosial, utang nasional, kurangnya potensi ekonomi sendiri dengan lingkungan yang terdegradasi, dll.).

Dunia saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan organisasi internasional sebagai akibat dari proses globalisasi dan peran negara modern telah berkurang.

Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar adalah kepentingan semua negara. Namun, kemungkinan untuk membatasi munculnya kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat bergantung pada banyak aspek. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi bukan hanya masalah dan ranah dekade ketiga abad ke-21; ini adalah dilema yang telah diatasi di masa lalu. Saat ini, peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan di dalam suatu negara dimainkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk membentuk kembali dunia agar memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut berisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target terkait yang harus dicapai oleh semua pihak (pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, sektor ilmiah dan bisnis, dan warga negara). Tujuan-tujuan t



BAB 4

REALISME EKONOMI DAN TATANAN DUNIA BARU

4.1 PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi masyarakat dunia menyediakan tiga bentuk fundamental reproduksi sosial: ekonomi alamiah, ekonomi pasar (juga disebut ekonomi barang atau ekonomi uang-barang), dan ekonomi terencana (ekonomi yang dikendalikan secara terpusat, ekonomi komando dan kuota). Ketiganya berbeda dalam tujuan agen ekonomi dan sifat hubungan di antara mereka. Ekonomi alamiah dalam skala makroekonomi adalah masa lalu, dan ekonomi terencana masih beroperasi di beberapa wilayah dunia saja. Dunia modern didominasi oleh ekonomi pasar sebagai sistem ekonomi dan mode pengelolaannya didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Dalam bahasa sehari-hari, hal ini disamakan dengan ekonomi kapitalis. Dalam realitas sosial-ekonomi, hal ini beroperasi dalam berbagai bentuk ekonomi nasional yang dibentuk berdasarkan berbagai konsep dan model pembangunan, yang pada berbagai tingkat berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang muncul dari gagasan Tatanan Dunia Baru yang diadopsi.

4.2 TANTANGAN TATANAN DUNIA BARU

Konsep Tatanan Dunia Baru (NWO; Latin: *Novus Ordo Mundi* atau *NOM*) telah menimbulkan banyak kontroversi, terutama sebagai akibat dari manipulasi politik dan salah tafsir yang disengaja dengan memberikan informasi palsu (berita palsu). Karena aktivitas ini, konsep tersebut termasuk dalam kategori luas teori konspirasi.

Tatanan Dunia Baru kadang-kadang disebut Sistem Dunia Modern atau Great Reset dan sesuai dengan banyak inisiatif historis sebelumnya. Sebagai titik awal, hal ini berkaitan dengan hukum alam, yang memberikan status manusia sebagai makhluk bebas, dan hukum buatan negara (pemerintah dan lembaga-lembaganya), yang melayani dan membantu komunitas manusia.

Terdapat dua teori yang berpusat pada gagasan Tatanan Dunia Baru: (1) teori Francis Fukuyama yang menguraikan tatanan global berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme ekonomi⁶ dan (2) teori Samuel Huntington, sebuah paradigma peradaban yang diidentifikasi dengan Kekacauan Besar, yang membagi tatanan global menjadi peradaban-peradaban individual yang, dengan memperhatikan kepentingan mereka sendiri, menyebabkan konflik dan kekacauan di arena internasional dan bencana global. Upaya untuk melawan tren ini mengarah pada solusi sentralisasi ekonomi global dan penciptaan badan-badan internasional yang kuat dan semakin besar yang secara konsisten membatasi hak dan kebebasan sipil melalui undang-undang yang diperkenalkan untuk keamanan kita, diikuti oleh implementasi teknologi mutakhir untuk pengawasan dan pengendalian kehidupan sosial.

Di sini, Tatanan Dunia Baru dipahami sebagai Agenda 2030 (“Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”) tahun 2015. Agenda tersebut membentuk serangkaian tindakan yang perlu ditangani untuk mencapai pembangunan berkelanjutan



global. Hal ini menunjukkan perlunya memfokuskan upaya komunitas global pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang sesuai dengan tantangan utama dunia saat ini: (1) pemberantasan kemiskinan dan (2) kelaparan; (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi; (7) energi bersih; (13) aksi iklim; (14) kehidupan di bawah air dan (15) di darat; (8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak; (9) pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) pengurangan ketidaksetaraan; (11) kota dan komunitas berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (16) perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat; dan (17) kemitraan untuk tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini saling bergantung dan berfokus pada memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Para penandatangan Agenda (193 Negara Anggota PBB) telah berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut secara global pada tahun 2030 dengan hak untuk menetapkan prioritas mereka sendiri terkait dengan tujuan-tujuan tersebut.

Namun, saat ini terdapat banyak hambatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini setelah ancaman peradaban (seperti yang ditunjukkan pada banyak kesempatan dalam laporan Klub Roma) serta ancaman politik dan militer yang terungkap dalam skala global. Hal ini sebagian besar berkontribusi pada situasi di mana orang mengubah visi mereka untuk masa depan dan mulai menyadari keterbatasan kemajuan, pertumbuhan, dan pembangunan, dan banyak negara di dunia menjadi semakin curiga terhadap proses globalisasi dan regionalisasi sebagai sumber hilangnya kedaulatan, hilangnya kebebasan sipil, dan, dalam kasus ekstrem, penyebab kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan. Selain itu, konsep globalisasi dan regionalisasi yang berbeda berkontribusi pada heterogenisasi dunia. Hal ini bertepatan dengan analisis CIA yang disajikan dalam laporan Dewan Intelijen Nasional, "Tren Global 2025: Dunia yang Berubah", yang memprediksi bahwa dunia semakin multipolar dengan banyak pusat pemerintahan yang, dalam menghadapi masalah global yang semakin besar, tidak dapat menyelesaikannya sendiri atau bersama-sama.

Tinjauan terhadap implementasi tujuan Agenda 2030 dan penilaian yang dirumuskan dalam literatur ilmiah sosial-politik dan ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, menekankan perlunya visi baru tentang Tatanan Dunia Baru. Visi tersebut harus diarahkan untuk menyelesaikan tantangan pembangunan global dunia, yang saat ini ditandai dengan volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi. Semua tantangan ini terikat bersama oleh keharusan untuk mengatasi masalah iklim, lingkungan, dan kesehatan.

Perubahan visi Tatanan Dunia Baru dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyoroti ketergantungan pembangunan ekonomi pada stabilitas lingkungan alam dan iklim serta lingkungan epidemi dan mengungkap kelemahan banyak negara di dunia, termasuk negara-negara yang paling maju, menunjukkan bahwa hegemoni di bidang keuangan, teknologi, dan militer menutupi fakta bahwa mereka sangat tidak efisien.

4.3 MODEL EKONOMI PASAR SEBAGAI POLA UNTUK ORGANISASI EKONOMI NASIONAL

Ekonomi pasar mempertahankan prinsip-prinsip umumnya tetapi pada saat yang sama sangat terdiferensiasi di seluruh dunia dalam hal konsep pembangunan dan mekanisme dasar



funksinya. Hal ini karena konsep dan mekanisme ini telah menjadi kriteria untuk membedakan model pembangunan ekonomi pasar sebagai pola untuk pengorganisasian ekonomi nasional. Seperti yang ditunjukkan oleh arus utama ekonomi, hal ini dihasilkan dari meningkatnya daya tarik analisis fenomena sosial-ekonomi, yang, bagaimanapun, sering mengabaikan sikap terhadap banyak aspek struktural dan fungsional dari sistem ekonomi.

Dalam realitas sosial-ekonomi, sistem ekonomi pasar yang beroperasi di sebagian besar negara di dunia, tergantung pada wilayahnya, memiliki fondasi yang berbeda. Dalam praktiknya, kita berurusan dengan ekonomi pasar campuran yang terjadi dalam beberapa jenis dan bentuk, yang tunduk pada perubahan dan transformasi konstan tergantung pada solusi hukum dan administratif tertentu, prioritas, norma dan kebiasaan yang tidak tertulis, pandangan dunia, dan fondasi ideologis.

Ekonomi pasar bukanlah sistem yang homogen karena dapat ada dalam berbagai bentuk. Ciri pembeda dari bentuk-bentuk ini adalah sikap terhadap peran pasar dan peran negara dalam perekonomian, yang pada dasarnya mengarah pada penentuan skala kebebasan ekonomi dan pengambilan keputusan di satu sisi dan tingkat intervensi negara di sisi lain. Tingkat pengaruh negara dan pasar bergantung pada jenis dan sifat sistem ekonomi di suatu negara dan, akibatnya, pada sejauh mana campur tangan negara dalam lingkup kebebasan ekonomi. Lingkup pengaruh negara dan pasar dalam perekonomian serta peran kedua lembaga tersebut tercermin dalam dua model yang berlawanan: ekonomi pasar yang mengatur diri sendiri (juga disebut ekonomi pasar bebas atau ekonomi liberal) dan ekonomi pasar dengan intervensi negara (juga disebut ekonomi pasar yang diatur, sistem parametrik, atau sistem terkoordinasi). Namun, dalam praktik ekonomi dunia modern, model-model ekonomi pasar ini tidak terjadi secara terpisah. Sebaliknya, paling sering terjadi kombinasi dalam hal skala dan tingkat pengaruh pasar dan negara terhadap fungsi perekonomian.

4.4 MODEL-MODEL PENGEMBANGAN UTAMA EKONOMI PASAR

Dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh realitas ekonomi global kontemporer, peran negara sebagai institusi dalam perekonomian dan peran institusi pasar yang mewakilinya sangat bervariasi dalam ekonomi pasar yang didefinisikan secara luas. Berdasarkan kriteria ini, terdapat beberapa kelompok model pengembangan ekonomi pasar, termasuk khususnya kontinental (Eropa), Anglo-Saxon, dan Asia-Afrika.

Terdapat variasi lebih lanjut dari model-model dalam kelompok-kelompok ini (Tabel 4.1), tergantung pada tingkat individualisasi kehidupan sosial dan ekonomi; tingkat solidaritas sosial; area dan cakupan kebebasan ekonomi dari aktor ekonomi dasar; area, cakupan, dan instrumen intervensi negara dalam proses ekonomi; peran institusi yang spesifik untuk ekonomi pasar; dan sifat sistem hukum dan ekonomi.



Tabel 4.1 Klasifikasi model ekonomi pasar.

No.	Kategori	Jenis Model	Negara yang Menggunakan
1.	Kontinental / Eropa		
11		Model Rhineland / Ekonomi Pasar Sosial	Jerman, Austria, Swiss, Polandia
12		Model Skandinavia / Sosial-Demokrat Terkoreksi	Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia
13		Model Belanda	Belanda
14		Statisme Pasar / Kapitalisme Negara / Model Kapitalisme Korporat	Prancis, Belgia
15		Model Konsultatif	Italia
16		Model Mediterania	Yunani, Spanyol, Portugal
17		Model Ganda Eropa	Rusia, Belarus, Ukraina, dll.
2.	Model Anglo-Saxon		
21		Model Amerika	Amerika Serikat
22		Model Neoliberal	Kanada, Inggris (UK), Australia, Selandia Baru
3.	Model Asia-Afrika		
31		Model Macan Asia	Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dll.
32		Model Jepang	Jepang
33		Model Islam	Negara-negara Arab, negara-negara non-Arab
34		Model Tiongkok	Tiongkok
35		Model India	India
36		Model Ganda Asia	Negara-negara pasca-Soviet di Asia

4.5 REPOSISI PERAN NEGARA DAN PASAR DALAM TATANAN EKONOMI BARU

Klasifikasi model ekonomi pasar ini bukanlah satu-satunya. Literatur tentang subjek ini menunjukkan model lain, yang berbeda secara signifikan, tergantung pada kriteria pembagian dan jumlah serta komposisi negara yang memenuhi asumsi model.

Kelompok model ekonomi pasar berbeda secara signifikan satu sama lain dalam hal asumsi model serta peran dan pentingnya lembaga ekonomi (negara dan pasar) dan budaya ekonomi. Setiap model memiliki sisi negatif dan positif. Dalam hal ini, muncul perselisihan sistemik, dengan arus liberal masih berbenturan dengan arus intervensionis. Ketidakefisienan yang semakin meluas dari berbagai model menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali asumsi mereka dan melakukan pembahasan lebih lanjut, yang menjangkau model ekonomi dan sosial. Pendekatan seperti itu juga diinginkan dalam menghadapi tantangan Tatanan Dunia Baru.

Orientasi terhadap salah satu model harus menghasilkan evaluasi ulang asumsi kebijakan sosial-ekonomi, diikuti oleh perubahan peran lembaga yang memengaruhi pembentukannya. Hal ini harus mencakup tata kelola ekonomi, penciptaan sistem ekonomi



yang seimbang, mendamaikan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan serta kebutuhan dan tuntutan masa kini dengan tantangan masa depan.

Semua kelompok model ekonomi pasar berbeda secara signifikan satu sama lain dalam hal asumsi model serta peran dan pentingnya lembaga ekonomi dan budaya ekonomi. Orientasi terhadap salah satu model telah menghasilkan evaluasi ulang asumsi kebijakan sosial-ekonomi, diikuti oleh perubahan peran lembaga yang memengaruhi pembentukannya.

Hal ini diterjemahkan menjadi sejumlah isu yang akan memaksa perlunya melihat masalah sosial-ekonomi melalui prisma tatanan kelembagaan dalam ekonomi yang akan mengarah pada efisiensi ekonomi, efisiensi mekanisme nyata fungsi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan ekonomi, serta terciptanya keadilan sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, tidak hanya pengetahuan tetapi juga imajinasi dan keberanian moral yang dibutuhkan. Dalam hal ini, berbagai skenario, seperti pembangunan, kelangsungan hidup, dan bahkan kebangkrutan, harus diperhitungkan. Hal ini memunculkan berbagai lintasan sistem kontingen, yang masing-masing memiliki banyak unsur realisme.

4.6 TRANSFORMASI EKONOMI PASAR MENUJU AGENDA 2030

Kelompok pertama model pembangunan ekonomi pasar terdiri dari model-model kontinental (Eropa), yang sebagian besar merujuk pada model ekonomi pasar sosial, meskipun dengan penekanan yang bervariasi pada solusi yang diadopsi. Kategori ini mencakup model-model berikut: model ekonomi pasar Rhineland/Sosial, model Skandinavia (juga disebut model sosial-demokratis yang dikoreksi), model Belanda, model statisme pasar (juga disebut kapitalisme negara atau kapitalisme korporat), model konsultatif, model Mediterania, dan model ganda. Mereka dicirikan oleh solidaritas sosial yang cukup besar. Semuanya didasarkan pada kepemilikan pribadi. Mereka terus dimodifikasi dengan pengenalan lembaga-lembaga yang dirancang untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan mitra sosial mereka yang memengaruhi perusahaan, menciptakan sistem korporat tertentu yang terdiri dari konfederasi besar pengusaha, serikat pekerja, dan bank, baik nasional maupun lokal. Kelemahan kelompok ini adalah fleksibilitas aktor ekonomi yang sangat terbatas dari sudut pandang perubahan organisasi dan alokatif, dan sisi positifnya adalah dorongan untuk memperkenalkan teknologi inovatif.

Model yang paling representatif dari sistem kontinental adalah model ekonomi pasar Rhineland, yang juga disebut model ekonomi pasar sosial atau model koordinasi (Jerman, Austria, Swiss, Polandia). Model ini mengekspresikan konsep yang bersifat liberal tetapi tidak terlepas dari kapitalisme pasar bebas dan persaingan bebas. Model ini mengacu pada gagasan saling ketergantungan antara tatanan ekonomi dan sosial yang sejalan dengan etika Kristen. Ciri utamanya adalah negara menetapkan sistem hukum yang koheren sebagai penjamin aksesibilitas terhadap pencapaian sosial (termasuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) dan ekonomi. Model ini mengasumsikan fungsi kesejahteraan seperti yang diungkapkan dalam sistem jaminan sosial dan peraturan pasar tenaga kerja. Model ini memperkuat gagasan solidaritas sosial. Model ini tidak mengganggu fungsi sehari-hari mekanisme pasar. Model ini mendorong persaingan yang adil di pasar produk (barang dan jasa) dan faktor produksi.



Model ekonomi pasar sosial meletakkan dasar bagi transformasi ekonomi Polandia menjadi ekonomi pasar. Namun, proses tersebut dibebani oleh kekhasan sistem Polandia dan pengaruh model-model kontinental lainnya, termasuk model Anglo-Saxon. Ekonomi pasar Polandia sering digambarkan sebagai "ekonomi pasar dependen", yaitu ekonomi yang sangat terkait dengan modal asing, melakukan produksi barang konsumsi tahan lama yang kompleks, memiliki tenaga kerja terampil dan murah, dan menerapkan transfer inovasi teknologi di dalam perusahaan transnasional berdasarkan masuknya modal dalam bentuk investasi asing langsung.

Model ekonomi pasar kontinental lainnya yang terverifikasi dalam realitas sosial-ekonomi adalah model pembangunan Skandinavia (Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark), yang juga disebut model Nordik atau model sosial-demokratis yang telah dikoreksi. Model ini berbeda dari model Rhineland dalam banyak hal, tetapi pendekatan pro-sosial dalam kebijakan sosial-ekonomi merupakan kesamaan bagi kedua model tersebut. Model ini memiliki sistem distribusi kesejahteraan sosial yang sangat maju, yang tercermin dalam sistem jaminan sosial yang maju. Negara memainkan peran kesejahteraan dengan menggabungkannya dengan peningkatan efisiensi ekonomi. Pasar memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi dan pada saat yang sama cukup terdiferensiasi.

Tipe model Skandinavia yang paling menonjol adalah model Swedia, yang pada dasarnya merupakan bentuk ekonomi pasar kesejahteraan yang menggabungkan permainan bebas kekuatan pasar dengan keamanan sosial dan kesejahteraan yang luas yang disediakan oleh sektor publik. Peran negara direduksi menjadi negara kesejahteraan, yaitu, lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan sosial, yang terutama bertanggung jawab atas efisiensi ekonomi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa negara adalah salah satu pihak dalam kompromi politik antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Dasar dari tipe model Skandinavia kedua, yaitu, model ekonomi Denmark, adalah hubungan antara fleksibilitas organisasi ekonomi dan keamanan ketenagakerjaan di pasar tenaga kerja. Keduanya saling mendukung dalam banyak situasi. Strategi kebijakan dilihat dalam beberapa cara: (1) sebagai tingkat keamanan di bidang implementasi proses ekonomi yang memungkinkan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas proses partisipasi ekonomi dan sosial; (2) sebagai tingkat fleksibilitas fungsional kuantitatif (baik internal maupun eksternal), yang memungkinkan adaptasi yang memadai terhadap perubahan kondisi untuk peningkatan daya saing dan produktivitas; dan (3) sebagai kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mempelajari perubahan fleksibilitas dan keamanan.

Model Belanda (Belanda) sangat dekat dengan model ekonomi pasar Skandinavia. Model ini dicirikan oleh tingkat distribusi barang dan jasa yang lebih rendah dibandingkan dengan model Skandinavia. Terkadang model ini termasuk dalam model Skandinavia.

Model statisme (Prancis, Belgia), juga disebut model kesejahteraan sosial, model korporat, atau model kapitalisme negara, mirip dengan model Skandinavia. Model ini menggabungkan keuntungan sosial (terutama perawatan kesehatan dan sistem pensiun) dengan rasionalitas tindakan ekonomi untuk pertumbuhan. Model ini mendamaikan persaingan pasar dengan perlindungan nilai-nilai sosial negara kesejahteraan. Model ini



dicirikan oleh tingkat aktivitas negara langsung yang tinggi di bidang sosial dan ekonomi. Di bidang sosial, masyarakat bergantung pada keputusan negara. Di bidang ekonomi, banyak area ekonomi nasional dimonopoli.

Model konsultatif (Italia) juga memiliki beberapa kesamaan dengan model-model yang dibahas sebelumnya. Model ini mengacu pada kemitraan sosial dalam tatanan hukum yang berlaku. Model ini dekat dengan gagasan korporatisme dan menyiratkan kerja sama antara masyarakat dan lembaga negara. Model ini mengekspresikan partisipasi langsung atau tidak langsung, formal atau informal, dan individual atau kolektif masyarakat dalam pelaksanaan keputusan yang menyangkut kebaikan bersama di semua tingkatan ekonomi. Ciri utamanya adalah bahwa model ini beroperasi dalam kondisi kelemahan relatif negara dan defisit keuangan yang besar. Implementasinya menunjukkan banyak kelemahan sebagai konsekuensi dari keterbelakangan struktural.

Model ekonomi pasar lainnya adalah model Mediterania (Yunani, Spanyol, dan Portugal – Portugal tidak berada di Mediterania tetapi memiliki hubungan integrasi yang kuat dengan Spanyol). Model ini memiliki banyak kesamaan dengan model Rhineland. Model ini dicirikan oleh perlindungan pekerjaan yang tinggi dan sistem jaminan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan model pembangunan kontinental.

Dalam realitas dunia kontemporer, model ekonomi pasar ganda juga berlaku. Model ini mengacu pada konsep transformasi ekonomi pasca-Soviet yang berbeda dan terdiri dari dua jenis yang berbeda: Eropa (Rusia, Belarus, dan Ukraina) dan Asia (negara-negara pasca-Soviet di Asia). Ciri khasnya adalah dominasi negara otokratis, kendali negara yang kuat atas faktor-faktor produksi, dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat negara.

Model pembangunan ganda ekonomi pasar Eropa dibedakan oleh pola-pola yang diambil dari model pembangunan lain, yaitu Skandinavia (Rusia, Ukraina) serta Prancis dan Tiongkok (Belarus), dengan bantuan pengalaman nasional. Ciri khasnya adalah ekonomi pasar sangat terbatas karena semua faktor produksi dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh negara. Akibatnya, hampir semua keputusan ekonomi bersifat politis. Situasi ini menyebabkan efisiensi yang rendah dalam penggunaan faktor produksi internal dengan pemanfaatan penuhnya.

Model pembangunan Rusia berorientasi pada ekonomi pasar dengan dominasi negara otokratis. Model ini dicirikan oleh kontrol negara yang kuat terhadap faktor-faktor produksi. Keputusan ekonomi strategis dibuat di tingkat negara. Fungsinya terbebani oleh oligarki dalam kehidupan ekonomi dan tingkat korupsi yang tinggi.

Model Ukraina mirip dengan model pembangunan Rusia. Model ini dicirikan oleh orientasi pada konsumsi penduduk yang meluas, yang pemenuhannya didasarkan pada impor dan bukan pada produksi sendiri. Sektor manufaktur terutama berfokus pada kegiatan ekstraktif dan pengolahan serta penyediaan bahan baku kepada konsumen dengan sebagian besar modal asing.

Model pembangunan ekonomi pasar Belarusia, yang sering disebut model ekonomi pasar pemerintah, menunjukkan beberapa ciri yang berbeda. Ciri-cirinya meliputi pemberian izin persaingan pasar antara modal swasta hanya di bawah arahan yang terencana,



peningkatan pembatasan administratif yang stabil terhadap perusahaan, peningkatan beban pajak, peningkatan pengeluaran pemerintah dan transfer sosial yang stabil, subsidi pemerintah untuk mempertahankan produksi yang tidak menguntungkan, dan subsidi untuk perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kelompok kedua model pembangunan ekonomi pasar terdiri dari model pembangunan Anglo-Saxon yang mewakili dua jenis: Amerika (Amerika Serikat) dan neoliberal (Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru). Ciri umum mereka adalah mengacu pada gagasan kapitalisme pasar (liberal). Negara diberi peran sebagai penjaga tatanan ekonomi dengan intervensi terbatas. Pasar mendominasi kehidupan ekonomi dengan pendekatan individualistik terhadap mekanisme yang membentuknya dan tingkat komersialisasi yang tinggi. Sistem kesejahteraan sosial kurang berkembang.

Model pembangunan Amerika, juga disebut kapitalisme Anglo-Amerika yang bebas dan kompetitif, didasarkan pada sistem kepemilikan pribadi. Model ini dicirikan oleh komersialisasi kehidupan ekonomi. Perusahaan diperlakukan secara subyektif dan obyektif, yang berarti bahwa perusahaan dapat dijual atau dibeli. Model ini juga dicirikan oleh tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap pengenalan ide-ide ekonomi baru. Kebebasan ekonomi disertai dengan tingkat inovasi yang tinggi di semua tingkatan aktivitas ekonomi. Intensitas aktivitas pembahasan dan pengembangan juga tinggi. Ekonomi memiliki kapasitas untuk inovasi yang sukses secara ekonomi. Ciri penting dari model ini adalah hubungan antara kemampuan individu dan perluasan cakrawala manusia, yang mengarah pada aktualisasi diri dan rasa kesejahteraan.

Dalam model neoliberal ekonomi Anglo-Saxon (Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru), pasar adalah area penting dari fungsi sebenarnya. Ciri utamanya meliputi kebebasan pribadi dan individualisme, dengan keberhasilan individu sebagai nilai utama yang diukur berdasarkan tingkat dan struktur konsumsi. Sisi negatifnya adalah konfrontatifitas yang berlebihan. Hal ini juga mencerminkan implementasi yang konsisten dan tanpa ampun dari ciri-ciri sistemik logika fungsi ekonomi pasar, yang evaluasinya dirumuskan berdasarkan kriteria efisiensi.

Kelompok terakhir model pengembangan ekonomi pasar terdiri dari model Asia-Afrika dengan banyak variasi: Macan Asia, Jepang, Islam, Tiongkok, India, dan model Asia ganda. Model Macan Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand) menunjukkan tingkat statisme pasar yang tinggi meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan model Rhineland dan Skandinavia. Ekonomi didasarkan pada keterlibatan negara yang sangat tinggi. Ekonomi didasarkan pada kebebasan ekonomi bersamaan dengan peran otoritatif negara. Pasar adalah area utama untuk memenuhi kebutuhan. Ekonomi sebagian besar berorientasi ekspor. Ekspor dan investasi didukung sambil mempertahankan tingkat konsumsi internal tertentu.

Model ekonomi Jepang serupa tetapi tidak identik. Model ini dicirikan oleh sifat otokratis negara dan campur tangan untuk membantu perkembangan ekonomi. Model ini mengacu pada gagasan kapitalisme Asia yang didasarkan pada tingkat demokrasi yang rendah dan stimulasi pembangunan ekonomi, yang dianggap sebagai nilai tertingginya. Model ini



mendamaikan negara dengan pasar. Model ini dicirikan oleh paternalisme, yang tercermin dalam pengeluaran anggaran yang rendah dan perlindungan sosial yang lemah di tingkat makro (negara) dan mendukung perusahaan di tingkat mikro.

Model pembangunan ekonomi pasar Muslim (Islam) banyak merujuk pada ekonomi pasar riil. Model ini mencakup dua tipe yang berbeda (Arab dan Asia), yang merupakan konsekuensi dari perpecahan dalam model tersebut serta pengalaman historis dan politik spesifik di masing-masing negara Muslim. Kesamaan mereka adalah bahwa mereka merujuk pada ajaran, perintah, dan larangan agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Tradisi), meskipun dalam tingkat yang berbeda. Fungsi ekonomi nasional didasarkan pada tiga gagasan utama (persatuan, pemerintahan, kehendak bebas, dan tanggung jawab) dan tiga prinsip (moderasi, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial).

Gagasan dan prinsip-prinsip ini telah membimbing model pembangunan ekonomi pasar Muslim menuju pengorganisasian sumber daya ekonomi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dunia yang hidup, termasuk, di atas segalanya, manusia, dan menuju perlindungan lingkungan sekitar. Upaya untuk mencapai hal ini didominasi oleh moderasi daripada maksimalisasi utilitas (keuntungan dan kekayaan). Sumber daya ekonomi dipandang dari perspektif definisi dan persepsinya, bentuk kepemilikan, pembangunan ekonomi dan produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, dan peran negara.

Peran utama dalam penciptaan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi diberikan kepada negara, yang, bagaimanapun, tidak boleh menempatkan dirinya di atas masyarakat, seperti halnya individu. Hubungan sosial di dalam negara harus didasarkan pada saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Pilar-pilar ekonomi nasional Muslim meliputi kepemilikan yang beragam (pribadi, publik, dan negara), kebebasan dalam batas-batas yang ditentukan (spiritual, etis, dan moral), dan keadilan sosial (menjaga kepentingan sosial dengan membatasi kebebasan individu oleh negara). Tujuan utamanya sebagai sistem ekonomi adalah mengejar keadilan sosial dan esensinya adalah untuk merangsang aktivitas ekonomi individu. Sistem ini harus dibentuk oleh pajak agama sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial di satu sisi dan oleh perbankan Islam sebagai sarana utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan akuntansi Islam di sisi lain.

Model pembangunan ekonomi Muslim terbuka terhadap masalah-masalah dunia kontemporer. Hal ini memungkinkan adanya keragaman dalam ekonomi riil sebagai hasil dari perbedaan budaya, geografis, dan historis, sebagaimana dibuktikan oleh perbedaan antara dua jenis pembangunan, Arab dan Asia. Kesamaan mereka adalah agama. Perbedaan terletak pada tingkat penerimaan pandangan pemikiran ekonomi Barat. Tipe Arab, yang tercermin dalam perekonomian negara-negara seperti Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Qatar, Kuwait, Libya, Lebanon, dan Maroko, lebih konservatif. Tipe Asia, yang perwakilannya paling menonjol adalah perekonomian negara-negara non-Arab, seperti Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Irak, Iran, Pakistan, Sudan, dan Turki, lebih terbuka terhadap solusi Barat, terutama solusi neoliberal.

Kelompok model ekonomi pasar Asia juga mencakup model pembangunan ekonomi Tiongkok. Dari akhir tahun 1970-an hingga saat ini, model pembangunan yang berbasis pada



ekspor dan investasi infrastruktur telah diupayakan. Tenaga kerja murah telah menjadi penggerak pembangunan. Namun, hal ini terlihat menyusut karena krisis demografis yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan risiko menakutkan investor asing. Pembangunan ekonomi telah berorientasi pada produksi dan ekspor sambil mengabaikan konsumsi dalam negeri. Model pembangunan ekonomi pasar yang ada saat ini sedang dimodifikasi. Hal ini tercermin dalam konsep sirkulasi ganda yang mengarahkan perekonomian ke arah pasar dalam negeri, inovasi, dan pertumbuhan produktivitas.

Model pembangunan ekonomi India yang sedang berlangsung, yang disebut kebijakan ekonomi baru, yang dihasilkan pada tahun 1990-an, masih menjadi dasar upaya reformasi hingga saat ini. Model ini didasarkan pada pengurangan bertahap peran pengaturan negara dalam perekonomian demi mekanisme pasar. Pembangunan ekonomi didasarkan pada sektor jasa yang berkembang secara dinamis, terutama berorientasi pada kontak dengan pasar eksternal. Pengembangan jasa sebagai jalur pembangunan ekonomi diperlakukan sebagai fenomena transisi menuju pengembangan industri dan pertanian, yang terakhir merupakan sektor yang paling kurang berkembang. Kelemahan model pembangunan ekonomi pasar meliputi sektor negara yang tidak efisien, birokrasi yang berlebihan, konsumsi bahan baku yang tidak efisien, dan timbulnya polusi lingkungan.

Model pembangunan ganda Asia tercermin dalam perekonomian pasca-Soviet yang sebenarnya, yaitu Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Model ini juga beragam. Kelompok negara ini dicirikan oleh sistem ekonomi campuran, model oligarki menurut proporsi berbagai bentuk kepemilikan, dan ekonomi bahan baku yang berorientasi ekspor.

Armenia memiliki model oligarki dengan unsur-unsur demokratisasi institusional. Ciri khasnya meliputi pasar yang relatif bebas kompetitif di tingkat usaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama pembagian lingkup pengaruh yang ketat untuk pelaku usaha besar dan model investasi yang didasarkan pada dominasi investasi teknologi atas investasi publik langsung.

Di Azerbaijan, model pembangunan ekonomi pasar didasarkan pada sistem distribusi kekayaan oligarki birokratis, ekonomi berorientasi sumber daya yang bergantung langsung pada tingkat harga di pasar dunia, dan jenis reproduksi yang diperluas dengan daya tarik investasi yang tinggi.

Di antara kelompok negara-negara pasca-Soviet di Asia, ekonomi Kazakhstan memiliki tingkat liberalisasi ekonomi dan pengembangan hubungan pasar tertinggi. Model pembangunan ekonominya membayangkan terciptanya ekonomi pasar yang berorientasi sosial berdasarkan kombinasi kepemilikan negara, koperasi, dan swasta. Model ini mengasumsikan kombinasi efektif antara administrasi terpusat dengan sistem perencanaan dan strategi yang terarah dengan infrastruktur pasar yang berkembang, menggabungkan usaha bebas dan ekonomi multi-komponen dengan kepemilikan swasta yang dominan. Model ini didasarkan pada kombinasi sektor publik-korporasi dan kepemilikan swasta. Model ini bergantung pada infrastruktur keuangan yang berkembang, daya tarik investasi, keterbukaan pasar domestik, dan sektor usaha kecil dan menengah yang berkembang.



Model pembangunan ekonomi Kyrgyzstan juga dicirikan oleh orientasi terhadap ekonomi pasar liberal terbuka di mana lingkungan kewirausahaan dan persaingan dikembangkan. Model ini dicirikan oleh sistem perizinan yang liberal, tingkat persaingan yang tinggi dalam perdagangan, jasa, dan pertanian, serta adanya alat-alat pengaruh berbasis pasar. Hal ini terhambat oleh kurangnya akses terhadap sumber daya infrastruktur, kapasitas pasar internal yang rendah, daya tarik investasi yang rendah, dan tingginya proporsi komponen korupsi dalam perekonomian.

Model ekonomi Tajikistan dicirikan oleh sistem hubungan ekonomi yang diatur secara ketat oleh negara dengan struktur quasi-pasar sebagai mekanisme untuk mengatur persaingan dan kebebasan berwirausaha yang hampir sepenuhnya diatur oleh negara. Pembangunan negara ini didasarkan pada permintaan domestik, yang bergantung sepenuhnya pada tingkat pendapatan tunai dari migran karena investasi langsung yang terbatas dan potensi produksi yang terbatas. Potensi ekspor utama negara ini berasal dari migrasi tenaga kerja, yang merupakan faktor risiko utama bagi perekonomiannya.

Model pembangunan ekonomi pasar yang paling tidak efektif terdapat di Tajikistan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling tertutup di dunia dan CIS karena sistem pemerintahan negara yang otoriter (kontrol total dan sentralisasi kekuasaan absolut di tangan presiden). Perekonomiannya didominasi oleh produksi industri, yang sebagian besar dibangun di atas ekstraksi sumber daya bahan bakar dan energi strategis utama (gas dan minyak) dan eksportnya.

Model pembangunan ekonomi pasar Uzbekistan ditandai oleh struktur ekonomi yang kompleks. Jelas berbasis pada bahan mentah, tetapi pada saat yang sama mengoperasikan sektor produksi industri yang sangat terdiversifikasi dan berkembang pesat. Ciri khasnya adalah sistem manajemen ekonomi yang otoriter, tingkat hambatan perdagangan dan pajak yang tinggi, serta birokratisasi hubungan ekonomi. Di sisi negatif, tingkat kebebasan ekonomi rendah karena beban pajak yang tinggi, pembatasan penggunaan infrastruktur, dan korupsi yang tinggi.

Analisis model-model ekonomi pasar membuktikan adanya perbedaan signifikan di antara mereka, yang terutama disebabkan oleh asumsi yang berbeda tentang bagaimana ekonomi berfungsi, akurasi penilaian kekuatan reaksi ekonomi terhadap berbagai tindakan negara, dan perbedaan dalam sistem nilai. Tinjauan model-model ekonomi pasar dalam kaitannya dengan fungsinya dalam realitas ekonomi dunia kontemporer tidak memungkinkan penilaian dan pemilihan model terbaik secara pasti. Tidak satu pun model yang dapat mengklaim bersifat universal karena asumsi masing-masing dirumuskan berdasarkan kondisi pembangunan yang berbeda, sejarah dan tradisi yang berbeda, serta situasi geopolitik yang berbeda.

Mengingat faktor-faktor Tatanan Dunia Baru berdasarkan tujuan Agenda 2030 dan mengingat meningkatnya kekhawatiran dan konflik politik dan militer, ekonomi, sosial, iklim dan lingkungan, epidemi, nasional, dan agama di dunia, implementasi tujuan-tujuan tersebut pada dekade ketiga abad ke-21 mengarah pada kesimpulan bahwa asumsi-asumsi yang dihasilkan diimplementasikan dalam skala terbatas. Hal ini menyiratkan perlunya merevisi dan



memodifikasi tujuan Agenda 2030. Mengingat hal tersebut di atas, organisasi internasional yang menangani masalah politik, militer, ekonomi, sosial, iklim dan lingkungan, pangan, dan kesehatan wajib mengambil tindakan untuk menciptakan Tatanan Dunia Baru yang memenuhi tantangan peradaban modern.

4.7 RINGKASAN

Tinjauan dan penilaian realisme model pembangunan ekonomi pasar mengarah pada kesimpulan berikut:

1. Realitas dunia modern yang dibebani oleh sejumlah tantangan peradaban, diperkuat oleh meningkatnya kekhawatiran dan konflik politik dan militer, ekonomi, sosial, iklim, lingkungan, dan epidemi, telah mengungkapkan ketidakharmonisan yang besar antara tujuan dan sasaran Tatanan Dunia Baru dan kemungkinan implementasinya. Akibatnya, dilema baru dalam beradaptasi dengan tantangan ekonomi pasar terus muncul. Upaya tersebut terhambat tidak hanya oleh perbedaan budaya dan agama, tetapi juga oleh implementasi beragam model ekonomi pasar di seluruh dunia, benua, dan negara. Karena banyaknya jenis dan bentuk ekonomi pasar, perlu untuk menilai ekonomi pasar yang ada secara riil sesuai dengan ciri-ciri karakteristiknya.
2. Ekonomi pasar modern sangat beragam, sebagaimana dibuktikan oleh ekonomi nasional riil di seluruh dunia. Ekonomi tersebut telah dan sedang dibangun berdasarkan model pembangunan yang berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi fungsi dan pilihan prioritas, tujuan kebijakan sosial-ekonomi, dan strategi implementasinya. Perbedaan terletak pada indikasi jalur yang berbeda untuk pembangunan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Realitas dunia kontemporer dalam menghadapi krisis peradaban global yang semakin meningkat dan keraguan tentang efektivitas konsep model kemajuan yang diterapkan pada tahap pembangunan sebelumnya oleh masing-masing ekonomi nasional membuat perubahan paradigma pembangunan ekonomi pasar menjadi tak terhindarkan.
3. Tinjauan terhadap ciri-ciri utama model pembangunan ekonomi pasar dalam skala global menunjukkan bahwa model-model tersebut berbeda sifatnya dari sudut pandang faktor identifikasi yang diadopsi. Model-model tersebut termasuk dalam berbagai kategori, mulai dari solusi liberal (pasar bebas) hingga intervensionis (otokratis, proteksionis). Model-model tersebut biasanya muncul dalam kombinasi dengan model lain, dengan satu model mendominasi model lainnya. Hal ini mengungkapkan bahwa pemilihan model pembangunan yang tepat untuk ekonomi pasar selalu berarti tunduk pada implementasi tujuan dan tugas spesifik bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai konsekuensi dari pilihan ekonomi, politik, sosial, ideologis, agama, dan budaya, baik dalam dimensi internal (nasional) maupun eksternal (global dan regional).



BAB 5

FRAGMENTASI EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAK SISTEMIK

5.1 PENDAHULUAN

Subjek bab ini adalah fragmentasi ekonomi global saat ini dan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan fragmentasi adalah proses melemahnya hubungan ekonomi di antara kelompok-kelompok negara utama dan kemungkinan intensifikasi kerja sama ekonomi di dalam kelompok-kelompok tersebut. Proses ini berlawanan dengan globalisasi. Tujuan bab ini adalah untuk mempertimbangkan alasan fragmentasi tersebut dan mengkarakterisasi serta memeriksa konsekuensinya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang berada di balik perubahan yang sedang berlangsung dalam tatanan ekonomi dunia dan untuk menggambarkan tatanan baru yang mungkin muncul.

Globalisasi dan fragmentasi sangat bergantung pada politik internasional. Di satu sisi, terdapat hubungan dua arah yang kuat antara kebijakan dan hubungan ekonomi internasional, dan di sisi lain, antara politik dan diplomasi internasional.

Diplomasi dapat membentuk kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan perdagangan luar negeri, investasi, dan bentuk-bentuk kerja sama ekonomi internasional lainnya, termasuk inisiatif dan proses integrasi aktif. Tugas dasar diplomasi dalam hal ini adalah menciptakan rasa saling pengertian dan kepercayaan. Namun, hal ini menuntut agar semua pihak yang berkepentingan (negara) memiliki nilai-nilai dasar yang sama dan menerima aturan yang berkaitan dengan tatanan global atau, setidaknya, mereka saling mengakui dan menghormati kepentingan mereka yang tidak saling bertentangan. Tidak mengherankan bahwa tingkat kepercayaan timbal balik tersebut berbeda di antara negara-negara dan blok politik tertentu, dan bahwa hal itu berkembang sebagai hasil dari proses kompleks dalam politik internasional.

Diplomasi tidak selalu berhasil atau menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan hubungan ekonomi internasional. Ketika ketidakpercayaan, permusuhan, dan persaingan mendominasi hubungan politik, hubungan ekonomi yang positif akan melemah. Jika situasi seperti itu memiliki dimensi global dan berkaitan dengan kelompok besar negara, ekonomi global akan mengalami proses fragmentasi. Sebaliknya, kebijakan ekonomi internasional dapat berperan dalam membentuk hubungan politik antar negara, dan dapat menjadi alat diplomasi.

Pertama, terkadang diharapkan bahwa pengembangan hubungan ekonomi yang erat dapat membawa keuntungan bagi semua peserta, menciptakan kepentingan bersama, dan pada akhirnya kepercayaan timbal balik yang seharusnya berdampak positif pada hubungan internasional dan politik yang lebih luas. Contoh keberhasilan strategi tersebut adalah Uni Eropa (dan sebelumnya Komunitas Ekonomi Eropa). Namun, keberhasilan ini memiliki beberapa catatan. Dapat dikatakan bahwa keputusan politik dan kemauan untuk bekerja sama secara erat, yang didasarkan pada landasan visi, kepentingan, dan tujuan bersama, merupakan



prasyarat untuk integrasi ekonomi. Meskipun demikian, bahkan keberhasilan ini pun memiliki batasnya, dan Brexit adalah demonstrasi paling nyata dari hal ini.

Terdapat pula contoh kegagalan besar dari angan-angan terkait dampak positif kerja sama ekonomi terhadap politik. Saat ini, contoh yang paling jelas adalah kegagalan kebijakan Jerman untuk menarik Rusia ke dalam kerja sama damai yang lebih luas dan sistem nilai dan standar bersama. Kita dapat bertanya-tanya apakah proyek-proyek masa lalu, seperti Nord Stream dan terutama Nord Stream II, didorong oleh niat baik atau oleh keserakahan dan persepsi yang salah tentang kepentingan diri sendiri. Kebijakan tersebut tidak hanya naif dan pada akhirnya merugikan Jerman sendiri, tetapi juga mengabaikan kritik, peringatan, dan kepentingan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya – belum lagi Ukraina – dan Uni Eropa secara keseluruhan. Ini adalah contoh pahit lain dari keterbatasan integrasi ekonomi dan politik di Eropa.

Kedua, kebijakan ekonomi internasional dapat menarik atau mempertahankan negara lain sebagai pemain aktif dalam lingkup pengaruh. Hal ini biasanya memiliki beberapa alasan historis dan regional, dan contohnya termasuk Persemakmuran Inggris dan Kebijakan Tetangga Eropa, khususnya Kemitraan Timur Uni Eropa. Contoh yang baik, baru, spesifik, dan kontroversial dalam membangun lingkup pengaruh adalah inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Proyek-proyek Tiongkok di luar negeri seringkali memiliki nuansa bantuan ekonomi. Proyek-proyek tersebut sangat dipresentasikan sebagai perspektif baru kerja sama dan pembangunan. Namun, proyek-proyek tersebut juga membentuk jaringan pengaruh ekonomi dan politik langsung Tiongkok dan, pada akhirnya, dominasi yang harus dipahami dalam konteks persaingan antara Tiongkok, di satu sisi, dan Amerika Serikat dan Barat pada umumnya, di sisi lain.

Ketiga, bukan hanya sikap positif terhadap kerja sama ekonomi yang penting sebagai alat dalam diplomasi. Ketika hubungan politik tegang, sanksi ekonomi dapat diterapkan untuk memaksa perubahan kebijakan tersebut atau sekadar untuk melemahkan lawan tertentu. Secara historis, contoh yang baik dari sanksi yang berhasil adalah sanksi Amerika terhadap Uni Soviet pada tahun 1980-an. Namun, dibutuhkan waktu sebelum sanksi dapat memberikan efek yang diinginkan dan seringkali sanksi tersebut mahal bagi kedua belah pihak. Jelas, sanksi hanya dapat diinisiasi secara wajar oleh pihak yang lebih kuat yang siap menanggung biaya dan dengan sabar menunggu hasil yang diharapkan.

Ketika Perang Dingin berakhir, kondisi politik menjadi jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan hubungan ekonomi yang intens secara global. Selain itu, perubahan kebijakan di beberapa negara, terutama Tiongkok, mendukung perdagangan dan investasi internasional. Terakhir, doktrin liberal terkait hubungan ekonomi luar negeri diterima secara luas dan menjadi komponen Konsensus Washington dan reformasi kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF. Dengan demikian, proses globalisasi semakin cepat.

Globalisasi selalu menimbulkan banyak ketidakpuasan dan kritik. Hal ini dapat dibenarkan dalam banyak hal. Namun, sejak zaman David Ricardo, teori ekonomi mengklaim bahwa perdagangan internasional, atau pembagian kerja internasional yang lebih luas, membawa keuntungan yang dapat didistribusikan di antara semua peserta; dengan demikian,



hal itu dapat bermanfaat bagi semua orang. Terlepas dari apakah hal itu selalu demikian atau tidak, pada kenyataannya hal itu mungkin merupakan masalah isi. Bagaimanapun, berdasarkan teori tersebut, fragmentasi ekonomi dunia dapat merugikan dalam hal produk dan pendapatan.

Namun, ekonomi internasional tidak pernah mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari tatanan internasional, seperti keamanan strategis. Teori ekonomi internasional memperhatikan keuntungan saat ini yang dihasilkan dari pembagian kerja internasional yang lebih dalam dan lebih baik, dan mengasumsikan kerja sama yang ramah di antara mitra dengan status yang sama. Hal ini seringkali jauh dari skenario sebenarnya.

Selama Perang Dingin, semangat persaingan yang bermusuhan sangat jelas. Jelas, hanya ada sedikit ruang untuk hubungan ekonomi global yang erat dan tanpa pandang bulu. Namun demikian, masih ada ruang untuk hubungan ekonomi antar blok politik. Muncul pertanyaan seberapa jauh hubungan yang menguntungkan atau sekadar diperlukan tersebut harus dikembangkan. Manfaat yang mereka bawa mungkin mengaburkan konflik kepentingan mendasar dan melemahkan motivasi untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan tujuan utama yang konon diterima oleh masing-masing pihak dalam konflik tersebut. Realpolitik yang memperhatikan manfaat kecil dari "normalisasi" dapat dengan mudah mengorbankan perubahan mendalam ke arah yang lebih baik. Misalnya, otoritas Jerman Barat sangat enggan untuk menyatakan dukungan apa pun – bahkan secara verbal – kepada gerakan Solidaritas di Polandia pada awal tahun 1980-an agar tidak merusak hubungan dengan Jerman Timur.

Kebijakan seperti itu sangat berbeda dari kebijakan sanksi Amerika yang disebutkan sebelumnya. Hal itu melemahkan konsistensi Barat dalam kebijakan kompleksnya terhadap blok komunis. Jika otoritas Jerman berhasil dalam upaya "normalisasi" mereka, Jerman tetap tidak akan bersatu. Selain itu, pengabaian prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota aliansi atau blok, di samping persepsi yang sempit dan jangka pendek tentang kepentingan mereka sendiri, juga dapat merusak posisi internasional dan kredibilitas suatu negara dalam kasus dan konsistensi blok.

Saat ini, kita sedang mengalami perubahan besar dalam tatanan global. Semakin jelas bahwa era globalisasi – yang dikenal sebagai perkembangan sistem ekonomi global yang relatif damai dan tidak mengganggu, yang terdiri dari hubungan dan ketergantungan – telah berakhir. Sekali lagi, kita akan hidup di dunia yang kurang lebih bermusuhan, penuh persaingan dan kompetisi yang semakin meningkat di antara negara-negara besar dan blok politik, seperti halnya pada masa Perang Dingin, dan ekonomi global akan mengalami fragmentasi.

Proses fragmentasi telah dimulai dan mungkin akan segera semakin dalam. Fase penting pertama dari fragmentasi adalah perang dagang AS-Tiongkok yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Trump. Kemudian, hubungan ekonomi internasional terganggu secara serius; rantai pasokan terputus karena pandemi COVID-19. Hal ini memberikan sinyal yang jelas bahwa pembagian kerja internasional telah melampaui batas keamanan strategis. Pada saat yang sama, beberapa aktivitas Tiongkok menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut mengenai keamanan nasional, khususnya di Amerika Serikat dan Australia. Perang dagang baru pun terjadi. Proses fragmentasi ekonomi global dipercepat oleh gejolak politik akibat fase



invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Perang tersebut juga memberikan dimensi baru pada pertanyaan tentang ruang lingkup kerja sama yang wajar dengan Tiongkok, negara yang secara terbuka memusuhi Barat.

5.2 PERPECAHAN DAN KERETAKAN

Sekarang, garis-garis utama fragmentasi ekonomi global sudah jelas. Garis-garis tersebut ditentukan oleh meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan oleh invasi Rusia di Ukraina dan reaksi negara-negara demokrasi Barat terhadapnya. Secara umum, perpecahan mendasar ada antara otokrasi dan demokrasi. Namun, gambaran keseluruhannya jauh dari sederhana.

Pertama, negara-negara yang dapat dikenali dalam setiap kelompok saja mungkin, sampai batas tertentu, berbeda dalam sikap mereka. Ini dapat menjadi fungsi dari politik internal saat ini, dan kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut dalam hal ini. Akan naif untuk mengharapkan bahwa aliansi dan blok dapat beroperasi sebagai monolit politik dan ekonomi yang selalu mewakili posisi yang sama dalam perombakan global. Namun, perbedaan besar di dalam kedua blok – otokrasi dan demokrasi – dapat secara signifikan memengaruhi jalur persaingan dan harus diberi perhatian yang cermat. Perbedaan-perbedaan di dalam blok tersebut merupakan keretakan, seperti yang saya sebut.

Kedua, ada sekelompok besar negara yang bukan pemain aktif atau anggota blok-blok utama dan tidak terlibat langsung dalam persaingan global; Namun, mereka mungkin penting dalam banyak aspek seperti halnya negara-negara Dunia Ketiga selama Perang Dingin. Menarik untuk melihat bagaimana mereka menempatkan diri dalam persaingan global. Sangat penting juga bagaimana para pemain utama akan memengaruhi keputusan mereka.

Garis-garis utama fragmentasi ekonomi global dapat dilihat dan dipahami dengan lebih baik melalui lensa alasan perpecahan tersebut. Saya katakan bahwa alasan-alasan tersebut pada dasarnya bukanlah ekonomi, dan sebagian besar berada dalam lingkup persaingan politik yang bermusuhan dan bermotivasi ideologis. Perpecahan tersebut berakar dalam sikap sosial dan politik yang berbeda yang merujuk pada gagasan-gagasan seperti pemerintahan demokratis, hak asasi manusia, supremasi hukum, atau penghormatan terhadap hidup berdampingan secara damai. Bahkan, sikap-sikap tersebut merujuk pada beberapa nilai sosial dan politik dasar yang, bagaimanapun, sangat penting sehingga menentukan aliansi dan blok.

Analisis yang mengesampingkan dimensi aksiologis dari persaingan dan perpecahan akan jauh dari masuk akal dan bermanfaat. Meskipun politik terkadang dianggap sinis, terutama jika mengingat tindakan, instrumen, atau aktor-aktor tertentu, politik sangat berkaitan dengan nilai-nilai prinsip. Sebagai contoh, konflik antara dua blok utama di era Perang Dingin memiliki dimensi kepentingan ekonomi dan memang menyangkut keamanan internasional dan persaingan militer atau dominasi global, tetapi pertama-tama, itu adalah konflik antara dua ideologi sosial dan politik – komunisme yang represif dan demokrasi liberal.

Perbedaan aksiologis semacam itu adalah substansi mendalam dari persaingan antara aliansi atau blok yang bersaing. Penting untuk secara jelas mengenali perbedaan ini dalam analisis perpecahan dan fragmentasi ekonomi dunia. Seperti yang saya tulis sebelumnya,



fragmentasi dapat merugikan secara ekonomi bagi semua pihak, dan biaya ini dikeluarkan untuk mengejar tujuan yang berbeda dari manfaat ekonomi. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa sampai perbedaan tersebut dianggap tidak dapat diterima, persaingan akan berlangsung, dan biaya ekonomi akan dikeluarkan.

Realpolitik yang terlalu ambisius hanya mengorbankan nilai-nilai dasar dan tujuan-tujuan penting sebagai imbalan atas keuntungan saat ini, yang pada akhirnya dapat sangat merugikan dalam banyak hal. Hal ini juga dapat berupa jenis kebijakan yang sinis dan kontraproduktif pada saat yang sama. Setelah menerima perspektif ini, saya berasumsi bahwa persaingan, perpecahan, dan fragmentasi tidak akan hilang sebelum perbedaan politik dan nilai-nilai mencapai karakter atau tingkat yang dapat diterima. Penalaran yang sama diterapkan pada masa Perang Dingin. Penting juga untuk menekankan betapa pentingnya kekhawatiran keamanan strategis nasional bagi perpecahan tersebut. Kekhawatiran tersebut tidak secara langsung termasuk dalam lingkup nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, tetapi bahkan dalam hal ini, perpecahan kontemporer sangat ditentukan secara ideologis. Saya sebutkan sebelumnya tentang penghormatan terhadap hidup berdampingan secara damai – sekarang jelas lebih dari sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir bahwa itu bukanlah nilai universal bahkan di antara para pemain utama.

Mengabaikan alasan-alasan mendalam, seperti keamanan nasional atau hak asasi manusia, yang menyebabkan konflik perdagangan dan, secara umum, memburuknya hubungan ekonomi internasional, dapat mengakibatkan pernyataan yang jelas, kesimpulan yang salah, dan rekomendasi yang keliru. Mari kita ambil contoh kutipan berikut, “Perang dagang AS-Tiongkok belum membawa keuntungan ekonomi besar bagi kedua negara. Bagi Amerika Serikat, mungkin sudah saatnya untuk fokus pada kebijakan ekonomi di dalam negeri terlebih dahulu”. Tentu saja, perang dagang tidak dimaksudkan untuk membawa keuntungan ekonomi bagi siapa pun. Jelas juga bahwa selalu baik untuk memperhatikan kebijakan domestik. Namun, kesimpulan bahwa sudah saatnya mereka mengakhiri perang adalah menyesatkan, karena mengabaikan kekhawatiran mendasar tentang keamanan strategis. Pertanyaan mungkin muncul apakah rekomendasi tersebut sengaja menyesatkan.

Mengutip pendapat perwakilan bisnis yang mungkin sebagian besar tertarik dan terbatas pada pemahaman dompet mereka sendiri juga tidak banyak mengubah keadaan (“Meskipun ada permohonan dari komunitas bisnis AS untuk meredakan ketegangan, Presiden AS Joe Biden sejauh ini telah memperkuat kebijakan pendahulunya dengan memperkuat aliansi anti-China dan menerapkan sanksi tambahan”). Anehnya, analisis yang sama mengutip Presiden Biden yang menggambarkan konflik AS-China sebagai “pertempuran antara kegunaan demokrasi di abad ke-21 dan otokrasi”.

Perpecahan menjadi tak teratasi, dan melampaui persaingan yang tidak merusak ketika berakar pada perbedaan besar sehubungan dengan prinsip, nilai, dan tujuan dasar. Namun, secara dangkal dan operasional, persaingan berkembang di bidang kekuasaan politik dan militer serta kepentingan ekonomi. Perpaduan perbedaan ideologis yang mendalam dan dimensi operasional persaingan seharusnya tidak membuat kita meremehkan konteks aksiologis konflik. Pemikiran serupa diungkapkan dengan baik dalam kutipan berikut:



Bobot politik dari slogan-slogan yang menargetkan Tiongkok dan kondisi domestik seharusnya tidak mengaburkan sifat sistemik dari persaingan Washington-Beijing. Donald Trump berperan sebagai katalis, dengan kebijakannya mempercepat perubahan persepsi baik anggota elit maupun masyarakat. Tiongkok mulai digambarkan sebagai saingan strategis yang menimbulkan ancaman terhadap kepentingan sekaligus menjadi bagian dari peradaban yang berbeda dan memupuk nilai-nilai yang berbeda... . Kekuatan militer Tiongkok yang meningkat, bersama dengan kebijakan revisionis yang diikuti oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), menjadi apa yang Washington anggap sebagai ancaman utama bagi keamanan AS, yang tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi Tiongkok berdasarkan asimetri pasar.

Dengan demikian, jelas bahwa garis dasar fragmentasi ekonomi global saat ini harus membagi demokrasi liberal (Amerika Serikat, negara-negara anggota Uni Eropa, Australia, Kanada, Jepang, dan lainnya) di satu sisi dan otokrasi di sisi lain. Kelompok yang terakhir terdiri, pertama-tama, dari Tiongkok komunis. Meskipun memiliki beberapa mekanisme pasar yang diterima oleh perekonomian, negara ini mewakili sistem politik internal yang menindas. Dalam hubungan internasional, aktivitas Tiongkok menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional di negara-negara demokrasi dan menjadi sasaran tuduhan praktik komersial Tiongkok yang tidak adil. Semua ini memberikan nuansa persaingan yang bermusuhan pada persaingan internasional dan semakin mengurangi ruang untuk kerja sama. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat semakin fokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok.

Bahkan ada antagonisme yang lebih akut – meskipun kurang penting dalam perspektif jangka panjang – antara negara-negara demokrasi dan Rusia. Keruntuhan hubungan ekonomi luar negeri sangat mendadak dalam kasus ini karena sanksi yang diterapkan setelah invasi Rusia baru-baru ini ke Ukraina. Namun, Rusia sendiri tampaknya semakin bergantung pada Tiongkok – juga sebagai negara penerima sumber daya mentah energi Rusia.

Saat ini, tidak ada kelompok otokrasi yang konsisten yang dapat menentang negara-negara demokrasi. Selama Perang Dingin, ada Pakta Warsawa yang secara paksa menjaga blok Soviet tetap bersatu, tetapi tidak ada yang seperti itu saat ini. Kelompok ini juga terdiri dari negara-negara yang cenderung menjadi satelit otokrasi besar, yaitu Tiongkok dan Rusia. Contoh yang tidak menimbulkan keraguan termasuk Venezuela, Belarus, dan Iran. Karena tidak ada blok otokrasi yang konsisten, sulit untuk mengatakan bahwa blok tersebut rentan terhadap perpecahan. Posisi saat ini tidak harus stabil, terutama ketika posisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Gagasan tentang garis batas yang kabur tampaknya paling tepat diterapkan dalam hal ini.

Jika berbicara tentang demokrasi, gambaran yang ada juga tidak jelas. Pertama-tama, kelompok ini jauh dari homogen. Banyak negara yang termasuk dalam kategori demokrasi liberal mungkin memiliki kepentingan, masalah, dan sikap tertentu. Contoh yang baik adalah Australia. Pada tahun 2020, negara ini secara individual terlibat dalam perang dagang dengan Tiongkok. Yang penting – dan sejalan dengan pernyataan saya sebelumnya – adalah bahwa masalah dimulai ketika pemerintah Australia menganggap tindakan Tiongkok membahayakan keamanan nasional Australia. Pemerintah melarang raksasa teknologi Tiongkok, Huawei, dari



peluncuran jaringan seluler 5G (dengan alasan keamanan). Pemerintah juga menekan keras pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok di Xinjiang dan Hong Kong dan menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19.

Akibatnya, hubungan bilateral membeku karena respons Tiongkok yang mencakup larangan dan tarif pada ekspor Australia. Tidak mengherankan, perang dagang tersebut menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.⁸ Jelas, ada tuntutan di Australia untuk mengakhiri perang tersebut. Namun, “merupakan tugas yang rumit bagi Pemerintah Albania (Perdana Menteri baru A.K.) untuk berinteraksi dengan Tiongkok dengan penuh hormat sambil juga membela kedaulatan nasional dan nilai-nilai demokrasi”. Australia dengan demikian merupakan contoh posisi dan tantangan individual, tetapi juga merupakan ilustrasi yang baik dari masalah yang lebih umum yang terletak di balik ketegangan politik dan kesenjangan ekonomi atau fragmentasi ekonomi global.

Kasus Australia juga berguna untuk menjelaskan posisi yang ragu-ragu dan kemungkinan keretakan dalam kelompok demokrasi. “Australia tidak lagi berpura-pura bahwa kita tidak harus memilih antara teman, sekutu, dan kakak besar keamanan kita, AS, dan mitra dagang terbesar kita, Tiongkok. Kita telah memilih”. Namun, tidak jelas apa pilihannya, bahkan setelah membaca dengan saksama artikel yang dikutip. Tentu saja, pemerintah Australia yang baru bermaksud untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Jika mengabaikan nilai-nilai dan kekhawatiran yang memunculkan sengketa tersebut, jika melunakkan pendiriannya, maka akan terjadi semacam Realpolitik. Ini juga akan berarti keretakan dalam blok tersebut dan sebenarnya ini sangat merupakan pilihan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Perlu juga dicatat bahwa perubahan sikap dapat terjadi bersamaan dengan perubahan pemerintahan, dan politik internal, yang sebagian besar didorong oleh situasi ekonomi, dapat menjadi kekuatan penting di balik keretakan tersebut. Ini berarti bahwa garis-garis keretakan dapat berubah secara dinamis – meskipun tidak dramatis – dan dalam pengertian ini juga, garis-garis perpecahan dan keretakan menjadi kabur.

Ketika berbicara tentang Eropa atau Uni Eropa, itu juga bukan satu kesatuan yang monolitik. Perbedaan sikap terhadap tantangan asing telah terlihat. Hal ini, dan telah, cukup jelas sehubungan dengan kebijakan terhadap Rusia, sebelum dan selama fase agresi Rusia baru-baru ini. Perbedaan yang dikombinasikan dengan aturan suara bulat dapat melumpuhkan banyak tindakan. Ada kekhawatiran serius bahwa veto Hongaria dapat mencegah pemberlakuan sanksi Eropa terhadap Rusia. Oleh karena itu, ada usulan reformasi, khususnya untuk memperkenalkan aturan pemungutan suara mayoritas. Kanselir Scholtz mengatakan di Praha pada Agustus 2022:

Alternatif untuk pemungutan suara mayoritas bukanlah untuk mempertahankan status quo. Sebaliknya, itu adalah untuk bergerak maju dalam kelompok-kelompok yang semakin beragam, dengan hutan aturan yang berbeda dan pilihan ikut serta dan tidak ikut serta yang rumit. Itu bukanlah bentuk integrasi yang terdiferensiasi. Sebaliknya, itu akan menjadi kekacauan yang membingungkan – dan undangan bagi semua orang yang ingin bertaruh melawan Eropa geopolitik yang bersatu dan mempermainkan kita satu sama lain.



Secara operasional atau prosedural, pemungutan suara mayoritas mungkin membantu, tetapi itu tidak akan menghilangkan perbedaan kepentingan dan pendapat individu dari negara-negara tertentu. Masih menjadi pertanyaan terbuka apakah itu akan bermanfaat bagi integritas jangka panjang Uni Eropa. Sulit juga untuk memprediksi apakah posisi kebijakan yang dihasilkan dari pemungutan suara mayoritas akan membuat Uni Eropa, sebagai pemain global, lebih konsisten dalam tindakannya dan lebih siap untuk memenangkan persaingan. Dukungan untuk perubahan sejauh ini terbatas.

Faktanya, ada tanda-tanda kurangnya integritas di Uni Eropa yang lebih mengkhawatirkan daripada kemungkinan veto Hongaria. Jerman dan Kanselir Sholtz berada di pusat masalah ini. Di saat Tiongkok semakin menjadi perhatian, dan ancaman bagi demokrasi secara internasional serta penindasan secara terbuka di dalam negeri, Kanselir Sholtz memutuskan – yang banyak dikritik di negaranya sendiri dan bahkan dalam koalisi pemerintahannya – untuk mengunjungi Tiongkok pada November 2022. Tindakan negara-negara individual seperti itu, terutama negara-negara yang kuat secara ekonomi dan penting secara politik, yang dianggap bertentangan dengan kepentingan blok demokrasi secara keseluruhan, menunjukkan keretakan yang sangat dalam. Tentu saja, hal itu membuat setiap usulan pemungutan suara mayoritas dan kebijakan luar negeri Eropa bersama yang dihasilkan pasti akan gagal.

Lebih buruk lagi, ketika dikombinasikan dengan aspirasi federalis, hal itu membahayakan keberadaan Uni Eropa itu sendiri. Pengabaian serupa terhadap posisi dan kepentingan negara-negara tertentu dapat ditelusuri kembali ke beberapa alasan frustrasi Inggris terhadap Uni Eropa dan Brexit. Tak pelak lagi, muncul pertanyaan apakah para politisi terkemuka Jerman masih menganggap Uni Eropa penting bagi negara mereka atau cenderung menganggapnya sebagai penghambat. Terakhir, namun tidak kalah penting, terdapat perbedaan penting antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait kebijakan terhadap Tiongkok dan Rusia.

Belum lama ini, Uni Eropa secara terbuka mencoba menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Tiongkok, dan upaya mereka, jelas, sangat terkait dengan upaya pendekatan politik yang direncanakan. Pada tahun 2004, beberapa negara Eropa – khususnya Prancis dan Jerman – memilih untuk mencabut larangan ekspor senjata, termasuk pesawat tempur Mirage, ke Tiongkok. Embargo senjata diberlakukan setelah pembantaian Tiananmen pada tahun 1989. Langkah tersebut ditentang keras oleh pemerintahan Presiden Bush dan anggota Kongres Amerika.

Bentrok yang lebih baru antara Amerika Serikat dan Uni Eropa (Komisi Eropa) menyangkut "sanksi ekstrateritorial" Amerika yang merujuk pada perusahaan-perusahaan Eropa yang bekerja sama dengan entitas yang dimasukkan oleh pemerintahan Amerika ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir. Perselisihan ini dimulai pada tahun 1990-an (berkaitan dengan sanksi yang dikenakan pada entitas Iran dan perusahaan yang bekerja sama dengan mereka). Pada tahun 2021, sanksi baru mulai diterapkan pada perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa Nord Stream II. Masalah ini secara hukum kompleks, dan tidak penting di sini untuk menyajikan analisis hukum. Yang



penting adalah perbedaan sikap terkait sanksi antara pemerintahan Amerika dan Komisi Eropa (dan beberapa negara Eropa). Masalah hukum hanyalah hasil dan bukti dari perbedaan sikap terhadap sanksi. Sikap Amerika jauh lebih ketat daripada sikap Eropa.

Kesimpulannya, jelas telah muncul dua blok negara yang berlawanan – demokrasi dan otokrasi. Ilusi bahwa kerja sama erat antara negara-negara yang termasuk dalam kelompok berbeda itu mungkin dan patut dianjurkan telah sirna, dan masing-masing pihak telah menegaskan kembali pendiriannya. Perpecahan semakin dalam. Persaingan sengit yang terjadi pasti akan mengakibatkan fragmentasi ekonomi dunia. Hal ini akan menimbulkan biaya bagi semua pihak dalam hal produk dan pendapatan. Namun, yang dipertaruhkan dalam perselisihan ini bukanlah hasil ekonomi jangka pendek, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai politik dan sosial dasar (ideologi), dan pada akhirnya dengan keamanan nasional strategis. Perpecahan tidak akan hilang sampai perbedaan dalam nilai-nilai dan tindakan politik dan sosial mereda sehingga tidak lagi menjadi hal yang tidak dapat diatasi. Syarat dasar untuk peningkatan hubungan adalah tidak adanya ancaman terhadap keamanan strategis.

Akan naif untuk berpikir bahwa perpecahan dan fragmentasi tidak akan berlangsung lama. Perang Dingin berlangsung hampir setengah abad, dan harapan bahwa lawan utama – Uni Soviet – telah dikalahkan secara damai ternyata terlalu dini. Perang Dingin muncul kembali dengan kedok Rusia. Saat ini, tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok juga sangat serius, dan persaingan dengan Tiongkok mungkin akan berlangsung lama.

Semakin baik masyarakat dan badan-badan penguasa di negara-negara demokrasi memahami sifat perpecahan tersebut, semakin baik pula kesiapan mereka untuk secara konsisten mengejar tujuan tersebut. Pertama-tama, mereka harus memahami dan menerima biaya ekonomi dari fragmentasi ekonomi global. Tidak setiap negara akan memiliki tekad yang sama; namun demikian, politik internal dan pengaruh asing, penataan ulang, dan perubahan dapat sangat berpengaruh.

Dalam konteks ini, sangat penting agar tidak ada seorang pun yang terpinggirkan. Pernyataan ini merujuk baik pada negara maupun kelompok sosial. Pencapaian tingkat solidaritas dan koherensi sosial tertentu diperlukan dalam dimensi nasional dan internasional. Saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan bahwa selama Perang Dingin masyarakat Barat jauh lebih koheren daripada saat ini – khususnya, dalam hal ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Stratifikasi yang semakin meningkat di masyarakat Barat modern membuat mereka tidak stabil secara politik, kurang dapat diprediksi secara politik, dan rentan terhadap campur tangan asing. Kohesi sosial harus menjadi prioritas. Dalam hal solidaritas dan kohesi internasional, kepentingan negara-negara kecil yang lebih rentan terhadap guncangan dan biaya harus selalu diakui dan diperhitungkan, tetapi tidak dengan mengorbankan integritas prinsip. Hal ini harus memastikan bahwa perpecahan seminimal mungkin.

Mengenai negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam persaingan antara blok-blok utama, penting untuk memberikan insentif positif bagi mereka yang siap bekerja sama dan insentif negatif bagi mereka yang menentang. Namun, dalam hal ini pun, integritas prinsip sangat penting. Jika nilai-nilai dan aturan mendasari persaingan, akan tidak konsisten bagi negara-negara demokrasi untuk memberikan keuntungan kepada negara-negara yang tidak



memiliki nilai-nilai demokrasi yang sama tetapi mungkin berguna sebagai sekutu kecil. Akan lebih buruk lagi jika negara-negara demokrasi besar melanggar aturan yang, menurut pandangan mereka sendiri, seharusnya berlaku dalam hubungan internasional. Prinsip sederhana harus diterapkan – setiap orang harus diperlakukan dengan benar dan adil, dan anggota blok harus murah hati dan penuh pertimbangan terhadap sekutu kecil yang memiliki nilai-nilai yang sama.

5.3 LANGKAH-LANGKAH PERSAINGAN

Tujuan bagian bab ini adalah untuk meninjau kategori utama langkah-langkah yang digunakan untuk memperkuat posisi dalam persaingan global suatu negara atau blok yang memulainya. Bagian ini tidak dimaksudkan sebagai presentasi rinci tentang sanksi yang diterapkan oleh negara-negara tertentu atau Uni Eropa. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran substansial tentang fragmentasi ekonomi global saat ini dan membantu membentuk opini mengenai kemungkinan konsekuensi dari fragmentasi tersebut.

Langkah-langkah persaingan membentuk empat kelompok utama. Yang pertama, dan yang paling jelas, adalah langkah-langkah pembatasan dan sanksi yang mencakup, khususnya:

- Sanksi terhadap individu;
- Pembatasan perdagangan yang mencakup tarif dan larangan ekspor atau impor;
- Larangan transfer teknologi;
- Pembatasan investasi dan pergerakan modal;
- Pengucilan dari sistem dan layanan tertentu.

Kedua, tindakan persaingan mencakup tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak ruang untuk manuver ekonomi dan politik secara internasional, seperti pengembangan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam persaingan global dan penciptaan platform kerja sama dan lembaga baru untuk melemahkan posisi pesaing atau mendapatkan kemerdekaan dari lembaga yang dikendalikan oleh pesaing.

Ketiga, persaingan global dapat memicu upaya untuk mengalihkan produksi dari negara-negara yang bersaing dan membuat rantai pasokan lebih aman; salah satu dampaknya adalah relokasi manufaktur ke dalam negeri dan relokasi manufaktur ke negara-negara sahabat.

Keempat, tindakan persaingan dapat berupa penetrasi politik dan ekonomi yang bermusuhan terhadap negara-negara lawan.

Tindakan pembatasan

Tonggak penting dalam proses fragmentasi ekonomi global adalah sanksi yang dikenakan oleh banyak negara setelah invasi Rusia ke Ukraina dan aneksasi Krimea pada tahun 2014. Ini bukan hanya perang dagang, tetapi reaksi yang lebih kuat dari negara-negara demokrasi terhadap pelanggaran hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar yang mereka anut. Pada prinsipnya, sanksi dikenakan terhadap individu (misalnya, larangan perjalanan) dan perusahaan serta sektor tertentu. Sanksi lebih lanjut terhadap Rusia yang merujuk pada seluruh negara dan ekonominya diterapkan setelah fase baru invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Berbagai sanksi diberlakukan oleh banyak negara demokrasi: Amerika Serikat, Uni Eropa,



dan negara-negara Eropa lainnya (Swiss dan Inggris); kemudian, Kanada, Jepang, Australia, Korea Selatan, Singapura, dan banyak lainnya. Namun, ada negara-negara penting yang memutuskan untuk tidak memberlakukan sanksi. Meksiko dan Brasil secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam sanksi ekonomi apa pun terhadap Rusia, begitu pula India. Yang terpenting, Tiongkok cukup mendukung Rusia, meskipun dua bank negara Tiongkok, Industrial and Commercial Bank of China dan Bank of China, memangkas pembiayaan pembelian bahan baku Rusia, yang membatasi akses Rusia ke mata uang asing.

Dalam proses penetapan sanksi, perbedaan mendalam dalam tatanan politik dan ekonomi global terungkap dengan jelas. Mungkin aspek yang lebih penting dari situasi baru ini adalah tingkat konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Perang Dingin. Langkah-langkah pembatasan yang diterapkan pada tahun 2022 tidak terbatas pada sanksi yang ditargetkan terhadap individu dan bisnis tertentu, tetapi sangat luas dan dapat dianggap sebagai "perang ekonomi". Bank Sentral Rusia diblokir aksesnya ke cadangan devisa yang disimpan di luar negeri. Bank-bank Rusia diputus dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT); Kanada dan Amerika Serikat melarang impor minyak Rusia – langkah yang diikuti (dengan beberapa pengecualian tetapi mencakup impor gas alam) oleh Uni Eropa. Aset Rusia – termasuk yang dimiliki oleh bank dan oligarki – dengan total nilai yang diperkirakan mencapai 1 triliun dolar di luar negeri. Amerika Serikat memberlakukan kontrol ekspor, sebuah langkah yang berfokus pada pembatasan akses Rusia ke komponen teknologi tinggi. Demikian pula, sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa mencakup transfer teknologi.

Presiden Biden melarang investasi baru AS di sektor energi Rusia. Pemerintah Eksekutif terkait menetapkan kewenangan hukum untuk perlunya pembatasan investasi di masa mendatang oleh warga negara Amerika Serikat di sektor ekonomi Rusia mana pun sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri.

Pada akhirnya, Rusia menjadi sangat terisolasi secara internasional, dan harus mencari dukungan di antara negara-negara otokrasi lainnya, seperti Tiongkok, Iran, atau bahkan Afghanistan.

Negara lain yang dikenai sanksi luas adalah Tiongkok. Dalam hal ini, sebagian besar sanksi berasal dari Amerika, meskipun Uni Eropa juga menerapkan embargo senjata pada tahun 1989 setelah penindasan pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen, dan kemudian memberlakukan sanksi baru pada tahun 2021 terhadap beberapa pejabat dan entitas publik Tiongkok karena pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, saya juga menyebutkan sanksi Australia.

Namun, sanksi Amerika diberlakukan bukan hanya karena masalah hak asasi manusia; sanksi tersebut memiliki pembenaran yang jauh lebih luas, dan merupakan konsekuensi serta instrumen dari perang dagang atau ekonomi dan persaingan global antara kedua negara yang bermusuhan.



Perang dagang dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden AS Donald Trump mulai menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya terhadap Tiongkok dengan tujuan memaksa negara tersebut untuk melakukan perubahan terhadap apa yang menurut para pejabat AS merupakan praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual yang telah berlangsung lama. Masalah utamanya adalah defisit perdagangan Amerika Serikat yang berlebihan dengan Tiongkok (dan secara keseluruhan), tetapi argumen Amerika menunjuk pada alasannya – kebijakan dan tindakan non-pasar dan jahat yang memungkinkan Tiongkok memperoleh keunggulan kompetitif, seperti manipulasi mata uang, instrumen proteksionis yang diterapkan dalam lingkungan kapitalisme negara (di bawah pemerintahan komunis), transfer teknologi paksa (syarat akses ke pasar Tiongkok atau investasi di Tiongkok), dan bahkan pencurian kekayaan intelektual. Faktanya, perang dagang sejak awal lebih banyak tentang aturan daripada hasilnya.

Konflik memasuki dimensi baru ketika kekhawatiran keamanan nasional muncul ke permukaan. Bagian utama dari hal ini adalah tuduhan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Trump pada tahun 2020 terhadap Huawei, penyedia peralatan telekomunikasi Tiongkok. Namun, teknologi telah menjadi pusat konflik sebelumnya. Menurut Perwakilan Perdagangan AS Robert E. Lighthizer, Tiongkok mempertahankan kebijakan "transfer teknologi paksa", mempraktikkan "kapitalisme negara", termasuk pembelian perusahaan teknologi AS, dan menggunakan pencurian siber untuk mendapatkan teknologi. Pemerintahan Donald Trump mengambil langkah-langkah sejak tahun 2018 untuk mencegah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan negara Tiongkok membeli perusahaan teknologi Amerika dan untuk menghentikan perusahaan-perusahaan Amerika menyerahkan teknologi kunci mereka ke Tiongkok sebagai biaya untuk memasuki pasar mereka.

Pemerintahan Biden tidak mencabut tarif era Trump terhadap impor Tiongkok. Bahkan, pemerintahan Demokrat memperkenalkan sejumlah batasan ekspor baru dan larangan investasi untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk melindungi kepentingan ekonomi dan militer AS. Pada Oktober 2022, Departemen Perdagangan AS memperluas sanksi terhadap beberapa lusin perusahaan Tiongkok. Kontrol ekspor mencakup penjualan produsen chip Amerika Nvidia dan AMD.

Langkah-langkah untuk Memperoleh Lebih Banyak Ruang untuk Manuver Ekonomi dan Politik

Contoh terpenting dan paling jelas dari sebuah negara yang menjalankan kebijakan ekonomi internasional yang bertujuan untuk menarik negara-negara lain ke dalam lingkup pengaruhnya adalah Tiongkok. Dan contoh yang paling koheren dan terkenal dari kebijakan Tiongkok tersebut adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Inisiatif ini sudah dikenal luas, dan telah menjadi subjek presentasi yang ekstensif, antara lain dalam Laporan Bank Dunia Ekonomi Sabuk dan Jalan: Peluang dan Risiko Koridor Transportasi, dan laporan khusus oleh The Economist yang mencakup beberapa bab yang menyajikan aspek-aspek tertentu dari BRI. Oleh karena itu, tidak perlu presentasi ekstensif lainnya di sini. Sebaliknya, beberapa kontroversi yang ditimbulkan oleh BRI perlu disebutkan.



Jelas, tujuan inisiatif ini adalah untuk meningkatkan ekspor Tiongkok, khususnya karena saluran transportasi dan logistik yang lebih baik dan lebih efisien secara umum. Perkembangannya dapat menjadi insentif bagi pembangunan lokal di negara-negara yang terlibat, terutama di Asia Tengah. Namun, terdapat kekhawatiran besar terkait dampak sosial, politik, dan lingkungan. Tampaknya sikap Tiongkok terhadap target BRI bersifat fleksibel dan dapat mencakup berbagai tujuan, yang juga tidak disukai oleh negara penerima atau negara demokrasi. Di antara yang lain, ada upaya untuk mendominasi wilayah Xinjiang. Seperti yang dinyatakan oleh The Economist:

Pada dasarnya, satu-satunya hal yang dituntut Tiongkok dari negara-negara Asia Tengah sebagai imbalan atas dana BRI adalah kesetiaan tanpa syarat untuk memerangi dugaan separatisme di Xinjiang. Memang, salah satu motivasi utama BRI adalah untuk menghindari provinsi Tiongkok yang bergejolak, menjadikan Asia Tengah sebagai basis anti-Tiongkok.

Contoh lain dari sikap fleksibel dan tujuan yang berbeda adalah proyek pembangunan pembangkit listrik baru di Pakistan.

Pembangkit listrik di Pakistan adalah contoh nyata: siapa yang dapat meragukan kebutuhan warga Pakistan akan lebih banyak listrik? Namun, bahkan di sini muncul pertanyaan, terutama tentang lingkungan. Sebagian besar pengeluaran energi BRI berada di area yang padat karbon – terutama pembangkit listrik tenaga batu bara. Emisi dari proyek-proyek tersebut tidak dihitung dalam komitmen China sendiri berdasarkan perjanjian Paris. Emisi tersebut juga biasanya tidak diperhitungkan dalam komitmen negara penerima, seperti yang ditunjukkan oleh World Resources Institute, sebuah kelompok lingkungan. BRI sangat merusak kredibilitas hijau China sendiri.

Namun, ada tuduhan – dan contoh – bahwa pembiayaan kredit China untuk proyek-proyek BRI dapat menyebabkan – tidak hanya di Asia – ketegangan fiskal di negara penerima dan menghasilkan kesetiaan politik, suatu syarat untuk pemberian bantuan keuangan. Selain itu, “China melakukan investasi besar-besaran di pelabuhan dan jalur pipa di seluruh dunia; banyak yang khawatir bahwa investasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan militer atau strategis lainnya”.

Negara-negara demokrasi terlambat melakukan beberapa upaya terbatas untuk mengimbangi ekspansi China. Contohnya adalah *strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka* yang diprakarsai pada tahun 2019 oleh Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India. Namun, ini lebih merupakan aliansi politik negara-negara yang menyatakan nilai-nilai serupa dan bukan lembaga yang akan membiayai dan mempromosikan pertumbuhan di negara ketiga. Contoh lain dari proyek semacam ini adalah proyek Australia yang diluncurkan pada tahun 2018, *Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur untuk Pasifik*, senilai 14 Triliun dalam bentuk pinjaman dan hibah. Dan Amerika Serikat mendirikan US International Development Finance Corporation



pada tahun 2019. Dana yang tersedia hanya sebagian kecil dari apa yang dapat ditawarkan China.

Demi presentasi yang komprehensif, Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang diprakarsai oleh Rusia pada tahun 2015 perlu disebutkan. Namun, saat ini, Rusia bukanlah pemain utama – kecuali Belarus – bahkan di republik-republik pasca-Soviet yang bergabung dengan uni tersebut.

Upaya untuk mendapatkan lebih banyak ruang gerak ekonomi dan politik tidak terbatas pada penguatan pengaruh di luar negeri. Contohnya adalah yuan digital yang mungkin di masa depan akan memudahkan perdagangan luar negeri dengan Tiongkok dan membantu menghindari kemungkinan sanksi Amerika terkait penggunaan dolar AS. Seperti yang dinyatakan oleh The Economist:

Sedikit bankir yang berpikir bahwa yuan akan segera menggantikan dolar sebagai mata uang pilihan dunia. Tetapi itu bukan satu-satunya tujuan yang layak dikejar. Tujuan lain lebih layak dan lebih mendesak. Secara khusus, para teknokrat Tiongkok bercita-cita untuk membangun sistem pembayaran yang lebih mudah digunakan oleh mitra dagangnya dan lebih sulit diblokir oleh Amerika. Mereka mungkin juga berharap bahwa sistem seperti itu dapat membuat yuan lebih berpengaruh di luar negeri, tanpa mengorbankan kontrol modal Tiongkok di dalam negeri.

Tiongkok telah mengembangkan fasilitas keuangan lain yang membuatnya lebih tahan terhadap sanksi. Mereka mendirikan alternatif untuk SWIFT yang disebut CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Sistem ini diluncurkan pada tahun 2015 untuk menginternasionalisasi RMB, tetapi juga dapat melemahkan konsekuensi dari pengecualian hipotetis dari SWIFT. Terdapat kekhawatiran bahwa pemutusan hubungan Rusia dari SWIFT akan memberikan dorongan bagi pengembangan CIPS yang, pada gilirannya, dapat melemahkan SWIFT dan kendali Barat atas keuangan internasional.

Reshoring⁴ dan friend-shoring⁴

Offshoring – aliran modal dan lokalisasi produksi ekonomi di luar negeri – telah menjadi fitur penting dari fase globalisasi modern. Masing-masing, reshoring (mengembalikan produksi ke negara asal) dan friend-shoring (mengalihkan produksi dari negara saingan ke negara sekutu politik) harus menjadi ciri proses fragmentasi ekonomi global. Reshoring dan friend-shoring dapat sangat ditentukan oleh keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan. Hal ini sangat dipicu oleh kenaikan biaya pengiriman dan terganggunya keamanan rantai pasokan. Perusahaan-perusahaan Amerika berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada pasar Asia sebagai reaksi terhadap perselisihan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Menurut organisasi industri Reshoring Initiative, sekitar 1.800 perusahaan AS bermaksud untuk memindahkan kembali seluruh bisnis mereka atau setidaknya sebagiannya tahun ini. Sekitar 220.000 lapangan kerja baru akan tercipta di AS dengan cara ini.



Namun, karena perpindahan fasilitas produksi dan manufaktur memiliki aspek utama keamanan dan kemakmuran nasional, hal tersebut juga menjadi perhatian dan aktivitas politik di tingkat tinggi. Saat ini hal ini paling terlihat di Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Trump pada dasarnya menggunakan perang dagang untuk mengelola tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan untuk memindahkan kembali produksi ke Amerika Serikat. Kebijakan ini tidak terlalu efektif. Presiden Biden menekankan kebijakan industri atau – secara lebih umum – menciptakan insentif untuk pembahasan, investasi, dan produksi dalam negeri, meskipun langkah-langkah pembatasan yang disajikan sebelumnya di bagian bab ini juga penting – khususnya, larangan transfer teknologi.

Ada tiga undang-undang penting dalam konteks ini, yaitu undang-undang infrastruktur senilai Rp.12 Kuadriliun, undang-undang semikonduktor dan sains senilai Rp.2,8 Kuadriliun, dan paket pengeluaran iklim senilai Rp.3,9 Kuadriliun. Tujuannya adalah untuk mendorong manufaktur Amerika, membantu kelas menengah, dan membuat ekonomi lebih ramah lingkungan, di antara hal-hal lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, undang-undang tersebut memberi negara kekuasaan untuk memulai, membimbing, dan membiayai program investasi.

Debat di kalangan pemerintah bukan lagi tentang apakah akan mengejar kebijakan industri sama sekali, tetapi tentang bagaimana membuatnya paling efektif. Dengan demikian, pemerintah tidak berupaya untuk menghidupkan kembali globalisasi tanpa batas; sebaliknya, mereka ingin mengisolasi para pesaing dan merancang ulang hubungan komersial dengan sekutu.

Karakter serbaguna dari undang-undang baru dan peran yang harus dimainkannya dalam mereindustrialisasi Amerika – dan mengembalikan produksi ke dalam negeri – diungkapkan dengan baik dalam

The Economist:

Dalam dua tahun terakhir, Kongres Amerika telah mengesahkan tiga RUU, tentang infrastruktur, chip semikonduktor, dan penghijauan... . Idenya adalah bahwa, dengan tindakan pemerintah, Amerika dapat mereindustrialisasi dirinya sendiri, memperkuat keamanan nasional, menghidupkan kembali daerah-daerah yang tertinggal, menyemangati pekerja kerah biru, dan secara dramatis mengurangi emisi karbonnya secara bersamaan... . Satu-satunya cara untuk membangun mayoritas di Kongres adalah dengan menggabungkan keinginan Demokrat untuk bertindak atas perubahan iklim dengan kekhawatiran yang agresif tentang ancaman dari Tiongkok dan kebutuhan untuk menangani daerah-daerah yang tertinggal di jantung Amerika. Masing-masing kekhawatiran ini valid.

Aspek penting dari proyek besar ini adalah tujuan keseluruhannya untuk memperkuat dominasi Amerika dalam teknologi baru, yang merupakan kartu AS dalam pertarungan untuk kepemimpinan global. Namun, proyek ini jelas memiliki fitur-fitur protektif, seperti persyaratan konten domestik atau aturan pengadaan publik, yang membuat sekutu merasa kesal, terutama



di Eropa. Hal ini menciptakan risiko keretakan di antara negara-negara demokrasi dan harus dikelola dengan hati-hati. Tampaknya pemerintahan Biden mengambil beberapa langkah untuk memenuhi harapan negara-negara demokrasi lainnya. Secara khusus, “dengan Eropa, mereka meluncurkan Dewan Perdagangan dan Teknologi (TTC), sebuah forum untuk memastikan bahwa Barat mengikuti pendekatan yang konsisten dalam persaingan teknologi mereka dengan China”. Namun, karena tidak ada proyek dengan ambisi serupa di tempat lain selain Amerika Serikat, mungkin sulit untuk berbagi manfaat dari pengeluaran Amerika secara bebas. Dengan demikian, kebijakan Friend-shoring mungkin lebih merupakan sebuah postulat daripada kenyataan. Namun, kebijakan reshoring Amerika tetap akan menjadi hal yang baik.

Penetrasi Bermusuhan ke Negara Lawan

Penetrasi bermusuhan adalah fenomena gabungan. Ini mencakup spionase teknologi dan pencurian kekayaan intelektual, akuisisi terselubung perusahaan di sektor strategis dan yang memiliki keahlian teknologi unik, lobi terselubung, dan agen pengaruh. Ada bentuk-bentuk penetrasi bermusuhan yang tidak jelas terkait niat dan tujuan langsung atau aspek teknologinya. Ini adalah kasus Huawei yang akhirnya membuat khawatir dinas intelijen di beberapa negara. Bahkan lebih kabur lagi adalah kasus balon pengawasan Tiongkok yang melanggar wilayah udara Amerika pada Februari 2023. Namun, tidak diragukan lagi bahwa penetrasi semacam itu, dan khususnya spionase, tidak hanya melanggar aturan ekonomi pasar yang adil; pertama-tama, hal itu menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Dalam hal ini, hal itu secara sempurna mencerminkan semangat persaingan antara demokrasi dan otokrasi. Karena penetrasi dalam berbagai bentuknya biasanya tersembunyi, hal itu membutuhkan kewaspadaan dan prosedur yang lebih baik untuk mengawasi aktivitas bisnis.

Contoh ancaman yang baru-baru ini ditemukan termasuk investasi besar-besaran Tiongkok di bidang real estat di sektor strategis. Pengungkapan yang dilakukan di Inggris sebagai bagian dari daftar pemerintah baru tentang properti yang dimiliki melalui entitas lepas pantai menunjukkan pada tahun 2022 bahwa China Investment Corporation (CIC) memiliki lebih dari 250 properti di seluruh Inggris.

Meskipun CIC dikenal sebagai investor di properti Inggris, skala dan detail pembeliannya tetap tersembunyi hingga sekarang karena penggunaan berbagai perusahaan lepas pantai. Daftar tersebut, yang mengungkap detailnya, menunjukkan bahwa CIC telah fokus pada depot distribusi, taman ritel, dan kawasan perdagangan, termasuk beberapa yang penting bagi infrastruktur regional.

Dengan kata lain, mereka merupakan bagian penting dari rantai pasokan. Contoh lain adalah upaya pengambilalihan perusahaan teknologi Inggris, Newport Wafer Fab, yang memiliki teknologi chip unik. Awalnya tampak menjadi target perusahaan Belanda sebelum kepemilikan akhirnya oleh Tiongkok terungkap. Pemerintah akhirnya memblokir kesepakatan tersebut dengan alasan keamanan. Pengawasan yang lebih baik dan keputusan untuk menghentikan transaksi yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Investasi yang disahkan pada tahun 2022, yang memberi pemerintah wewenang untuk menyaring dan membatalkan kesepakatan



di 17 sektor sensitif yang melibatkan investor asing yang berpotensi bermusuhan. Keputusan untuk memblokir akuisisi tersebut adalah

Merupakan peringatan bagi universitas-universitas Inggris, yang telah mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan Tiongkok. Sebuah laporan pada tahun 2021 oleh Civitas, sebuah lembaga pemikir, menemukan bahwa lebih dari setengah universitas Russell Group memiliki hubungan pembahasan saat ini atau sebelumnya dengan perusahaan yang terkait dengan angkatan bersenjata Tiongkok. Universitas bergantung pada mahasiswa Tiongkok untuk 6% dari total pendapatan mereka.

Sekarang telah menjadi jelas bahwa universitas-universitas terkemuka tidak dapat dengan bebas berbagi pengetahuan mereka dengan entitas hukum atau individu mana pun dari negara-negara saingan.

Transaksi kontroversial lainnya terjadi pada tahun 2022 di Jerman – akuisisi saham di terminal di pelabuhan Hamburg oleh COSCO, sebuah perusahaan pelayaran Tiongkok. Akhirnya pemerintah Jerman membatasi saham yang dibeli menjadi kurang dari 25% alih-alih 35% yang direncanakan sebelumnya.

Ini hanyalah beberapa contoh penetrasi yang bermusuhan, tetapi cukup untuk memberikan gambaran tentang masalahnya. Contoh-contoh ini juga merupakan ilustrasi yang baik tentang langkah-langkah defensif yang seharusnya mencakup pembatasan investasi langsung terhadap pembahasan ilmiah dan penerimaan mahasiswa asing. Kebutuhan akan langkah-langkah tersebut berarti bahwa demokrasi tidak lagi dapat menjadi masyarakat yang terbuka tanpa syarat karena hal itu akan menunjukkan kenaifan dan kerentanan.

5.4 RINGKASAN

Fragmentasi ekonomi global tidak terbatas pada perang dagang, tetapi berakar pada persaingan strategis yang bermusuhan antara sistem ideologis yang berlawanan – demokrasi dan otokrasi. Ini juga bukan tentang keuntungan ekonomi. Konflik kepentingan mendasar menentukan perpecahan utama dalam ekonomi global dan fragmentasi saat ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan keberadaan blok politik selama Perang Dingin.

Untuk mencapai tujuan persaingan, waktu dan sikap yang konsisten sangat diperlukan. Konsistensi harus mengacu pada kebijakan masing-masing negara, tetapi juga pada keselarasan dalam kelompok demokrasi. Setiap tindakan anggota individu dari kelompok yang mengorbankan kepentingan strategis bersama blok untuk keuntungan individu jangka pendek berarti ada keretakan di antara negara-negara demokrasi.

Persaingan strategis tidak hanya menentukan garis fragmentasi, tetapi juga menentukan seberapa dalam perpecahan tersebut atau – dengan kata lain – apa ukuran persaingan tersebut. Hal ini jauh melampaui perang dagang dan pasti membentuk kembali lingkungan kelembagaan dan hukum baik di dalam negeri di masing-masing negara maupun secara internasional. Hal ini juga merujuk pada organisasi internasional utama, seperti WTO atau IMF. Dalam arti tertentu, melemahnya makna global organisasi-organisasi ini akan menjadi kembalian ke asal-usulnya, ketika mereka didirikan, pertama-tama, oleh dan untuk



demokrasi Barat yang maju. Muncul pertanyaan apakah mereka akan menjadi platform kerja sama yang bermanfaat bagi demokrasi modern. Tren saat ini dalam memodifikasi kebijakan ekonomi, khususnya upaya untuk mendorong relokasi manufaktur, dapat dengan mudah menimbulkan bentrokan kepentingan di antara demokrasi-demokrasi utama. Hal ini jelas terlihat dalam kasus program-program utama pemerintahan Biden dan keberatan yang ditimbulkannya di Eropa. Oleh karena itu, tampaknya platform dan aturan untuk menetapkan konflik kepentingan akan sangat penting bahkan ketika mereka mungkin mengambil bentuk baru. Mereka harus menghilangkan kemungkinan keretakan di antara demokrasi sebanyak mungkin dan membuat blok tersebut lebih konsisten.

Untuk tatanan internasional baru, proses domestik – ekonomi, sosial, dan politik – juga akan penting. Saya berani mengatakan bahwa proses domestik akan sangat penting. Sebelumnya dalam bab ini, saya telah menunjukkan pentingnya dukungan politik publik untuk kebijakan yang membutuhkan keberanian untuk membela kepentingan strategis meskipun mungkin merugikan secara ekonomi dalam jangka pendek. Jika biaya bagi kelompok sosial besar tinggi, akan mudah kehilangan dukungan. Namun, tidak harus demikian. Barat tidak memenangkan Perang Dingin melawan masyarakat demokrasinya. Saya juga menyebutkan ketidakpuasan yang disebabkan oleh globalisasi, dan bukan tanpa alasan. Pengembalian produksi ke dalam negeri itu sendiri dapat memicu perubahan positif.

Program ekonomi yang baik seperti kebijakan industri yang diprakarsai oleh pemerintahan Biden dapat membantu. Reformasi di banyak bidang, misalnya sistem pajak, akan penting. Pajak perusahaan minimum di OECD adalah contoh yang baik. Untuk menjalankan kebijakan luar negeri secara efektif dalam lingkungan persaingan yang bermusuhan, penting untuk melakukan pembersihan di dalam negeri. Masa Perang Dingin juga merupakan Zaman Keemasan kapitalisme – kapitalisme inklusif. Dan demokrasi memenangkan perang tersebut.



BAB 6

SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL VERSUS STABILITAS EKONOMI

6.1 PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu negara yang stabil dihasilkan dari kebebasan ekonomi, kewirausahaan, dan interaksi yang baik antara semua bagiannya. Prinsip panduan ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan pelaku ekonomi di berbagai tingkatan dan di berbagai sektor ekonomi, dimulai dari perusahaan terkecil, hubungan mereka dengan lingkungan, pasar yang efisien, dan infrastruktur teknis dan regulasi yang menguntungkan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan mekanisme yang tidak sesuai dan kurangnya sinkronisasi sektor ekonomi, yang dapat berujung pada masalah pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama di era tantangan dan ketegangan sosial-ekonomi dan ideologis yang semakin intensif, termasuk terjadinya krisis ganda.

Menganalisis kondisi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, dapat dilihat, bahkan dari kejauhan, bahwa sistem keuangan dan sektor ekonomi riil menunjukkan mekanisme yang terpisah dan perbedaan yang mendalam. Terbukti bahwa kedua sektor tersebut berkembang secara independen satu sama lain, mengejar tujuan yang berbeda, dan dengan demikian menghasilkan ketidaksetaraan yang memecah homogenitas ekonomi. Hubungan antara elemen-elemen ini sangat tidak koheren; hal ini mencerminkan krisis struktural yang menghambat kebijakan ekonomi dan prediksi perkembangan yang andal dalam jangka panjang. Strategi pembangunan berkelanjutan yang diupayakan oleh negara, berdasarkan pencarian keseimbangan internal dan rasionalitas jangka panjang, menghadapi kesulitan yang mengkhawatirkan. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan masalah-masalah struktural terpenting yang menunjukkan perlunya mencari model baru sistem keuangan yang menjamin keamanan dan stabilitas ekonomi dan sosial.

6.2 HUBUNGAN ANTARA SEKTOR KEUANGAN DAN EKONOMI RIIL

Pendekatan sistemik terhadap ekonomi mengakui komponen-komponen terpenting dari sistem tersebut, yaitu ekonomi riil, sektor keuangan, dan sistem regulasi. Dalam ekonomi yang stabil, pemisahan antara bidang keuangan dan bidang ekonomi riil umumnya diabaikan, dengan asumsi bahwa keduanya membentuk satu kesatuan dan bahwa proses riil dapat dijelaskan secara akurat dalam bahasa moneter yang mudah dipahami yang memungkinkan pengukuran nilai yang tepat, agregasi arus, analisis perubahan struktural, dll. Karena sistem keuangan merupakan cerminan akurat dari bidang ekonomi riil, penyederhanaan bahwa ruang lingkup pengaruh sistem keuangan bertepatan dengan bidang ini dan bahwa instrumen keuangan memungkinkan untuk mengarahkan ekonomi mudah diterima. Akibatnya, proses kompleks produksi, pertukaran, dan konsumsi dalam bidang barang direduksi menjadi dimensi keuangan.



Sejak awal moneterisme, pemikiran tentang ekonomi, dan selanjutnya tentang sistem pengaturan, telah sepenuhnya tunduk pada mekanisme keuangan. Pendekatan manajerial terhadap proses makroekonomi jelas menunjukkan bahwa bidang ekonomi riil, yaitu produksi dan pertukaran barang fisik, termasuk infrastruktur produktif dan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, pada dasarnya berbeda dari sistem keuangan yang mendukungnya. Lebih lanjut, lembaga keuangan yang terkait dengan fungsi uang tunduk pada mekanisme dan kinerja yang berbeda dari bidang ekonomi riil. Menyamakan ranah riil dengan ranah keuangan menciptakan banyak konflik kepentingan, yang segera ditafsirkan, bahkan oleh para spesialis, sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang tidak memadai.

Agregasi fenomena dalam dimensi moneter mengaburkan anomali dalam ranah ekonomi riil, yang menyangkut penurunan daya saing jangka panjang, peningkatan kualitas, penyeimbangan risiko dan cadangan, akses ke sumber daya, dan lain-lain. Secara bersamaan, muncul fenomena negatif, seperti utang publik dan meningkatnya kewajiban, memburuknya imbal hasil modal, dan penghindaran pajak. Hal ini pada gilirannya menyebabkan distorsi pasar produk, penurunan investasi, penurunan konsumsi dan tabungan, dan lain-lain. Dampak dari distorsi ini menyebabkan destabilisasi lembaga keuangan, peningkatan utang publik, dan inflasi.

Hubungan antara sektor-sektor kunci ekonomi memengaruhi potensi negara, oleh karena itu, upaya untuk mencapai keamanan dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dalam lingkungan yang tidak stabil telah menjadi tantangan utama bagi kebijakan ekonomi negara. Perbaikan yang berkelanjutan di bidang ekonomi riil tidak dapat dicapai melalui pelonggaran kuantitatif untuk merangsang penciptaan uang dan pemberantasan inflasi melalui peningkatan suku bunga dan kebijakan fiskal. Suku bunga yang tinggi dan aliran modal tambahan menyebabkan akumulasi likuiditas berlebih dan depresiasi moneter. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan keseimbangan di bidang riil meliputi konsekuensi globalisasi yang kurang dipahami dalam produksi, polarisasi kekayaan dan utang, ketergantungan teknologi, rantai pasokan yang panjang dan kompleks, perjuangan untuk bertahan hidup usaha kecil, hilangnya kerajinan tangan, konsentrasi jasa-jasa lain, krisis pertanian individu, dan fenomena patologis.

Kebutuhan akan pendekatan terpisah terhadap fenomena riil didukung oleh pertimbangan teknis dan penyeimbangan yang memerlukan perhitungan dalam bentuk barang, mulai dari penyediaan makanan, obat-obatan, jumlah perlengkapan sekolah yang memadai, tempat tidur rumah sakit, ruang perumahan, sarana transportasi, sumber energi, jaringan jalan, dan lain-lain. Kurangnya koordinasi agregat ini menyebabkan defisit sumber daya dalam skala internasional. Ketidakseimbangan dalam dimensi barang merupakan faktor pendorong biaya dan inflasi, yang melibatkan fluktuasi nilai ekonomi, ketidakstabilan permintaan, gangguan pasar keuangan, dan lain-lain.

Pengelolaan bidang barang melengkapi kendala sistem keuangan dan menyoroti hubungan yang mengkondisikan manfaat dalam hal kerja sama, komplementaritas, dan keamanan ekonomi, termasuk harapan sosial. Tanpa dimensi ini, mustahil untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekologi, budaya, kualitas hidup, dan faktor-



faktor lain dari bidang sosial. Dalam pendekatan tradisional terhadap ekonomi, elemen-elemen sistem keuangan memainkan peran subordinat terhadap aktor-aktor ekonomi riil, memenuhi permintaan akan uang dan jasa keuangan. Dapat diasumsikan bahwa pembangunan berkelanjutan dari seluruh perekonomian disebabkan oleh koordinasi sistem keuangan dengan perkembangan ekonomi riil yang mencakup bidang produksi, jasa, dan konsumsi. Lebih lanjut, perlambatan pembangunan dan periode resesi dan krisis – dan khususnya polikrisis – menunjukkan gangguan dan kurangnya koordinasi antara bidang non-tunai dan sistem keuangan perekonomian. Unsur penting dari sistem ini adalah uang yang stabil, yang menjadi subjek kebijakan penargetan inflasi.

Dalam ekonomi terbuka, situasinya sangat berbeda. Liberalisasi hubungan ekonomi telah membawa perekonomian, dan terutama komponen-komponennya, ke dalam konfrontasi dengan lingkungan asing. Di bawah pengaruh ekspektasi keuntungan, arus uang dan barang dihidupkan kembali, merangsang investasi asing, relokasi produksi, dan migrasi penduduk, sehingga menyebabkan pergeseran struktur ekonomi internal dalam kaitannya dengan batas-batas nasional. Di bawah ancaman ekonomi terbuka, memastikan keamanan ekonomi dan stabilitas eksternal tampaknya menjadi prioritas bagi target inflasi.

Pembukaan ekonomi telah memulai fase globalisasi yang ditandai dengan intensifikasi pertukaran internasional, ekspansi luar negeri, dan percepatan umum pembangunan ekonomi. Kondisi yang menguntungkan untuk pengembangan perputaran komoditas, transportasi, komunikasi, pariwisata luar negeri, dan aliran sumber daya keuangan telah tercipta. Globalisasi dengan peluang yang lebih luas untuk pengelolaan lintas batas mengganggu sikap individu dan hubungan sosial. Pembukaan harus memperkaya para aktor, menyoroti kelemahan dan kekuatan, mengaktifkan motivasi positif, memelihara nilai-nilai seseorang, meningkatkan cara kerja, dan mengembangkan hubungan.

Masalahnya adalah setiap aktor harus, sampai batas tertentu, menjadi penerima manfaat globalisasi dalam hal ekonomi, kemanusiaan, dan peradaban. Lingkungan harus diterima dan diperlakukan secara setara. Hal ini dihasilkan dari hak untuk menghormati identitas dan kekhasan serta mempertimbangkan kepentingan aktor yang lebih lemah juga. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus menjadi alat kebijakan penting untuk keamanan dan stabilitas ekonomi. Liberalisasi telah melemahkan kontrol negara dan mekanisme pengaturan serta melonggarkan ikatan ekonomi domestik. Globalisasi telah mempercepat perkembangan cabang-cabang ekonomi riil. Dalam persaingan terbuka, pengaruh masing-masing cabang bergeser ke arah yang berbeda, seringkali menyusut atau beralih ke pemain asing. Potensi sektor keuangan domestik diuji dalam konfrontasi dengan bank asing dan lembaga pasar keuangan internasional. Mereka yang paling ekspansif memperluas wilayah operasi aslinya, seringkali melampaui batas negara mereka sendiri. Aktor domestik yang melintasi batas negara mengekspresikan strategi mereka sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan baru, mengungkapkan tujuan yang berbeda yang ditentukan oleh tingkat spesialisasi, dinamika ekspansi, dan kekuatan daya saing eksternal.

Bank dan lembaga keuangan internasional mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan kelebihan modal di wilayah tertentu dan menginvestasikannya di wilayah lain.



Bank asing, dengan memperkenalkan strategi global yang melibatkan cabang lokal mereka, telah belajar untuk menarik modal lokal, memanfaatkan tempat perlindungan pajak, dan sebagainya. Lingkup pengaruh mata uang nasional terkuat semakin meluas, sementara peredaran mata uang yang lebih lemah semakin menyusut. Di bidang ekonomi riil, barang yang lebih menarik, lebih gencar dipromosikan, atau lebih murah menggantikan produk yang kurang kompetitif, mengurangi aktivitas dan spesialisasi masing-masing negara.

Dalam fase globalisasi saat ini, terdapat kesenjangan dalam perekonomian domestik terkait tingkat ketergantungan pada negara asing, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem keuangan dan kebutuhan perekonomian domestik. Polarisasi dan kemudian konsentrasi arus dalam arah tertentu dan dominasi negara-negara dengan potensi ekonomi terbesar dapat diamati. Dampak meningkatnya tekanan eksternal di berbagai bidang telah mengakibatkan peningkatan ketidakseimbangan internal dan ketergantungan ekonomi di sebagian besar negara. Dalam hal ini, literatur semakin mengangkat gagasan deglobalisasi dan konsentrasi aktivitas negara di sekitar dua kutub dalam ekonomi global – Tiongkok dan Amerika Serikat.

Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh elemen-elemen sistem keuangan yang, dipengaruhi oleh kekuatan modal eksternal, mencari cara untuk memperluas domain kendali mereka dan berkembang sendiri. Akibatnya, bidang ekonomi riil, dan terkadang cabang-cabangnya serta bidang keuangan, berfungsi sebagai sistem independen. Mereka mengejar tujuan yang terpisah dan terkadang strategi yang berlawanan, memecah kelompok kepentingan dan opini publik. Stratifikasi semacam ini yang terjadi di berbagai tingkatan dapat berarti bahwa aktor domestik lebih cenderung bekerja sama dengan aktor eksternal dan, pada saat yang sama, enggan mengembangkan kerja sama dengan aktor internal. Contohnya adalah sektor perbankan asing yang mempromosikan kredit konsumen di Polandia dan, secara bersamaan, enggan membiayai eksportir besar. Perusahaan lokal menyadari keengganan bank asing untuk membiayai produksi untuk ekspor.

Contoh lain adalah praktik spekulatif rantai ritel yang lebih mengutamakan produsen asing. Proses-proses di atas menyebabkan disintegrasi dan melemahkan ekonomi internal. Akhirnya, kesamaan target yang diterapkan oleh bank dan didukung oleh organisasi non-pemerintah, pelobi, politisi, dan media telah menjadi sumber utama ketidakstabilan ekonomi. Fenomena ini, yang menunjukkan penyatuan semua kekuatan eksternal, dapat menunjukkan perlunya semua aktor dan pemangku kepentingan, termasuk otoritas negara dan otoritas moneter, untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi yang terkonsolidasi dan tangguh terhadap guncangan dan risiko eksternal.

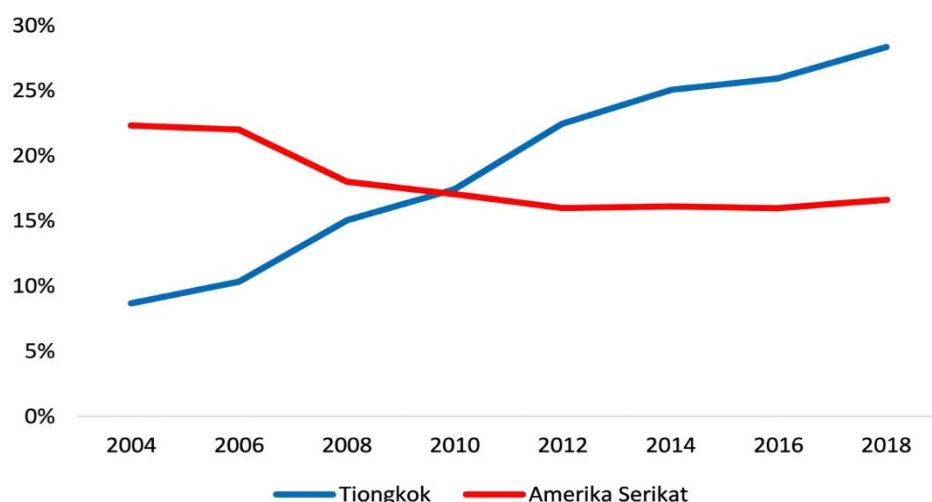
Kurangnya kontrol negara atas ekonomi riil menjadi momok kebijakan ekonomi di banyak negara. Contoh spektakuler dari fenomena ini, yang dapat berfungsi sebagai peringatan bagi negara lain, adalah Yunani. Negara ini, setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981 dan Zona Euro pada tahun 2001, selama bertahun-tahun dengan sukarela menggunakan pembiayaan eksternal untuk mengembangkan infrastruktur publik. Sektor swasta negara ini dibuka secara luas untuk investasi asing langsung. Ketika fase pembayaran pinjaman tiba, menjadi jelas bahwa efek pengganda dari investasi tersebut hanya memberikan



kontribusi yang sangat kecil terhadap peningkatan pendapatan anggaran. Entitas swasta dan perusahaan asing yang menggunakan infrastruktur dan layanan publik negara modern memindahkan kantor pusat mereka ke surga pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Pendapatan anggaran yang rendah, biaya operasional negara modern yang tinggi, dan beban pembayaran utang dengan cepat menyebabkan Yunani menumpuk utang. Deklarasi insolvensi Yunani pada tahun 2009 menyebabkan negara tersebut secara tidak menguntungkan melepaskan aset publik dan menyebabkan krisis yang mendalam selama bertahun-tahun. Saat ini, Yunani, yang mencari peluang untuk memperbaiki situasinya, menjual pelabuhannya kepada investor Tiongkok.

Dalam kondisi ketidakseimbangan global, perkembangan masing-masing negara kehilangan simetri internal dan komplementaritas yang dibutuhkan oleh sistem regulasi, yang melemahkan dogma keseimbangan internal dan mempersulit kebijakan ekonomi negara. Kecenderungan disintegrasi yang disebabkan oleh dinamika berbeda dari cabang-cabang internal ekonomi yang dipicu oleh tingginya tingkat ketergantungan ekonomi domestik pada negara asing telah terbukti menjadi kecenderungan permanen. Dalam ekonomi global, polarisasi kuat dari arus barang dan modal yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi ketergantungan pada negara asing merupakan realitas negara-negara kecil. Ketergantungan Eropa Barat pada impor bahan baku energi dari Rusia dan produk industri dari Tiongkok telah terbukti menjadi contoh risiko yang terkait dengan polarisasi ini.

Analisis pasar untuk produk industri dasar dan canggih, pakaian, perlengkapan rumah tangga, peralatan, komponen dan sub-rakitan elektronik, suku cadang otomotif, dan banyak barang lainnya menegaskan konsentrasi produksi di Timur Jauh dan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dari negara-negara Barat pada impor. Ketergantungan yang terus-menerus ini telah menyebabkan hilangnya produksi industri di sebagian besar negara. Keterbatasan substitusi pengiriman, elastisitas penawaran yang rendah, dan ketergantungan pada monopoli menyebabkan kenaikan harga yang cepat dan mengimplikasikan hilangnya keamanan ekonomi.



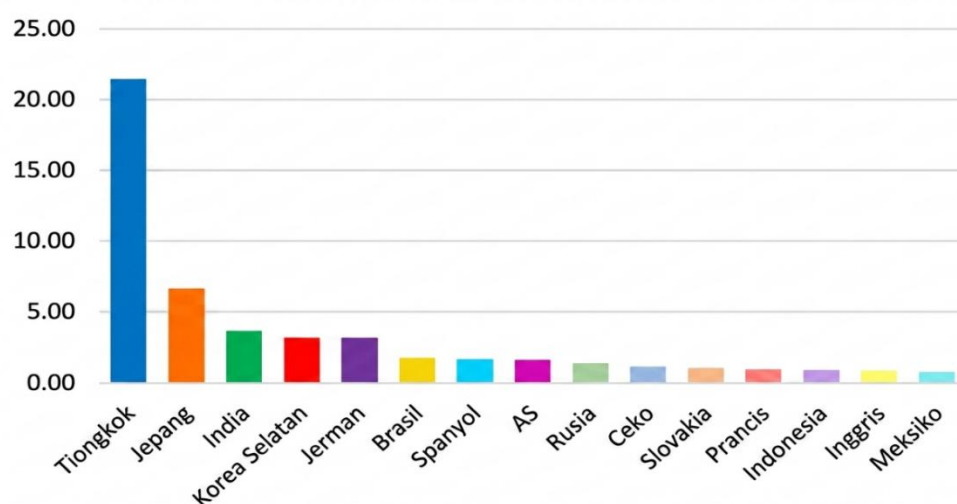
Gambar 6.1 Pangsa Tiongkok dan Amerika Serikat dalam produksi industri global



Negara-negara yang menjaga keamanan ekonominya dengan tepat memilih bidang spesialisasi mereka, berupaya mendiversifikasi pembangunan mereka, membuat penawaran ekspor mereka lebih menarik, dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat, mengkonsolidasikan keunggulan mereka dalam mengejar posisi dominan di pasar global. Ekspansi eksternal telah menjadi faktor penentu pembangunan internal. Pasivitas dalam hal ini melemahkan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, yang berarti menyerah pada pengaruh eksternal. Dogma pembangunan ekonomi, yang menunjukkan nilai tinggi yang diberikan pada ekspansi eksternal, mengharuskan keamanan dan stabilitas internal dipastikan dalam perekonomian.

Doktrin monetarisme yang diperkenalkan oleh Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an, dan kemudian dipopulerkan di sebagian besar negara maju, ternyata menjadi faktor penting dalam perubahan ekonomi dunia yang menentukan posisi sektor riil dan keuangan. Di bawah pengaruh doktrin ini, sektor keuangan berkembang pesat. Bidang komersialisasi kehidupan meluas, instrumen dan pasar keuangan baru diciptakan, dan kapitalisasi bursa saham serta aset bank dan dana investasi meningkat. Skala operasi di sektor keuangan berkali-kali melebihi skala operasi di sektor ekonomi riil. Sebagian besar negara meninggalkan pengelolaan sektor ekonomi riil, dengan asumsi bahwa pasar dan kebijakan keuangan menyediakan instrumen yang cukup untuk kebijakan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dianggap didorong oleh dinamika pertumbuhan nilai modal aset keuangan. Sejak saat itu, sektor keuangan mendominasi perekonomian negara-negara Barat, sementara sektor ekonomi riil, yang mengalami penurunan dan menghasilkan keuntungan rendah, dapat dialihdayakan, yaitu, dialihkan ke negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sejauh ini, upaya untuk membalikkan tren ini masih lemah atau tidak efektif.



Gambar 6.2 Estimasi produksi mobil penumpang di negara-negara terpilih pada tahun 2021 (dalam jutaan unit).



6.3 PARADIGMA KEAMANAN DAN STABILITAS SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN

Sektor keuangan tidak diragukan lagi merupakan bagian terbesar dan terpenting dari ekonomi modern. Dalam kelompok negara-negara yang sangat maju secara ekonomi, kapitalisasi sektor keuangan berkali-kali melebihi nilai cabang non-keuangan yang didefinisikan sebagai bidang ekonomi riil. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa perkembangan ekonomi secara keseluruhan sebagian besar ditentukan oleh stabilitas dan keamanan perkembangan sektor keuangan.

Situasi sektor ini biasanya disajikan dari perspektif yang lebih luas sebagai elemen sistem keuangan. Para pelaku di sektor ini, bank dan perantara keuangan non-bank, pasar keuangan, dll., dan bidang organisasi dan regulasi membentuk inti dari sistem keuangan. Sistem ini juga secara tidak langsung mencakup perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang terlibat dalam peredaran dan penciptaan uang. Pada prinsipnya, hanya sebagian kecil dari ekonomi alam yang tidak menggunakan pertukaran moneter yang tetap berada di luar sistem ini dan oleh karena itu bebas dari inflasi dan hubungan pasar uang dan kredit lainnya.

Perlu dicatat bahwa bahkan di negara-negara yang paling maju sekalipun, kita dapat menemukan sektor ekonomi alam yang berbeda, seringkali marginal, yang terkait dengan kegiatan tradisional, terutama yang melibatkan produksi pertanian, kerajinan tangan, dan berbagai jasa. Bidang ini berada di luar jangkauan sistem keuangan, bursa komoditas, dan statistik negara. Sektor ini bukanlah target penting bagi kebijakan ekonomi; sektor ini memainkan peran yang bermanfaat sebagai pembawa tradisi dan ikatan lingkungan serta sebagai peredam guncangan pada periode pergolakan dan krisis regional, meskipun dianggap menampung ekonomi informal dan keterbelakangan. Contoh ekstrem dari komersialisasi dan perluasan kontrol negara atas ekonomi alam adalah penghancuran kebun pribadi dan kebun rumah di negara-negara komunis dan promosi pengaduan tentang kegiatan informal ke kantor pajak di negara-negara Barat. Dilema yang ditimbulkan oleh keberadaan ekonomi alam dapat direduksi menjadi konfrontasi antara radikalisme fiskal dan apresiasi terhadap pentingnya ikatan sosial dan keamanan ekonomi.

Pendekatan sistemik memungkinkan untuk melihat aktivitas entitas dan komponen sistem ekonomi secara dinamis dan multidimensional dalam jangka waktu yang panjang. Ciri khas sistem keuangan adalah bahwa ia merupakan mekanisme yang berkontribusi dalam menyediakan layanan yang memungkinkan peredaran daya beli dalam perekonomian. Ia menunjukkan fungsi dasar sistem keuangan dalam perekonomian, yaitu fungsi moneter, yang mencakup penyediaan kuantitas dan struktur uang yang diperlukan bagi perekonomian dan pengorganisasian peredarannya yang memungkinkan berbagai jenis pembayaran dilakukan; fungsi modal dan redistribusi, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang efektif; dan fungsi kontrol, yang digunakan untuk memverifikasi keputusan mengenai penggunaan sumber daya moneter dan modal bebas.

Dari sudut pandang kelancaran fungsi seluruh perekonomian, suatu keadaan yang diinginkan adalah keadaan yang aman yang ditentukan oleh kondisi bidang ekonomi riil, termasuk keseimbangan internal dan eksternal, keadaan ketertiban sosial, dan stabilitas sistem keuangan. Ciri-cirinya meliputi kualitas hidup warganya, tingkat aktivitas profesional



yang tinggi, stabilitas harga dan nilai tukar, dan keberlanjutan hubungan modal, yang mendorong prediktabilitas tren dan perilaku pasar. Hal ini dicirikan oleh tingkat volatilitas yang rendah dan ketahanan yang tinggi terhadap fenomena pasar alami dalam permintaan dan penawaran. Stabilitas sistem ini kondusif untuk menghilangkan guncangan eksternal, kemampuan masyarakat untuk menahan risiko, alokasi sumber daya keuangan yang efisien dalam perekonomian, dan identifikasi serta pengelolaan risiko yang efektif. Semua ini mendorong fungsi ekonomi negara sebagai sistem yang efisien dan merupakan syarat untuk kelancaran fungsi seluruh perekonomian.

Sejauh ini, sebagian besar perhatian telah diberikan pada pembangunan stabilitas keuangan. Konsep ini didasarkan pada pembangunan jaringan untuk keamanan dan pengendalian risiko dalam sistem keuangan. Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan, yang memprakarsai kerja sama antar bank sentral di bidang ini, harus dianggap sebagai pelopor konsep ini. Rekomendasi Komite Basel mengikuti arah perilaku terkoordinasi dari lembaga-lembaga yang membentuk jaring pengaman untuk memastikan stabilitas makroekonomi berdasarkan mekanisme pasar yang efisien, infrastruktur kelembagaan yang berkembang dengan baik, promosi kebijakan ekonomi yang sehat, dan prosedur transparan untuk perlindungan sistemik. Namun, konsep melakukan politik melalui lensa keuangan ini tidak menjamin keberhasilan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Tampaknya mustahil tanpa melindungi perekonomian dari dampak negatif globalisasi, termasuk transmisi resesi dan krisis.

Konfirmasi perbedaan antara dimensi ekonomi dan keuangan dari stabilitas dan kemakmuran umum adalah contoh Zona Euro. Uni Eropa menunjukkan kepedulian yang besar terhadap peningkatan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Uni Eropa mengelola sistem keuangan kelompok secara keseluruhan melalui kerja sama dengan Sistem Bank Sentral Eropa dan lembaga keuangan nasional dan internasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas keuangan, yang terutama diimplementasikan melalui langkah-langkah kebijakan makro-prudensial. Upaya mencapai stabilitas keuangan pada dasarnya bermuara pada solusi yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah akumulasi risiko berlebihan akibat faktor eksternal dan gangguan pasar;
2. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan dan mengurangi potensi efek domino (dimensi lintas sektor);
3. Mendorong penerapan perspektif sistemik dalam regulasi keuangan untuk memungkinkan pengembangan serangkaian insentif yang tepat bagi pelaku pasar (dimensi struktural).

Membangun stabilitas ekonomi dipahami secara luas. Hal ini membutuhkan upaya untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap perkembangan yang merugikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komponen-komponennya, yaitu pelaku pasar keuangan dan mekanisme serta pengaturan regulasi, mampu menahan guncangan ekonomi dan koreksi tajam dalam ketidakseimbangan keuangan dan bahwa, jika terjadi materialisasi risiko di tingkat mikroekonomi, tidak terjadi kaskade materialisasi risiko di tingkat sistemik.



Kebijakan stabilitas ekonomi dapat menjadi bentuk perluasan dari konsep dan pengalaman kebijakan stabilitas keuangan. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Polandia, stabilitas didefinisikan sebagai keadaan di mana sistem keuangan menjalankan fungsinya secara terus menerus dan efisien, bahkan dalam hal gangguan yang tidak terduga dan merugikan dengan magnitudo yang signifikan. Bank sentral telah menjadi lembaga utama jaring pengaman keuangan dengan peran yang semakin meningkat dalam bidang stabilitas moneter dan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perubahan dalam cara kerja, tujuan, dan strategi bank sentral, serta ruang lingkup dan instrumen kebijakan moneter, termasuk kebijakan makro-prudensial yang sedang diterapkan saat ini. Bank sentral diharapkan bertanggung jawab tidak hanya untuk kebijakan moneter menggunakan instrumen standar dan non-konvensional tetapi juga untuk stabilitas keuangan dan keberhasilan implementasi proses tersebut, di mana kebijakan makro-prudensial yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengurangi konsekuensi negatif dari risiko sistemik termasuk dalam rangkaian tujuan.

Menjaga stabilitas sistem keuangan membutuhkan pemantauan risiko sistemik yang muncul di dalam atau di sekitar sistem keuangan dan mengambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut. Sistem keuangan yang stabil merupakan syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam menilai stabilitas sistem keuangan publik, pertimbangan utama haruslah pemenuhan fungsi-fungsi dasar sistem ini, yaitu fungsi alokasi, redistribusi, dan stabilisasi, serta upaya untuk mencegah destabilisasi dan ketidakseimbangan permanen.

Hilangnya stabilitas keuangan berarti kegagalan untuk memenuhi standar struktur penerimaan dan pengeluaran yang diinginkan dalam sistem keuangan publik, yang dibuktikan dengan peningkatan risiko, yang membutuhkan respons dari lembaga keuangan publik. Tanda-tanda ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat dilihat dalam fenomena seperti krisis di tingkat nasional dan internasional. Peran bank sentral dalam menghadapi risiko ekonomi dan ruang lingkup tindakan dalam mekanisme penyeimbangan kembali keuangan selama fase krisis tampaknya sangat kontroversial karena tidak menghasilkan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Krisis perbankan sentral baru-baru ini telah menyebabkan melemahnya standar yang telah berlaku selama bertahun-tahun dan yang menetapkan arah dan metode kebijakan moneter. Hal ini juga menyebabkan perubahan persepsi tentang peran dan kewajiban bank sentral untuk menjaga stabilitas seluruh perekonomian sebagai suatu sistem. Tujuan ini sekarang tampaknya lebih penting daripada paradigma stabilitas moneter karena yang terakhir jelas telah kehilangan prominensinya.

Perluasan formula intervensi publik untuk mencakup penyediaan keamanan dan stabilitas bagi seluruh perekonomian menyediakan pengaturan kelembagaan dan regulasi serta bantuan publik, bantuan keuangan dari pemerintah, bank sentral, dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional. Intervensi publik pada dasarnya berbeda dari bantuan kepada sektor keuangan. Cakupan subjektif diperluas dari sektor keuangan ke kelompok pelaku ekonomi lainnya. Ini adalah bantuan yang ditargetkan yang bertujuan untuk hasil yang terukur, yang melibatkan kebutuhan akan koordinasi dan interaksi



antara semua lembaga di ranah publik. Ini berarti melampaui hubungan antara bank sentral dan bank komersial. Pada akhirnya, terserah kepada otoritas negara untuk menentukan sumber kerugian dan menilai besarnya, melakukan proses pemulihan, mengambil langkah-langkah ad hoc untuk stabilisasi, meminimalkan dampak negatif, dan menentukan besarnya jaminan dan, khususnya, jumlah kompensasi keuangan. Keterlibatan dana publik untuk bantuan memerlukan regulasi dan bergantung, seperti halnya pilihan jalur bantuan, pada tingkat krisis dan penilaian keadaan serta tingkat risiko oleh lembaga pengawas keuangan negara. Intervensi negara pada saat ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan bantuan kepada pelaku ekonomi selama krisis merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara. Banyak hal bergantung pada kondisi umum ekonomi, situasi politik, efisiensi aparatur negara, dan kecepatan tindakan.

Keamanan dan stabilitas ekonomi telah menjadi pusat perhatian dalam koordinasi kebijakan negara, bank sentral, dan masyarakat umum yang diwakili oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan. Ketika menentukan instrumen untuk memulihkan dan memperkuat stabilitas, perlu mempertimbangkan prinsip untuk selalu menghitung biaya dan dampak yang diharapkan dari implementasi upaya stabilisasi yang dipilih sebelum memutuskan bentuk bantuan kepada entitas keuangan dan non-keuangan. Prinsip ini pada akhirnya akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang solusi yang akan diimplementasikan. Ini tentang melihat pertimbangan ekonomi dan sosial jangka panjang di luar lingkup kepentingan komersial jangka pendek dan sempit.

6.4 SISTEM KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN NEGARA

Meskipun bantuan negara umumnya dianggap terlambat dan tidak memadai dalam krisis parah, resesi mendalam, atau krisis ganda, penggunaan instrumen untuk memperbaiki gangguan telah memberikan dampak yang nyata. Untuk menilai pentingnya stabilitas ekonomi dan keuangan dalam kebijakan nasional, perlu dikaji bagaimana sumber daya bantuan dialokasikan untuk prioritas ekonomi dan sosial tertentu setelah krisis hipotek subprime 2007–2009 yang dipicu oleh ekspansi dan spekulasi berlebihan sektor keuangan AS di pasar properti.

Literatur juga menggambarkan banyak kasus perlakuan tidak setara terhadap aktor di negara-negara OECD lainnya, termasuk Uni Eropa. Contoh dukungan praktis untuk bank-bank nasional terkuat, yang sebagian besar beroperasi di pasar internasional, mendominasi. Pemberian bantuan dibenarkan oleh program untuk melindungi lapangan kerja di industri tertentu. Menariknya, bantuan negara yang diberikan kepada bank tidak diterjemahkan menjadi dukungan untuk perusahaan yang lebih lemah dan stimulasi lapangan kerja. Sebaliknya, bantuan tersebut digunakan untuk meratakan kerugian, rekapitalisasi bank, dan meningkatkan kinerja mereka; bantuan tersebut menjamin program restrukturisasi dan proses konsolidasi pembiayaan. Contoh negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut antara lain Spanyol, Portugal, dan Italia. Kebutuhan akan program pemulihan sektor keuangan strategis ditekankan, dengan mempertimbangkan pemulihan daya saing bank dan lembaga keuangan sambil menerima aktivitas industri yang rendah dan pengangguran yang tinggi. Cara



penyeimbangan ini menyebabkan ekspansi sektor keuangan yang lebih nyata dan memburuknya kondisi masyarakat dan ekonomi riil.

Apa yang disebut pelonggaran kuantitatif telah menjadi sumber pendanaan utama untuk dukungan sektor keuangan dalam kebijakan kontra-siklik di sebagian besar negara maju. Proses ini terdiri dari "mencetak uang", yaitu, memperbesar basis moneter melalui pembelian obligasi pemerintah dalam skala besar dan menurunkan suku bunga, yang menyebabkan lonjakan likuiditas yang kuat dalam sistem keuangan. Sebagai hasil dari kebijakan ini, basis moneter (M1) di Amerika Serikat meningkat sekitar 15 kali lipat setelah tahun 2007, mencapai level US\$21 miliar saat ini, melebihi dinamika PDB berkali-kali selama periode ini. Di Uni Eropa, mekanisme penciptaan uang dalam skala serupa telah diluncurkan.

Pelonggaran kuantitatif, yang awalnya diperkenalkan oleh otoritas moneter AS dan kemudian oleh Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan negara-negara lain, memiliki efek pemulihan jangka pendek, tetapi penyebaran metode non-standar ini untuk memperluas likuiditas oleh sebagian besar negara dan perlindungan pasar domestik dari ekspansi mata uang asing telah menyebabkan ekonomi global mengalami kelebihan likuiditas dan inflasi kronis.

Kebijakan anti-krisis yang diuraikan di sini, yang berfokus pada stabilitas dan keamanan lembaga sektor keuangan, telah mengungkapkan risiko dan arah baru untuk perubahan jangka panjang dalam ekonomi global yang dihasilkan dari mengabaikan bidang riil dan sosial. Dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter untuk pertumbuhan stabil sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan dengan metode yang melibatkan penurunan nilai uang (QE), penurunan kualitas fungsi uang, dan depresiasi nilainya yang cepat. Semua ini dikonfirmasi oleh penolakan paradigma stabilitas moneter dan penurunan kepercayaan pada tata kelola moneter global.



Gambar 6.3 Pasokan uang M1 (2006–2022, dalam miliar dolar AS).

Keadaan sektor keuangan saat ini, yang dibentuk oleh intervensi negara setelah krisis terakhir, ditandai dengan akumulasi aset keuangan yang signifikan dan peningkatan kapitalisasi di atas kinerja operasional. Periode ini juga menyebabkan peningkatan utang publik dan utang



struktural di negara-negara Barat. Di sebagian besar perekonomian, terjadi peningkatan lebih lanjut dalam jarak antara sektor keuangan dan cabang-cabang yang membentuk bidang riil. Pangsa pertanian, industri, dan cabang ekonomi lainnya dalam PDB negara-negara ini terus menurun. Dana konsumsi sosial yang tinggi memperburuk ketergantungan pada impor barang. Konsentrasi fenomena ini meningkatkan paparan risiko dan menimbulkan dilema baru bagi pilihan kebijakan. Ternyata tujuan negara dalam hal kebijakan stabilitas sistem keuangan adalah menggunakan bantuan publik dalam menyelesaikan masalah dan memulihkan daya saing pelaku sektor keuangan. Entitas non-keuangan tidak dapat mengandalkan bantuan pada tingkat yang sama, yang membedakan posisi mereka dalam kaitannya dengan lingkungan ekonomi domestik dan luar negeri. Peran negara dalam melindungi bank dari risiko sistemik terbatas pada pemberian asuransi terhadap konsekuensi peristiwa buruk, sementara beban biaya bantuan diganti dari sumber publik.

Hak istimewa bank untuk diasuransikan secara gratis oleh negara berkontribusi pada kesediaan mereka untuk mengambil risiko dan ekspansi keuangan eksternal, yang mendorong konsentrasi sektor dan konsolidasi entitas keuangan. Perlindungan negara terhadap aktivitas bank dikombinasikan dengan kerja sama dalam mengejar tujuan kebijakan ekonomi, khususnya terkait ekspansi luar negeri. Pendapat bahwa modal memiliki kewarganegaraan tertentu dikonfirmasi oleh partisipasi aktor keuangan dalam menetapkan tujuan dan memengaruhi proses ekonomi dan kebijakan negara.

6.5 DAMPAK PEMBANGUNAN STRUKTUR DARI KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA

Saat ini, di negara-negara OECD, sektor keuangan pada dasarnya mendorong pertumbuhan PDB. Di sebagian besar negara OECD, sektor ini merupakan industri terpenting dan paling ekspansif yang menentukan fungsi seluruh perekonomian. Sektor ini juga mempekerjakan kelompok pekerjaan terbesar di bank dan lembaga non-bank yang terlibat dalam penjualan dan layanan jasa keuangan, termasuk mengendalikan sejumlah besar operasi luar negeri. Kebijakan ekonomi negara yang sangat berfokus pada stabilitas sektor keuangan diyakini dapat mengurangi risiko dan, pada saat yang sama, mendorong ekspansi dan dominasi sektor keuangan dalam perekonomian. Memperluas cakupan kebijakan ini ke sektor ekonomi lainnya dapat memecahkan masalah sektoral dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara dengan perekonomian maju mengalami kanibalisme ekonomi di mana sektor keuangan menghasilkan dan sekaligus menyerap sebagian besar aset keuangan, termasuk bantuan publik. Jumlah uang yang berlebihan di bank dan dana investasi mengintensifkan pencarian area dengan imbal hasil tinggi, seringkali dengan risiko yang sangat tinggi. Ini bukan tentang menyelesaikan masalah ekonomi riil. Ada godaan yang meningkat untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk usaha berisiko dan berinvestasi dalam program luar angkasa dan proyek-proyek tidak pasti lainnya, termasuk keterlibatan dalam pasar spekulasi; pasar mata uang kripto dan derivatifnya berkembang pesat; dan sebagainya. Ini adalah kasus keterlibatan sektor keuangan dalam perusahaan teknologi, seperti Microsoft, Apple, Tesla, dan Uber, yang kapitalisasi absurdnya terlepas dari kinerja operasional tanpa menjamin pengembalian yang memadai. Dengan cara ini, sistem keuangan telah menyetujui



mekanisme tambahan untuk penciptaan uang dan pembangkitan modal. Di bawah mekanisme ini, perusahaan teknologi besar, bekerja sama dengan dana investasi sebagai pemegang saham utama, membangun piramida keuangan dengan secara berkala meningkatkan nilai aset mereka sendiri terlepas dari produktivitas aktualnya. Fenomena ini diabaikan oleh lembaga pengawas keuangan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman pasca-krisis beberapa tahun terakhir, penggunaan instrumen bantuan negara secara besar-besaran untuk kepentingan bank telah menyebabkan pergeseran krisis utang dari sektor keuangan yang telah direvitalisasi ke ranah publik negara. Kondisi sektor keuangan yang sangat baik dikaitkan dengan utang negara-negara dengan perekonomian terbesar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, Prancis, dan Brasil, serta negara-negara yang lebih kecil, seperti Yunani dan Portugal. Beban utang publik hanya bersifat hipotetis bagi generasi mendatang karena, dalam praktiknya, hal itu menciptakan pasar untuk instrumen utang, yang merupakan area aktivitas terpenting bagi bank dan dana investasi.

Mekanisme di mana akumulasi sektor keuangan didorong oleh keuntungan dari pembiayaan utang publik telah menjadi bentuk aktivitas ekonomi skala besar dan pertumbuhan PDB yang paling penting di negara-negara maju secara ekonomi. Dalam ekonomi terbuka, modal asing secara aktif terlibat dalam proses akumulasi aset keuangan. Pertumbuhan aset sektor keuangan dihadapkan dengan sektor riil ekonomi, yang terpinggirkan di banyak negara. Dengan penurunan pasokan produk domestik, permintaan internal untuk barang konsumsi semakin dipenuhi oleh berbagai macam barang impor. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan sektor domestik dalam bentuk barang pada barang impor dan, pada saat yang sama, meningkatkan bahaya semakin ketatnya lingkaran utang di sektor keuangan seperti yang terjadi di negara-negara Uni Eropa yang lebih lemah.

Pengalokasian sektor riil ke negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah telah memperdalam ketergantungan negara-negara maju pada impor produk industri dasar, yang pada akhirnya menyebabkan penutupan pabrik dan hilangnya spesialis di banyak profesi. Perkembangan teknologi dan biaya tenaga kerja yang tinggi terkadang membuat produksi kembali tidak mungkin dilakukan. Kelangkaan yang baru-baru ini diamati di pasar untuk produk setengah jadi, obat-obatan, komponen elektronik mobil, baterai, dan bahkan pakaian, alas kaki, dan makanan secara langsung menyebabkan harga barang impor yang lebih tinggi dan seringnya gangguan rantai pasokan. Dalam konteks ini, promosi re-offshoring sama sekali tidak efektif dan hanya tipu daya. Berdasarkan proses hilangnya banyak cabang ekonomi di Eropa pada tahun 1990-an, seperti industri elektronik, pembuatan kapal, dan pakaian, dimungkinkan untuk membuat proyeksi industri lain yang saat ini berada pada fase yang lebih awal. Sekilas, industri otomotif menarik perhatian kita, yang menghilang di depan mata kita di bawah pengaruh ekspansi merek-merek Asia.

Ketidakseimbangan yang semakin besar dalam ekonomi riil dan ekspansi sektor keuangan secara bersamaan dengan meningkatnya utang negara, serta penurunan pentingnya sektor riil ekonomi, tidak menciptakan prospek yang memuaskan atau menguntungkan bagi



negara atau kelompok pemangku kepentingan lainnya. Kelebihan uang menyebabkan erosi fungsinya dan penurunan kualitas uang, yang pada gilirannya menyebabkan memburuknya hubungan pertukaran, menghindari mata uang berisiko, yang biasanya berujung pada krisis, inflasi, peningkatan utang negara, dan defisit anggaran. Inflasi yang tinggi mengganggu proses pertukaran, penyelesaian, investasi, dan pembiayaan serta mendorong pencarian bentuk uang elektronik lainnya yang meningkatkan kepercayaan terhadap uang, keamanan penyelesaian keuangan, dan stabilitas tabungan. Sebagai akibat dari pertumbuhan aset sektor keuangan, terjadi peningkatan utang pemerintah. Dipengaruhi oleh biaya pembayaran utang luar negeri dan neraca pertukaran negatif, defisit neraca pembayaran meningkat, dan sebagainya. Rantai ketergantungan ini mengakibatkan perlambatan ekonomi secara umum, inflasi, kenaikan biaya, masalah struktural yang terlihat di sektor riil, pengangguran, dan penurunan pendapatan serta dana konsumsi, yang dalam jangka panjang memperdalam ketidakseimbangan ekonomi, memperburuk prospek kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya memicu krisis berikutnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penggunaan berkelanjutan dari efek pelonggaran kuantitatif dan peningkatan likuiditas lembaga keuangan. Fenomena ini juga harus dinilai melalui prisma efek ekonomi, termasuk fungsi sistem keuangan, ketahanan terhadap guncangan eksternal dan internal, pemenuhan kriteria kepercayaan sosial oleh sistem, terutama lembaga-lembaganya, dan dampak positif pada efek penggunaan sumber daya keuangan oleh entitas di sektor riil dan akibatnya pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial-ekonomi. Isu-isu ini juga memerlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai bidang utama kebijakan keuangan negara. Pendekatan ini seharusnya menjadi titik awal dalam memilih bentuk-bentuk bantuan negara dan menentukan cakupan instrumen non-konvensional yang digunakan dalam memulihkan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, paradigma stabilitas sistem keuangan terbukti salah dan tidak berfungsi dalam praktik karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi. Kepentingan publik menuntut tanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan di semua bidang ekonomi.

Dalam pencarian kunci keseimbangan umum, muncul pertanyaan tentang hubungan antara kecukupan pengembangan pasar nasional dan pasar keuangan global serta tingkat pengembangan modal sosial. Hal ini mengarahkan perhatian pada pentingnya menyeimbangkan kebebasan dan dimensi sosial ekonomi dengan stabilitas dan keamanan yang dianggap sebagai tantangan strategis yang dihadapi oleh semua kategori pemangku kepentingan.

6.6 GLOBALISME VS KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Salah satu faktor yang mendestabilisasi ekonomi global dalam hal tanggung jawab negara untuk mengatur sisi material kehidupan adalah inisiatif pembangunan ekonomi yang saling bersaing. Ini bukan konsep teoritis tetapi realitas ekonomi yang mengekspresikan perjuangan untuk pengaruh dan kekuasaan ekonomi pada tahap globalisasi saat ini.

Tampaknya, kontrol modal dari atas ke bawah merupakan konsep dominan globalisasi yang diwakili oleh ekonomi terbesar di dunia. Di balik konsep ini terdapat dana investasi dan



pensiun yang bekerja sama, mengelola jaringan hubungan modal yang berjenjang bersama dengan bank dan perusahaan terbesar di dunia. Ternyata, slogan-slogan paling radikal dari liberalisme ekonomi korporat dan perubahan ekonomi dan sosial diusung oleh perwakilan modal terbesar. Program-program perlindungan ekosistem, transisi energi, dan migrasi penduduk merupakan tantangan resmi dari dana investasi terbesar yang menyatukan perusahaan-perusahaan besar dalam perjuangan mereka untuk kekuasaan dan dominasi ekonomi. Gagasan revolusi hijau, nol karbon, dan dalam waktu dekat, pengurangan reproduksi, konsumsi individu, dan mobilitas masyarakat, membentuk visi peradaban baru. Mengingat kekejaman dalam eksploitasi bahan mentah, kerusakan ekosistem, ketegangan sosial, dan ketergantungan neo-kolonial, agenda baru pengayaan investor dan pasivitas negara merupakan penyebab kekhawatiran dan kekecewaan.

Masa depan di mana terjadi penurunan kualitas hidup, pengurangan konsumsi bagi masyarakat luas, dan ketidakadilan yang mendalam dari solusi yang memberikan hak istimewa bagi orang terkaya adalah janji dominasi atas dunia yang miskin dan tanpa kebebasan. Konsep ini menghancurkan pencapaian peradaban dan merendahkan fondasi masyarakat sipil. Korporasi ekspansif yang didukung oleh media swasta dan LSM menyerang ranah lembaga publik negara-negara yang secara ekonomi lebih lemah. Dengan mengganggu lembaga publik, tujuannya adalah untuk mengacaukan otoritas publik dan melemahkan fungsi negara. Fenomena baru ini menjadi elemen penting dari perpecahan internal dan ketegangan sosial.

Evolusi globalisasi, atau bahkan deglobalisasi, dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan sejumlah perkembangan berbahaya yang menyebabkan akumulasi dampak buruk dan konflik yang menunjukkan jebakan peradaban yang berbahaya dan memunculkan polarisasi kekuatan ekonomi serta memperdalam ketidaksesuaian struktural. Menjadi jelas bahwa globalisasi, yang membawa manfaat unilateral, memperdalam distribusi dampak yang tidak adil, dan melanggengkan ketidaksetaraan, adalah doktrin ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, ia mengintensifkan dinamika eksploitasi sumber daya yang bersifat predator, berkontribusi pada semakin dalamnya kerusakan lingkungan, dan membuat mustahil untuk menembus hambatan pertumbuhan.

Dalam praktiknya, doktrin globalisasi berarti kurangnya kendali atas beberapa proses ekonomi, asimetri, dan ketidakmampuan untuk melindungi ekonomi domestik dan untuk bersaing karena menempatkan pemain asing pada posisi istimewa. Aktor lokal menjadi subkontraktor, terkadang hanya karena perusahaan asing dapat menunjukkan kapitalisasi yang lebih tinggi, peringkat kelas satu, dan jaminan dari bank-bank besar. Fenomena ini berkontribusi pada pengurasan sumber daya, pengalihan biaya ke negara-negara yang lebih lemah, dan akibatnya peningkatan ketergantungan sektoral dan proporsi pembangunan yang tidak menguntungkan dalam perekonomian. Arah baru polarisasi ekonomi global mengabaikan batas-batas nasional dan upaya regulasi. Akibatnya, para profesional berpendidikan tinggi didorong untuk beremigrasi, dan sekelompok negara yang lebih kuat memperoleh penemuan ilmiah dan paten. Pada saat yang sama, limbah, peralatan usang, dan industri padat energi dialihkan ke arah sebaliknya. Eropa Tengah adalah tempat



terkonsentrasinya penjualan mobil bekas dan pembuangan limbah dari negara-negara Uni Eropa lainnya.

Perlawanan terhadap globalisme tidak hanya tumbuh di negara-negara yang lebih lemah. Peningkatan dampak sosial-ekonomi negatif globalisasi dapat dengan mudah terlihat di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Perlawanan dan penolakan terhadap globalisasi yang muncul dapat digambarkan sebagai ekspresi pembelaan kedaulatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan internal. Kedaulatan ekonomi menciptakan peluang bagi negara-negara kecil untuk bertahan hidup dan memberikan kesempatan yang sama untuk pembangunan. Strategi ini merupakan reaksi alami terhadap perlakuan tidak adil terhadap negara-negara yang lebih lemah dalam proses globalisasi. Melindungi kepentingan sendiri, mengendalikan sumber daya dan lapangan kerja lokal, serta menciptakan kondisi untuk pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi dapat menghentikan kehancuran ekonomi akibat proses globalisasi. Selain itu, kebijakan membela kedaulatan ekonomi mengarah pada pematangan rasa kebersamaan kepentingan ekonomi dan pematangan lembaga-lembaga demokrasi negara sebagai entitas independen dalam ekonomi terbuka. Langkah pertama ke arah ini tampaknya adalah perlunya menyelidiki mekanisme globalisasi dan merevisi ilmu ekonomi, yang menyajikan fungsi ekonomi nasional secara tradisional, karena tidak memahami globalisasi atau menyembunyikan kekuatan destruktifnya.

Kebebasan dan keamanan operasi lintas batas juga tidak dibatasi dengan benar oleh hambatan globalisasi. Saat ini, tidak ada yang mempertanyakan peran ekonomi negara, yang telah menjadi peserta aktif dalam mendukung ekspansi eksternal. Di negara-negara dengan pemahaman yang baik tentang risiko keterbukaan ekonomi, instrumen proteksionisme secara sadar diterapkan di bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan dan keamanan negara, perlindungan pasar internal, ruang lingkup pengawasan negara, perencanaan pengembangan dan penggunaan hasil ilmiah, perlindungan paten, dan promosi industri yang paling kompetitif. Paket ini juga mencakup kebijakan stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Faktor-faktor yang mendukung kebijakan kedaulatan ekonomi juga mencakup keadaan lokal, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, pasar tenaga kerja yang kaku, spesialisasi yang kuat, dan profil preferensi di tingkat regional, dan lain sebagainya. Keadaan ekonomi dan budaya lokal mengakibatkan segmentasi pasar yang mendalam yang menghambat penetrasi pasar lokal dan penyebaran tren yang tidak menguntungkan meskipun terjadi ekspansi perusahaan global. Contohnya termasuk rasa nilai dan kekhasan budaya yang kuat serta keengganan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumsi. Sikap-sikap tersebut mencerminkan perlawanan terhadap disintegrasi komunitas, misalnya, melalui slogan-slogan revolusioner, seperti, "makan cacing", atau, "nol emisi", dengan kepentingan tertentu di baliknya yang mengganggu struktur ekonomi lokal yang telah mapan secara tradisional.



6.7 TANTANGAN PENCARIAN MODEL EKONOMI BARU

Tren jangka panjang ekonomi global ditandai oleh dinamika yang relatif tinggi dari perubahan yang kompleks dan multidireksional. Proyeksi perubahan dapat dijelaskan lebih tepat oleh AI daripada analisis tren dan indikator risiko. Dari perspektif analisis jangka pendek untuk tujuan bisnis, perubahan tersebut diekspresikan sebagai manifestasi ketidakstabilan ekonomi yang ditandai oleh periode resesi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak teratur, dengan perubahan struktural dan kualitatif jangka panjang di baliknya.

Mengikuti pendekatan sistemik dalam kebijakan ekonomi, negara berupaya menciptakan sinergi antar sektor di sekitar tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui reformasi, perbaikan, dan intervensi, negara menyatukan potensi, memperkuat hubungan yang lebih lemah, dan membangun hubungan yang bermanfaat dengan lingkungan. Dalam kondisi pasar terbuka, manifestasi ketidakstabilan ekonomi berkembang secara spontan yang dipandu oleh visi keuntungan dari aktor-aktor yang lebih kuat secara ekonomi. Dalam kondisi kebijakan ekonomi liberal yang dipahami secara tradisional, sektor keuangan, dan sektor riil ekonomi, yang kehilangan rasa kebersamaan kepentingan, mengejar tujuan terpisah yang menyebabkan disintegrasi ekonomi.

Rasionalitas hubungan antara sistem keuangan dan sektor riil ekonomi adalah bahwa pertumbuhan PDB yang pesat membutuhkan sistem keuangan untuk tunduk, sementara setiap masalah yang terkait dengan stabilitas sistem ini, seperti inflasi, suku bunga negatif, dan ketergantungan pada modal asing, berdampak negatif pada sektor riil ekonomi. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang pesat berkontribusi pada perkembangan sektor keuangan, seperti yang dicontohkan oleh negara-negara Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok), yang merupakan "pabrik dunia" dan kreditor terbesar dalam ekonomi global. Klaim yang berlawanan, yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang stabil memungkinkan tercapainya tingkat pertumbuhan PDB yang pesat dan sektor keuangan merangsang ekonomi riil, menimbulkan keraguan serius. Sebagaimana terlihat dari pengamatan globalisasi di negara-negara OECD, prasyarat untuk pengembangan ekonomi adalah kebijakan negara yang aktif yang diarahkan pada pertumbuhan berkelanjutan, dengan koordinasi kepentingan ekonomi, keseimbangan internal, dan diversifikasi yang memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Prasyarat untuk menggunakan ekonomi terbuka untuk pembangunan ekonomi adalah daya saing internasional dan kualitas infrastruktur yang menghubungkan ekonomi dengan lingkungan global. Ini juga mencakup infrastruktur informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memastikan pergerakan sumber daya yang cepat, murah, dan aman. Tindakan-tindakan ini merupakan ranah otoritas negara, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Kerja sama internasional dan integrasi ekonomi dan moneter dapat menjadi faktor yang berkontribusi untuk mengurangi ketidaksesuaian antara elemen-elemen sistem keuangan dan ekonomi riil. Uni Eropa, sebagai kelompok integrasi yang memikul beban untuk mengejar kebijakan ekonomi bersama, telah mengalami banyak kegagalan dalam sistem keuangan dan moneter serta di bidang riil. Meskipun negara-negara anggota telah mengembangkan standar hidup dan tingkat pembangunan ekonomi yang umumnya tinggi, tingkat pertumbuhan Uni



Eropa yang menurun relatif terhadap pesaing utamanya, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, mungkin merupakan ujian terhadap efektivitas kebijakan ekonomi. Kinerja sistem moneter Eropa yang moderat atau bahkan buruk dalam hal ekspansi eksternal dan daya saing dengan mata uang utama lainnya, bahkan relatif terhadap negara-negara Uni Eropa yang bukan anggota Zona Euro, patut diperhatikan.

Analisis singkat mengungkapkan kelemahan dalam mekanisme integrasi yang menunda efek konvergensi. Penyesuaian struktur ekonomi didasarkan pada ketergantungan administratif yang melanggengkan persaingan internal yang agresif, sementara peningkatan standar hidup memperdalam polarisasi ketidaksetaraan. Terlepas dari berlalunya lebih dari setengah abad integrasi, pasar internal masing-masing negara Uni Eropa masih berbeda secara signifikan dalam tingkat pembangunan, struktur cabang, pendapatan, dan tingkat konsumsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan bersama Uni Eropa, seperti Uni Moneter, yang merupakan hasil dari keseimbangan kekuatan negara-negara anggota, tidak menghasilkan efek sinergi. Karena kesalahan-kesalahan ini dan kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh para politisi, sulit untuk melihat kemajuan dalam pengembangan internal dan peningkatan potensi Uni Eropa dibandingkan dengan negara-negara ekonomi terkemuka lainnya.

Berkaitan dengan masalah sistem keuangan, Uni Eropa memfokuskan perhatiannya pada masalah internal, terutama pada pengamatan dan pendeteksian kelemahan dalam struktur sistem keuangan nasional dan pemeriksaan ketahanan di sektor perbankan negara-negara anggota. Tidak sulit untuk melihat bahwa membangun stabilitas keuangan adalah salah satu elemen tata kelola internal melalui pelebagaan prosedur dan standar kehati-hatian. Pada prinsipnya, organisasi tersebut melakukan aktivitas pasif. Pertama dan terutama, Uni Eropa sejauh ini gagal menciptakan solusi yang akan memobilisasi potensi bersama yang mampu memperluas pengaruhnya dan mempertahankan ekonominya dari persaingan eksternal, sambil menghilangkan contoh-contoh persaingan internal atau bahkan upaya dominasi antar anggota yang mengurangi potensi ekonomi kelompok tersebut. Hipotesis ini dapat dikonfirmasi oleh banyak contoh perlakuan tidak adil terhadap negara-negara anggota.

Seperti halnya globalisasi dalam skala dunia, Uni Eropa adalah ruang di mana pengaruh ekonomi nasional bergeser, dan potensi modal terpolarisasi di sekitar negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi. Pasar nasional, seperti pasar internal Uni Eropa, ditandai dengan peningkatan asimetri di hampir setiap bidang. Kebijakan Uni Eropa tidak membangun etos ekonomi bersama atau mengejar agenda konsolidasi segmen pasar individu. Sebaliknya, ia mempertahankan etos persaingan internal. Badan-badan Uni Eropa bertindak untuk kepentingan ekonomi anggota terkuat. Tahap perkembangan di mana aktor ekonomi, termasuk lembaga keuangan, bertindak untuk kepentingan pan-Eropa belum tercapai. Bank dan perusahaan profesional, yang didukung oleh modal nasional negara-negara anggota, menundukkan, atau melawan pesaing yang lebih lemah dengan melemahkan daya saing eksternal Uni Eropa dan situasi ini diterima.

Uji kemampuan manajerial lembaga-lembaga Uni Eropa mungkin adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif. Uni Eropa belum cukup matang untuk melakukan solusi rasional sebagai organisasi supranasional. Contohnya adalah kelambatan



atau bahkan ketidakberdayaan dalam memerangi pandemi, krisis energi, atau masuknya imigran, dan dalam bantuan untuk Ukraina. Birokratisasi, korupsi, dan statisme, perlakuan tidak adil terhadap negara-negara anggota, kegiatan di luar perjanjian, dan keterlibatan kuat badan-badan Uni Eropa dalam perjuangan politik dan dalam mempromosikan ideologi sayap kiri berkontribusi pada kurangnya pencapaian ekonomi dan harapan yang tidak terpenuhi. Semua ini menunjukkan perlunya kewaspadaan, akuntabilitas, dan pengawasan yang mendalam terhadap inisiatif organisasi internasional ini oleh negara-negara anggota. Replikasi nyata dari fenomena negatif globalisasi menegaskan perlunya mencari jalur pembangunan yang lebih cepat dan perubahan mendalam dalam mekanisme Uni Eropa.

Globalisasi harus berlangsung dalam kondisi yang menghormati kepentingan semua peserta dalam permainan pasar, dan ini membutuhkan keamanan transaksi ekonomi, sikap kooperatif, perlindungan terhadap yang lemah, kepatuhan terhadap aturan etika umum, perlindungan hukum, dan pengawasan internasional. Memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh globalisasi membutuhkan upaya untuk meningkatkan daya saing, alokasi sumber daya dan pengeluaran yang akurat untuk pembangunan, ilmu pengetahuan, dan pembahasan yang berfokus pada daya tarik penawaran jangka panjang di pasar global. Namun, ini membutuhkan kerja sama antar cabang dan entitas ekonomi yang harus bersekutu dengan negara dan pemerintah daerah.

Sejauh ini, negara, dengan persetujuan masyarakat, telah tertarik pada proteksionisme dengan menjadikan instrumen proteksi sebagai sumber pendapatan anggaran tambahan. Ini adalah tindakan yang bersifat konservatif, secara artifisial menetapkan keseimbangan antara ekonomi internal dan lingkungan. Ini tentang kerja sama negara dalam mendefinisikan strategi ekonomi yang mengarahkan aktivitas entitas ekonomi individu menuju tujuan strategis, yang didefinisikan secara realistis, memanfaatkan peluang untuk membangun dan mengkonsolidasikan daya saing ekonomi dalam skala global. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis dan penggunaan instrumen kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pembangunan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat tata kelola mikroekonomi yang mengekspresikan potensi intelektual dan budaya para pelaku ekonomi. Perusahaan kontemporer di awal abad ke-21 menghadapi sejumlah tantangan peradaban, ekonomi, dan teknologi yang patut diatasi. Mengidentifikasi kondisi eksternal yang membentuk proses globalisasi memungkinkan perbandingan, penilaian diri mengenai posisi yang dipegang, termasuk kekuatan dan kelemahan, dan penilaian kemampuan untuk bersaing melawan lingkungan global. Di sisi lain, dengan menerima keadaan objektif ekonomi global, strategi tindakan dapat didefinisikan, termasuk arah pengembangan individu, yang dapat diperlakukan sebagai tantangan internal untuk berubah sebagai respons terhadap proses globalisasi. Hal ini karena jelas bahwa sebuah perusahaan, untuk bertahan dan tumbuh, harus menanggapi tantangan eksternal dengan menerapkan perubahan internal yang mengekspresikan modal intelektual dan sosialnya.

Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap perusahaan, perlu dibedakan antara adaptasi terhadap lingkungan, yang diungkapkan dalam strategi adaptasi, dan pengembangan



otonom, yaitu pencarian jati diri dan pengembangan identitas dalam kondisi operasional yang berubah, yang mengarah pada penemuan jalan pengembangan sendiri di tengah lingkungan. Di bawah pengaruh globalisasi, perusahaan mengalami perubahan internal; kepribadian barunya dihasilkan dari keputusan otonom, sikap kreatif, dan kebutuhan akan pengembangan internal. Daya saing merupakan efek eksternal dan akhir dari proses yang terjadi di dalam perusahaan. Untuk menentukan sejauh mana perubahan yang ditimbulkan oleh proses globalisasi, termasuk perubahan yang disengaja untuk menghadapi tantangan dalam hal ini, perlu dijawab sejumlah pertanyaan, dan khususnya menentukan seperti apa seharusnya perusahaan agar tetap kompetitif di masa depan. Berkat analogi yang erat dengan proses sosial dan peradaban, dimungkinkan untuk merujuk pada pengalaman positif semua aktor, termasuk individu dan komunitas manusia.

6.8 RINGKASAN

Stabilitas adalah kondisi ekonomi penting dengan banyak manfaat bagi mereka yang beroperasi di dalamnya. Pertama dan terpenting, hal ini memberikan kepastian dan prediktabilitas sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan sejumlah potensi risiko. Stabilitas ekonomi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara terencana dan menghitung pengeluaran serta pendapatan mereka. Konsumen dapat menabung dengan aman dan membuat keputusan pembelian.

Stabilitas ekonomi juga sangat penting untuk pembangunan ekonomi, terutama pada masa risiko ekonomi atau geopolitik tambahan, atau krisis ganda. Dalam kondisi stabilitas ekonomi, perusahaan lebih bersedia untuk berinvestasi, yang mengarah pada peningkatan produksi dan lapangan kerja. Stabilitas ekonomi juga bermanfaat bagi ekspor karena investor dan konsumen asing lebih bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara dengan ekonomi yang stabil. Lebih lanjut, mengingat manfaat stabilitas ekonomi, stabilitas dianggap sebagai barang publik dan hilangnya stabilitas dapat menimbulkan biaya sosial yang besar.

Stabilitas ekonomi sangat penting dalam konteks pembangunan dan kemakmuran ekonomi terbuka kecil, yaitu ekonomi yang lebih rentan terhadap fluktuasi eksternal, seperti perubahan harga komoditas, tren ekonomi internasional, atau peristiwa politik yang merugikan. Khususnya di ekonomi terbuka kecil, sektor keuangan yang kuat dapat memberikan stabilitas dan dukungan di masa krisis.

Manfaat globalisasi yang lebih tinggi akan dicapai oleh ekonomi yang didukung secara efisien oleh sistem keuangan yang memberikan fleksibilitas dan daya tanggap yang lebih besar terhadap perubahan serta kebebasan pembiayaan dan investasi, yang berarti produktivitas yang lebih tinggi, modernisasi yang lebih cepat, pemasaran yang lebih efisien, dan kemampuan untuk mengendalikan proporsi biaya dan profitabilitas. Model ini memberikan ruang bagi fungsi integratif negara yang bertanggung jawab atas pengembangan dan kondisi modal sosial. Kesimpulan mengenai isu stabilitas ekonomi adalah sebagai berikut:

- Dari sudut pandang kelancaran fungsi seluruh perekonomian, keadaan yang diinginkan adalah keamanannya yang ditentukan oleh kondisi bidang riil, termasuk keseimbangan internal dan eksternal, keadaan ketertiban sosial, dan stabilitas sistem keuangan.



- Sistem ekonomi, bersama dengan lembaga pengawas, harus mampu mencegah risiko serius terwujud pada tingkat sistemik atau makroekonomi ketika risiko tersebut terwujud pada tingkat individu atau mikroekonomi.
- Persepsi tentang peran dan kewajiban bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sedang berubah. Tujuan ini sekarang tampaknya lebih penting daripada paradigma stabilitas moneter karena yang terakhir jelas telah kehilangan prominensinya.

Dalam menghadapi perubahan global yang terkait dengan globalisasi, dan bahkan deglobalisasi, gangguan dalam rantai pasokan, gejolak di pasar keuangan dan bahan baku, peningkatan risiko konflik bersenjata, paradigma mengenai stabilitas ekonomi sedang berubah, menggeser beban pengelolaan stabilitas ke negara, khususnya ke keuangan publik, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- Perluasan formula intervensi publik untuk mencakup penyediaan keamanan dan stabilitas bagi perekonomian secara keseluruhan memberikan pengaturan kelembagaan dan regulasi serta bantuan publik, termasuk bantuan keuangan, dari pemerintah, bank sentral, dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional.
- Ternyata tujuan negara dalam hal kebijakan stabilitas sistem keuangan adalah menggunakan bantuan publik dalam menyelesaikan masalah dan memulihkan daya saing pelaku sektor keuangan, bahkan dalam hal gejolak, krisis, atau krisis ganda yang parah.
- Partisipasi negara dalam menanggung beban menjaga stabilitas dan daya saing sektor keuangan merupakan hak istimewa bagi lembaga keuangan, khususnya bank, untuk diasuransikan secara gratis oleh negara, dan berkontribusi pada kesediaan mereka untuk mengambil risiko dan ekspansi keuangan eksternal, yang mendorong konsentrasi sektor dan konsolidasi entitas keuangan.
- Mekanisme di mana akumulasi sektor keuangan didorong oleh keuntungan dari pembiayaan utang publik telah menjadi bentuk aktivitas ekonomi skala besar dan pertumbuhan PDB yang paling penting di negara-negara maju secara ekonomi.

Pemilihan strategi global dan adaptasi para aktor, termasuk individu, bisnis, dan komunitas sosial, terhadap perubahan sangat penting untuk masa depan mereka. Mendorong pembangunan dalam jangka panjang akan meningkatkan keamanan eksistensi dan kualitas hidup, perluasan pilihan, stabilitas, dan peningkatan hubungan eksternal. Kesalahan yang dibuat atau kegagalan untuk mengenali risiko globalisasi dapat menyebabkan runtuhnya pembangunan, penurunan pendapatan, hilangnya pasar, pengangguran, dan runtuhnya program pembangunan jangka panjang.

Dalam ekonomi terbuka, strategi membutuhkan kemampuan untuk menghadapi lingkungan, memanfaatkan peluang di luar pasar lokal asli serta menghadapi lingkungan dan memenuhi harapan, tuntutan, preferensi, dan nilai-nilainya. Agar kompetitif, penawaran harus lebih luas daripada pesaing dalam hal absolut dan objektif serta berdasarkan harapan pengguna produk. Untuk mencapai hasil yang lebih baik membutuhkan efisiensi dan



produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini tidak mungkin dilakukan di semua bidang. Selain keunggulan alami, yang bersifat sementara, perusahaan harus berupaya untuk menjadi pemimpin ketika berhadapan dengan pesaing. Pasar global memaksa peningkatan kualitas produk, yang secara langsung membutuhkan perubahan dalam organisasi, teknologi tinggi, dan kualifikasi staf yang tinggi. Di sisi lain, peningkatan standar menghasilkan peningkatan daya tarik penawaran, tingkat teknis yang lebih tinggi, dan pengembangan kompetensi staf. Mereka yang membatasi ruang lingkup aktivitas mereka pada pasar lokal mengutuk diri mereka sendiri pada pertumbuhan yang lebih lambat atau berisiko mengalami serangan eksternal, pengambilalihan, kehilangan identitas, dan kemunduran perlahan menuju ketidakjelasan.

Pada akhirnya, tata kelola di bawah globalisasi ditentukan oleh individu, yang, sebagai aktor independen, bertanggung jawab atas masa depan mereka. Perilakunya ditentukan oleh potensi ekonomi dan kemampuan untuk memimpin dan mengembangkan keterampilan profesional untuk menghadapi tantangan globalisasi. Potensinya didasarkan pada faktor-faktor yang membentuk suatu perusahaan, yaitu aset, karyawan organisasi, dan teknologi. Komponen dasar suatu perusahaan ini sebagian besar menentukan peluangnya, merangsang proses pengembangannya, dan menentukan kendalanya dalam ekonomi global. Variabel-variabel ini juga diamati dalam pengembangan otonomnya.



BAB 7

STABILITAS PERBANKAN ERA PASCA-PANDEMI

7.1 PENDAHULUAN

Dua gelombang Krisis Keuangan Besar (GFC) 2007+ menunjukkan ketidakcukupan paradigma manajemen stabilitas sektor perbankan yang berfokus pada lembaga-lembaga individual. Hal ini menyoroti pentingnya transmisi guncangan negatif melalui pasar keuangan global di antara lembaga-lembaga keuangan yang berlokasi di tempat-tempat yang berjauhan secara geografis. Empat tahun GFC telah menunjukkan bahwa pengawas memiliki pengetahuan terbatas tentang interaksi antara berbagai jenis risiko (kredit, pasar, dan likuiditas) yang terjadi di masing-masing lembaga dan di seluruh sektor. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami risiko yang dihasilkan oleh sektor perbankan secara keseluruhan. Selain itu, salah satu penyebab utama GFC yang teridentifikasi adalah ledakan kredit ketika bank memberikan pembiayaan kepada entitas yang memiliki aset dan pendapatan yang tidak memadai. Bersamaan dengan pendekatan baru terhadap stabilitas sektor perbankan, konsep kebijakan makro-prudensial diperkenalkan dan instrumen untuk penerapannya secara praktis muncul.

Unsur-unsur utama dari jenis instrumen kebijakan baru tersebut mencakup peningkatan nilai riil (terkait dengan aset tertimbang risiko) dari penyangga modal yang ada untuk meningkatkan kualitasnya dan implementasi penyangga baru untuk memungkinkan bank menyerap guncangan yang dihasilkan dari sifat pro-siklik pinjaman dan penyebaran risiko sistemik di seluruh sektor. Oleh karena itu, persyaratan modal tambahan, penyangga kontra-siklik, dan penyangga risiko sistemik diimplementasikan.

Dari tahun 2020 hingga 2022, ekonomi global mengalami dua guncangan negatif serius: pandemi COVID-19 dan pecahnya perang di Ukraina. Meskipun berbeda sifatnya dan, yang terpenting, berbeda dari guncangan Krisis Keuangan Global (GFC), masing-masing menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global dan lokal. Tujuan bab ini adalah untuk menganalisis karakteristik krisis-krisis berikutnya pada tahun 2020–2022 dan untuk menjawab pertanyaan apakah prinsip dan instrumen kebijakan makro-prudensial yang dikembangkan setelah krisis keuangan global (GFC), dikombinasikan dengan langkah-langkah kebijakan fiskal (paket bantuan) dan kebijakan moneter aktif, memastikan respons yang memadai terhadap tantangan krisis yang mengarah pada stabilisasi sistem keuangan, termasuk, yang terpenting, memastikan bahwa bank memenuhi peran penting mereka sebagai perantara keuangan. Bagian empiris dari pembahasan ini bertujuan untuk memeriksa efektivitas dua instrumen utama kebijakan makro-prudensial, yaitu penyangga kontra-siklik dan penyangga risiko sistemik, dalam merangsang pemberian pinjaman pada periode tekanan kuat untuk memperlambatnya. Sepengetahuan penulis, ini adalah salah satu dari sedikit pembahasan di mana penerapan praktis instrumen kebijakan makro-prudensial utama telah diverifikasi dalam konteks praktis krisis pandemi berikutnya dan perang Rusia-Ukraina.



7.2 KEBIJAKAN MAKROEKONOMI TERHADAP KRISIS GLOBAL

Literatur yang membahas dampak pandemi terhadap cara pelaksanaan kebijakan makroekonomi terus berkembang. konsekuensi pandemi dari pembatasan pasokan barang dan mengusulkan serangkaian solusi di bidang bauran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi jenis efek negatif yang disebutkan dari lockdown.

pengaruh COVID-19 terhadap cara kebijakan moneter diimplementasikan, dengan menunjukkan ancaman dan konsekuensi dari cara yang tidak lazim dalam menjalankan kebijakan ini. Dampak dari perpaduan kebijakan makro-prudensial dan moneter terhadap pinjaman bank setelah wabah pandemi virus corona. Penyesuaian kebijakan makro-prudensial terhadap kondisi pasca-pandemi dan instrumen makro-prudensial terpenting digunakan untuk memperlancar dan membatasi konsekuensi guncangan negatif pada sektor keuangan. Sejauh mana kebijakan makroprudensial telah mengurangi risiko sektor perbankan sebagai respons terhadap pandemi baru-baru ini

Literatur tentang konsekuensi ekonomi dari perang di Ukraina jauh lebih terbatas. Literatur tersebut terutama berfokus pada masalah guncangan negatif pada pasar energi dan pangan serta peran mereka dalam terjadinya proses inflasi global. Literatur ini mencakup laporan Program Pangan Dunia yang berfokus pada dampak konflik di Ukraina terhadap ketahanan pangan global – khususnya, perlindungan negara-negara termiskin. Konsekuensi dari peningkatan harga energi yang tiba-tiba. Artikel terakhir mencoba mengukur dampak fluktuasi harga energi terhadap dinamika inflasi yang signifikan. Topik serupa dibahas, yang mencoba menggabungkan informasi tentang perasaan pengguna situs jejaring sosial ke dalam analisis standar variabel makroekonomi dengan cara yang menarik serta menilai kekuatan tekanan sanksi perang dan pasar keuangan internasional.

7.3 ASPEK MIKRO DAN MAKROPRUDENSIAL DARI STABILITAS SEKTOR PERBANKAN

Sebelum krisis keuangan global (GFC), stabilitas sektor perbankan terutama dipahami sebagai pemeliharaan kesehatan keuangan lembaga-lembaga individual. Bank-bank yang tahan terhadap guncangan eksternal dianggap stabil; mereka mampu bertindak sebagai perantara keuangan jika terjadi peristiwa negatif beruntun dan memengaruhi lingkungan ekonomi makro dan keuangan suatu negara. Persepsi tentang stabilitas keuangan oleh para pembuat keputusan tata kelola ekonomi global dan lembaga pengawas ini tercermin dalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Komite Pengawasan Perbankan Basel (BCBS), yang dikenal sebagai Basel I dan II.

Krisis 2007+ menunjukkan bahwa resesi yang menyertai krisis sektor keuangan berlangsung lebih lama dan memengaruhi perekonomian lebih dalam daripada penurunan ekonomi non-keuangan. Krisis ini juga membawa lebih banyak efek samping negatif di bidang sosial. Krisis ini berakar pada pertumbuhan kredit real estat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diprakarsainya – pertama di beberapa lembaga individual dan kemudian menyebar dengan cepat melalui hubungan antar bank dengan entitas di yurisdiksi yang jauh. Oleh karena itu, krisis ini menambahkan dua dimensi pada stabilitas keuangan sektor perbankan:



1. Struktural – terkait dengan tingkat keterkaitan entitas;
2. Temporal/Siklikal – berkaitan dengan peningkatan dan penurunan risiko keuangan secara bergantian dari waktu ke waktu.

Dari perspektif mikro-prudensial, risiko yang dihadapi sistem keuangan sebagian besar bersifat eksogen. Kuantifikasi ukurannya dapat berhasil diimplementasikan menggunakan model top-down dan beroperasi pada data agregat yang menggambarkan kondisi entitas individu. Dimensi makro-prudensial dari rekomendasi stabilitas sektor perbankan berfokus pada memastikan kesehatan sistem secara keseluruhan (dimensi struktural) dan juga mempertimbangkan karakteristik siklikalnya.

Mengadopsi perspektif baru tentang stabilitas sektor perbankan memiliki konsekuensi yang luas dalam cara kita memahami risiko yang memengaruhi sektor ini. Perumusan peraturan makro-prudensial membutuhkan asumsi bahwa risiko yang memengaruhi sektor perbankan memiliki banyak sumber di dalam sistem dan, oleh karena itu, bersifat endogen. Model bottom-up harus digunakan untuk mengukur jenis risiko ini, memungkinkan kombinasi proses yang terjadi di dalam bank dengan kondisi global sektor tersebut. Tabel 7.1 menyajikan perbedaan mendasar dalam pendekatan mikro- dan makro-prudensial terhadap stabilitas sektor perbankan.

Tabel 7.1 Perbandingan stabilitas sektor perbankan dari perspektif mikro dan makro.

Fitur	Pendekatan Mikro-prudensial	Pendekatan Makro-prudensial
Tujuan operasional	Berfokus pada lembaga-lembaga individu	Berfokus pada sektor perbankan secara keseluruhan
Tujuan strategis	Membatasi kerugian depositan dan pemegang saham	Mengurangi kerugian ekonomi secara global
Sifat risiko	Eksogen	Endogen
Mempertimbangkan interaksi antar lembaga	Tidak	Memperhitungkan hubungan dan besarnya paparan risiko timbal balik
Metode analisis risiko yang dipilih	Top-down	Bottom-up

7.4 KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL – DEFINISI DAN PRINSIP DASAR PELAKSANAANNYA

Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh badan pengawas internasional (termasuk Otoritas Perbankan Eropa) dan badan kerja yang dibentuk oleh G20, sulit untuk menunjukkan satu definisi yang koheren tentang kebijakan makroprudensial.

Dengan mempertimbangkan situasi di atas, dimungkinkan untuk membuat semacam definisi semu yang menunjukkan fitur utama dari jenis kebijakan ini, mengikuti Laporan Kemajuan Alat dan Kerangka Kebijakan *Makroprudensial* kepada G20:

1. *Tujuan*: untuk mencegah sektor perbankan suatu negara kehilangan kemampuan untuk menyediakan fungsi intermediasi keuangan kepada entitas sektor riil, yang dapat



- mengakibatkan kerugian signifikan dalam volume produk global yang dihasilkan oleh perekonomian negara tersebut (dalam skenario ekstrem, juga perekonomian global).
2. *Cakupan*: untuk fokus pada seluruh sektor perbankan, dengan penekanan khusus pada interaksi antara bank-bank individual dan entitas sektor perbankan dan ekonomi riil.
 3. *Instrumen*: alat-alat prudensial yang memiliki dampak sistemik pada seluruh sektor perbankan.

Implementasi praktis kebijakan makroprudensial harus mempertimbangkan interaksi dengan kebijakan lain yang diimplementasikan pada tingkat makroekonomi. Bidang ini terutama menyangkut kebijakan moneter yang, dengan mengubah bentuk kurva imbal hasil, dapat secara signifikan memengaruhi kesediaan entitas untuk mengambil risiko (dalam konteks ini, perlu disebutkan kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan oleh Bank Federal Reserve pada awal abad ke-21, yang sekarang dianggap sebagai penyebab signifikan krisis pinjaman subprime di Amerika Serikat pada tahun 2007, yang pada gilirannya memicu Krisis Keuangan Global).

Pernyataan ini juga berlaku untuk kebijakan fiskal, yang diamati pada tahun 2011–2012 dalam contoh beberapa negara Zona Euro, setelah suatu negara menanggung tingkat kewajiban yang berlebihan akibat menutupi kerugian yang dihasilkan oleh sektor perbankan. Kebijakan fiskal semacam itu dapat menyebabkan destabilisasi yang luas di zona riil dan dampak negatif sekunder pada sistem keuangan suatu negara dan sistem terkait. Implikasi timbal balik dari kebijakan mikro dan makroprudensial, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.

7.5 INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Menurut Komite Kebijakan Keuangan Bank of England, tiga kelas utama instrumen kebijakan makroprudensial dapat dibedakan:

1. Yang memengaruhi neraca bank;
2. Yang memengaruhi kondisi pemberian pinjaman dan kondisi transaksi antar entitas;
3. Yang membentuk struktur pasar keuangan tempat bank melakukan operasinya.

Tujuan dari kelas instrumen pertama dan kedua ini adalah untuk mengurangi risiko yang bervariasi dari waktu ke waktu yang meningkat selama masa booming ekonomi (dan booming kredit terkait) dan mengurangi cakupan dampak jika terjadi resesi. Karena sifat risiko yang dimaksud, instrumen yang termasuk dalam kedua kelas tersebut diimplementasikan dengan kekuatan yang bervariasi tergantung pada fase siklus yang diamati.

Instrumen kelas pertama memengaruhi ukuran agregat neraca dan jatuh tempo komponen yang termasuk dalam sisi aktif dan pasif neraca bank, termasuk, antara lain, penyangga modal kontra-siklikal, penyangga risiko sistemik, dan rasio likuiditas dan leverage maksimum. Instrumen yang memengaruhi persyaratan pemberian pinjaman dan pelaksanaan transaksi antar entitas meliputi, antara lain, batasan rasio pinjaman terhadap nilai (Loan to Value, LtV), nilai pinjaman terhadap tingkat pendapatan peminjam (Loan to Income, Lti), dan jumlah jaminan (margin) dalam perdagangan instrumen keuangan (dasar dan derivatif).



Kelompok ketiga instrumen kebijakan makro-prudensial meliputi, antara lain, pengorganisasian platform yang diatur untuk perdagangan instrumen keuangan yang membangun kepercayaan timbal balik antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kepercayaan entitas juga dibangun dengan menggunakan instrumen dari kelas rekomendasi ini mengenai pengungkapan informasi oleh lembaga tentang kondisi keuangan mereka dan paparan risiko yang timbul dari hubungan dengan entitas lain di sektor tersebut. Tabel 7.2 merangkum kelas-kelas instrumen kebijakan makro-prudensial, beserta keuntungan dan kerugian mendasar yang diamati selama implementasi praktis sejauh ini.

Tabel 7.2 Instrumen kebijakan makro-prudensial.

Klasifikasi Instrumen	Instrumen	Keuntungan Utama	Kekurangan Utama
Mempengaruhi neraca bank	Penyangga modal kontra-siklik (<i>Countercyclical capital buffers</i> - CCyBs)	1) Relatif sederhana dalam implementasi. 2) Dampak langsung pada kemampuan lembaga untuk menyerap kerugian.	Dalam kondisi tertentu, penggunaannya dapat memperkuat risiko pada lembaga individu.
	Penyangga risiko sistemik (<i>Systemic risk buffers</i> - SyRBs)	Sama seperti di atas.	Sama seperti di atas.
	Penyangga untuk lembaga penting sistemik global & domestik (G-SIIs & O-SIIs)	Sama seperti di atas.	Sama seperti di atas.
	Langkah-langkah bobot risiko (<i>Risk weight measures</i>)	1) Insentif lebih kuat bagi bank daripada penyangga modal. 2) Memungkinkan pengelolaan volume pinjaman ke kelompok entitas terpilih selama masa <i>boom</i> dan resesi.	1) Dapat menyebabkan transfer risiko ke segmen sektor keuangan lainnya. 2) Memerlukan pengumpulan data keuangan dari bank dengan tingkat detail (<i>granularity</i>) yang tinggi.
	Rasio leverage maksimum	1) Memungkinkan pengukuran yang mudah terhadap persyaratan yang dikenakan pada bank. 2) Lebih tahan terhadap arbitrase dibandingkan	Tidak ada penalti untuk peningkatan tingkat risiko pada tingkat leverage yang rendah.



		instrumen berbasis ukuran risiko.	
	Penghapusan pinjaman bermasalah yang bervariasi waktu	Memungkinkan pencegahan dini jika terjadi penurunan kualitas kredit yang diperkirakan.	1) Sulit diterapkan dalam praktik karena perbedaan karakteristik bank di sektor tersebut. 2) Instrumen yang tumpang tindih dengan modal kontra-siklik dan bobot risiko.
	Pembatasan transfer modal	Memungkinkan ekspansi basis modal bank itu sendiri.	Jika diterapkan secara seragam ke seluruh sektor, dapat dianggap sebagai hukuman bagi bank yang dikelola dengan baik.
	Penyangga likuiditas yang bervariasi waktu	1) Memungkinkan kontrol langsung atas pencocokan jatuh tempo aset dan liabilitas serta penyangga likuiditas bank. 2) Mengarah pada penghalusan siklus kredit.	Belum ada hasil empiris mengenai efisiensi penggunaannya.
Mempengaruhi kondisi pemberian pinjaman dan transaksi antar entitas	Batasan rasio LtV (<i>Loan-to-Value</i>) dan LtI (<i>Loan-to-Income</i>)	Memungkinkan pengurangan risiko kredit secara langsung, khususnya risiko yang terkait dengan produk KPR.	Besarnya implikasi terhadap aktivitas ekonomi dan efek sosial sulit untuk diestimasi.
	Persyaratan keamanan (<i>Security requirements</i>)	1) Penggunaan instrumen jenis ini mendukung pembangunan rasa saling percaya di pasar keuangan. 2) Mengurangi risiko kebangkrutan lembaga individu yang memicu efek domino.	1) Ketidakmampuan untuk beroperasi di segmen pinjaman tanpa jaminan. 2) Ketahanan yang rendah terhadap arbitrase antar yurisdiksi.
Membentuk struktur pasar keuangan tempat bank beroperasi	Pembuatan platform untuk perdagangan	1) Sentralisasi manajemen risiko sistemik.	1) Meningkatkan risiko yang terkait dengan penggunaan infrastruktur



	instrumen keuangan	2) Penyederhanaan struktur ketergantungan antar entitas di sektor tersebut. 3) Menjamin transparansi pasar yang lebih besar.	perdagangan instrumen (risiko operasional). 2) Memungkinkan bank untuk mentransfer risiko ke entitas perantara.
	Persyaratan pengungkapan (<i>Disclosure requirements</i>)	1) Membatasi risiko sistemik yang dihasilkan dari asimetri informasi. 2) Meningkatkan disiplin internal lembaga.	Pengungkapan besarnya paparan bank dan isi penyangga likuiditas mereka membatasi efektivitas operasi pasar jika risiko terealisasi.

Dalam praktik kebijakan prudensial, untuk mengelola penumpukan kerentanan yang berasal dari permintaan pinjaman berlebih yang dihasilkan oleh rumah tangga dengan ekuitas atau pendapatan yang tidak sesuai, pengawas berfokus pada penerapan batasan Loan to Value dan Loan to Income. Pendekatan seperti itu secara langsung berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan dan akibatnya dapat membatasi dinamika harga rumah.

Kelompok instrumen makro-prudensial kanonik lainnya menargetkan tingkat modal bank yang diawasi. Gagasan umum dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan, pada saat-saat baik atau dari lembaga-lembaga yang penting secara sistemik (terlalu besar untuk gagal), beberapa bantalan modal tambahan di atas persyaratan modal minimum. Penyangga yang terakumulasi dapat digunakan pada saat-saat sulit untuk menyerap guncangan negatif yang memengaruhi sektor perbankan. Kelas instrumen terapan yang paling penting dan banyak digunakan adalah penyangga modal kontra-siklik (CCyB), penyangga risiko sistemik (SyRB), penyangga lembaga penting sistemik global (G-SII), dan penyangga lembaga penting sistemik (O-SII). Penyangga CCyB terutama ditujukan untuk menangani dimensi temporal/siklik dari risiko sektor perbankan. Penyangga SyRB, G-SIIs, dan O-SIIs digunakan untuk membatasi dampak penyebaran risiko lintas sektoral dan membangun penghalang terhadap penularan antar bank serta memperkuat ketahanan seluruh sektor perbankan. Dalam kasus resesi di sektor riil, uang dari penyangga tersebut dapat dilepaskan untuk menghasilkan pasokan kredit tambahan kepada perusahaan non-keuangan dan rumah tangga serta untuk menghindari pengurangan drastis dalam pembiayaan ekonomi.

7.6 DAMPAK PANDEMI DAN PERANG TERHADAP STABILITAS PERBANKAN

Krisis 2007+ bersumber utama dari kelemahan sistem keuangan dan menyebar ke seluruh dunia melalui koneksi perbankan. Dua krisis terakhir yang berkaitan, masing-masing, dengan COVID-19 dan perang di Ukraina memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Dalam kasus pertama, pemerintah dengan mempertimbangkan dampak pada kesehatan masyarakat (kematian berlebihan dari kelompok warga tertentu) menunda perekonomian mereka,



menyebabkan keruntuhan cepat dalam aktivitas ekonomi dan berisiko mengalami kerugian besar akibat kebangkrutan peminjam dan penurunan drastis harga aset. Perang di Ukraina disertai dengan pertumbuhan inflasi yang cepat mengancam stabilitas keuangan dengan dampak pembatasan yang dikenakan pada Rusia dan hasil dari kemungkinan tindakan anti-inflasi yang diambil di bidang kebijakan moneter. Namun, perlu dicatat bahwa, berbeda dengan Krisis Keuangan Global (GFC), selama krisis 2020 dan 2022, pengawas dan bank sentral di seluruh dunia telah siap menghadapi kesulitan yang akan datang setelah lebih dari sepuluh tahun membangun kerangka kebijakan makro-prudensial di wilayah hukum mereka.

Bagian bab ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan konsistensi kebijakan makro-prudensial yang diterapkan selama krisis COVID-19 dan krisis perang di Ukraina. Dapat diharapkan bahwa, meskipun kebijakan prudensial tidak memberikan respons tahap pertama terhadap krisis yang diamati, kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang menstabilkan sistem keuangan global yang terpapar serangkaian guncangan negatif.

Krisis COVID-19 segera dan langsung memengaruhi jutaan bisnis di seluruh dunia. Beberapa di antaranya, yang pada praktiknya kehilangan kesempatan untuk melakukan kegiatan operasional, mulai mengalami masalah dalam membayar kembali utang yang ditanggung bank. Demikian pula, beberapa rumah tangga, yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan COVID-19, menjadi, setidaknya untuk sementara, tidak mampu membayar. Kedua fenomena tersebut secara signifikan memengaruhi kualitas portofolio pinjaman sektor perbankan. Keduanya juga, melalui mekanisme penghapusan pinjaman yang tidak dibayar secara berkelanjutan dan sehubungan dengan penerapan "kerugian yang diharapkan", menimbulkan kebutuhan untuk membuat cadangan yang dihasilkan dari perkiraan penurunan kualitas pinjaman yang diberikan.

Secara langsung dan tidak langsung (peningkatan risiko yang diharapkan berarti peningkatan nilai aset tertimbang risiko), masalah yang dijelaskan mulai berdampak negatif pada rasio modal bank. Untuk mempertahankan rasio kecukupan modal pada tingkat yang memadai, terdapat tekanan signifikan pada bank untuk membatasi tingkat aset mereka, baik dengan membatasi pinjaman atau dengan menjual sekuritas.

Pada saat yang sama, karena resesi ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan COVID-19, para pengambil keputusan makroekonomi di masing-masing negara mengharapkan likuiditas tambahan diberikan kepada entitas ekonomi yang terkena dampak penguncian lebih lanjut. Sebagian dari likuiditas ini diberikan melalui program bantuan fiskal, tetapi ada juga harapan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya harus secara aktif terlibat dalam proses pembiayaan perusahaan. Dengan mempertimbangkan sifat sementara resesi yang disebabkan oleh pandemi dan keinginan untuk memastikan tingkat pembiayaan yang sesuai untuk perusahaan non-keuangan, beberapa otoritas makro-prudensial memutuskan untuk melonggarkan persyaratan mengenai rasio solvabilitas kredit.

Penyerapan guncangan negatif oleh bank dilakukan dengan mengoptimalkan penyangga modal mikroprudensial dan dengan penyelesaian penyangga modal makroprudensial tambahan. Perang di Ukraina menghancurkan perekonomiannya dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar. Perang ini juga memengaruhi ekonomi global



melalui berbagai saluran – antara lain, melalui perdagangan internasional dan pasar komoditas, rantai pasokan global dan regional, dan akhirnya berdampak pada terwujudnya risiko geopolitik dan hilangnya kepercayaan pasar yang substansial. Harga minyak, bahan bakar fosil, dan pangan melonjak tajam dan, terutama di negara-negara berkembang, menimbulkan tekanan inflasi. Ketegangan risiko geopolitik secara substansial meningkatkan ketidakpastian dan volatilitas harga aset yang diperdagangkan. Arus keluar modal dan ketidakstabilan nilai tukar mata uang di beberapa negara berkembang menyebabkan kekacauan keuangan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global memadamkan jaringan ketahanan pangan internasional dan memecah kerangka perdagangan dan investasi global. Dampak negatif yang disebutkan di atas diperkuat dengan pertumbuhan utang publik.

Kemampuan untuk memperluas kekuatan militer, sambil memerangi inflasi dan berupaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan menjamin stabilitas sistem keuangan, membutuhkan pendekatan baru di bidang kebijakan fiskal, moneter, dan makro-prudensial dan, yang terpenting, koordinasi ketiga kebijakan tersebut. Para pengambil keputusan kebijakan moneter memulai perjuangan mereka melawan proses inflasi yang menyebar dengan cepat yang sengaja diciptakan dengan dampak pada pasar energi dan pangan. Tindakan ini harus seimbang agar tidak menimbulkan ketegangan di pasar utang publik dan dengan demikian mengurangi pengeluaran pertahanan nasional, maupun melemahkan proses penyesuaian positif yang diamati setelah berakhirnya epidemi COVID-19.

Oleh karena itu, otoritas fiskal, moneter, dan makro-prudensial harus menyusun strategi yang jelas dan terukur untuk mengendalikan utang publik dan inflasi, sambil memperkuat kerangka kerja makro-prudensial untuk mencegah sistem keuangan dari tekanan finansial. Tindakan kunci yang memastikan efektivitas perpaduan kebijakan tersebut adalah pemantauan berkelanjutan terhadap risiko yang meningkat, menghubungkan keputusan dengan analisis berdasarkan kumpulan data yang andal, dan komunikasi yang transparan dan tepat waktu tentang tujuan tindakan yang diambil dan kredibilitasnya dalam upaya mencapainya, memastikan pembentukan ekspektasi yang tepat dari konsumen dan produsen.

7.7 RESPONS MAKROPRUDENSIAL TERHADAP PANDEMI DAN PERANG

Risiko yang muncul sehubungan dengan wabah epidemi COVID-19 dan dimulainya perang di Ukraina mengakibatkan perlunya penggunaan campuran kebijakan fiskal, moneter, dan makro-prudensial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, implementasi campuran kebijakan tersebut harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sekaligus mengamankan stabilitas sistem keuangan. Regulator dan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan makro-prudensial dalam praktiknya telah menunjukkan fleksibilitas mereka, memungkinkan bank untuk menggunakan penyangga modal dan likuiditas yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Dalam kebanyakan kasus, dana yang dikumpulkan di bawah bantalan keuangan ini digunakan untuk tujuan aslinya; dalam menghadapi potensi krisis keuangan, dana tersebut digunakan untuk memperlancar siklus pinjaman dan mencegah risiko lembaga individu menyebar ke seluruh sektor. Pengamatan terhadap aktivitas operasional pengawas makro-



prudensial menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, mereka berfokus pada tiga pendekatan dan instrumen utama:

1. Pengurangan atau pembubaran penyangga modal tambahan;
2. Pengurangan tekanan pada penyangga modal dari pinjaman baru dengan mengubah metode penentuan bobot risiko untuk beberapa piutang pinjaman dan metode estimasi risiko kredit menggunakan model statistik dan ekonometrik;
3. Perubahan kualifikasi instrumen utang yang memenuhi kriteria untuk termasuk dalam penyangga kredit;
4. Pemberlakuan pembatasan pembayaran dividen dan penggunaan bonus insentif untuk staf manajemen.

Dengan mempertimbangkan pelajaran yang dipetik selama Krisis Keuangan Global (GFC), sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, beberapa regulator (termasuk regulator Swedia, Inggris, dan ECB) memperkenalkan pembatasan umum pada pembayaran dividen kepada pemegang saham dan larangan bonus yang diberikan kepada staf manajemen senior. Tampaknya pembatasan tersebut dimaksudkan untuk berfungsi sebagai instrumen tambahan dari dampak makro-prudensial pada kondisi keuangan bank dan potensi pemberian pinjaman. Di satu sisi, mempertahankan keuntungan yang diperoleh bank menyebabkan peningkatan bantalan modal, tetapi di sisi lain, memiliki sumber daya yang memadai dalam hal dana sendiri sesuai dengan teori penciptaan uang, bank memiliki basis yang lebih tinggi untuk menghasilkan kredit. Penggunaan solusi jenis ini di seluruh yurisdiksi memungkinkan pengurangan risiko sistemik dan mendukung prinsip persaingan yang setara antara entitas yang diperlakukan dengan cara yang sama oleh pengawas.

Instrumen kebijakan makro-prudensial lainnya yang digunakan dalam praktik dari tahun 2020 hingga 2022 mengacu pada pengurangan penyangga atau pembatasan tekanan pada penyangga modal bank. Solusi yang paling umum termasuk membatasi tingkat atau membubarkan penyangga modal kontra-siklikal dan penyangga risiko sistemik. Pendekatan di atas dianggap sebagai yang paling transparan dan konsisten dengan asumsi awal mengenai penggunaan alat kebijakan makro-prudensial. Regulator di sejumlah besar negara (Luksemburg, Bulgaria, dan Slovakia) tidak hanya membatasi atau sepenuhnya menghilangkan CCyB tetapi pada saat yang sama menerapkan strategi "panduan ke depan berbasis waktu", yang menurutnya diumumkan bahwa, dalam perspektif yang dipilih, penyangga kontra-siklikal tidak akan ditingkatkan oleh regulator. Jenis solusi ini memungkinkan pengelolaan ekspektasi bank individual dan mengurangi ketidakpastian mengenai asumsi untuk penciptaan pinjaman.

7.8 DINAMIKA KREDIT PASCA GUNCANGAN EKSTERNAL

Bagian empiris dari pembahasan ini menganalisis efektivitas penggunaan penyangga makro-prudensial untuk merangsang pemberian pinjaman selama pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Ukuran efektivitas instrumen makro-prudensial yang digunakan adalah perbedaan dinamika pinjaman yang dihitung untuk negara-negara yang menerapkan kebijakan prudensial aktif dan negara-negara yang tidak menerapkan langkah-langkah tersebut. Penyangga modal kontra-siklikal dan penyangga risiko sistemik dipilih sebagai dua instrumen



makro-prudensial dasar yang menjadi subjek analisis. Karena penggunaan sistem bantuan yang luas untuk perusahaan non-keuangan, pembahasan ini berfokus pada analisis dampak instrumen tersebut terhadap kredit bank yang diberikan kepada rumah tangga.

Untuk kelompok sepuluh negara, data tentang tingkat penyangga modal kontra-siklikal dan penyangga risiko sistemik untuk periode 2020–2022 diperoleh dari sumber daya Dewan Risiko Sistemik Eropa (ESRB). Kelompok negara yang dianalisis dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu negara-negara yang secara aktif menggunakan instrumen-instrumen tersebut sebagai respons terhadap COVID-19 dan pecahnya perang di Ukraina (Republik Ceko, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia) dan negara-negara yang, dalam hal kebijakan makro-prudensial, mengadopsi strategi tunggu dan lihat atau belum pernah mengumpulkan penyangga CCyB dan SyRB sebelumnya (Hongaria, Italia, Belanda, Polandia, dan Spanyol). Untuk menganalisis dampaknya terhadap pemberian pinjaman bank, data bulanan tentang dinamika pemberian pinjaman untuk negara-negara yang disebutkan yang dikumpulkan di Gudang Data Statistik ECB digunakan.

7.9 PENGGUNAAN PENYANGGA MAKRO-PRUDENSIAL

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penggunaan penyangga makro-prudensial oleh pengawas di negara-negara terpilih berkontribusi pada perataan pemberian pinjaman kepada rumah tangga. Pada paruh pertama tahun 2020 (COVID-19) dan paruh pertama tahun 2022 (perang di Ukraina), kredit yang diberikan kepada rumah tangga berada pada tingkat sekitar 0,8 ppt dan sekitar 0,2 ppt, masing-masing, di negara-negara yang menerapkan kebijakan solusi makro-prudensial dibandingkan dengan kasus yurisdiksi yang tidak menerapkan jenis kebijakan ini (Gambar 7.1). Oleh karena itu, analisis distribusi efek pelepasan penyangga CCyB dan SyRB menunjukkan perwujudannya terutama selama tahun pertama penggunaan praktis instrumen tersebut dan kemudian penurunannya pada paruh kedua tahun 2021 dan 2022.

Dengan mempertimbangkan cakupan perubahan yang diinduksi yang relatif kecil (maksimum kurang dari 1 ppt pinjaman) dan tindakan stimulasi yang menyertai kebijakan makro-prudensial di bidang fiskal (paket bantuan) dan kebijakan moneter (penurunan suku bunga dan penerapan instrumen pelonggaran kuantitatif), hasil analisis yang diperoleh harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Namun, tampaknya dapat dibenarkan untuk menerima bahwa hubungan antara pelepasan cadangan kehati-hatian dan dinamika kredit untuk rumah tangga memang ada dalam kenyataan; oleh karena itu, hal ini penting untuk analisis.

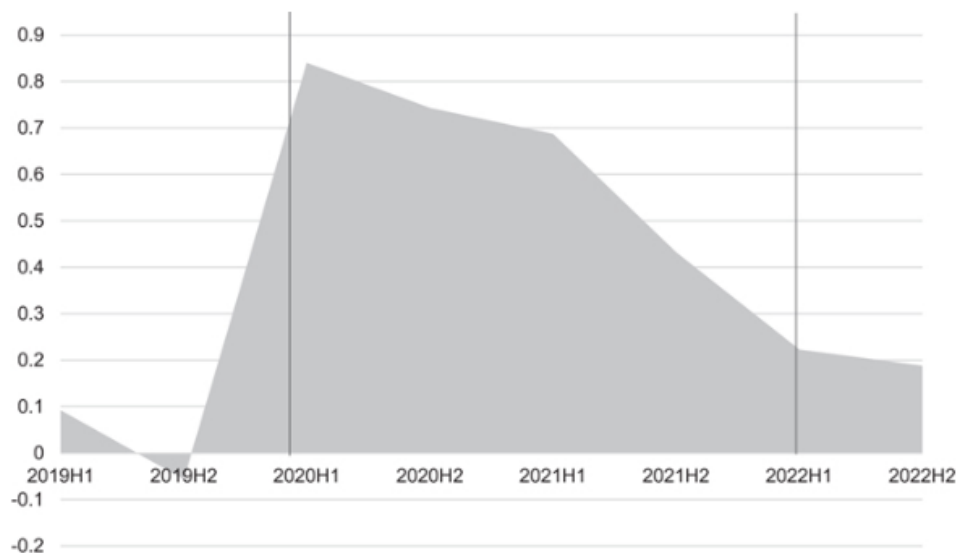
Perlu dicatat bahwa selisih pertumbuhan kredit dalam poin persentase (grafik biru) adalah perbedaan rata-rata antara pertumbuhan kredit di negara-negara tempat penyangga dilepaskan dan skenario kontrafaktual di mana penyangga tidak dilepaskan. Garis vertikal padat memisahkan periode pra-pandemi dan pra-perang Ukraina.

Ketika menilai dekomposisi dampak dari masing-masing jenis penyangga makroprudensial terhadap dinamika kredit yang diberikan kepada rumah tangga, hubungan yang jauh lebih kuat dapat diamati antara pelepasan penyangga kontra-siklik (Gambar 7.2) dengan kasus penyangga risiko sistemik (Gambar 7.3). Dalam kasus yang pertama, dampaknya kira-kira dua kali lebih kuat daripada dalam kasus penyangga risiko sistemik (pada puncak

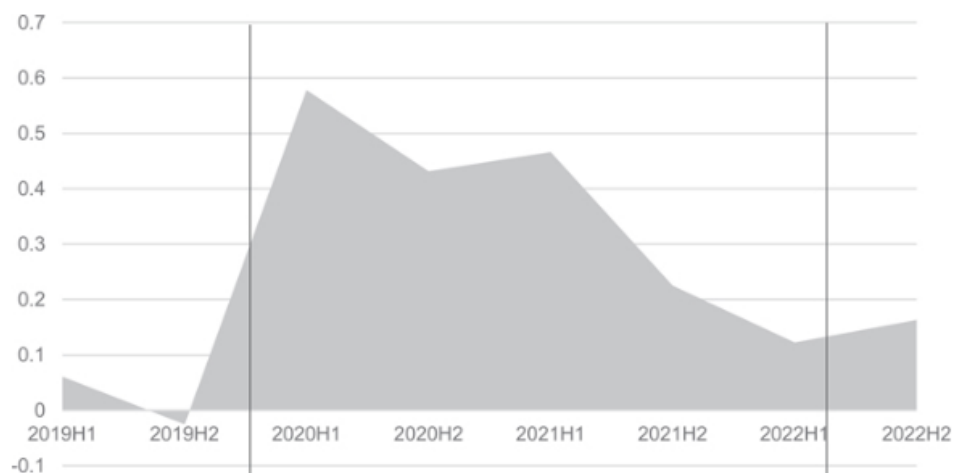


periode yang dianalisis, sekitar 0,6 ppt untuk CCyB dibandingkan dengan sekitar 0,3 ppt untuk SyRB). Selain itu, pelepasan dana dari penyangga kontra-siklik berdampak pada volume pinjaman dua tahun setelah dimulainya implementasi instrumen ini.

Perlu juga ditekankan bahwa kedua penyangga makro-prudensial CCyB dan SyRB memiliki dampak yang signifikan terhadap stimulasi pemberian pinjaman kepada rumah tangga. Perlu juga dicatat bahwa kedua instrumen kebijakan makro-prudensial ini digunakan untuk pertama kalinya, sehingga baik pengawas maupun bank yang diawasi memiliki pengalaman praktis yang terbatas dalam penerapannya. Oleh karena itu, tampaknya beberapa perbedaan dalam efektivitas penggunaan dana dari penyangga prudensial dapat dijelaskan oleh proses pembelajaran mekanisme pengoperasian instrumen-instrumen ini.

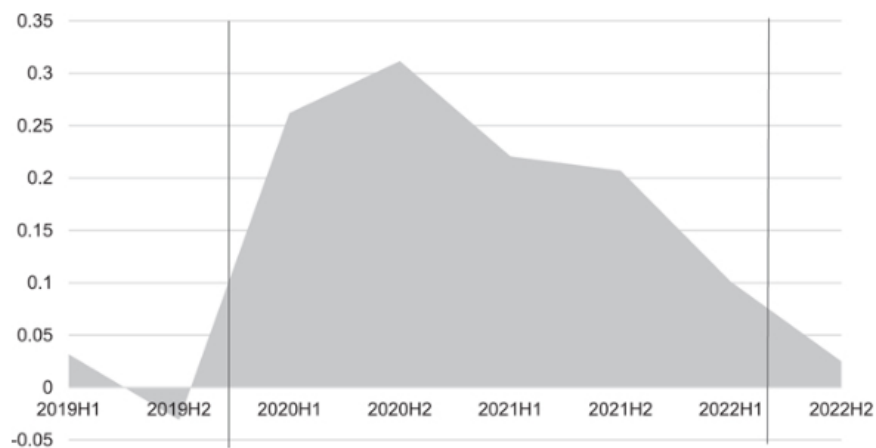


Gambar 7.1 Dampak pelepasan penyangga modal terhadap pinjaman rumah tangga (dinamika PPT).



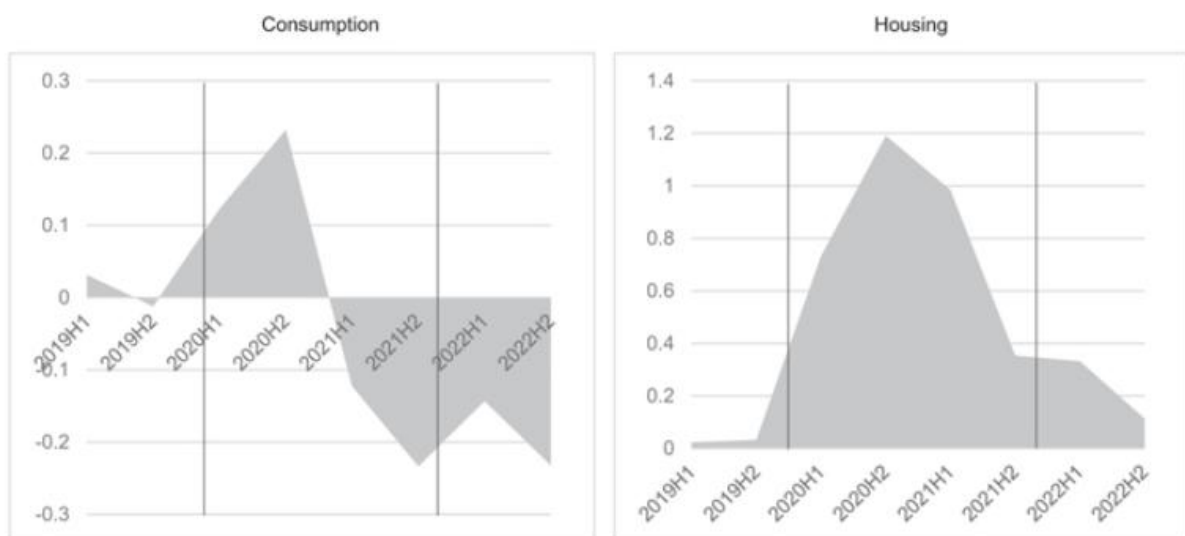
Gambar 7.2 Dampak CCyB terhadap pinjaman rumah tangga (dinamika PPT).

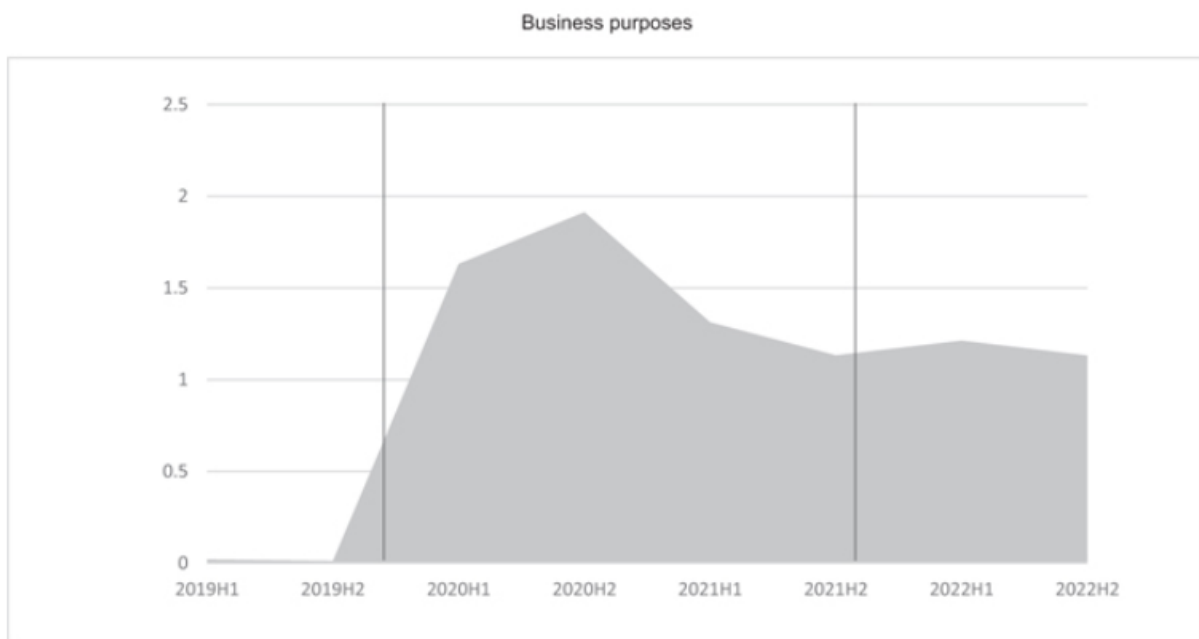




Gambar 7.3 Dampak SyRB terhadap pinjaman rumah tangga (dinamika PPT).

Bagian selanjutnya dari analisis dampak pelepasan penyangga modal terhadap dinamika kredit yang diberikan kepada rumah tangga setelah wabah epidemi dan dimulainya perang Ukraina-Rusia mencakup penilaian karakteristik perkembangan masing-masing jenis kredit: konsumsi, perumahan, dan pinjaman bisnis (investasi) (Gambar 7.4). Studi ini mengidentifikasi perbedaan signifikan antara dinamika pinjaman yang diberikan kepada masing-masing kelompok peminjam. Hubungan terkuat dan terlama antara pelepasan penyangga CCyB dan SyRB dan jalannya pinjaman diidentifikasi dalam kasus pinjaman bisnis. Dalam kasus pinjaman jenis ini, peningkatan dinamikanya pada paruh pertama tahun 2020 di wilayah hukum yang menerapkan kebijakan makro-prudensial aktif lebih dari 2 poin persentase lebih tinggi pada periode pasca-pandemi dan lebih dari 1 poin persentase lebih tinggi setelah pecahnya perang di Ukraina dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki jenis pinjaman ini.





Gambar 7.4 Dampak pelepasan buffer terhadap kredit konsumsi, perumahan, dan tujuan bisnis (investasi) (dinamika ppt).

Instrumen kebijakan makro-prudensial yang digunakan dalam praktik juga secara signifikan memengaruhi dinamika pinjaman yang diberikan kepada rumah tangga untuk tujuan perumahan. Sebagai hasil dari aktivitas pengawas di segmen pinjaman ini, dinamikanya meningkat lebih dari 1 ppt pada periode COVID-19 dan juga terlihat setelah pecahnya perang Ukraina-Rusia.

Namun, dalam kasus pinjaman konsumen, sulit untuk berbicara tentang dampak signifikan dari kebijakan yang dijalankan dengan menggunakan buffer makro-prudensial. Dapat diasumsikan bahwa, dalam kasus jenis pinjaman ini, faktor-faktor selain ketersediaan kredit (termasuk kekhawatiran peminjam tentang situasi keuangan mereka) memiliki dampak yang menentukan pada dinamika pinjaman yang akhirnya diberikan.

7.10 RINGKASAN

Bab ini menyajikan asal-usul kebijakan makro-prudensial dan instrumennya yang dibentuk selama Krisis Keuangan Global (GFC) dan membahas risiko yang terutama dimaksudkan untuk diatasi oleh kebijakan tersebut. Penyangga modal tambahan, penyangga kontra-siklikal dan penyangga risiko sistemik, yang dikumpulkan oleh bank sebagai bagian dari implementasi praktis prinsip-prinsip kebijakan makro-prudensial, serta pengetahuan yang diperoleh oleh pengawas di bidang mekanisme penyebaran risiko dalam sistem keuangan global dan yurisdiksi individual, tampaknya menjadi premis utama untuk menjaga stabilitas keuangan setelah merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2022. Meskipun berbeda karakteristiknya, kedua krisis periode 2020–2022 tersebut memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas lingkungan makroekonomi dan kondisi sistem perbankan, terutama kemampuan untuk secara efisien menjalankan fungsi perantara keuangan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi empiris



yang dilakukan, insentif yang dihasilkan dari penggunaan instrumen makro-prudensial yang disebutkan (pelepasan penyangga kontra-siklikal dan sistemik) sehubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang aktif memungkinkan pemeliharaan kondisi keseluruhan sektor perbankan yang baik.

Analisis efektivitas dampak perubahan penyangga kontra-siklikal dan penyangga sistemik terhadap kredit bank yang diberikan kepada rumah tangga dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan penyebaran impuls yang lebih kuat akibat pelepasan penyangga kontra-siklikal. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa, dalam periode yang dianalisis, kebijakan makro-prudensial memiliki dampak yang sangat kuat pada pinjaman yang diberikan untuk tujuan bisnis dan perumahan. Ini adalah fitur berharga dari mekanisme operasi instrumen makro-prudensial yang dianalisis, yang terbukti sangat berguna dalam mengurangi guncangan negatif akibat pandemi virus corona dan pecahnya perang di Ukraina, yang khususnya diarahkan pada pengurangan pembiayaan kegiatan bisnis dan transaksi di pasar real estat perumahan. Penyeimbangan pasokan kredit yang diberikan di kedua segmen ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan pemeliharaan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi.



BAB 8

KRISIS POLIKRITIS DAN EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM

8.1 PENDAHULUAN

Awal setiap abad baru mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban untuk masa depan lingkungan dan sejumlah bidang kehidupan manusia. Beberapa pertanyaan tersebut berkaitan dengan bidang manajemen sosial dan penyediaan akses energi yang aman dan tanpa gangguan yang dipahami dari sudut pandang ilmiah dan praktis.

Diharapkan bahwa masa depan yang dekat akan membawa perkembangan yang mirip dengan penemuan-penemuan penting dalam sains, dan bahwa hal tersebut dapat diimplementasikan secara praktis oleh manusia. Dalam hal ini, wajar untuk bertanya tentang tantangan yang menentukan perkembangan ekonomi sebagai bidang ilmu ekonomi yang menghadapi banyak masalah baru dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan tantangan yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengenali arah pengembangan ekonomi lebih lanjut. Tujuan ini sah karena ekonomi seperti yang kita kenal saat ini bukan hanya produk peradaban modern tetapi juga fenomena budaya yang telah berkembang, sampai batas tertentu secara sadar, seringkali secara spontan, selama berabad-abad aktivitas ekonomi manusia.

Perubahan iklim dan lingkungan yang saat ini terjadi di seluruh dunia memicu proses perubahan di banyak bidang ekonomi dan masyarakat. Studi hingga saat ini telah berfokus pada identifikasi faktor-faktor utama dan relevan yang memengaruhi perubahan iklim. "Pelaku utama", yaitu, bidang-bidang yang secara signifikan memengaruhi perubahan iklim, telah diakui. Ini termasuk hidrokarbon (minyak dan turunannya, gas alam, batubara dan lignit, dan lain-lain.), dan konsumen utamanya termasuk industri energi, industri baja, dan industri transportasi, terutama transportasi darat (angkutan barang berat dan penumpang), maritim, dan udara. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), sistem energi sebagaimana beroperasi saat ini menyumbang sekitar 75% dari total emisi gas rumah kaca. Ini adalah salah satu penyebab utama pemanasan global, yang dampaknya memicu perkembangan krisis sosial dan ekonomi baru. Fenomena yang semakin umum kita amati adalah tumpang tindihnya krisis, yang bahkan dapat mengakibatkan interferensi antar krisis. Ini adalah kondisi yang menguntungkan untuk terciptanya polikrisis.

Dengan identifikasi pendorong utama perubahan iklim negatif, dimungkinkan untuk mempersiapkan kebijakan iklim dan ekonomi baru. Selama proses ini, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan bidang pembahasan ilmiah dan praktik yang sebelumnya terpisah telah diidentifikasi. Hal ini mengarah pada pengembangan bidang pembahasan ilmiah baru. Bidang-bidang ini tunduk pada verifikasi dalam praktik kehidupan ekonomi, yaitu ekonomi keberlanjutan, yang mendefinisikan sumber daya alam sebagai faktor produksi dalam hal kesetaraan.



Ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam adalah salah satu bidang keberhasilan utama bagi kebijakan iklim yang diadopsi yang berupaya untuk secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Untuk satu kelompok, terutama hidrokarbon, kita akan melihat upaya untuk penggunaan yang signifikan di sektor ekonomi tertentu. Untuk kelompok lain, yaitu logam tanah jarang, akan ada peningkatan kebutuhan untuk mencari dan menggunakannya di sektor-sektor ekonomi yang akan memproduksi produk mereka untuk transisi energi. Di setiap sektor ekonomi ini, sejumlah langkah telah diambil untuk mengembangkan teknologi baru dan membawanya ke pasar. Tujuannya adalah, dan terus berlanjut, untuk mengurangi konsumsi hidrokarbon dan mengembangkan teknologi baru untuk mengekstrak energi dari sumber terbarukan dan menghasilkan energi dari sumber rendah karbon. Hal ini secara langsung terkait dengan pengembangan dan penggunaan teknologi baru, seperti baterai untuk kendaraan listrik, penyimpanan energi, pembangkit listrik tenaga angin, elektroliser, sel bahan bakar, dan sel fotovoltaik. Area lain yang tidak boleh dilupakan adalah kebutuhan konstan untuk menggunakan bahan baku alami dalam proses yang umumnya disebut sebagai digitalisasi ekonomi.

Ketersediaan bahan baku alami adalah, dan akan tetap menjadi di masa depan, ciri permanen kehidupan ekonomi dan masyarakat dalam hal harapan, kebutuhan, dan keinginan untuk memastikan keamanan seluruh ekonomi dan warga negara. Pengurangan atau kekurangan sumber daya mineral tertentu merupakan pemicu krisis. Terjadinya banyak krisis pada waktu yang hampir bersamaan atau tepat bersamaan sepenuhnya sesuai dengan definisi polikrisis. Analisis asal usul dan esensi istilah “polikrisis” memberikan kesan bahwa istilah ini diperkenalkan dengan mempertimbangkan bahan baku alami serta penggunaan dan dampaknya.

Bab ini mengacu pada teori ekonomi pembangunan berkelanjutan dan menyajikan peran serta pentingnya bahan baku alami yang relevan dengan proses transisi energi. Bab ini juga menunjukkan risiko yang mungkin timbul bagi suatu ekonomi yang memiliki bahan baku alami, yaitu munculnya kutukan sumber daya. Bab ini menguraikan peran sumber daya alam, dan khususnya bahan baku kritis dan strategis, dalam mencapai Net Zero, yaitu ekonomi tanpa emisi gas rumah kaca, pada tahun 2050. Bab ini mengidentifikasi produk-produk yang tanpanya sektor energi yang menghasilkan energi dari sumber terbarukan maupun dari hidrogen, TIK, dan transportasi jalan, kereta api, udara, dan air tidak dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Bab ini menyoroti pentingnya bahan baku kritis dalam ekonomi abad ke-21 dan menunjukkan perannya dalam ekonomi global. Atas dasar ini, bab ini menyajikan area-area yang berpotensi menjadi perhatian bagi ekonomi politik bahan baku dalam konteks risiko krisis ganda yang mungkin ditimbulkannya.

8.2 PERAN DAN PENTINGNYA SUMBER DAYA ALAM DALAM EKONOMI ABAD KE-21

Untuk pertimbangan lebih lanjut, upaya untuk mendefinisikan istilah "sumber daya alam" akan bermanfaat. Bab ini bergantung pada definisi yang digunakan dalam ekonomi pembangunan berkelanjutan karena jauh lebih sesuai dengan tujuan ekonomi dan lingkungan



yang telah diadopsi oleh sebagian besar ekonomi nasional dalam mengatasi pemanasan global di abad ke-21.

Sumber daya alam juga disebut sebagai sumber daya lingkungan, barang lingkungan, modal alam, dan fondasi alami kehidupan, dan karenanya dianggap sebagai barang umum. Sumber daya alam mencakup semua komponen alam yang dikelompokkan menjadi empat kategori utama: (1) sumber daya terbarukan; (2) bahan baku dan pembawa energi primer yang tidak terbarukan; (3) sumber daya yang hampir tidak habis; dan (4) unsur-unsur dasar lingkungan.

Sumber daya terbarukan mencakup semua hewan dan tumbuhan dan terkait dengan keanekaragaman spesies. Sumber daya ini dapat diperbarui tetapi hanya sampai tingkat tertentu tergantung pada tingkat pembaruan. Setelah tingkat pembaruan tertentu terlampaui, sumber daya tersebut menjadi habis. Bahan baku yang tidak terbarukan mencakup bahan baku yang tidak memperbarui dirinya sendiri dalam rentang waktu manusia. Pembawa energi primer, termasuk batubara, minyak, dan gas alam, adalah kelompok khusus bahan baku tak terbarukan. Bahan baku tak terbarukan tidak memperbarui diri dalam rentang waktu manusia dan inilah mengapa terjadi kekurangan bahan baku tersebut. Sumber daya yang hampir tak habis-habisnya meliputi bahan baku yang memperbarui diri dalam rentang waktu manusia. Sumber daya ini meliputi angin, matahari, energi panas dari dalam bumi, dan pasang surut. Unsur-unsur dasar lingkungan meliputi udara, tanah, dan air. Sumber daya bahan baku alam yang disebutkan sebelumnya bersifat multifungsi dan memainkan peran penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi umat manusia. Secara khusus, sumber daya tersebut menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. *Fungsi produksi (penyediaan barang lingkungan, atau dikenal juga sebagai input):* Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan unsur-unsur dasar lingkungan (tanah, air, dan udara), sumber daya terbarukan dan tak terbarukan (termasuk pembawa energi primer), dan sumber daya tak habis-habisnya (energi terbarukan, seperti matahari, angin, pasang surut, dan panas dari dalam bumi).
2. *Fungsi penyerapan:* Lingkungan menyerap produk konjugasi yang tidak diinginkan (produk sampingan yang tidak dapat dihindari, seperti panas limbah dari pembangkit listrik) yang timbul dari produksi dan konsumsi, termasuk semua emisi dan limbah yang dihasilkan dari produksi dan konsumsi.
3. *Fungsi ruang hidup:* Media lingkungan (tanah, air, dan udara) merupakan ruang hidup semua makhluk hidup di Bumi (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme). Semua makhluk menderita kerugian ketika zat berbahaya, radiasi, dan lain-lain., hadir di ruang hidup.
4. *Mempertahankan sistem alam:* Lingkungan berkontribusi untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi berbagai unsur alam. Ini termasuk keseimbangan iklim dan lapisan ozon yang berfungsi secara efektif.
5. *Fungsi reproduksi:* Fungsi ini mencakup semua fungsi estetika dan ramah rekreasi.

Karena sifatnya yang umum, fungsi-fungsi ini mencakup keempat kategori sumber daya alam yang ditangani dalam proses manajemen. Fungsi-fungsi ini merujuk pada seluruh



perekonomian dan bisnis. Namun, mengingat pentingnya seluruh rangkaian isu yang terlibat dalam transisi energi, perhatian khusus harus diberikan pada sumber daya bahan baku non-terbarukan, pembawa energi primer, dan bahan baku terbarukan.

Penekanan khusus harus diberikan pada sumber daya bahan baku alam yang merupakan pembawa energi primer dan bagaimana sumber daya tersebut diperoleh dan digunakan lebih lanjut. Kelompok terpisah terdiri dari bahan baku alam yang bukan pembawa energi primer tetapi memainkan peran penting dalam proses ekonomi yang terkait dengan pembangkitan energi terbarukan dan digunakan dalam proses digitalisasi ekonomi yang didefinisikan secara luas. Yang menarik perhatian khusus adalah kelompok kedua sumber daya alam yang disebut bahan baku kritis (CRM).

Bahan baku kritis mencakup bahan baku yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Bahan baku ini digunakan dalam rantai produksi industri banyak komoditas dan terutama di industri teknologi tinggi. Bahan baku merupakan komponen penting dalam keseluruhan produksi elemen infrastruktur energi yang memungkinkan untuk memperoleh energi dari sumber terbarukan dan oleh karena itu merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan transisi energi yang diharapkan menghasilkan emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2050 (sebagaimana disepakati di Perserikatan Bangsa-Bangsa). Bahan baku yang diklasifikasikan sebagai bahan baku kritis menurut keadaan pengetahuan dan kebutuhan pada tahun 2023 tercantum dalam Tabel 8.1. Namun, perlu dicatat bahwa, tergantung pada kebutuhan ekonomi tertentu, kelompok bahan baku kritis dapat terdiri dari berbagai bahan baku.

Tabel 8.1 Bahan baku alam yang diklasifikasikan sebagai kritis pada tahun 2023.

Antimon	Disprosium	Grafit	Mangan	Logam golongan platina	Telurium
Arsenik	Kobalt	Hafnium	Grafit alam	Skandium	Logam titanium
Aluminium/Bauksit	Tembaga	Helium	Neodimium	Logam silikon	Uranium
Barit	Feldspar	Unsur tanah jarang berat	Nikel kelas baterai	Praseodimium	Wolfram
Berilium	Fluorit	Unsur tanah jarang ringan	Niobium	Stronsium	Vanadium
Bismut	Galium	Litium	Fosforit	Tantalum	Silikon karbida
Boron/Borat	Germanium	Magnesium	Fosfor	Terbium	Batu bara kokas
Platina	Silikon	Kadmium	Selenium	Timah	Lantanum

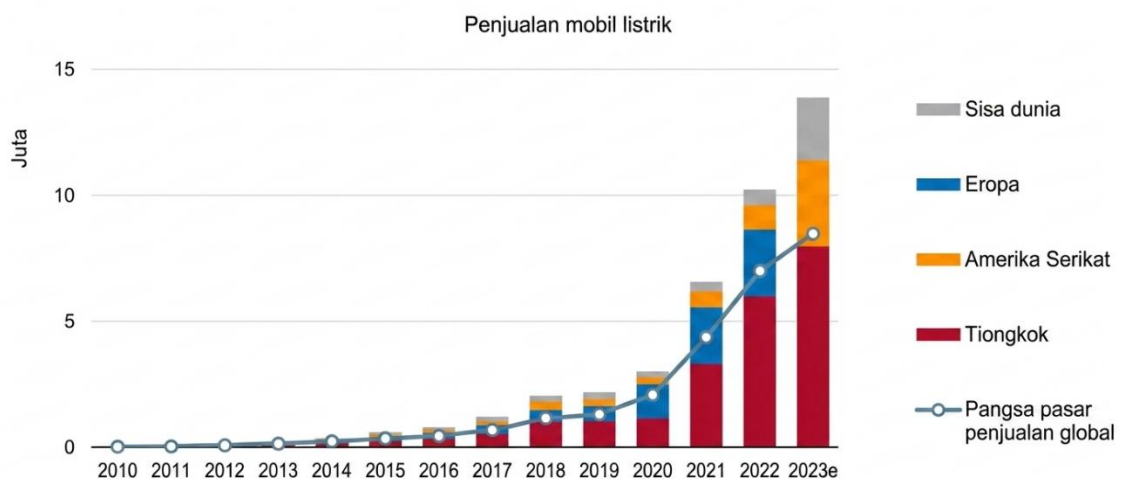
Mengingat tantangan transisi energi dan pergerakan menuju ekonomi nol karbon bersih pada tahun 2050, perhatian harus diberikan pada penggunaan kelompok bahan baku alami tertentu, beberapa di antaranya telah diidentifikasi sebagai bahan baku kritis. Hal ini memerlukan identifikasi teknologi inti, baik yang saat ini digunakan maupun yang



diproyeksikan pada tahun 2030, yang membutuhkan kelompok bahan baku alami tertentu, termasuk CRM. Teknologi inti tersebut meliputi kendaraan listrik, turbin angin, sistem penyimpanan energi stasioner, elektroliser hidrogen dan sel bahan bakar, elektronik berbasis silikon, dioda pemancar cahaya (LED), dan sel fotovoltaik.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan minat global terhadap kendaraan bermotor bertenaga listrik (permintaan global untuk kendaraan listrik pada tahun 2015 adalah 716.000 unit, meningkat menjadi 10,6 juta unit pada tahun 2022; Gambar 8.1). Kendaraan yang menjadi populer termasuk mobil, van, truk, dan bus. Popularitas kendaraan ini telah mengakibatkan peningkatan permintaan akan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksinya, termasuk, khususnya, baterai kendaraan (hampir 60% dari permintaan lithium, 30% dari permintaan kobalt, dan 10% dari permintaan nikel digunakan untuk produksi baterai untuk kendaraan listrik), magnet tanah jarang, elektronika daya, dan baja listrik. Bidang produksi ini juga merangsang permintaan akan komponen lebih lanjut dari infrastruktur listrik, yang mengakibatkan permintaan akan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Kumpulan bahan baku ini pada dasarnya mirip dengan yang digunakan dalam produksi kendaraan bertenaga listrik.

Bidang lain yang memanfaatkan bahan baku penting, terutama tanah jarang, adalah energi angin. Hal ini khususnya menyangkut permintaan akan magnet logam tanah jarang. Permintaan akan rangkaian logam tanah jarang yang terkait dengan turbin angin (darat dan lepas pantai) bergantung pada popularitasnya dan pengembangan teknologi baru untuk memperoleh energi dari sumber terbarukan. Menurut proyeksi yang disiapkan oleh Badan Energi Internasional, permintaan tersebut dapat meningkat hingga tujuh kali lipat pada tahun 2035 dibandingkan dengan tahun 2021.



Penjualan mobil listrik naik 55% di tahun 2022, dipimpin oleh Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun rekor lainnya.

Gambar 8.1 Pada tahun 2022, penjualan mobil listrik melebihi 10 juta unit.

Area lain di mana bahan baku penting digunakan secara signifikan adalah penyimpanan energi. Proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan kebutuhan akan penyimpanan energi dengan



kapasitas 680 GW di tingkat global. Pertumbuhan di bidang ini akan menghasilkan permintaan akan grafit, litium, dan nikel. Kemungkinan perubahan permintaan untuk bahan baku ini akan disebabkan oleh pengembangan teknologi alternatif baru, terutama baterai aliran.

Peningkatan penggunaan hidrogen nol atau rendah karbon akan menjadi bagian penting dari transisi energi. Permintaan hidrogen yang sangat besar akan memicu kebutuhan untuk memproduksinya menggunakan elektroliser. Konstruksi elektroliser, pada gilirannya, akan membutuhkan iridium dan platinum. Dengan meningkatnya minat terhadap penggunaan hidrogen dalam transportasi berat, udara, kereta api, dan maritim, akan terjadi peningkatan permintaan akan sel bahan bakar, yang kini menjadi komponen penting dari kendaraan listrik sel bahan bakar (FCEV). Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan peningkatan permintaan akan yttrium, niobium, dan grafit. Permintaan akan bahan baku ini akan bergantung pada popularitas bahan bakar ini dan perluasan infrastruktur untuk produksinya (menggunakan elektroliser, antara lain) dan stasiun pengisian bahan bakar.

Pengembangan yang disebut elektronika daya saat ini tidak mungkin dilakukan tanpa penggunaan silikon, silikon karbida, dan galium nitrida. Perhatian harus diberikan pada proyeksi pertumbuhan peran silikon karbida, yang digunakan dalam kendaraan listrik, inverter, dan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Saat ini, dioda pemancar cahaya (LED) mendominasi pasar karena menguasai lebih dari 50% pangsa pasar pencahayaan global pada tahun 2020 dan 2021. LED menggantikan sumber cahaya tradisional karena kinerjanya yang sangat baik dalam hal efisiensi energi, masa pakai, fleksibilitas, dan kualitas warna. Selain efisiensinya yang lebih baik, biaya produksinya juga dapat dikurangi dibandingkan dengan pencahayaan tradisional. Pencahayaan LED juga semakin banyak digunakan pada tanaman yang ditanam di dalam ruangan dan pada sistem pencahayaan yang digunakan di mobil. Dorongan tambahan untuk permintaan bahan baku alami yang digunakan dalam produksi adalah teknologi Light Fidelity (Li-Fi) yang sedang berkembang. Teknologi ini memungkinkan LED untuk mengirimkan data dengan kecepatan lebih baik dan dengan keamanan serta efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi. LED diproduksi dari bahan semikonduktor. Bahan yang digunakan dalam produksi meliputi galium nitrida, galium arsenida, galium fosfida, dan galium arsenofosfida. Warna dioda bergantung pada bahan semikonduktor yang digunakan.

Pasar manufaktur panel fotovoltaik saat ini didominasi oleh teknologi yang menggunakan silikon kristal. Panel fotovoltaik film tipis secara bertahap mendapatkan pangsa pasar. Produksinya membutuhkan kadmium, tellurida, dan telurium, di antaranya.

Area penggunaan bahan baku alami terpilih yang ditunjukkan berkaitan dengan transisi energi, yang berarti bahwa bahan baku tersebut merupakan elemen penting (menurut keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini) dalam mencapai target emisi nol bersih untuk perekonomian dan dengan demikian akan membantu menghentikan perubahan iklim. Namun, dari sudut pandang warga biasa dan peralatan serta teknologi yang saat ini digunakan, perhatian khusus harus diberikan pada aplikasi industri utama bahan baku tanah jarang untuk mengenali peran khusus yang mereka mainkan di abad ke-21 dan menunjukkan bagaimana mereka memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat. Perlu dicatat bahwa



bahan baku tanah jarang tidak hanya digunakan dalam teknologi terbaru tetapi juga industri tradisional, seperti industri peleburan, pertambangan, metalurgi, otomatisasi, kereta api berkecepatan tinggi, telekomunikasi, penerbangan, dan banyak lainnya. Aplikasi industri utama dari bahan baku tanah jarang ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Aplikasi industri utama dari bahan baku tanah jarang.

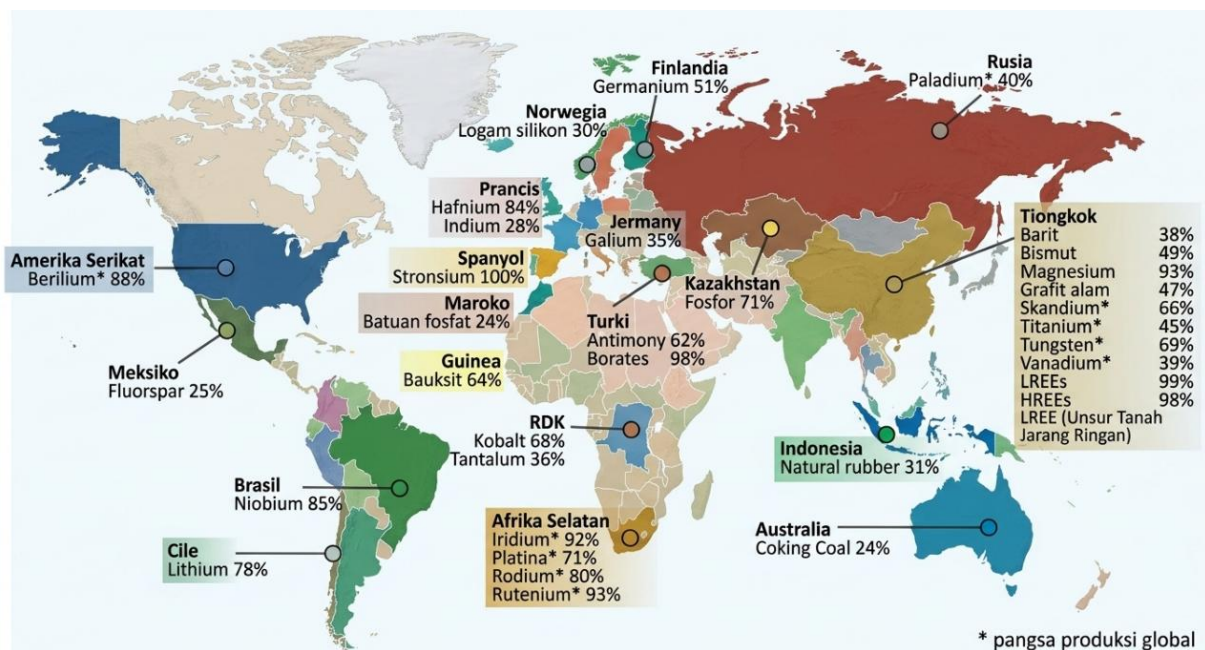
Bahan Baku	Aplikasi
Antimon	Penghambat api (tambahan plastik), katalis polietilena
Barit	Lumpur pengeboran cair dan gas, industri kaca, perlindungan radiologis, obat-obatan, metalurgi, piroteknik
Berilium	Telekomunikasi dan elektronika, penerbangan dan kedirgantaraan, industri nuklir sipil dan militer
Bismut	Generator termoelektrik (mobil), superkonduktor suhu tinggi, paduan solder bebas timbal
Borat	Produk kaca dan keramik
Kobalt	Ponsel, komputer, mobil hibrida, magnet
Kokas	Metalurgi
Fluorit	Produksi asam fluorida, produksi baja dan aluminium, keramik, optik
Galium	Semikonduktor, dioda fotoluminesen
Germanium	Fotovoltaik, serat optik, katalis, perangkat optik inframerah
Indium	Chip elektronik, layar LCD
Magnesium	Paduan aluminium
Grafit	Kendaraan listrik, penerbangan, kedirgantaraan, industri nuklir
Niobium	Satelit, kendaraan listrik, industri nuklir, perhiasan
Logam silikon	Sirkuit terpadu, panel fotovoltaik, isolator listrik
Tantalum	Kapasitor miniatur, superalloy
Wolfram	Alat potong, selubung, dan elektroda tabung elektron serta sinar-X
Vanadium	Baja khusus, kedirgantaraan, katalis
Logam Platina (rutenium, rodium, paladium, osmium, iridium, platina)	Katalis, perhiasan
Lantanum	Superkonduktor, kaca optik, pencahayaan
Serium	Katalis, pemurnian minyak, paduan logam
Praseodimium	Batu pemantik (flints), pewarna, magnet
Neodimium	Magnet permanen, autokatalis, pemurnian minyak, laser
Prometium	Senyawa berpendar (luminescent)
Samarium	Magnet dalam senjata roket, magnet permanen, kendaraan listrik
Europium	Laser, reaktor nuklir, pencahayaan, geokimia, fosfor merah dalam tabung sinar katoda
Gadolinium	Zat fosfor dalam tabung sinar katoda
Terbium	Aktivator untuk fosfor hijau dalam tabung sinar katoda, magnet permanen



Disprosium	Magnet permanen, mesin hibrida
Holmium	Laser, medan magnet, senyawa superkonduktor
Erbium	Jaringan optik telekomunikasi, jaringan transmisi, kedokteran nuklir
Tulium	Mesin sinar-X portabel, laser, superkonduktor suhu tinggi
Iterbium	Baja tahan karat, aktivasi ion dalam kristal laser, mesin sinar-X portabel
Lutesium	Pemancar-beta (β)
Skandium	Pencahayaan, penanda, paduan aluminium
Itrium	Aditif untuk fosfor merah dalam tabung sinar katoda, paduan superkonduktor, bata tahan api, sel bahan bakar, magnet

8.3 KETERSEDIAAN BAHAN BAKU KRITIS

Dalam hal bahan baku kritis, perlu ditentukan tidak hanya bagaimana bahan baku tersebut digunakan (dalam proses produksi dan teknologi apa) tetapi juga dari mana sumbernya (diekstraksi). Untuk banyak bahan baku, terdapat sejumlah tempat terbatas di mana bahan baku tersebut dapat diperoleh, itulah sebabnya pasokan banyak bahan baku kritis sangat terkonsentrasi. Contoh konsentrasi bahan baku alam individual yang diklasifikasikan sebagai bahan baku kritis di Uni Eropa ditunjukkan pada Gambar 8.2.



Gambar 8.2 Negara-negara yang merupakan pemasok terbesar bahan baku penting ke Uni Eropa.

Perlu dicatat bahwa produksi banyak bahan baku alam yang relevan dengan transisi energi saat ini lebih terkonsentrasi secara geografis daripada produksi minyak atau gas alam. Deposit mineral tertentu saat ini paling besar di sejumlah negara yang sangat terbatas. Tren ini tercermin dalam Gambar 8.3, yang menunjukkan konsentrasi berbagai bahan baku berdasarkan negara tempat keberadaannya.



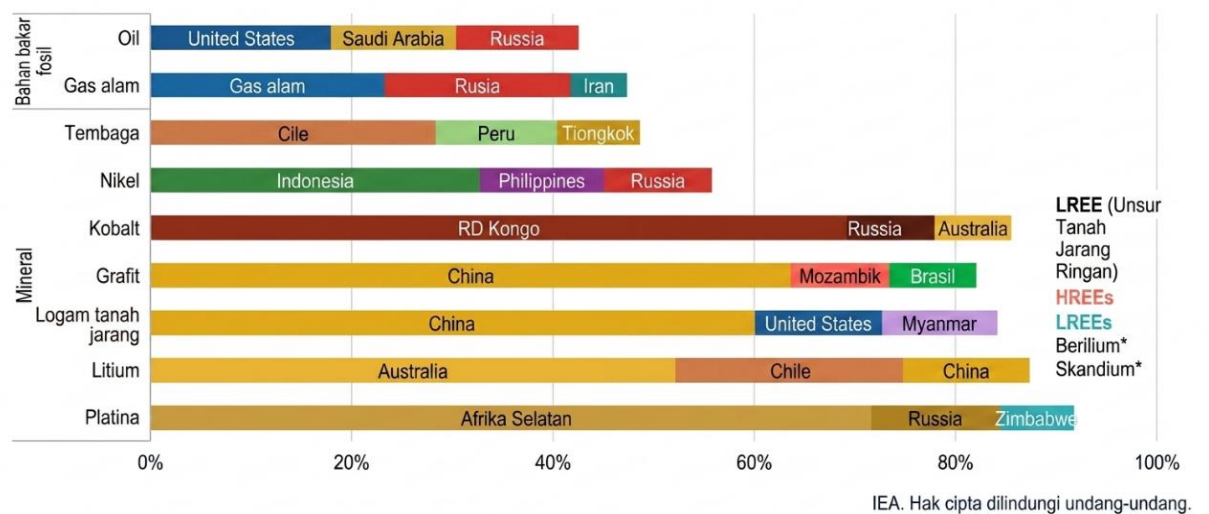
Negara-negara yang dominan dalam ekstraksi bahan baku penting meliputi Australia (litium), Chili (tembaga dan litium), Cina (grafit dan unsur tanah jarang), Republik Demokratik Kongo (kobalt), Indonesia (nikel), dan Republik Afrika Selatan (platium dan iridium). Negara-negara kunci untuk bahan baku penting tertentu ditunjukkan pada Tabel 8.3.

Sumber daya alam dan bahan baku yang tidak diragukan lagi penting bagi perekonomian dan masyarakat adalah air tawar. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik telah menunjukkan bahwa semakin banyak negara dan wilayah mulai mengidentifikasi akses terhadap air sebagai sumber potensial krisis sosial dan ekonomi. Perubahan iklim yang terkait dengan emisi gas rumah kaca memperburuk ketidaksetaraan tertentu.

Meskipun energi paling sering diangkat karena memungkinkan perekonomian berfungsi, air adalah hal mendasar dan penting bagi kehidupan. Alam telah mendistribusikannya dengan caranya sendiri, sangat tidak merata dan sangat berbeda dari bagaimana sejarah telah menetapkan batas-batas nasional. Sebanyak 60% dari sumber daya air tawar dunia ditemukan di sembilan negara dan hanya terdapat dalam jumlah melimpah di enam negara tersebut: Brasil, Kolombia, Kanada, Kongo, Rusia, dan Indonesia. Amerika Serikat tidak dalam kondisi buruk, berbeda dengan India (yang dihuni oleh 36% umat manusia) dan Tiongkok, yang bersama-sama hanya memiliki 10% sumber daya air global... Di negara-negara kaya, 11% air yang digunakan diperuntukkan bagi keperluan kota, dibandingkan dengan 8% di negara-negara miskin, yang hanya sedikit lebih rendah. Namun, sisa air didistribusikan secara sangat berbeda. Negara-negara kaya menggunakan hingga 60% air mereka untuk industri, yang menyumbang proporsi yang lebih kecil dari PDB mereka, sementara negara-negara miskin hanya mengalokasikan 10%. Kebalikannya berlaku untuk pertanian, yang mengonsumsi hingga 70% air dunia. Di negara-negara padat penduduk yang masih didominasi oleh pertanian, seperti India dan Tiongkok, angkanya masing-masing adalah 70% dan hampir 90%, dibandingkan dengan 3% di Inggris. Dalam hal ini, mengejutkan bahwa pertanian di Amerika Serikat menyumbang hingga 41% dari total penggunaan air, terutama karena sistem irigasi yang sangat boros air.

Air banyak digunakan dalam proses energi – sebagai pembawa energi dalam pembangkit listrik tenaga air, sebagai elemen proses teknologi yang digunakan dalam proses pendinginan di pembangkit listrik konvensional dan nuklir, dan sebagai sumber energi dalam ekonomi hidrogen yang sedang berkembang (untuk produksi hidrogen dalam elektrolisis). Oleh karena itu, peran besarnya saat ini dalam transisi energi harus digarisbawahi. Perlu juga disadari bahwa cadangan utamanya, seperti halnya bahan baku kritis atau strategis, terbatas pada beberapa lokasi di dunia.





Gambar 8.3 Pangsa tiga negara penghasil terbesar dalam total produksi mineral dan bahan bakar fosil tertentu, 2019.

8.4 EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM

Banyak akademisi dan praktisi kehidupan ekonomi telah, selama bertahun-tahun, mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan tentang sumber daya alam. Apakah model ekonomi yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam telah diidentifikasi? Dapatkah model saat ini berkontribusi pada implementasi langkah-langkah transisi energi yang efektif?

Bagi perekonomian saat ini, pertanyaan-pertanyaan ini masih relevan. Kepemilikan sumber daya alam yang signifikan oleh suatu negara dapat menjadi kutukan dan sumber masalah. Generalisasi harus dihindari karena hal ini tidak berlaku untuk Amerika Serikat, Norwegia, Australia, atau Kanada, misalnya. Negara-negara ini, yang kaya akan bahan baku alami, diklasifikasikan sebagai negara maju dan telah menemukan jalan pembangunan mereka sendiri dalam hal penggunaan berbagai mineral secara efisien.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh praktik kehidupan ekonomi, ada sekelompok negara dengan perekonomian yang kaya sumber daya alam di dunia, terutama yang memiliki minyak dan gas, di mana sumber daya alam tidak memberikan dorongan pembangunan dalam jangka panjang. Akibatnya, mereka semakin rentan terhadap dampak negatif dari terjadinya berbagai jenis krisis atau polikrisis. Paradoksnya, banyak pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa negara dengan cadangan sumber daya alam yang besar berkembang lebih lambat. Hal ini disebut kutukan sumber daya.

Tabel 8.3 Produsen utama bahan baku penting.

<i>Bahan Baku</i>	<i>Produsen Utama (Pasokan Global)</i>
Antimon	Tiongkok (74%), Tajikistan (8%), Rusia (4%)
Barit	Tiongkok (38%), India (12%), Maroko (10%)
Bauksit	Australia (28%), Tiongkok (20%), Brasil (13%)
Berilium	Amerika Serikat (88%), Tiongkok (8%), Madagaskar (2%)
Bismut	Tiongkok (85%), Laos (7%), Meksiko (4%)



Borat	Turki (42%), Amerika Serikat (24%), Chile (11%)
Kobalt	RD Kongo (59%), Tiongkok (7%), Kanada (5%)
Batu Bara Kokas	Tiongkok (55%), Australia (16%), Rusia (7%)
Fluorit	Tiongkok (65%), Meksiko (15%), Mongolia (5%)
Galium	Tiongkok (80%), Jerman (8%), Ukraina (5%)
Germanium	Tiongkok (80%), Finlandia (10%), Rusia (5%)
Hafnium	Prancis (49%), Amerika Serikat (44%), Rusia (3%)
Indium	Tiongkok (48%), Korea Selatan (21%), Jepang (8%)
Litium	Chile (44%), Tiongkok (39%), Argentina (13%)
Magnesium	Tiongkok (89%), Amerika Serikat (4%), Israel (2%)
Grafrit Alam	Tiongkok (69%), India (12%), Brasil (8%)
Karet Alam	Thailand (33%), Indonesia (24%), Vietnam (7%)
Niobium	Brasil (92%), Kanada (8%)
Fosforit	Tiongkok (48%), Maroko (11%), Amerika Serikat (10%)
Fosfor	Tiongkok (74%), Kazakhstan (9%), Vietnam (9%)
Skandium	Tiongkok (66%), Rusia (26%), Ukraina (7%)
Logam Silikon	Tiongkok (66%), Amerika Serikat (8%), Norwegia (6%)
Stronsium	Spanyol (31%), Iran (30%), Tiongkok (19%)
Tantalum	RD Kongo (33%), Rwanda (28%), Brasil (9%)
Titanium	Tiongkok (45%), Rusia (22%), Jepang (22%)
Wolfram	Tiongkok (69%), Vietnam (7%), Rusia (6%)
Vanadium	Tiongkok (55%), Afrika Selatan (22%), Rusia (19%)
Logam Platina	Afrika Serikat (84% - Pt, Rh, Ru), Rusia (40% - Pd)
Tanah Jarang Berat	Tiongkok (86%), Australia (6%), Amerika Serikat (2%)
Tanah Jarang Ringan	Tiongkok (86%), Australia (6%), Amerika Serikat (2%)

Istilah ini, sebagai deskripsi fenomena dan digunakan pada tahun 2001 oleh R. Auty, telah menyebar dengan cepat dalam literatur. Secara umum, ada tiga alasan untuk efek ini: (1) ketergantungan pada bahan baku membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga dunia dan dampak guncangan permintaan negatif; (2) perekonomian seringkali berada di jalur buntu sebagai akibat dari pengembangan bahan baku yang sepihak (penyakit Belanda adalah kasus khusus); (3) kepemilikan bahan baku yang menarik memicu konflik internal atas kendali bahan baku dan pendapatan yang diperoleh dari penjualannya.

Namun, perlu dicatat bahwa risiko yang timbul dari memiliki sumber daya alam yang signifikan bersifat kondisional. Apakah suatu negara dengan sumber daya alam yang signifikan akan mengalami masalah atau tidak bergantung pada kebijakan ekonomi yang dijalankannya. Kutukan sumber daya alam lebih mengancam perekonomian kecil daripada negara-negara besar dan kaya. Hal ini karena peran bahan baku bagi perekonomian di negara-negara kaya sangat berbeda dengan di negara-negara miskin. Negara-negara miskin dengan sumber daya



alam yang cukup berupaya untuk mengeksploitasinya secara intensif, yang mengakibatkan peningkatan pentingnya bahan baku bagi kehidupan ekonomi dan, akibatnya, kehidupan sosial mereka. Hal ini berlaku terlepas dari apakah dampaknya negatif atau positif.

Tiga dekade terakhir abad ke-20 dan dua dekade pertama abad ke-21 memberi kita bukti kuat tentang hubungan antara runtuhnya harga dunia untuk bahan baku tertentu dan munculnya krisis ekonomi dan sosial di suatu perekonomian berbasis bahan baku. Ketika terjadi lonjakan harga pasar dunia, negara pengekspor bahan baku alam dengan cepat memperoleh peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak. Dalam kebanyakan kasus, para pengambil keputusan di negara penghasil bahan baku percaya bahwa ini adalah keadaan permanen, meskipun ekonomi dunia bersifat siklik. Mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang sementara dan transien.

Akibatnya, mereka memiliki keinginan untuk segera mengabaikan situasi tersebut. Pihak berwenang berupaya meraih kesuksesan politik dengan mudah melalui serangkaian kegiatan pembangunan dan propaganda (dengan penekanan pada yang terakhir) untuk kepentingan kelompok besar klien sosial dan politik. Masalahnya adalah semakin besar kenaikan harga (lonjakan harga), semakin tidak rasional perencanaan ekonomi di suatu negara. Jika suatu negara memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar, kriteria ekonomi dikesampingkan ketika mengambil keputusan investasi. Akibatnya, kegiatan atau investasi yang tunduk pada tujuan politik menjadi yang terpenting.

Jika demikian, masalah muncul ketika harga bahan baku di pasar dunia mulai turun. Pendapatan ekspor turun tajam dan tidak ada dana yang tersedia untuk melaksanakan program pembangunan dan investasi yang telah dimulai. Hal ini menyebabkan penangguhan program pembangunan individu dan penghentian pekerjaan pada investasi tertentu. Ini, pada gilirannya, mengurangi pengeluaran rumah tangga secara langsung di pasar barang konsumsi dan menyebabkan krisis sosial-ekonomi, yang dapat menyebabkan polikrisis dan penyebarannya lebih lanjut ke ekonomi global lainnya.

Secara historis, situasi seperti itu dapat dilihat di Pantai Gading pada tahun 1980-an dan di Rusia pada dekade terakhir abad ke-20 dan dekade pertama abad ke-21. Pantai Gading, dari kemerdekaan hingga tahun 1980-an, mengalami periode kemakmuran yang dipicu oleh booming harga kakao dan kopi. Dengan dimulainya krisis energi pada tahun 1980, harga kedua bahan baku alam ini turun tajam, memicu serangkaian krisis ekonomi dan sosial yang sebagian besar terkait dengan isu-isu nasionalis dan anti-imigrasi. Negara tersebut memasuki fase perselisihan dan pertempuran internal (kudeta dan perang saudara) selama beberapa dekade.

Rusia, yang tidak dapat dianggap kecil dan lemah dan pada saat yang sama bukan negara pasca-kolonial, memiliki ekonomi yang secara unilateral bergantung pada beberapa sumber daya energi, terutama minyak dan gas alam dan, sampai batas tertentu, bahan bakar nuklir. "Gas alam, minyak, dan sumber daya energi lainnya menyumbang 18% dari PDB Rusia, 50% dari pendapatan pajaknya, dan sebanyak 61% dari pendapatan ekspornya". Jika harga naik atau tetap cukup tinggi, hal ini menyebabkan aliran dana yang stabil dan signifikan ke dalam anggaran negara dan pelaksanaan berbagai program sosial, investasi, dan militer. Melalui program-program yang tepat sasaran kepada klien politik dan massa sosial, para pembuat



keputusan membangun basis yang memadai untuk memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan dan berpartisipasi dalam distribusi kekayaan nasional ini. Anehnya, meskipun selama bertahun-tahun harga produk energi ekspor cukup baik, ekonomi Rusia tidak modern, setidaknya dalam hal sektor sipil.

Ini bukanlah model ekonomi yang seharusnya diikuti oleh negara yang ingin memberikan tingkat keamanan ekonomi dan sosial tertentu kepada warganya. Namun, dalam model ini, mungkin akan tergoda untuk dengan cepat mengabaikan situasi di pasar dunia dalam hal politik, terkait dengan harga berbagai bahan baku alam.

Penyakit Belanda adalah kasus khusus dari kutukan sumber daya. Setelah penemuan ladang gas alam di Groningen pada tahun 1960-an dan di Laut Utara (tergantung sumbernya, ladang yang ditemukan pada tahun 1959 mengandung antara 2.800 miliar dan 4.500 miliar meter kubik gas alam, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia), eksploitasinya menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Akibatnya, sejumlah besar modal dan faktor tenaga kerja tertarik ke sektor ini (menguras pasar tenaga kerja demi sektor ekstraktif dan sektor ekonomi lainnya yang bekerja sama dengannya). Hal ini menyebabkan situasi di mana akumulasi faktor modal dan tenaga kerja di industri pengolahan menurun di sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya menyebabkan perkembangan cabang bahan baku dan berkurangnya ekspansi industri dan layanan khusus (tidak termasuk yang diberikan kepada sektor gas).

Situasi ini berbahaya dari sudut pandang kebijakan ekonomi. Meskipun ekspor bahan baku yang diperoleh menghasilkan pendapatan yang tinggi, industri bahan baku tidak menunjukkan skala ekonomi, berbeda dengan industri pengolahan. Ancaman lain adalah bahwa sektor bahan baku "merebut" sumber daya manusia terbaik, yaitu orang-orang yang berkualifikasi tinggi (dalam hal kompetensi teknis dan manajerial), inovatif, kreatif, dan cekatan, dengan menawarkan gaji yang tinggi dan menarik. Dari sudut pandang ekonomi secara keseluruhan, situasi seperti itu tidak baik karena memengaruhi fungsi sektor ekonomi lainnya (industri pengolahan, R&D, dan lain-lain.).

Dalam kasus ekonomi kecil, Dutch Disease memengaruhi apresiasi mata uang, yang dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan industri pengolahan sendiri. Hal ini karena ekspor bahan baku alam didorong oleh masuknya devisa ke dalam perekonomian, yang mengakibatkan penguatan mata uang negara sendiri. Akibatnya, terjadi penurunan profitabilitas ekspor oleh perusahaan industri domestik dan pemutusan bertahap dari pasar internasional, yang menyebabkan hilangnya daya saing dan penghentian produksi yang tidak menguntungkan. Memiliki mata uang yang kuat juga mengakibatkan peningkatan persaingan di pasar domestik melalui peningkatan pangsa perusahaan asing di pasar domestik (peningkatan impor) dan hilangnya daya saing secara bertahap oleh perusahaan domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya dan berkembangnya proses deindustrialisasi dalam perekonomian.

Pertanyaannya adalah apakah Penyakit Belanda dapat dihindari dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya. Contoh ekonomi industri besar, seperti Amerika Serikat, Australia, atau Kanada, menunjukkan bahwa ketika sektor ekstraktif tidak memiliki peran



dominan, gejala Penyakit Belanda hanya terbatas pada tingkat lokal atau regional. Di ekonomi yang lebih kecil, ada cara (atau solusi) untuk menghindari masalah yang terkait dengan kutukan sumber daya. Norwegia dikutip sebagai contoh untuk hal ini. Pada tahun 1990, dibentuk dana khusus di mana pendapatan dari penjualan minyak dan gas diinvestasikan, sementara pengeluarannya tidak boleh melebihi 4% dari modal yang terkumpul.

Para peneliti juga mengidentifikasi dampak positif dari Penyakit Belanda, dengan sumber daya alam memiliki efek positif pada pembangunan suatu negara. Ini disebut Model Kanada. Basis sumber daya yang kaya dapat memungkinkan pengembangan industrialisasi. Hal ini membutuhkan keterkaitan yang kuat antara sektor ekstraktif domestik dan sektor industri, di mana sektor industri dirangsang untuk menghasilkan produk olahan dari bahan baku alami yang diterima atau produk akhir untuk sektor ekstraktif. Tiongkok telah menerapkan varian Model Kanada sehubungan dengan ekstraksi bahan baku alami yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai dan akumulator listrik yang digunakan dalam komputer pribadi, telepon seluler, dan kendaraan bermotor listrik. Industri ekstraksi bahan baku alami tertentu telah terkait erat dengan industri pengolahan. Dalam hal ini, biaya transportasi dan pilihan lokasi untuk industri pengolahan (relatif dekat dengan lokasi ekstraksi bahan baku) juga perlu diperhatikan. Akibatnya, Tiongkok kini menjadi produsen utama telepon seluler, komputer pribadi, dan kendaraan listrik. Negara ini tidak hanya memproduksi produk jadi sendiri tetapi juga menjual komponen jadi kepada perusahaan lain (misalnya, penjualan baterai untuk kendaraan listrik kepada perusahaan otomotif Eropa).

Varian ketiga dari kutukan sumber daya yang akan dibahas di sini terjadi di negara-negara yang memiliki sistem politik dan lembaga ekonomi yang buruk. Pada dasarnya, ini melibatkan perekonomian di mana pendapatan dari penjualan bahan baku alam tidak sepenuhnya masuk ke anggaran negara. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah negara dan rentan terhadap korupsi sehingga individu (atau kelompok) dapat menikmati keuntungan finansial yang signifikan dan menciptakan sistem oligarki. Akibatnya, dana tersebut digunakan secara tidak efisien dan terbuang sia-sia. Alasannya adalah tingginya pendapatan yang dihasilkan dari penjualan bahan baku alam, yang menghambat reformasi sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Sebaliknya, terjadi perluasan dan perkembangan kelompok-kelompok sosial yang disuap dan dikorupsi untuk berpartisipasi dalam redistribusi sebagian pendapatan dari bahan baku alam.

Pemerintah biasanya mengembangkan aparat penegak hukum, yang dalam praktiknya mengarah pada pembentukan apparatus represi dan paksaan. Langkah-langkah ini digunakan untuk menetralkan ketegangan sosial dan dengan demikian secara bertahap menekan sistem demokrasi dan mengadopsi sistem di mana elit negara mengamankan kekayaan mereka melalui kendali atas apparatus kekerasan. Kontrol tersebut memberi mereka akses sebagian ke dana dari penjualan bahan baku alam, termasuk khususnya minyak, gas alam, bijih logam, terutama yang termasuk dalam koleksi bahan baku kritis, berlian, emas, dan bahkan narkoba. Jenis pemerintahan ini terjadi di Afrika dan sangat lazim di wilayah sub-Sahara di mana banyak negara bergantung pada bahan baku alam. Model pemerintahan serupa telah berkembang dalam dua dekade terakhir di beberapa negara pasca-Soviet, seperti Rusia. Rusia memperoleh



pendapatannya dari penjualan minyak dan gas alam. Sistem politiknya saat ini hampir tidak dapat disebut sepenuhnya demokratis.

Model ekonomi yang disajikan yang menggambarkan penggunaan sumber daya alam menunjukkan bahwa kutukan sumber daya adalah praktik kebijakan ekonomi dan bukan hanya teori. Ekstraksi dan penjualan bahan baku alam dapat menyebabkan munculnya krisis lokal yang, dalam kombinasi tertentu dan dalam kondisi tertentu, dapat memicu perkembangan dan penyebaran polikrisis.

8.5 EKONOMI POLITIK DI MASA TRANSISI ENERGI

Transisi energi dirancang untuk berlangsung selama beberapa dekade mendatang di abad ke-21. Sebagai bagian dari proses ini, kita akan berpartisipasi dan mengamati sejumlah perubahan dengan dinamika yang berbeda-beda yang akan terjadi di berbagai bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Beberapa bahan baku alami yang saat ini populer secara bertahap akan digantikan oleh bahan baku lainnya. Hal ini akan didorong oleh tujuan utama untuk mencapai Net Zero pada tahun 2050.

Minyak dan gas alam secara bertahap akan kehilangan kepentingannya, dengan asumsi tidak ada terobosan teknologi yang terjadi dalam tiga dekade mendatang dan umat manusia tidak menguasai penggunaan bahan baku ini untuk tujuan energi tanpa emisi gas rumah kaca. Namun, terlepas dari pengabaian penggunaan minyak dan gas alam sebagai sumber energi, kemungkinan besar akan tetap digunakan dalam industri kimia, misalnya, dalam proses teknologi untuk pembuatan plastik dan pupuk.

Sebaliknya, bahan baku alami yang diklasifikasikan sebagai kritis dan strategis secara bertahap akan semakin penting. Penggunaannya dalam energi, transportasi, konstruksi, dan TIK akan memungkinkan peningkatan efisiensi proses yang terkait dengan implementasi dinamis transisi energi. Bahan baku ini, tidak seperti minyak atau metana, tidak akan (setidaknya menurut pengetahuan saat ini) secara langsung terkait dengan produksi energi; Bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk produksi produk yang menghasilkan energi dari sumber terbarukan. Oleh karena itu, mungkin ada godaan untuk berpendapat bahwa bahan-bahan tersebut memiliki potensi yang lebih rendah untuk kegiatan spekulatif dibandingkan dengan minyak.

Menganalisis permintaan saat ini dan masa depan untuk bahan baku kritis dan strategis serta deposit yang teridentifikasi, dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan cadangan mineral ini. Namun, perlu dicatat bahwa ada peluang terbatas untuk ekstraksi dan pemurniannya. Dalam jangka pendek hingga menengah, ada risiko kendala pasar, sebagian karena kurangnya investasi dalam kegiatan pertambangan. Menurut informasi yang disajikan oleh Komisi Eropa,

interval antara penemuan pertama dan dimulainya tambang komersial sangat bervariasi dari beberapa hingga beberapa dekade. Secara global, berdasarkan data historis, waktu rata-rata antara penemuan dan penambangan selama dekade terakhir untuk semua bahan bakar fosil adalah 12,5 tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ini rata-



rata antara 15 dan 20 tahun, tergantung pada bahan baku dan siklus bisnis serta harga pasarnya.

Saat ini, kemungkinan terjadinya kekurangan global bahan baku penting dan dampak negatifnya terhadap transisi energi sangat kecil. Produksi banyak mineral penghasil energi telah meningkat secara dramatis, dan sumber daya yang diekstraksi dari lokasi yang layak secara ekonomi juga meningkat. Perubahan teknologi dan inovasi disruptif menyebabkan peningkatan efisiensi dan munculnya bahan pengganti yang membentuk permintaan.

Perdagangan bahan baku penting saat ini jauh lebih kecil nilainya dibandingkan perdagangan bahan bakar fosil. Tidak seperti minyak, sebagian besar bahan baku penting tidak diperdagangkan secara luas di bursa, sehingga memungkinkan pedagang barang untuk memainkan peran kunci dalam memilih produsen dan konsumen. Karena dominasi beberapa perusahaan besar di industri ekstraktif, pasar oligopoli telah muncul. Perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan multinasional besar dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara yang beroperasi di banyak negara dan memiliki sumber daya serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan tambang. Akibatnya, industri ini sangat terkonsentrasi, dengan beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar produksi dan perdagangan global.

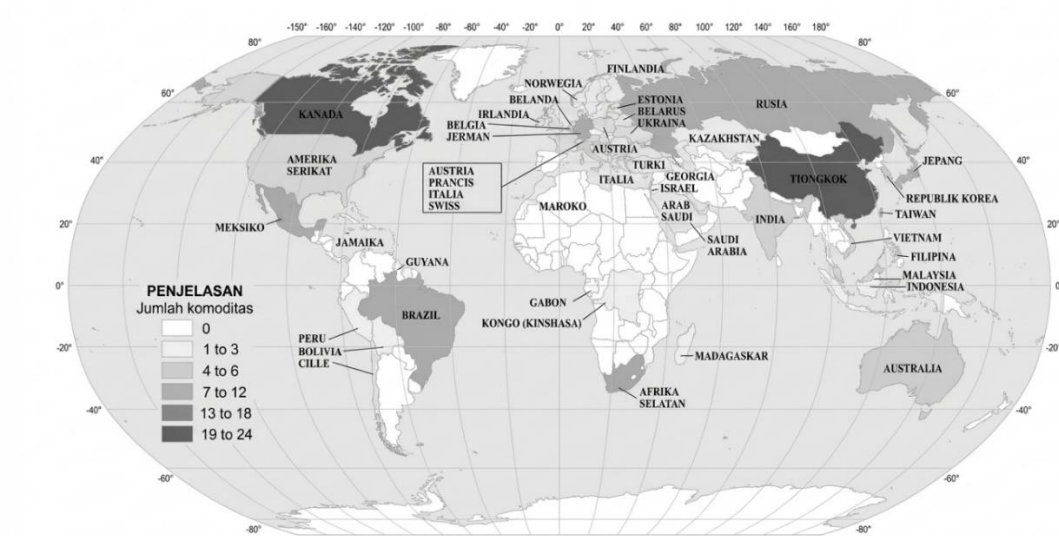
Setiap bahan baku penting memiliki geografi perdagangan yang unik. Hal ini menyebabkan terciptanya jaringan ketergantungan ekonomi dan teknologi yang luas di tingkat global yang melibatkan bahan baku penting dan teknologi terkait. Akibatnya, beberapa negara mengimpor barang (bahan baku atau teknologi) atau bergantung pada permintaan berkelanjutan untuk bahan, komponen, atau produk jadi mereka. Ketergantungan sebenarnya dalam hal permintaan dan penawaran bahan baku penting dari masing-masing ekonomi nasional bervariasi, tergantung pada negara, sektor, dan teknologi. Hal ini juga bergantung pada permintaan internal suatu negara untuk bahan baku penting dan spesialisasi industri nasional yang ada, khususnya yang relevan dengan proses transisi energi yang sedang berlangsung. Contohnya adalah Amerika Serikat, yang terus bergantung pada sumber asing untuk bahan baku dan bahan mineral olahan tertentu, termasuk beberapa mineral penting. Gambar 8.4 menunjukkan negara-negara pemasok mineral yang mana Amerika Serikat lebih dari 50% bergantung pada impor bersih pada tahun 2019–2020. Situasi serupa terjadi secara global seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.5.

Menganalisis keadaan saat ini, dapat disimpulkan bahwa rantai pasokan saat ini rentan terhadap berbagai risiko geopolitik, termasuk hal-hal berikut:

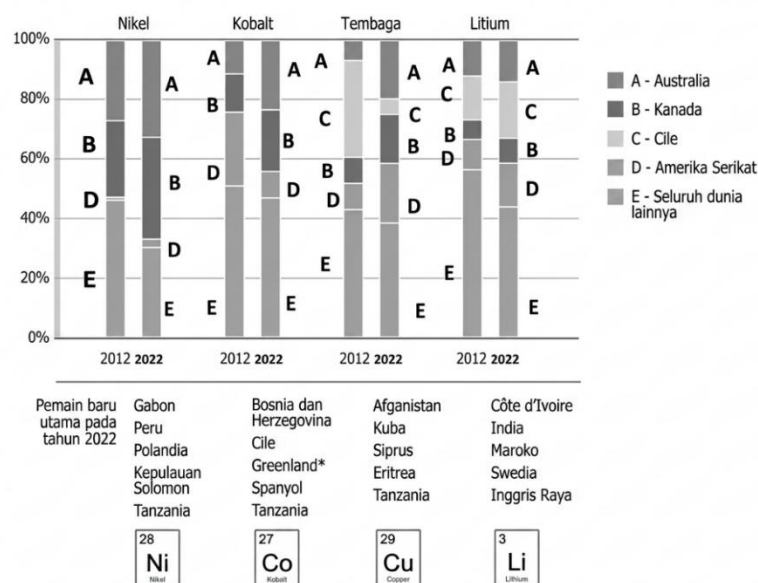
- Guncangan eksternal – bencana alam, pandemi, perang, bencana pertambangan, dan lain-lain.;
- Nasionalisasi sumber daya alam dan faktor produksi – pengambilalihan, pengendalian investasi asing, sengketa pajak, dan lain-lain.;
- Pembatasan ekspor – melalui pengenalan pajak ekspor, lisensi, kuota ekspor, atau harga minimum ekspor wajib, dan lain-lain.;



- Kartel mineral (bahan baku kritis) – koordinasi volume ekstraksi, harga, alokasi pasar, dan lain-lain.;
- Ketidakstabilan politik dan keresahan sosial – kekerasan, pemerintahan otoriter, korupsi, pemogokan buruh, dan lain-lain.;
- Manipulasi pasar – perdagangan orang dalam, manipulasi pasar jangka pendek, spekulasi pasar, dan lain-lain.;
- Risiko lingkungan – ekstraksi bahan baku kritis tanpa mempertimbangkan gangguan lingkungan, penentuan jejak lingkungan yang terkait dengan ekstraksi masing-masing bahan baku kritis, penghormatan terhadap hak-hak buruh (tidak ada kerja paksa), dan lain-lain.



Gambar 8.4 Sumber impor utama komoditas mineral non-bahan bakar yang ketergantungan impor bersihnya lebih dari 50% bagi Amerika Serikat.



Gambar 8.5 Pangsa anggaran eksplorasi global untuk bahan baku kritis (nikel, litium, tembaga, dan kobalt) dari tahun 2012 hingga 2022.



Gangguan dalam pasokan bahan baku kritis dapat memengaruhi banyak industri dan berdampak luas pada perekonomian, terutama dalam jangka pendek hingga menengah. Hal ini dapat terjadi karena permintaan akan bahan-bahan tertentu meningkat dan konsentrasi ekstraksi dan pengolahan saat ini terus berlanjut. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, arus perdagangan bahan-bahan penting cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh geopolitik seperti halnya minyak dan gas. Bahan baku penting melimpah, tersebar luas secara geografis, dan dapat diproses di banyak lokasi. Lokasi sumber baru yang akan dioperasikan hanya masalah waktu dan bergantung pada kondisi.

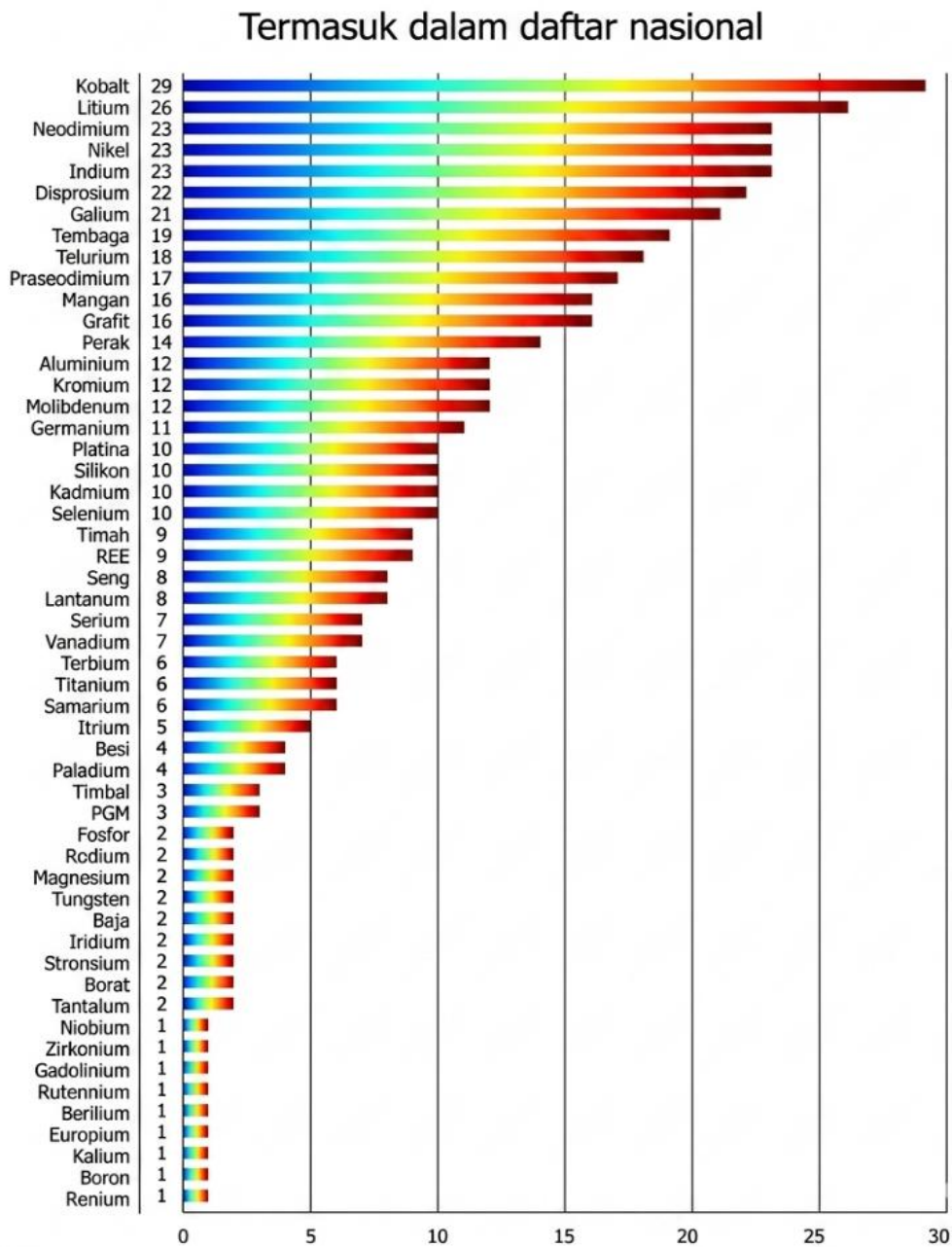
Sumber daya penting tersebar luas, membuka peluang untuk diversifikasi ekstraksi dan pengolahan material. Negara-negara berkembang saat ini menyumbang proporsi yang signifikan dari produksi material dunia yang dibutuhkan untuk transisi energi dan pangsa cadangan mereka bahkan lebih besar, meskipun belum sepenuhnya dieksplorasi (Gambar 8.3). Bolivia, misalnya, memiliki cadangan litium sebesar 21 juta ton, yang lebih banyak daripada negara lain mana pun, tetapi menghasilkan kurang dari 1% dari pasokan global pada tahun 2021. Negara-negara dapat menggunakan sumber daya mineral mereka untuk menarik industri midstream (pengolahan) atau bahkan industri downstream (produksi baterai dan kendaraan listrik).

Inovasi teknologi dapat memengaruhi permintaan dengan memperkenalkan substitusi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan desain, dan memperkenalkan material baru. Inovasi disruptif meningkatkan ketidakpastian tentang permintaan di masa depan. Sebagai contoh, perubahan komposisi kimia baterai kendaraan listrik selama delapan tahun terakhir telah secara signifikan mengubah permintaan akan material tertentu. Seiring munculnya teknologi baru, pasar kemungkinan akan mengalami perubahan lebih lanjut sebelum akhirnya terkonsolidasi di sekitar sejumlah material dan teknologi dominan yang terbatas. Oleh karena itu, memprediksi permintaan masa depan untuk material tertentu bisa sangat sulit, terutama dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi individu akan bahan baku penting dari sudut pandang ekonomi politik, perlu dicatat bahwa ada sekelompok negara yang mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan ketersediaan bahan baku penting.

Dalam hal ini, perhatian harus diberikan pada area yang diidentifikasi, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan yang mendasari kebijakan yang diadopsi. Aktivitas dasar dalam ekonomi politik adalah mengidentifikasi kelompok bahan baku yang akan dimasukkan dalam kumpulan bahan baku penting dan strategis. Kriteria utama meliputi pentingnya bahan baku tertentu untuk ekonomi tertentu, tingkat risiko pasokan (kedekatan dengan pasokan dan kemungkinan kekurangan), kompleksitas proses ekstraksi dan pemurnian, konsentrasi di berbagai bagian rantai pasokan, dan kurangnya substitusi di pasar. Pendekatan ini tercermin dalam ringkasan 35 daftar nasional bahan baku kritis yang mencakup 51 bahan yang relevan dengan transisi energi (Gambar 8.6).





Gambar 8.6 Bahan baku dan pasokan penting yang relevan dengan proses transisi energi yang termasuk dalam 35 daftar nasional bahan baku penting.

Kegiatan semacam ini sedang dilakukan di banyak negara di seluruh dunia. Untuk ekonomi global utama, termasuk Uni Eropa (Komisi Eropa) dan Amerika Serikat (Departemen Energi AS), terdapat kegiatan yang sedang berlangsung terkait dengan melakukan analisis sistem material. Analisis ini terdiri dari peta aliran bahan baku dan pasokan, komponen, atau produk melalui perekonomian. Bahan baku diamati dalam hal bagaimana ia memasuki perekonomian (penambangan atau ekstraksi domestik, impor), bagaimana ia bergerak melalui perekonomian (produksi, konsumsi, dan ekspor), dan kemudian bagaimana stoknya diisi kembali dan bagaimana ia didaur ulang dalam ekonomi sirkular. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahan baku kritis dan strategis telah dilakukan di Uni Eropa sejak awal abad



ke-21. Kegiatan serupa telah dilakukan di Amerika Serikat selama periode yang sama. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan apakah akan memasukkan bahan baku tertentu ke dalam daftar bahan baku kritis. Ada banyak langkah ekonomi politik yang diambil untuk melindungi dari polikrisis.

Yang pertama adalah menentukan kapasitas suatu ekonomi untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya mineral yang diekstraksi dan bersumber di negara tersebut. Ada kelompok negara yang memiliki bahan baku alami tetapi kekurangan teknologi dan basis industri untuk memprosesnya.

Kurangnya kapasitas ekstraksi, pengolahan, daur ulang, pemurnian, dan pemisahan di Uni Eropa (misalnya, untuk litium atau logam tanah jarang) mencerminkan kurangnya ketahanan dan ketergantungan yang tinggi pada pasokan dari bagian lain dunia. Beberapa bahan yang diekstraksi di Eropa (misalnya, litium) saat ini harus diekspor keluar dari Eropa untuk diproses. Teknologi, kemampuan, dan keterampilan pemurnian dan metalurgi merupakan mata rantai utama dalam rantai nilai.

Langkah kedua adalah menggunakan sumber daya alam secara efisien dan menerapkan aturan yang tepat untuk mengakses pembiayaan berkelanjutan bagi sektor ekstraksi dan pengolahan. Langkah ketiga adalah menggunakan sumber daya siklus tertutup dan mempromosikan desain produk yang memungkinkan pemulihan bahan baku alami individual dari suatu produk tertentu. Langkah keempat adalah mendukung pembahasan dan pengembangan serta implementasi solusi inovatif (dalam ekstraksi dan pengolahan limbah, material canggih, dan material pengganti) untuk bahan baku alami yang saat ini digunakan. Langkah kelima adalah mengidentifikasi proyek ekstraksi dan pengolahan yang relevan dan penting di pasar domestik dan luar negeri serta mengejar kebijakan internasional yang terarah yang mengakui pentingnya bahan baku individual dalam perekonomian suatu negara untuk mengamankan pasokan, mencapai diversifikasi sumber pasokan, dan mencari hubungan ekonomi berkelanjutan berdasarkan kemitraan. Kegiatan-kegiatan ini harus menghasilkan kemitraan strategis, dengan kebijakan yang mendukung pengadaan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan serta mempromosikan pembangunan negara-negara kaya sumber daya dengan mengakui peran mereka dalam seluruh rantai nilai pengolahan sumber daya alam. Langkah keenam adalah tentang pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan teknologi untuk tujuan prediksi teknologi. Inilah cara bagaimana permintaan akan bahan baku kritis tertentu dapat dibentuk secara aktif. Mekanisme ini terkait dengan proses analisis aliran material dalam perekonomian. Identifikasi teknologi baru dan munculnya substitusi baru serta material canggih yang dapat digunakan dalam teknologi saat ini akan memengaruhi tingkat investasi dan pekerjaan R&D.

Alasan lain mengapa mekanisme ini diperlukan adalah inovasi disruptif yang dapat secara dramatis mengubah seluruh rantai nilai produksi dan pengolahan bahan baku kritis.¹⁶ Langkah keempat adalah mendukung pembahasan dan pengembangan serta implementasi solusi inovatif (dalam ekstraksi dan pengolahan limbah, material canggih, dan material pengganti) untuk bahan baku alami yang saat ini digunakan. Langkah kelima



adalah mengidentifikasi proyek ekstraksi dan pengolahan yang relevan dan penting di pasar domestik dan luar negeri serta mengejar kebijakan internasional yang terarah yang mengakui pentingnya bahan baku individual dalam perekonomian suatu negara untuk mengamankan pasokan, mencapai diversifikasi sumber pasokan, dan mencari hubungan ekonomi berkelanjutan berdasarkan kemitraan.

Kegiatan-kegiatan ini harus menghasilkan kemitraan strategis, dengan kebijakan yang mendukung pengadaan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan serta mendorong pembangunan negara-negara kaya sumber daya dengan mengakui peran mereka dalam seluruh rantai nilai pengolahan sumber daya alam. Langkah keenam adalah pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan teknologi untuk tujuan prediksi teknologi. Dengan cara ini, permintaan akan bahan baku kritis tertentu dapat dibentuk secara aktif. Mekanisme ini terkait dengan proses analisis aliran material dalam perekonomian. Identifikasi teknologi baru dan munculnya substitusi baru serta material canggih yang dapat digunakan dalam teknologi saat ini akan memengaruhi tingkat investasi dan pekerjaan R&D. Alasan lain mengapa mekanisme ini diperlukan adalah inovasi disruptif yang dapat secara dramatis mengubah seluruh rantai nilai produksi dan pengolahan bahan baku kritis.

8.6 RINGKASAN

Ekonomi politik bahan baku alam yang memengaruhi transisi energi merupakan tantangan bagi perekonomian utama dunia selama beberapa dekade mendatang. Hal ini membutuhkan identifikasi area-area tertentu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan pemantauan terus-menerus terhadap risiko-risiko yang terkait. Langkah-langkah tersebut harus berfokus tidak hanya pada ekstraksi dan pengolahan bahan baku, tetapi juga pada industri yang menggunakannya untuk menghasilkan produk akhir. Penting untuk terus memantau munculnya teknologi dan produk baru untuk menentukan dampaknya pada rantai nilai saat ini dan investasi yang direncanakan. Perhatian juga harus diberikan pada isu keberlanjutan, meminimalkan jejak lingkungan, dan mendukung peningkatan standar kualitas dalam tata kelola sehingga sumber daya yang mengalir dari ekstraksi dan pengolahan bahan baku alam mencapai sebanyak mungkin warga negara, dan bukan hanya segelintir orang yang berkuasa di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan ini akan meminimalkan risiko krisis ganda atau mengidentifikasinya terlebih dahulu untuk mengambil tindakan penanggulangan yang tepat.

Proses transisi energi akan berjalan paralel dengan ekonomi bahan bakar fosil saat ini setidaknya selama dua dekade mendatang. Peningkatan infrastruktur listrik yang menghasilkan energi dari sumber terbarukan juga mencegah munculnya krisis ganda yang disebabkan oleh perubahan cepat dalam pasokan dan harga minyak dan gas alam. Pengurangan bertahap peran minyak dalam perekonomian merupakan "solusi" untuk potensi krisis ganda yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar cair. Hal ini akan mencegah penyebaran krisis lebih lanjut dan penumpukan emosi di masyarakat.

Selain itu, krisis ganda yang tercipta di sektor energi dapat dicegah dengan mengembangkan kapasitas untuk menghasilkan energi dari sumber terbarukan. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan peran dan pentingnya bahan baku alami,



terutama bahan baku kritis dan strategis. Dengan mengetahui peran bahan baku alami dalam mencapai tujuan ekonomi gas rumah kaca nol emisi dan kesalahan apa yang telah dilakukan selama abad terakhir dalam produksi dan pengolahan minyak dan gas alam, model kerja sama internasional baru dapat dikembangkan untuk ekstraksi dan pengolahan bahan baku kritis.

Kegiatan-kegiatan ini, dikombinasikan dengan pembahasan dan pengembangan serta implementasi inovasi produk dan proses, pada akhirnya dapat mencegah munculnya kartel atau mencegah kelompok ekonomi tertentu menjadi bergantung pada kebijakan dan, dalam kasus ekstrem, pemerasan oleh negara-negara penghasil bahan baku. Mencari lokasi sumber baru untuk bahan baku penting dan strategis serta membangun model kerja sama yang lebih maju (berdasarkan model saling menguntungkan) memungkinkan diversifikasi pasokan dan pembangunan berkelanjutan baik ekonomi pembeli maupun ekonomi produsen.



BAB 9

KEKUATAN GLOBAL & KEAMANAN INTERNASIONAL

9.1 PENDAHULUAN

Perang Rusia melawan Ukraina telah berdampak langsung pada keamanan dan stabilitas global; perang ini telah berkontribusi pada peningkatan risiko dan ketidakpastian di bidang sosial, ekonomi, dan politik, menyebabkan krisis demografis dan ekologis, meningkatkan rasa tidak aman di kalangan warga, dan bahkan memicu kekhawatiran akan perang nuklir. Invasi Rusia telah menjadi titik balik bagi keamanan global; invasi ini telah mengubah tatanan liberal internasional setelah Perang Dingin dan telah menyebabkan kebangkitan kembali pentingnya geopolitik blok NATO dan penguatan kerja sama militer antar negara anggota Uni Eropa.

Invasi ke Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional (Piagam PBB tahun 1945), Deklarasi Helsinki, Deklarasi tentang Ketidaklayakan Intervensi dalam Urusan Dalam Negeri Negara dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatannya, dan Perjanjian antara Ukraina dan Federasi Rusia tentang Perbatasan Negara Ukraina-Rusia. Selain itu, ketidakmampuan aliansi regional dan internasional untuk mendefinisikan dan menerapkan standar perilaku bertanggung jawab yang umum telah menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum. Lebih lanjut, kurangnya kerja sama internasional yang memadai di awal perang dan kurangnya upaya untuk membangun dialog dengan Rusia telah menyebabkan sejumlah keputusan dan tindakan yang tidak efektif. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk sipil di Ukraina, penghancuran seluruh kota dan infrastruktur, dan pendudukan sebagian wilayah negara berdaulat tersebut.

Munculnya tantangan geopolitik kontemporer seperti ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada keamanan internasional. Di antara tantangan tersebut adalah sebagai berikut: (1) konsekuensi perang ekonomi yang telah dideklarasikan negara-negara terhadap Rusia sebagai tanggapan atas invasi skala penuh ke Ukraina melalui pemberlakuan berbagai sanksi; (2) penurunan keamanan energi akibat keputusan dan perjanjian dalam pasokan gas Rusia ke negara-negara Eropa; (3) peningkatan kerawanan pangan dan krisis pasokan logam yang disebabkan oleh penurunan ekspor gandum dan makanan, serta baja dan logam lainnya karena 30% pasokan dunia produk-produk tersebut berasal dari Rusia dan Ukraina; dan (4) meningkatnya dampak ideologi, propaganda, disinformasi, dan perang informasi terhadap kohesi dan kekuatan aliansi, yang telah meningkatkan potensi risiko di masa depan terhadap keamanan internasional. Semua ini telah mengkondisikan dimulainya era baru dalam politik global dan keamanan internasional; hal ini telah membawa transformasi besar-besaran dalam arsitektur keamanan Eropa, membuat para pemimpin negara meninjau kembali pendekatan terhadap pembentukan kebijakan keamanan dan pertahanan nasional, dan telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan militerisasi. Pengeluaran militer global telah melampaui Rp20.000 Triliun untuk pertama kalinya – khususnya, di Amerika Serikat, Iran, Rusia, India, Cina, dan Arab Saudi. Jepang telah menggandakan anggaran pertahanannya menjadi Rp1,05



Kuadriliun (2% dari PDB-nya), sementara pengeluaran militer Qatar meningkat sebesar 434% dibandingkan tahun 2010.¹ Sementara Rusia meningkatkan pengeluarannya sebesar 2,9% menjadi Rp659 Triliun Rp659 Triliun Rp659 Triliun, pengeluaran Amerika Serikat dan sekutu NATO mencapai sekitar Rp12 Kuadriliun, yang 17 kali lebih banyak daripada yang dihabiskan di Rusia.² Pada saat yang sama, dalam satu tahun, Tiongkok meningkatkan anggaran militernya sebesar 4,7% hingga Rp2,93 Kuadriliun, dan India hingga Rp766 Triliun.

Dengan demikian, konfrontasi antara negara-negara individual di dunia dan aliansi mereka di abad ke-21 berlangsung dalam kondisi perubahan signifikan dalam sistem keamanan internasional, yang terkait dengan meningkatnya persaingan dan redistribusi lingkup pengaruh di antara berbagai pusat geopolitik. Dalam kondisi ini, kemampuan negara-negara di dunia untuk memastikan keamanan nasional mereka sendiri dengan mencegah konflik militer menggunakan sarana militer dan politik yang memungkinkan menjadi sangat penting.

9.2 FAKTOR KEAMANAN NASIONAL MODERN DAN METODE EVALUASINYA

Kemampuan suatu negara untuk memastikan keamanan nasionalnya ditentukan oleh dua faktor utama – kekuatan militer dan potensi ekonomi. Perlu dinyatakan bahwa korelasi perkembangan antara bidang ekonomi dan militer terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh: (1) peningkatan produksi produk berteknologi tinggi untuk keperluan militer yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah negara; (2) peningkatan produksi produk sipil yang didorong oleh perkembangan produksi militer dan produk militer yang lebih kompleks serta inovasi di sektor pertahanan dan industri; (3) peningkatan permintaan akan sumber daya keuangan dan sumber daya tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi untuk pengembangan dan produksi peralatan dan senjata militer inovatif yang kompleks; dan (4) evolusi global jenis konfrontasi antarnegara dan konflik militer berdasarkan penggunaan metode keuangan dan ekonomi negara-negara bawahan dan pada proses integrasi yang semakin mendalam, perubahan kutub lingkup pengaruh, dan lain-lain.

Semua ini menggarisbawahi perlunya studi komprehensif tentang potensi ekonomi dan kekuatan militer dalam menentukan keadaan dan tren perkembangan negara-negara di dunia di bidang keamanan nasional serta dampaknya terhadap keamanan internasional.

Saat ini, organisasi internasional dan pusat informasi-analitik, yang dengan satu atau lain cara terhubung dengan sistem keamanan dan pertahanan, memberikan banyak perhatian pada isu-isu pemantauan proses militerisasi. Organisasi-organisasi ini adalah Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), International Institute for Strategic Studies (IISS), Bonn International Conversion Centre (BICC), Institute for Economics and Peace (IEP), dan lembaga-lembaga nasional regional yang serupa. Organisasi internasional dan pusat informasi dan analisis ini menerbitkan berbagai peringkat berdasarkan indikator individu, seperti jumlah personel militer, pengeluaran anggaran pertahanan, dan jumlah pesawat terbang, kapal laut, dan tank.

Katalog dengan gambaran umum potensi militer dan pertahanan 170 negara (Military Balance) yang diterbitkan oleh International Institute for Strategic Studies⁸ adalah salah satu



yang paling populer. Peringkat tahunan negara-negara di dunia berdasarkan jumlah peralatan penerbangan (pesawat terbang) disajikan oleh situs web FlightGlobal, yang menerbitkan panduan tahunan terkemuka yang diakui untuk Angkatan Udara Dunia. Peringkat angkatan udara bersenjata negara-negara di dunia diterbitkan setiap tahun di portal World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA), dan Global Firepower Company setiap tahun menerbitkan daftar angkatan darat terbaik di dunia, yang disusun berdasarkan perhitungan Indeks Kekuatan Militer.

Analisis terhadap peringkat, ulasan, dan panduan analitis yang ada menunjukkan bahwa perangkat metodologis untuk menilai kekuatan militer negara-negara yang digunakan dalam peringkat atau ulasan tersebut cukup beragam dan didasarkan pada penggunaan indikator objektif kuantitatif murni dan perangkat evaluasi ahli. Selain itu, metode analisis komparatif memungkinkan untuk memantau dinamika kekuatan militer negara dan menentukan tren perkembangan global di bidang ini. Pada saat yang sama, perbandingan kekuatan militer negara yang lebih rinci dan akurat akan membutuhkan analisis dan evaluasi lebih lanjut karena baik negara-negara terkemuka maupun negara-negara yang kurang terkemuka memiliki keunggulan spesifik yang berbeda yang secara signifikan memengaruhi kekuatan militer mereka, tetapi hal ini tidak diperhitungkan oleh peringkat yang ada.

Potensi ekonomi suatu negara merupakan dasar fundamental dari kekuatan militernya. Di sini, perlu ditekankan bahwa potensi ekonomi, tanpa menentukan tujuan penggunaannya, tidak dapat berdiri sendiri karena isi dan penilaiannya selalu mempertimbangkan untuk apa potensi tersebut harus digunakan, untuk apa cadangan dan peluang yang tersedia dibutuhkan, dan hasil akhir apa yang harus diperoleh. Itulah sebabnya mengapa, dalam literatur ilmiah modern, terdapat berbagai interpretasi konsep "potensi ekonomi" dan pendekatan untuk penilaiannya.

Sesuai dengan perannya dalam memastikan kekuatan militer negara, potensi ekonomi dibentuk oleh hal-hal berikut: (1) kemampuan produksi perusahaan yang memproduksi produk akhir untuk keperluan militer; (2) cabang-cabang dasar produksi militer yang memasok komponen, bahan baku, dan bahan bakar melalui kerja sama; (3) infrastruktur yang terlibat dalam pemeliharaan kompleks pertahanan dan industri (transportasi, keuangan, komunikasi, dan manajemen); (4) pangkalan militer dan teknis beserta peralatan pengujian dan eksperimennya; (5) potensi ekspor-impor dan sistem hubungan ekonomi luar negeri terkait pasokan produk militer, khususnya senjata dan peralatan militer; dan (6) sumber daya alam yang telah dieksplorasi, stok material, dan cadangan yang ditujukan atau dapat digunakan untuk keperluan militer.

Oleh karena itu, sesuai dengan penilaian potensi ekonomi sebagai dasar untuk memastikan kekuatan militer negara-negara di dunia, definisi berikut diusulkan:

Potensi ekonomi adalah sumber daya yang tersedia di suatu negara yang memastikan pencapaian volume maksimum produksi produk militer dan produk kompleks pertahanan dan industri yang dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan angkatan bersenjata negara tersebut, dan juga untuk penyediaan pencegahan yang komprehensif dan, jika perlu, partisipasi dalam berbagai jenis perang dan konflik militer.



Analisis pendekatan yang ada untuk menilai potensi ekonomi (hasilnya disajikan dalam studi penulis sebelumnya) membuktikan tidak adanya pendekatan metodologis yang mempertimbangkan pentingnya potensi ekonomi dalam pengembangan kekuatan militer negara-negara di dunia. Hal ini mengharuskan dirancangnya pendekatan untuk penilaian potensi ekonomi, dengan mempertimbangkan kemampuan suatu negara untuk melawan dan mencegah kemungkinan perang atau konflik militer, dan mengingat sumber daya negara yang siap siaga.

9.3 EKONOMI SEBAGAI PENENTU KEKUATAN MILITER GLOBAL

Untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia dari sudut pandang memastikan kekuatan militer mereka, kami mengusulkan pendekatan metodologis yang mencakup tiga tahap utama:

- Tahap 1 : Menentukan komponen utama potensi ekonomi negara-negara di dunia dan indikator parsial yang mengevaluasinya.
- Tahap 2 : Penilaian integral potensi ekonomi negara-negara di dunia.
- Tahap 3 : Mempelajari pengaruh potensi ekonomi negara-negara di dunia terhadap kekuatan militer dan kemampuan mereka untuk memastikan keamanan nasional.

Mari kita pertimbangkan secara lebih rinci tahapan utama dari pendekatan yang diusulkan dan hasil yang diperoleh berdasarkan pendekatan tersebut. Data dari 44 negara di dunia untuk tahun 2018–2021 (tergantung pada ketersediaan informasi tentang indikator parsial yang dipilih untuk penilaian potensi ekonomi) dari sumber-sumber seperti Bank Dunia dan Basis Data Pengeluaran Militer SIPRI serta indeks internasional (Indeks Kompleksitas Ekonomi, Kesiapan untuk Masa Depan Produksi, Indeks Kinerja Industri Kompetitif, dan Indeks Teknologi dan Inovasi) membentuk dasar statistik studi ini.

Tahap 1 – Menentukan komponen utama potensi ekonomi negara-negara di dunia dan indikator parsial yang mengevaluasinya

Analisis pembahasan ilmiah modern dalam isu-isu yang dianalisis, memungkinkan untuk menentukan komponen utama potensi ekonomi dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk memastikan kekuatan militer dan keamanan nasional suatu negara. Ini termasuk progresivitas struktur ekonomi, inovasi dan teknologi, efisiensi ekonomi suatu negara, pengeluaran pertahanan, dan skala ekonomi.

Dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, indikator parsial berikut dipilih untuk penilaiannya:

1. Kemajuan struktur ekonomi, inovasi, dan teknologi:
 - x1 – Indeks Kompleksitas Ekonomi,
 - x2 – Indeks Kesiapan Masa Depan Produksi,
 - x3 – Indeks Kinerja Industri Kompetitif,
 - x4 – Indeks Teknologi dan Inovasi.



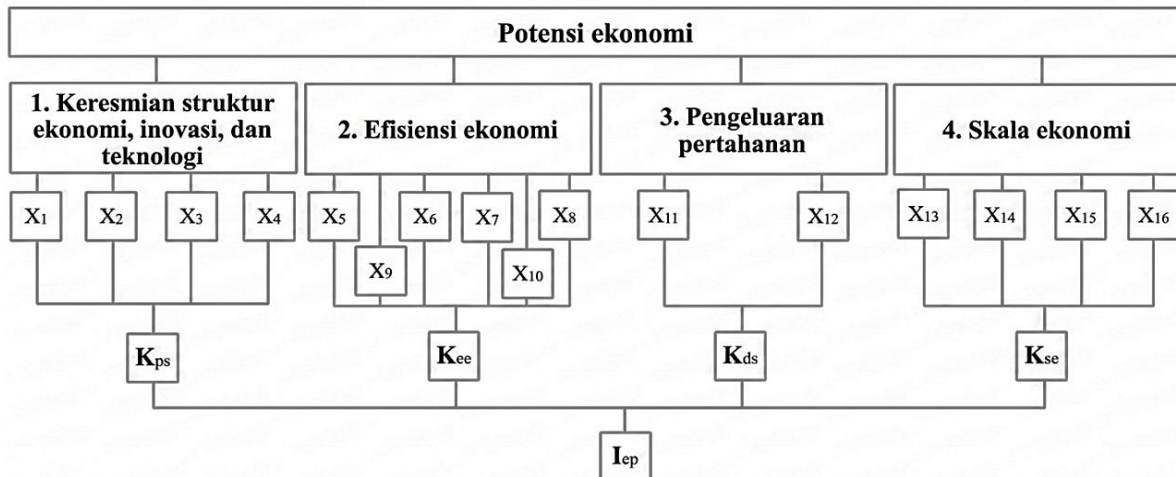
2. Efisiensi ekonomi suatu negara:
 - x5 – PDB per kapita,
 - x6 – Rasio ekspor terhadap PDB,
 - x7 – Rasio impor terhadap PDB,
 - x8 – Rasio utang luar negeri terhadap PDB,
 - x9 – Rasio cadangan emas dan devisa terhadap utang luar negeri,
 - x10 – Rasio pendapatan anggaran terhadap PDB.
3. Pengeluaran pertahanan:
 - x11 – Total pengeluaran militer per prajurit pria/wanita,
 - x12 – Bagian pengeluaran militer dalam total pengeluaran anggaran.
4. Skala ekonomi:
 - x13 – Nilai absolut PDB,
 - x14 – Nilai absolut pengeluaran anggaran,
 - x15 – Nilai absolut pengeluaran militer,
 - x16 – Nilai absolut cadangan emas dan devisa.

Skema struktural dan logis untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia disajikan pada Gambar 9.1.

Komponen, “Kemajuan struktur ekonomi, inovasi, dan teknologi”, ditentukan oleh indikator parsial berikut.

x1 – *Indeks Kompleksitas Ekonomi* adalah indikator potensi ekonomi, yang dapat ditentukan berdasarkan data yang menghubungkan lokasi dengan jenis aktivitas yang ada di dalamnya. Perhitungan ECI memungkinkan hasil makroekonomi penting seperti tingkat pendapatan suatu negara, pertumbuhan ekonomi, dan ketidaksetaraan pendapatan. Selain itu, data perdagangan, data ketenagakerjaan, data pasar saham, dan data paten digunakan untuk menghitung indeks ini. Dengan demikian, ECI adalah indeks struktur produksi suatu negara yang menggabungkan informasi tentang keragaman ekspor negara tersebut (jumlah produk yang diekspornya) dan volume ekspor produknya (jumlah negara yang mengekspor produk ini). Nilai indeks bervariasi dari –2 hingga +3, yang berarti semakin tinggi nilai indeks, semakin kompleks ekonomi suatu negara tertentu. Analisis indikator ini dilakukan berdasarkan data tahun 2018. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indeks ini ditunjukkan pada Gambar 9.2.



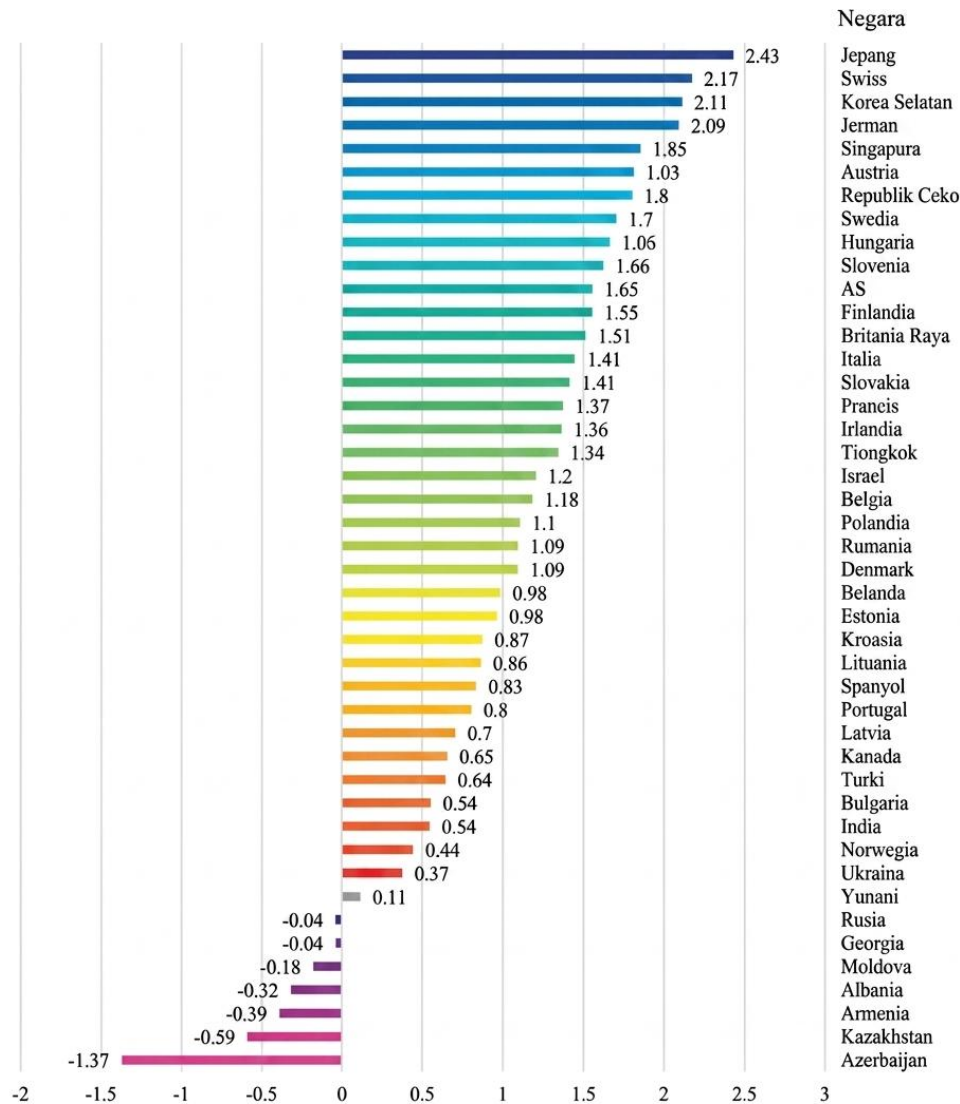


Gambar 9.1 Skema struktural dan logis untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia, di mana x1 – Indeks Kompleksitas Ekonomi; x2 – Indeks Kesiapan Masa Depan Produksi; x3 – Indeks Kinerja Industri Kompetitif; x4 – Indeks Teknologi dan Inovasi; x5 – PDB per kapita; x6 – Rasio ekspor terhadap PDB; x7 – Rasio impor terhadap PDB; x8 – Rasio utang luar negeri terhadap PDB; x9 – Rasio cadangan emas dan devisa terhadap utang luar negeri; x10 – Rasio pendapatan anggaran terhadap PDB; x11 – Total pengeluaran militer per personel militer; x12 – Pangsa pengeluaran militer dalam total pengeluaran anggaran; x13 – Nilai absolut PDB; x14 – Nilai absolut pengeluaran anggaran; x15 – Nilai absolut pengeluaran militer; x16 – Nilai absolut cadangan emas dan devisa; Kps – Indikator komposit progresivitas struktur inovasi; Kee – Indikator komposit efisiensi ekonomi; Kds – Indikator komposit pengeluaran pertahanan; KSE – Indikator komposit skala ekonomi; IEP – Indikator integral potensi ekonomi.

Oleh karena itu, analisis negara-negara di dunia berdasarkan nilai Indeks Kompleksitas Ekonomi menunjukkan bahwa Jepang, sebagai ekonomi paling kompleks, berada di urutan terdepan (nilai ECI – 2,43), Swiss berada di urutan kedua (2,17), dan Korea Selatan di urutan ketiga (2,11). Sebagai perbandingan, posisi Ukraina dalam Indeks Kompleksitas Ekonomi pada tahun 2018 lebih tinggi daripada Rusia – hasil Ukraina sama dengan 0,37 (peringkat ke-36 dari 44 negara di dunia), sedangkan Rusia mencetak nilai negatif, yaitu –0,04 (peringkat ke-38), yang disebabkan oleh ekspor bahan baku yang dominan oleh Rusia.

x2 – Indeks Kesiapan untuk Masa Depan Produksi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari pengukuran dua kelompok parameter: struktur produksi (atau tingkat perkembangan produksi saat ini di suatu negara) dan pendorong produksi (atau faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada transformasi sistem produksi dan memungkinkan suatu negara untuk memperoleh manfaat dari pengenalan teknologi canggih). Indeks ini menyediakan informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh Forum Ekonomi Dunia.

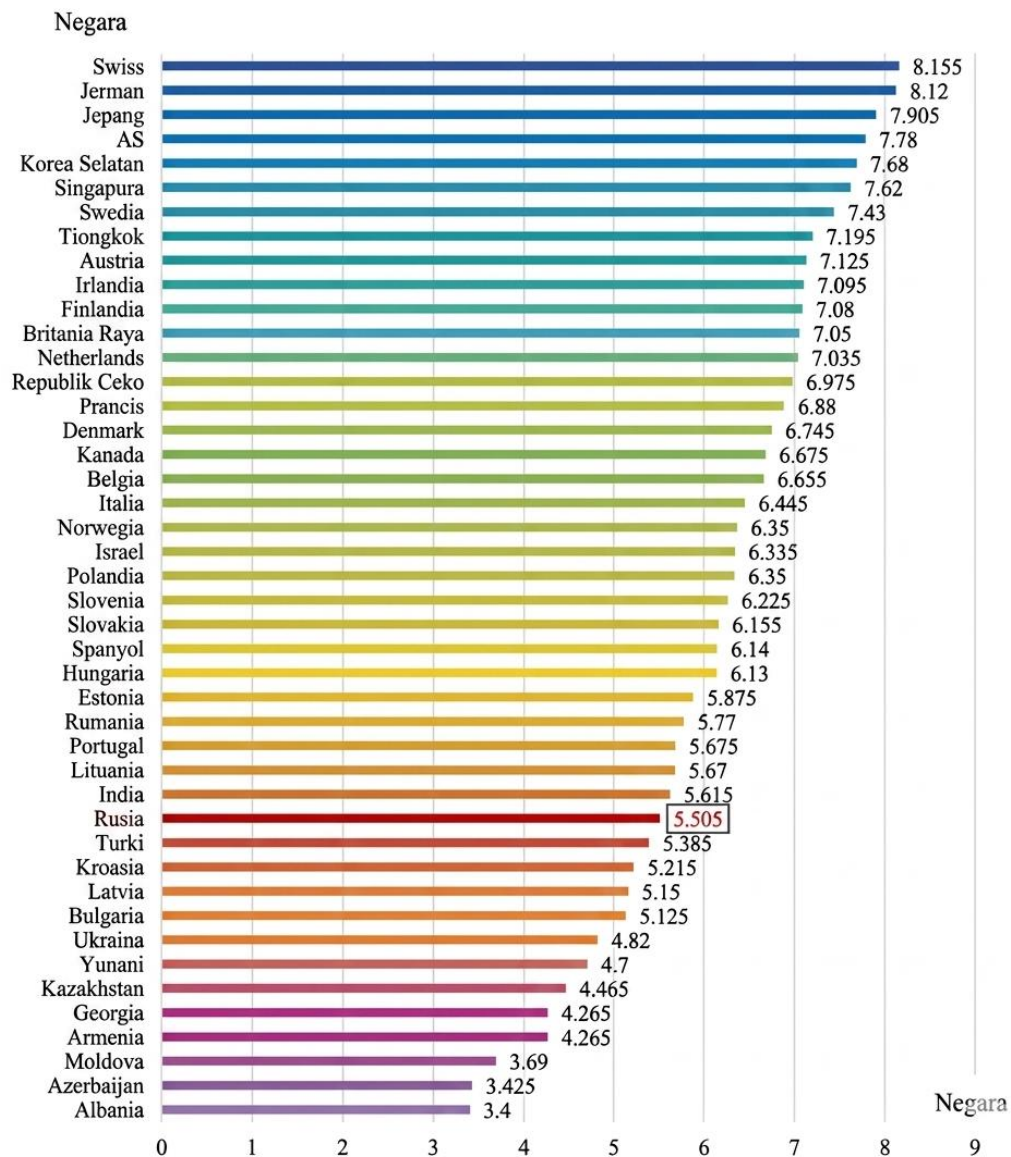




Gambar 9.2 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI) pada tahun 2018.

Komponen pertama dari indeks ini adalah struktur produksi, yang diukur sesuai dengan kompleksitas dan ukuran basis produksi yang ada. Diasumsikan bahwa negara-negara dengan basis produksi yang lebih maju, berskala besar, dan kompleks lebih siap menghadapi perubahan di masa depan, yang terkait dengan transformasi proses produksi di bawah pengaruh revolusi industri keempat. Komponen kedua, pendorong produksi, mengevaluasi "pemicu" utama yang memungkinkan suatu negara untuk menciptakan peluang bagi pengenalan teknologi canggih dan membentuk dasar transformasi sistem produksi. Kedua komponen indeks ini juga dinilai secara terpisah. Dalam kerangka studi ini, kami menghitung indikator kompleks – Indeks Kesiapan untuk Masa Depan Produksi – sebagai rata-rata aritmatika dari indeks komponen-komponennya. Peringkat negara-negara di dunia, sesuai dengan Indeks Kesiapan untuk Masa Depan Produksi yang dihitung, ditunjukkan pada Gambar 9.3.





Gambar 9.3 Peringkat negara-negara di dunia sesuai dengan Indeks Kesiapan Masa Depan Produksi yang dihitung.

Seperti yang terlihat pada Gambar 9.3, Swiss menempati peringkat pertama dalam hal kesiapan masa depan produksi (8,155), Jerman berada di peringkat kedua (8,12), dan Jepang di peringkat ketiga (7,905). Pada tahun 2018, Ukraina, menurut indeks tersebut, berada lima posisi lebih rendah daripada Rusia (masing-masing peringkat ke-37 dan ke-32).

x3 – *Indeks Kinerja Industri Kompetitif* (CIP) yang diusulkan oleh UNIDO mengevaluasi kemampuan negara untuk memproduksi dan mengeksport barang industri yang kompetitif. Indeks ini mencakup tiga parameter utama, yang masing-masing terdiri dari indikator berikut: kemampuan untuk memproduksi dan mengeksport barang industri (nilai tambah dalam industri manufaktur per kapita dan ekspor produk industri manufaktur per kapita); pendalaman dan modernisasi teknologi (intensitas industrialisasi dan kualitas ekspor); pengaruh global (pengaruh suatu negara terhadap nilai tambah produksi dunia dan pengaruh suatu negara terhadap ekspor global produk industri). Semakin tinggi skor dalam salah satu



dari tiga pengukuran tersebut, semakin tinggi daya saing industri negara tersebut dan indeks CIP-nya.

Analisis nilai Indeks Kinerja Industri Kompetitif berdasarkan data tahun 2018 (Gambar 9.4) menunjukkan bahwa Jerman berada di peringkat pertama (0,5234), Jepang di peringkat kedua (0,3998), dan Tiongkok di peringkat ketiga (0,3764). Ukraina tertinggal di belakang Rusia, berada di peringkat ke-38, sedangkan Rusia berada di peringkat ke-27.

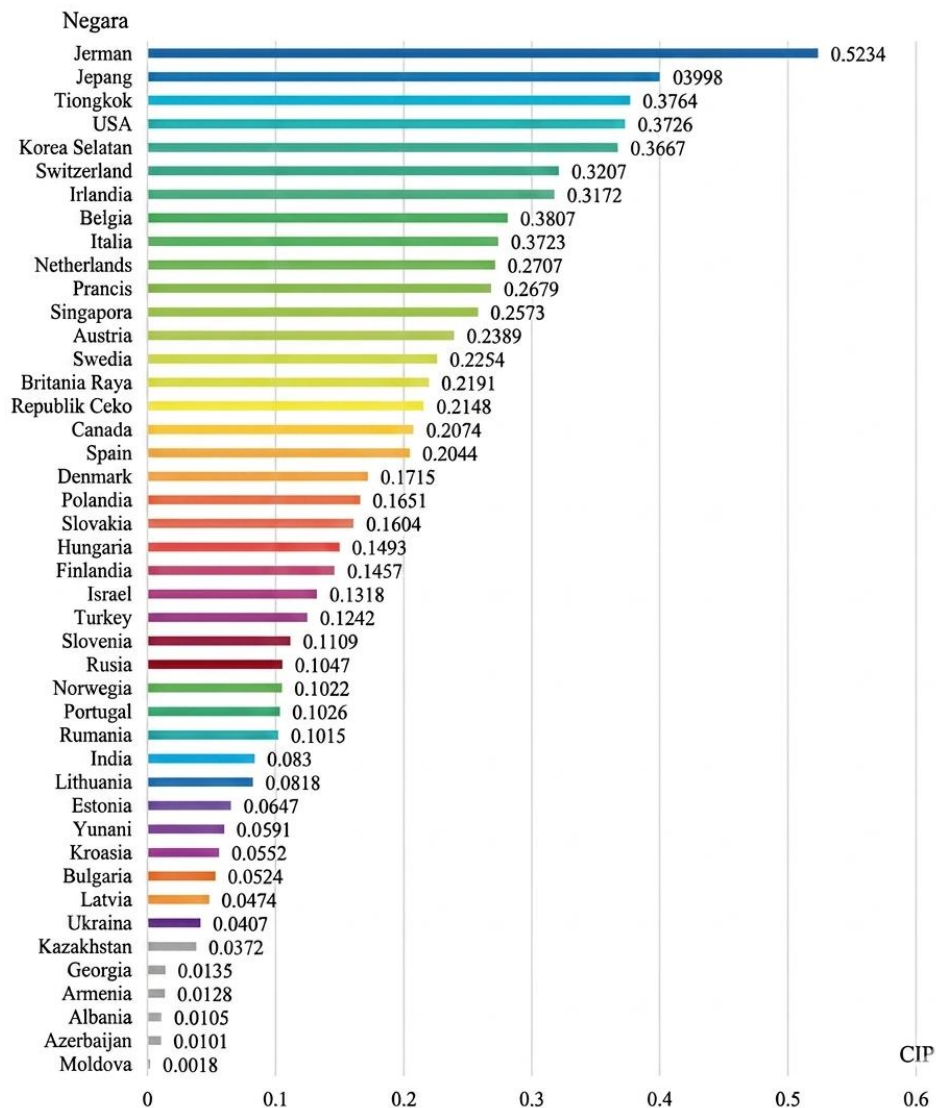
x4 – *Indeks Teknologi dan Inovasi* membantu mengidentifikasi kemungkinan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan pengeditan gen. Teknologi canggih sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan antar negara. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta negara-negara kurang berkembang tidak boleh ketinggalan gelombang perubahan teknologi yang cepat berikutnya. Indeks ini mencakup lima blok untuk mengukur kemampuan menggunakan, mengadopsi, dan mengadaptasi teknologi canggih: penyebaran TIK (tingkat infrastruktur TIK), keterampilan, aktivitas di bidang pekerjaan ilmiah dan pembahasan, aktivitas industri, dan akses ke pembiayaan. Peringkat berdasarkan nilai Indeks Teknologi dan Inovasi disajikan pada Gambar 9.5.

Seperti yang terlihat pada Gambar 9.5, terkait Indeks Teknologi dan Inovasi, tempat pertama ditempati oleh Amerika Serikat (1,0), Swiss berada di urutan kedua (0,97), dan Inggris Raya di urutan ketiga (0,96). Ukraina dalam peringkat ini menempati posisi 14 peringkat lebih rendah daripada Rusia. Namun, setelah melihat komponen individual indeks Ukraina dan Rusia, dapat dicatat bahwa Ukraina lebih unggul dari Rusia dalam hal indikator aktivitas industri, sementara komponen indeks lainnya lebih tinggi untuk Rusia.

Komponen “Efisiensi Ekonomi” dievaluasi berdasarkan indikator relatif dari basis data Bank Dunia untuk tahun 2021. Informasi masukan utama adalah data PDB, tingkat ekspor dan impor, utang luar negeri, jumlah cadangan emas dan devisa, dan pendapatan anggaran dalam dolar AS menurut negara di dunia. Selain itu, data tentang populasi negara-negara tertentu juga digunakan.

Indikator parsial pertama dari komponen ini adalah x5 – Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita – yang merupakan indikator makroekonomi yang ditentukan oleh rasio PDB suatu negara terhadap rata-rata populasi tahunannya. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa tempat pertama, dalam hal nilainya, ditempati oleh Irlandia dengan PDB sebesar Rp1.001.720.800 per orang. Swiss berada di urutan kedua (Rp919.916.000 per orang), dan Norwegia di urutan ketiga (Rp891.542.800 per orang). Tingkat PDB per kapita Ukraina 2,52 kali lebih rendah daripada indikator yang sama di Rusia.

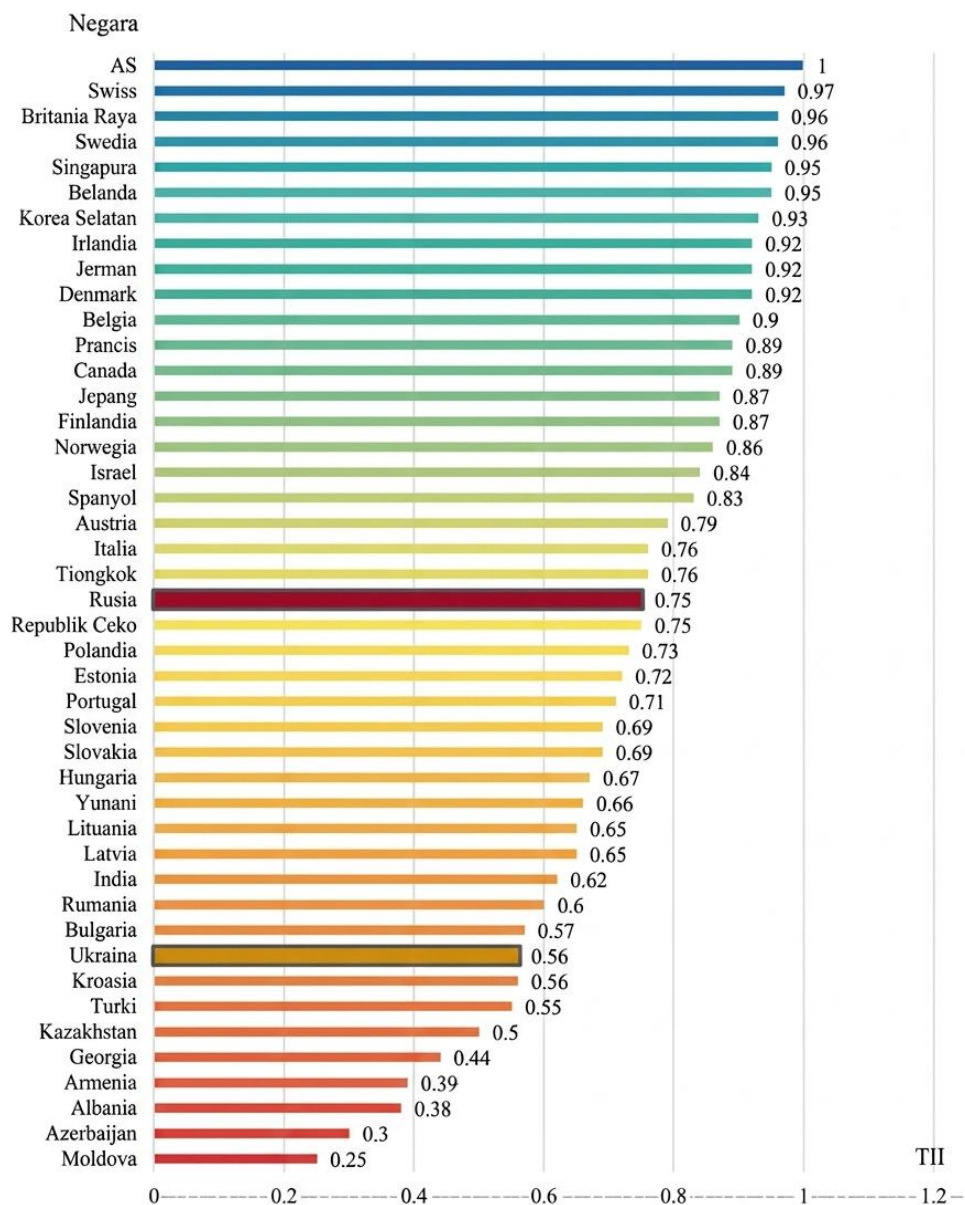




Gambar 9.4 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Kinerja Industri Kompetitif pada tahun 2018.

Indikator kedua dari komponen “Efisiensi Ekonomi” adalah x_6 – Pangsa ekspor suatu negara dalam kaitannya dengan PDB-nya. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa tempat pertama ditempati oleh Singapura, yang jumlah ekspornya dalam kaitannya dengan PDB adalah 184,84%. Irlandia berada di urutan kedua (134,41%), dan Slovakia di urutan ketiga (93,8%). Ukraina berada di urutan ke-27 (40,75%), dan Rusia di urutan ke-34 (30,86%).





Gambar 9.5 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Teknologi dan Inovasi pada tahun 2021.

Indikator parsial ketiga adalah x7 – Pangsa impor suatu negara dalam kaitannya dengan PDB-nya. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini memungkinkan untuk menentukan bahwa situasi di puncak sama dengan kasus pangsa ekspor dalam kaitannya dengan PDB – Singapura berada di urutan pertama, dengan indikator 153,47%, Irlandia di urutan kedua (95,03%), dan Slovakia di urutan ketiga (94,03%). Ukraina berada di urutan ke-25 (41,87%) dan Rusia di urutan ke-41 (21,31%).

Indikator keempat dari komponen “Efisiensi Ekonomi” adalah x8 – Rasio utang luar negeri suatu negara terhadap PDB-nya. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa Irlandia menempati peringkat pertama dengan 561,17%, Yunani berada di urutan kedua (274,4%), dan Jepang di urutan ketiga (273,3%). Ukraina berada di urutan ke-25 (678,0%), dan Rusia di urutan ke-38 (271,0%).



Indikator kelima dari komponen ini adalah x9 – Rasio cadangan emas dan devisa terhadap utang luar negeri suatu negara. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini mengungkapkan bahwa, berdasarkan nilai indikator ini, Israel berada di urutan pertama (221,11%), Republik Ceko di urutan kedua (168,23%), dan Rusia di urutan ketiga (131,33%). Ukraina berada di urutan ke-21 dalam peringkat ini (22,83%).

Indikator parsial keenam dari komponen “Efisiensi Ekonomi” adalah x10 – Rasio pendapatan anggaran terhadap PDB. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa Finlandia berada di urutan teratas dengan 46,0%, Prancis (45,1%) berada di urutan kedua, dan Norwegia di urutan ketiga (44,4%). Menurut indikator ini, Ukraina berada di urutan ke-23 (26,4%) dan Rusia di urutan ke-36 (19,3%).

Komponen “Pengeluaran Pertahanan” didasarkan pada informasi dari Basis Data Pengeluaran Militer SIPRI, yaitu, Total pengeluaran militer per personel militer (USD/orang) dan Pangsa pengeluaran militer dalam total pengeluaran anggaran. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah pengeluaran militer per personel militer (x11) pada tahun 2021 diberikan pada Gambar 9.6.

Sesuai dengan peringkat yang ditunjukkan pada Gambar 9.6, Amerika Serikat berada di peringkat pertama dalam hal jumlah pengeluaran militer per personel militer (576.853,20 USD/orang), Swedia berada di peringkat kedua (525.824,00 USD/orang), dan Inggris Raya berada di peringkat ketiga (458.835,20 USD/orang).

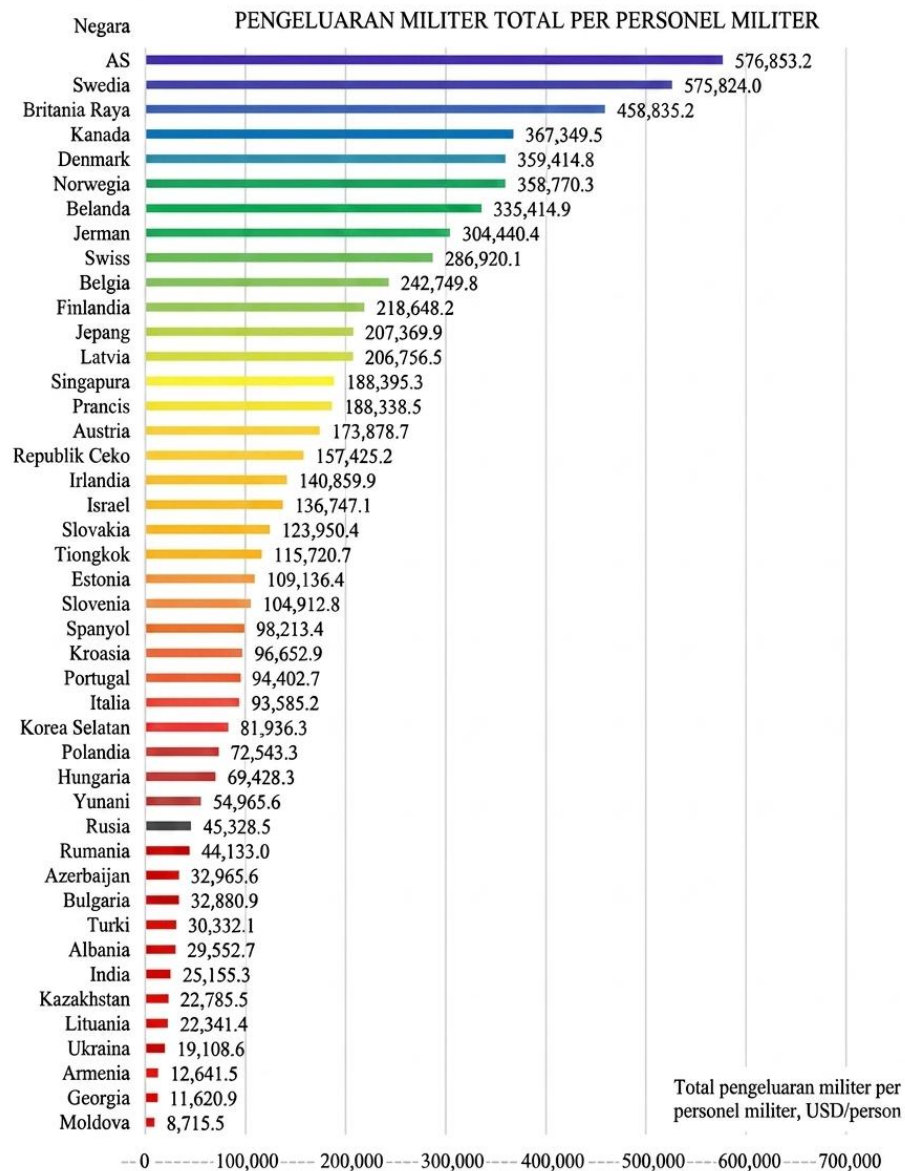
Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa ada negara-negara dengan pengeluaran militer yang relatif besar dan angkatan bersenjata yang tidak terlalu besar. Misalnya, Swedia, yang menghabiskan Rp78,87 Triliun, sementara jumlah angkatan bersenjatanya adalah 15.000 orang. Dalam pemeringkatan ini, Rusia berada di peringkat ke-32 dengan Rp453.285.000 per orang, dan Ukraina berada di peringkat ke-41 (Rp191.086.000 per orang).

Indikator parsial kedua dari komponen “Pengeluaran Pertahanan” adalah x12 – Bagian pengeluaran militer dalam total pengeluaran anggaran suatu negara. Pemeringkatan negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini disajikan pada Gambar 9.7.

Sesuai dengan daftar peringkat yang ditunjukkan pada Gambar 9.7, Armenia berada di peringkat pertama (16,32% dari anggaran adalah pengeluaran militer), Singapura di peringkat kedua (15,33%), Azerbaijan di peringkat ketiga (14,19%), dan Israel di peringkat keempat (12,14%). Di antara 44 negara yang diteliti, Irlandia memiliki jumlah pengeluaran militer terkecil dalam total pengeluaran anggaran (0,98%), Rusia berada di urutan ke-5 (10,79%), dan Ukraina di urutan ke-9 (7,83%).

Komponen “Skala ekonomi” berisi indikator parsial absolut: PDB (x13), pengeluaran anggaran (x14), pengeluaran militer (x15), dan cadangan emas dan devisa (x16). Informasi tentang indikator x13, x14, dan x16 diperoleh dari basis data Bank Dunia,³⁴ dan tentang x15 dari basis data pengeluaran militer SIPRI untuk tahun 2021.

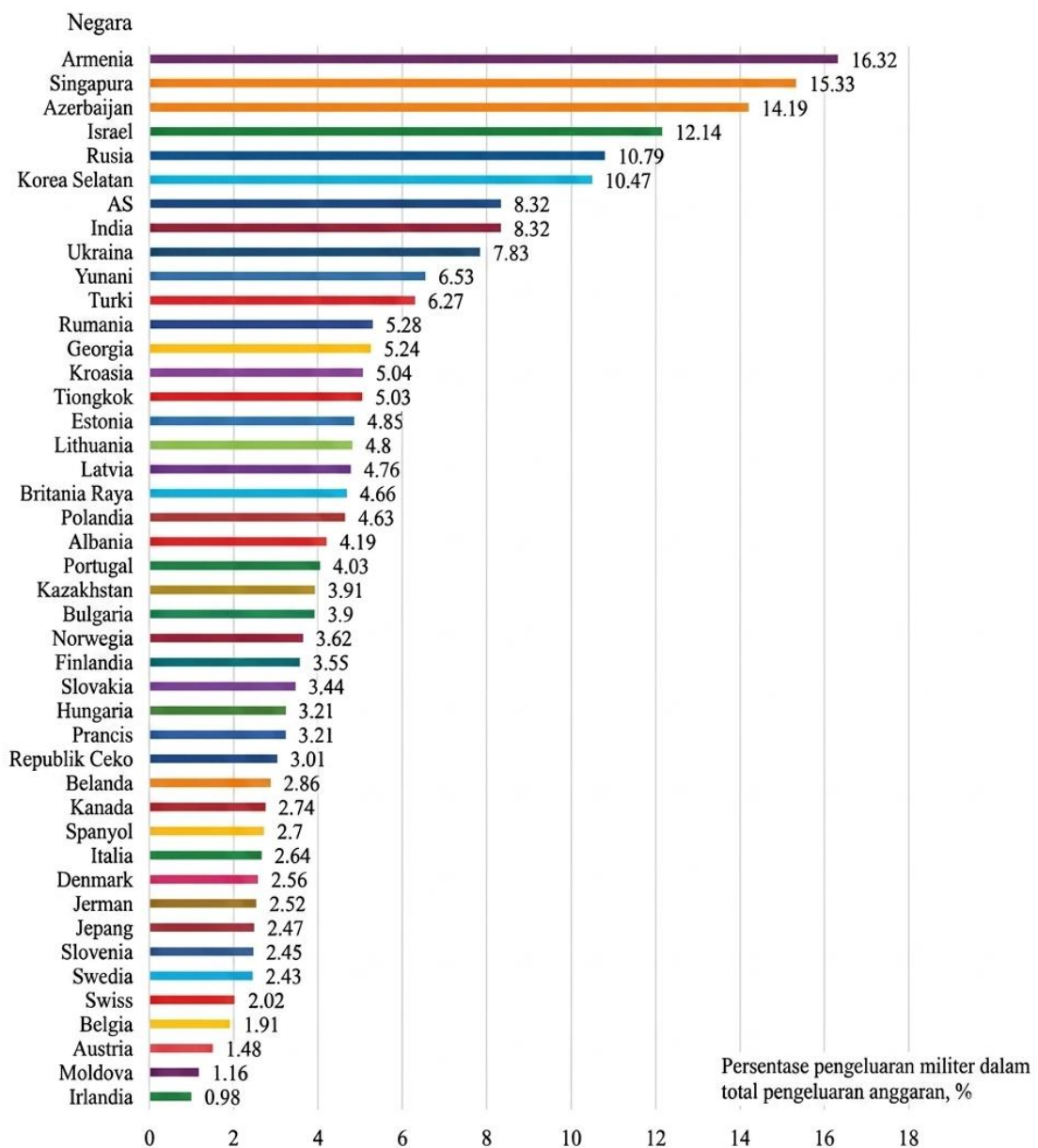




Gambar 9.6 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah total pengeluaran militer per personel militer.

Indikator parsial pertama dari komponen “Skala ekonomi” adalah x_{13} – Nilai produk domestik bruto. Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menempati peringkat pertama dengan total PDB sebesar Rp233,15 Kuadriliun, Tiongkok berada di peringkat kedua (Rp177,34 Kuadriliun), dan Jepang di peringkat ketiga (Rp49,4 Kuadriliun). Ukraina berada di peringkat ke-30, dan Rusia di peringkat ke-11, artinya PDB Ukraina dalam nilai absolut hampir sembilan kali lebih kecil daripada PDB Rusia.





Gambar 9.7 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan pangsa pengeluaran militer dalam total pengeluaran anggaran.

Indikator kedua dari komponen “Skala ekonomi” adalah x14 – Jumlah pengeluaran anggaran. Menurut hasil pemeringkatan, Amerika Serikat menempati posisi terdepan dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp98,1 Quintiliun, China berada di urutan kedua (Rp53,8 Quintiliun), dan Jepang di urutan ketiga (Rp23,6 Quintiliun). Menurut indikator ini, Ukraina berada di peringkat ke-30 dari 44 negara yang disurvei di dunia, sedangkan Rusia berada di peringkat ke-13, dan nilai absolut pengeluaran anggaran Rusia adalah 5,7 kali lebih tinggi daripada indikator yang sama di Ukraina.

Indikator ketiga dari komponen “Skala ekonomi” adalah x15 – jumlah pengeluaran militer. Menurut hasil pemeringkatan negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini, menggunakan data dari basis data SIPRI35 untuk tahun 2021, ditemukan bahwa Amerika



Serikat berada di puncak daftar peringkat dengan jumlah pengeluaran militernya sebesar Rp8,006 Kuadriliun. China berada di urutan kedua (Rp2,93 Kuadriliun), dan India di urutan ketiga (Rp768,98 Triliun). Berdasarkan indikator ini, Ukraina berada di peringkat ke-22 dari 44 negara di dunia dan Rusia berada di peringkat ke-5, dan nilai absolut pengeluaran militer Rusia 11 kali lebih tinggi daripada Ukraina.

Indikator keempat dari komponen “Skala ekonomi” adalah x_{16} – Jumlah cadangan emas dan devisa. Pemeringkatan negara-negara di dunia berdasarkan indikator ini memungkinkan untuk menentukan bahwa tempat pertama dalam daftar peringkat ditempati oleh China, yang jumlah cadangan emas dan devisanya sebesar Rp34,27 Kuadriliun. Jepang berada di posisi kedua (Rp14,05 Kuadriliun), dan Swiss di posisi ketiga (Rp11,09 Kuadriliun). Berdasarkan indikator ini, Ukraina berada di peringkat ke-30 dan Rusia di peringkat ke-6, yang berarti cadangan emas dan devisa Ukraina lebih dari 20 kali lebih kecil daripada Rusia.

Tahap 2 – Penilaian Integral Potensi Ekonomi Negara-negara di Dunia

Pada tahap ini, indikator komposit dihitung berdasarkan komponen potensi ekonomi dan indikator integral secara keseluruhan untuk negara-negara di dunia. Untuk menyesuaikan perbedaan satuan pengukuran indikator dan indeks, semua variabel dinormalisasi dalam rentang 0, 1. Proses normalisasi dan penskalaan data dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum setiap variabel sesuai dengan rumus:

$$x_i = \frac{x_{\emptyset}}{x_{\max}} \quad (1)$$

di mana

x_i adalah indikator yang dinormalisasi yang dihitung untuk indikator individual dari blok yang ditentukan untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia, dan i adalah indikator yang bervariasi dari 1 hingga 16;

$x_{\emptyset}$ adalah nilai aktual dari suatu indikator dalam blok yang ditentukan untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia;

$x_{\max}$ adalah nilai maksimum dari indikator tertentu yang diamati untuk negara-negara yang diteliti.

Indikator komposit dari progresivitas struktur ekonomi, inovasi, dan teknologi (K_{ps}), efisiensi ekonomi (K_{ee}), pengeluaran pertahanan (K_{ds}), dan skala ekonomi (K_{se}) dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai-nilai yang diperoleh dari indikator parsial yang dinormalisasi yang mencirikannya. Perhitungan disesuaikan tergantung pada jumlah indikator yang termasuk dalam indikator komposit tertentu.

Indikator integral potensi ekonomi (I_{EP}) adalah rata-rata aritmatika dari empat indikator komposit:

$$I_{EP} = \frac{(K_{\pi ci} + K_{ee} + K_{oB} + K_{Me})}{4} \quad (2)$$



Selanjutnya, negara-negara di dunia dikelompokkan ke dalam daftar peringkat berdasarkan Indikator Integral Potensi Ekonomi (IEP).

Penilaian juga dilakukan berdasarkan data dari 44 negara di dunia. Hasil perhitungan indikator integral dan komposit yang diperoleh disajikan dalam Tabel 9.1.

Daftar peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator integral potensi ekonomi disajikan pada Gambar 9.8.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan untuk 44 negara di dunia, ditetapkan bahwa Amerika Serikat memiliki potensi ekonomi tertinggi (nilai indikator integralnya adalah 0,664), Singapura berada di urutan kedua (0,515), dan Tiongkok di urutan ketiga (0,471). Menurut indikator integral potensi ekonomi yang dihitung, Ukraina berada di peringkat ke-39 dan Rusia di peringkat ke-24.

Tahap 3 – Mempelajari pengaruh potensi ekonomi negara-negara di dunia terhadap kekuatan militer dan kemampuan mereka untuk menjamin keamanan nasional

Diusulkan untuk menentukan dampak potensi ekonomi negara-negara terhadap tingkat kekuatan militer mereka dengan menganalisis ketergantungan indikator kekuatan militer – y (diukur dengan Indeks Kekuatan Militer Global – GFP) pada indikator komposit potensi ekonomi yang dihitung berdasarkan analisis korelasi-regresi.

Analisis korelasi-regresi dipilih sebagai metode pembahasan karena merupakan salah satu metode pengolahan data statistik yang paling umum dan mudah untuk mengukur kedekatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Tingkat korelasi antar indikator ditentukan menggunakan koefisien korelasi dan pilihan metode untuk menghitung koefisien ini bergantung pada jenis skala yang digunakan oleh variabel yang dianalisis. Misalnya, koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur variabel dengan skala interval dan kuantitatif. Perhitungannya dilakukan menurut rumus berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 * \sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad (3)$$

di mana x_i dan y_i adalah indikator, yang hubungannya sedang diselidiki, dan $\bar{x}, \bar{y}$ adalah nilai rata-rata dari indikator yang diselidiki.

Tabel 9.1 Hasil perhitungan indikator integral dan komposit untuk menilai potensi ekonomi negara-negara di dunia.

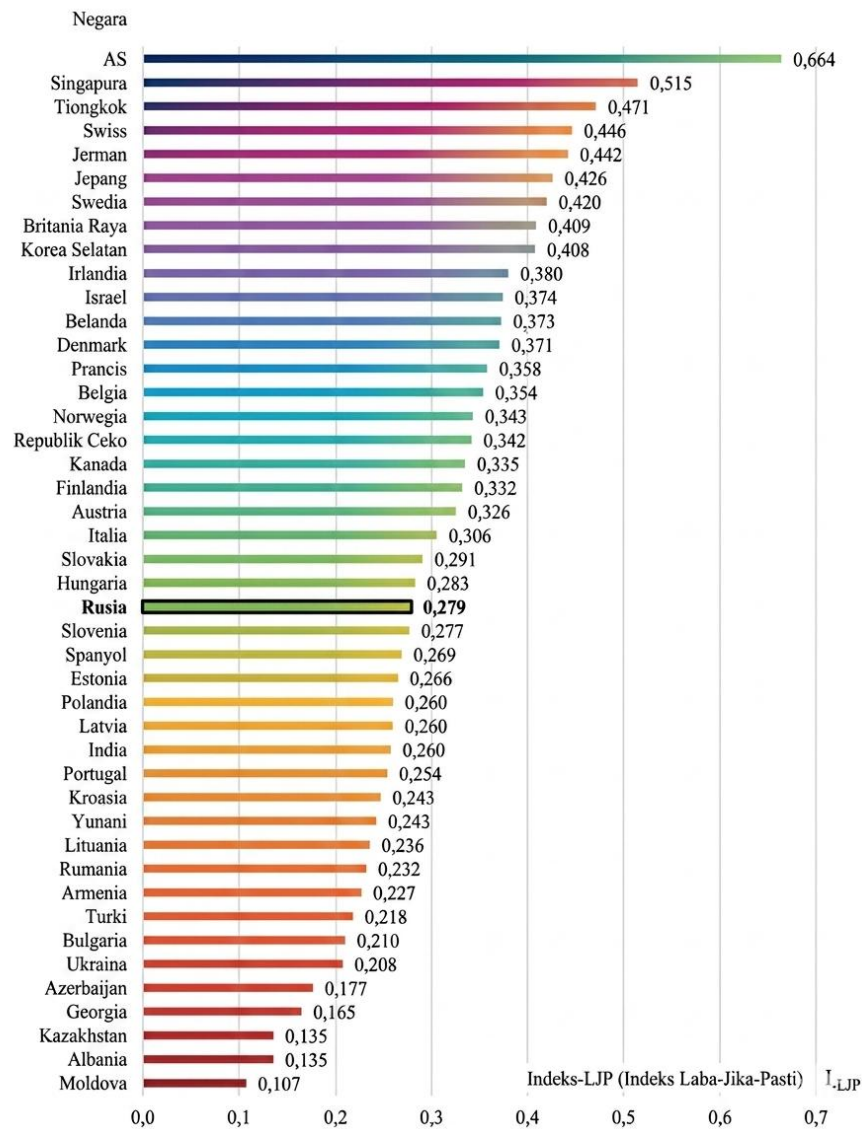
Negara	K_{PS} - indikator komposit kemajuan ekonomi, inovasi, dan teknologi.	K_{ee} -indikator gabungan efisiensi ekonomi	K_{ds} - indikator gabungan belanja pertahanan	K_{se} - indikator komposit skala ekonomi	I_{EP} -indikator integral potensi ekonomi
Albania	0.171	0.212	0.154	0.002	0.135
Armenia	0.194	0.201	0.511	0.001	0.227



Austria	0.716	0.378	0.196	0.014	0.326
Azerbaijan	0.044	0.200	0.464	0.002	0.177
Belgia	0.684	0.444	0.269	0.019	0.354
Bulgaria	0.381	0.306	0.148	0.005	0.210
Kanada	0.593	0.286	0.402	0.061	0.335
China	0.728	0.232	0.254	0.669	0.471
Kroasia	0.416	0.329	0.238	0.004	0.247
Republik Ceko	0.689	0.431	0.229	0.019	0.342
Denmark	0.631	0.447	0.390	0.016	0.371
Estonia	0.490	0.326	0.243	0.001	0.265
Finlandia	0.664	0.357	0.298	0.010	0.332
Prancis	0.702	0.363	0.260	0.108	0.358
Georgia	0.243	0.245	0.171	0.001	0.165
Jerman	0.944	0.346	0.341	0.137	0.442
Yunani	0.349	0.367	0.248	0.008	0.243
Hungaria	0.598	0.367	0.159	0.008	0.283
India	0.422	0.204	0.277	0.128	0.258
Irlandia	0.739	0.619	0.152	0.009	0.380
Israel	0.591	0.382	0.491	0.033	0.374
Italia	0.666	0.320	0.162	0.077	0.306
Jepang	0.901	0.314	0.255	0.233	0.426
Kazakhstan	0.219	0.177	0.140	0.006	0.135
Latvia	0.415	0.297	0.325	0.001	0.260
Lituania	0.464	0.310	0.167	0.002	0.236
Moldova	0.158	0.225	0.043	0.001	0.107
Belanda	0.683	0.401	0.378	0.031	0.373
Norwegia	0.505	0.427	0.422	0.019	0.343
Polandia	0.569	0.241	0.205	0.026	0.260
Portugal	0.483	0.319	0.205	0.009	0.254
Rumania	0.488	0.230	0.200	0.010	0.232
Rusia	0.402	0.248	0.370	0.094	0.279
Singapura	0.784	0.601	0.633	0.040	0.515
Slovakia	0.583	0.366	0.213	0.004	0.291
Slovenia	0.584	0.356	0.166	0.002	0.277
Korea Selatan	0.860	0.299	0.392	0.079	0.408
Spanyol	0.579	0.282	0.168	0.045	0.269
Swedia	0.750	0.379	0.530	0.021	0.420
Swiss	0.869	0.509	0.311	0.097	0.446
Turki	0.428	0.198	0.218	0.026	0.218
Ukraina	0.345	0.223	0.256	0.008	0.208



Britania Raya	0.716	0.276	0.540	0.105	0.409
Amerika Serikat	0.826	0.273	0.755	0.802	0.664



Gambar 9.8 Peringkat negara-negara di dunia berdasarkan indikator integral potensi ekonomi.

Dengan cara ini, model regresi multifaktorial pengaruh indikator komposit potensi ekonomi terhadap indikator kekuatan militer negara-negara di dunia (y) dibangun:

$$y = -2.516K_{Pci} + 6.779K_{ee} - 0.241K_{OB} + 0.367K_{ME} \quad (4)$$

Estimasi parameter dan akurasi model regresi yang dibangun disajikan pada Tabel 9.2.

Berdasarkan indikator estimasi model (Tabel 9.2), disimpulkan bahwa model tersebut secara memadai menggambarkan ketergantungan indikator kekuatan militer pada indikator



komposit penilaian potensi ekonomi. Misalnya, nilai koefisien korelasi berganda (R), yaitu 0,788578, menunjukkan tingkat pengaruh yang tinggi. Nilai koefisien determinasi berganda (R^2) yang sebesar 0,621855 menunjukkan bahwa 62,185% variasi pada variabel dependen y dijelaskan oleh variasi pada variabel independen, dan sisanya 37,815% variasi pada y dijelaskan oleh kesalahan observasi atau pengaruh faktor yang tidak diperhitungkan atau oleh kedua alasan tersebut secara bersamaan. Estimasi signifikansi persamaan regresi diberikan pada Tabel 9.3.

Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 9.3, estimasi persamaan regresi dan koefisien korelasi berganda menggunakan uji F Fisher menunjukkan signifikansi statistiknya.

Analisis koefisien parsial korelasi antara indikator kekuatan militer dan indikator komposit potensi ekonomi negara-negara di dunia menunjukkan bahwa K_{ps} – Indikator komposit kemajuan struktur ekonomi, inovasi, dan teknologi (0,50929) – memiliki pengaruh terkuat terhadap indikator kekuatan militer. K_{se} – Indikator komposit skala ekonomi – memiliki pengaruh sedang (0,38453) demikian pula K_{ds} – Indikator komposit pengeluaran pertahanan (0,35143) – sedangkan K_{ee} – Indikator komposit efisiensi ekonomi – memiliki pengaruh lemah terhadap indikator kekuatan militer (0,00824).

Tabel 9.2 Estimasi parameter dan akurasi model regresi yang dibangun menunjukkan pengaruh indikator komposit penilaian potensi ekonomi terhadap indikator kekuatan militer negara-negara di dunia.

Indikator	Statistik Regresi Model
Koefisien korelasi berganda (R)	0,788578
Koefisien determinasi berganda (R^2)	0,621855
R^2 yang dinormalisasi (Adjusted R^2)	0,568494
Kesalahan standar (Standard error)	0,770392
Observasi	44

Tabel 9.3 Estimasi signifikansi persamaan regresi model untuk menilai pengaruh indikator komposit potensi ekonomi terhadap indikator kekuatan militer negara-negara di dunia.

Indikator	df	SS	MS	F	Nilai Signifikansi F
Regresi	4	39,04040	9,760099	16,44486	$5,65 \times 10^{-8}$
Residu (Sisa)	40	23,74018	0,593505		
Total	44	62,78058			

Untuk menentukan sifat pengaruh potensi ekonomi terhadap indikator kekuatan militer, negara-negara di dunia dikelompokkan berdasarkan indikator gabungan potensi ekonomi dan kekuatan militer. Oleh karena itu, perlu menggunakan metode analisis klaster, dan StatSoft Statistica 8.0 (pengembang perangkat lunak – StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, AS) digunakan untuk perhitungan.

Melakukan analisis klaster dalam kerangka studi kami melibatkan prosedur berikut. Untuk menentukan jumlah klaster dan kedekatan negara dalam hal potensi ekonomi dan



kekuatan militer mereka, klasifikasi hierarkis dilakukan berdasarkan penggunaan aturan asosiasi menggunakan metode complete linkage, dan jarak Euclidean digunakan sebagai ukuran kedekatan. Metode complete linkage mendefinisikan jarak antar klaster sebagai jarak terbesar antara dua objek dalam klaster yang berbeda (yaitu, "tetangga terjauh"). Ukuran kedekatan, yang ditentukan oleh jarak Euclidean, adalah jarak geometris dalam ruang n -dimensi.

Perhitungan tersebut memungkinkan untuk membangun dendrogram vertikal dari klasifikasi hierarkis negara-negara di dunia berdasarkan indikator potensi ekonomi (IEP) dan kekuatan militer (PDB). Berdasarkan representasi visual dari hasilnya, sebuah asumsi dibuat tentang jumlah klaster alami, dan verifikasi asumsi tersebut dilakukan menggunakan metode k -means. Metode ini terdiri dari hal-hal berikut: perhitungan dimulai dengan k observasi yang dipilih secara acak yang menjadi pusat kelompok, setelah itu komposisi objek klaster diubah untuk meminimalkan variabilitas di dalam klaster dan memaksimalkan variabilitas antar klaster. Setiap observasi berikutnya ($k + 1$) termasuk dalam kelompok yang memiliki tingkat kesamaan minimal dengan pusat gravitasi. Hasil metode k -means dievaluasi berdasarkan analisis varians untuk menentukan signifikansi perbedaan antara klaster yang diperoleh.

Jika nilai $p < 0,05$, maka kita dapat berbicara tentang perbedaan yang signifikan antara klaster dan, karenanya, klasifikasi yang benar dari objek pengamatan (dalam kasus kita, negara-negara yang dipelajari).

Dengan demikian, penggunaan analisis klaster dan paket program aplikasi Statistica 8.0 memungkinkan untuk membagi negara-negara di dunia menjadi beberapa kelompok, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan kekuatan militer mereka. Hasil metode k -means dianalisis berdasarkan analisis varians (Tabel 9.4).

Nilai $p < 0,05$ untuk indikator kekuatan militer dan untuk indikator komposit dari progresivitas struktur inovasi, pengeluaran pertahanan, dan skala ekonomi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara klaster. Pembagian negara-negara ke dalam klaster diberikan pada Tabel 9.5.

Dengan demikian, analisis yang dilakukan membantu mengidentifikasi tiga kelompok negara di dunia berdasarkan potensi ekonomi dan kekuatan militer mereka.

Tabel 9.4 Hasil analisis varians untuk menentukan signifikansi perbedaan antara kelompok negara di dunia yang diperoleh berdasarkan indikator komposit penilaian potensi ekonomi dan kekuatan militer negara-negara di dunia.

<i>Indikator</i>	<i>Antar Kelompok</i>	<i>df</i>	<i>Dalam Kelompok</i>	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>Signif. p</i>
y – indikator kekuatan militer	2,417111	2	0,767258	41	64,58169	0,000000
K_{ps} – indikator komposit progresivitas struktur inovasi	1,148541	2	0,847341	41	27,78701	0,000000
K_{ee} – indikator komposit efisiensi ekonomi	0,025956	2	0,410069	41	1,29757	0,184177
K_{ds} – indikator komposit pengeluaran pertahanan	0,269510	2	0,664667	41	8,31234	0,000932



K_{se} – indikator komposit skala ekonomi	0,351416	2	0,692024	41	10,41009	0,000221
---	----------	---	----------	----	----------	----------

Tabel 9.5 Pembagian negara ke dalam klaster.

Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
Albania	Austria	Amerika Serikat
Armenia	Belgia	China
Azerbaijan	Kanada	Jerman
Estonia	Kroasia	Jepang
Georgia	Republik Ceko	Singapura
Irlandia	Denmark	Korea Selatan
Kazakhstan	Finlandia	Swedia
Latvia	Yunani	Swiss
Lituania	Hungaria	Britania Raya
Moldova	Belanda	Prancis
Slovenia	Norwegia	Israel
Bulgaria	Polandia	Italia
Slovakia	Portugal	India
	Rumania	Rusia
	Spanyol	
	Turki	
	Ukraina	

Kelompok 1 mencakup 13 negara dengan *potensi ekonomi dan kekuatan militer yang relatif rendah*. Negara-negara tersebut adalah Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Irlandia, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Moldova, Slovenia, Bulgaria, Slovakia, dan Estonia.

Klaster 2 mencakup 17 negara dengan *potensi ekonomi dan kekuatan militer rata-rata*. Termasuk Austria, Belgia, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Yunani, Hongaria, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Turki, dan Ukraina.

Klaster 3 menyatukan 14 negara yang memiliki *potensi ekonomi dan kekuatan militer tinggi*. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Swedia, Swiss, Inggris Raya, Prancis, Israel, Italia, India, dan Rusia.

9.4 RINGKASAN

Dapat dinyatakan bahwa kekuatan militer negara-negara di dunia, dan oleh karena itu kemampuan mereka untuk menjamin keamanan nasional dan memengaruhi keamanan internasional, sebagian besar ditentukan oleh potensi ekonomi mereka. Kemajuan struktur ekonomi mereka, inovasi dan teknologi, serta efisiensi ekonomi mereka termasuk di antara komponen potensi ekonomi yang memiliki dampak lebih besar pada kekuatan militer negara-



negara di dunia daripada jumlah pengeluaran militer dan skala ekonomi mereka. Pada saat yang sama, dalam jangka panjang, skala ekonomi suatu negara juga akan memengaruhi kekuatan militer negara tersebut, menentukan kemampuan ekonomi untuk menstabilkan proses internal, menjadi lebih fleksibel, dan mampu pulih selama konflik militer dan perang.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat dicatat bahwa Rusia memiliki potensi ekonomi dan kekuatan militer yang relatif tinggi dan merupakan musuh Ukraina dalam perang saat ini. Pada saat yang sama, Ukraina, dengan potensi ekonomi dan kekuatan militer rata-rata, tetapi tekad yang besar untuk membela negaranya dan hak untuk hidup di negara merdeka mereka sendiri, mampu melawan agresor. Namun, hasil dari konfrontasi ini, dalam arah mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum serta kedaulatan negara merdeka yang tidak dapat diganggu gugat, sebagian besar akan bergantung pada reaksi dan dukungan komunitas dunia, Uni Eropa, dan negara-negara NATO.

Perang di Ukraina telah menjadi titik balik bagi Eropa dan dunia dalam konteks perubahan arsitektur keamanan global. Saat ini Rusia adalah ancaman utama bagi keamanan Aliansi Eropa dan bagi perdamaian dan stabilitas di negara-negara Euro-Atlantik. Perubahan dalam strategi keamanan global telah meningkatkan perhatian pada kekuatan militer karena keinginan negara-negara terkemuka untuk memperkuat kendali atas wilayah-wilayah tertentu. Secara khusus, Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang kuat di Samudra Hindia dan Tiongkok memiliki pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Hal ini tidak hanya menghancurkan tatanan global yang ada tetapi juga mengarah pada kebangkitan paradigma ketidakpercayaan era Perang Dingin, sehingga mengurangi tingkat stabilitas sistem keamanan internasional.

Oleh karena itu, di satu sisi, tantangan modern mendorong negara-negara untuk fokus pada penguatan kekuatan militer, potensi ekonomi, dan keamanan otonomi strategis mereka; di sisi lain, tantangan ini menunjukkan kepada negara-negara bahwa pengembangan kerja sama internasional dan kerja sama di bidang keamanan sangat penting. Dalam kondisi ini, peran khusus harus diberikan pada pembangunan konsep baru tentang pembentukan keamanan dan stabilitas internasional dalam kerangka kerja kemitraan strategis Uni Eropa dan NATO serta aliansi internasional dan regional lainnya, dan juga pada pencarian cara untuk memulihkan dan memperkuat keamanan dan stabilitas internasional.



BAB 10

DAMPAK GLOBAL COVID-19 PADA EKONOMI & SOSIAL

10.1 PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi menunjukkan berbagai situasi krisis yang mengakibatkan kejatuhan, kehancuran, dan transformasi sistem ekonomi. Krisis dapat bersifat beragam – keuangan, ekonomi, buatan manusia, dan lain-lain. Tahun 2019 menghadirkan jenis krisis lain bagi dunia yang muncul karena pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi dunia sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menjadi tantangan global baru bagi tatanan dan stabilitas dunia. Pandemi virus corona berdampak negatif pada pembangunan sosial-ekonomi negara-negara dan, akibatnya, pada stabilitas sistem ekonomi global, menunjukkan kerentanannya terhadap ancaman baru. Perlu digarisbawahi bahwa dampak pandemi COVID-19 telah secara tak terhindarkan memengaruhi lintasan dan indikator pembangunan sebagian besar negara di dunia, dan dampaknya terus dirasakan hingga saat ini. Selain itu, komunitas dunia menghadapi dilema penting – untuk melestarikan kehidupan dan kesehatan penduduk atau untuk memastikan stabilitas fungsi sistem dunia.

Sebagai akibat dari pandemi, rantai pasokan global hancur, banyak sektor ekonomi, termasuk transportasi udara, bisnis hotel dan restoran, dan pariwisata, terpengaruh, dan pendapatan perusahaan dan penduduk berkurang secara signifikan. Pada saat yang sama, beban pada bidang sosial meningkat secara signifikan – sistem perawatan kesehatan di banyak negara tidak siap menghadapi begitu banyak pasien dan tingkat penyebaran penyakit yang cepat. Penutupan bisnis di sektor-sektor yang membutuhkan interaksi langsung dengan konsumen, seperti jasa, rekreasi, dan hiburan, mengakibatkan lonjakan pengangguran yang luas di banyak negara. Selanjutnya, transisi mendadak ke mode pembelajaran dan proses kerja daring menyebabkan beban tambahan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi, dan negara-negara yang memiliki indikator perkembangan sektor ini yang rendah terbukti tidak mampu membangun proses sosial dan ekonomi utama dalam format daring.

Setelah dimulainya pandemi, dunia menghadapi tantangan krisis jenis baru – “krisis corona”, yang ancaman utamanya adalah penyebaran virus yang cepat di seluruh dunia. Selain itu, konsekuensi pandemi COVID-19 melampaui persepsi medis dan biologis dan semakin meluas di bidang sosial-ekonomi. Selama berlangsungnya krisis baru ini, ekonomi global juga menjadi bergantung pada langkah-langkah perlindungan di bidang sosial dan ekonomi yang diperkenalkan oleh ekonomi nasional, dan aktivitas bisnis secara langsung bergantung pada ketatnya pembatasan karantina. Dengan demikian, langkah-langkah pembatasan, instrumen kebijakan proteksionis, penurunan aktivitas bisnis, dan perubahan struktural mengganggu keseimbangan ekonomi sebagian besar negara di dunia, menyebabkan perubahan volume dan rasio permintaan dan penawaran di pasar internasional.



10.2 INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL GLOBAL

Dampak pandemi COVID-19 terhadap indikator pembangunan ekonomi dan sosial global telah menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan para ilmuwan dan peneliti modern. Masalah yang disebabkan oleh rusaknya rantai pasokan global menjadi penyebab resesi ekonomi dunia. Pandemi COVID-19 menciptakan perlambatan ekonomi yang meluas dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Terjadi krisis di sektor produksi karena kekurangan tenaga kerja, gangguan pasokan, dan pembatasan karantina. Ketidakseimbangan dalam pasokan sumber daya dan fluktuasi permintaan konsumen menyebabkan penurunan volume penjualan dan kehilangan pelanggan bagi banyak perusahaan. Luasnya penyebaran penyakit virus corona ditentukan oleh berbagai kriteria sosial dan ekonomi.

Pandemi menjadi tantangan nyata untuk menguji keberlanjutan sistem perawatan kesehatan di negara-negara di seluruh dunia. Keunikan pandemi yang disebabkan oleh faktor non-ekonomi menciptakan tantangan jangka panjang di masa depan bagi komunitas dunia. Dampak negatif yang signifikan dari pandemi sebagai krisis baru disebabkan oleh sifat guncangan itu sendiri. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan dampak pandemi. Berbagai manifestasi dan dampak pandemi, baik bagi ekonomi maupun bidang lainnya, menyulitkan pemerintah nasional untuk mengembangkan langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasinya. Isu penguatan koordinasi di tingkat nasional dan internasional dalam penanggulangan dampak pandemi menjadi relevan.

10.3 PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI NEGARA COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi

Ukuran penting pembangunan sosial-ekonomi negara-negara di dunia adalah PDB ekonomi nasional, yang indikatornya langsung bereaksi terhadap ancaman yang dihadapi dunia akibat pandemi COVID-19. Fluktuasi indikator PDB hingga tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh dampak perubahan situasi ekonomi luar negeri, faktor ekonomi, kebijakan dan instrumen keuangan berbagai negara, dan lembaga internasional.

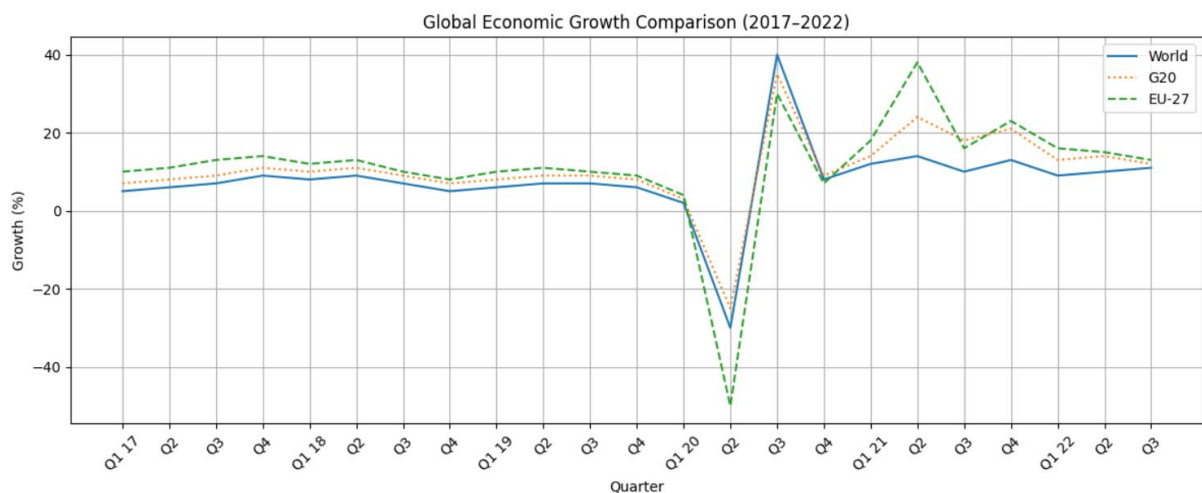
Namun, sejak awal pandemi, dunia menghadapi jenis ancaman baru yang menghancurkan perkiraan ekonomi jangka panjang. Perlu dicatat bahwa ketidakseimbangan struktural dan manifestasi ketidakstabilan ekonomi dalam perekonomian global sebagian telah terlihat pada hasil tahun 2019. Pada kuartal keempat tahun 2019, banyak perekonomian nasional menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi negatif, khususnya, tingkat pertumbuhan PDB di Jepang tercatat pada level -2,0%, di Meksiko -0,6%, di Afrika Selatan -0,4%, dan di Italia -0,3%.

Bahkan ada yang mendekati nol, seperti di Austria sebesar 0,01%, Denmark 0,9%, Jerman 0,4%, dan Swedia 0,6%. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perekonomian dunia berada di ambang krisis baru, yang awal mulanya dapat berupa gejolak dalam sistem ekonomi. Meskipun demikian, penyebab resesi global pada tahun 2020 tidak terduga bagi



masyarakat dunia, begitu pula konsekuensi dan dampaknya yang besar terhadap indikator produksi global (Gambar 10.1).

Perlu dicatat adanya penurunan tajam dalam indikator pertumbuhan PDB riil berdasarkan indikator kuartal pertama tahun 2020 di semua kelompok negara dan di seluruh ekonomi global. Indikator pertumbuhan PDB pada periode selanjutnya juga tidak menunjukkan dinamika positif, yang menegaskan besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap produktivitas ekonomi dunia. Menurut data Bank Dunia, penurunan keseluruhan ekonomi dunia adalah 3,12%. Terlebih lagi, konsekuensi krisis virus corona menjadi lebih menghancurkan bagi ekonomi dunia daripada konsekuensi krisis ekonomi 2008–2009, yang disebabkan oleh runtuhnya pasar hipotek Amerika pada tahun 2007 dan runtuhnya bank investasi terbesar Amerika yang mengakibatkan penurunan PDB dunia sebesar 1,34%. Namun, perlu dicatat bahwa pemulihan pada tahun 2021 lebih cepat daripada pemulihan setelah krisis keuangan tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2010, tingkat pertumbuhan PDB sudah mencapai 4,54% dan pada tahun 2021 mencapai 5,87%, sebagian besar disebabkan oleh pemulihan pesat aktivitas produksi di banyak negara di dunia.



Gambar 10.1 Dinamika perubahan PDB riil, indikator triwulanan, 2017–2022, %.

Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang disertai dengan perlambatan signifikan dalam aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan indikator volume produksi di hampir semua sektor ekonomi. Volume produksi industri dunia pada tahun 2020 mencapai Rp136,00 Kuadriliun, yang 2,63% lebih rendah dibandingkan indikator yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini lebih dari dua kali lipat penurunan volume produksi industri pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 – 1,11% (Rp139,68 Kuadriliun pada tahun 2019 dan Rp141,25 Kuadriliun pada tahun 2018). Pemulihan volume produksi industri telah terjadi menurut hasil tahun 2021, ketika indikator mencapai nilai Rp163,50 Kuadriliun, yang 20,21% lebih tinggi dari angka tahun 2020. Penurunan produksi terjadi karena terputusnya rantai pasokan sumber daya dan produk jadi, penghentian operasi banyak perusahaan, dan penghentian proses produksi karena tindakan



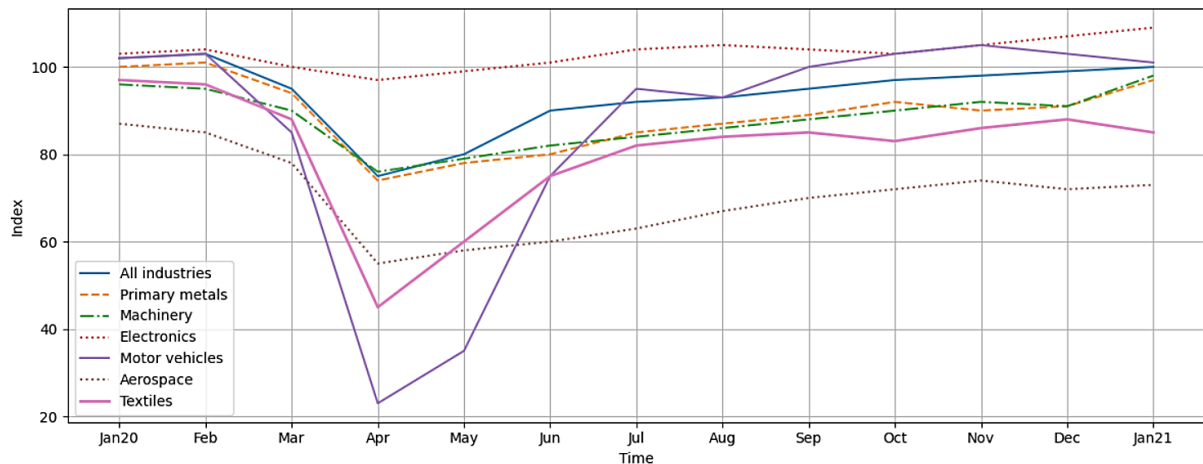
karantina yang ketat. Sektor-sektor ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen, seperti jasa rumah tangga, perdagangan ritel, dan industri ringan, paling terpengaruh.

Menurut hasil tahun 2021, sebagian besar industri mampu menunjukkan pemulihan indikator, terutama karena adaptasi proses produksi terhadap kondisi baru dengan pembatasan karantina, pemulihan rantai pasokan, dan langkah-langkah pendukung untuk pemulihan aktivitas ekonomi oleh pemerintah nasional (Gambar 10.2).

Pemulihan efisiensi produksi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan konsumen, khususnya pelepasan permintaan yang tertahan setelah pelanggaran pembatasan karantina dan pertumbuhan permintaan produk untuk pengorganisasian kerja jarak jauh dan peralatan pelindung pribadi. Di negara-negara maju, pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama meningkat secara substansial, dengan pangsa pengeluaran total meningkat sebesar 12% pada kuartal ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan nilai sekitar 10% pada periode 2018–2019. Kelompok produk, seperti mobil, elektronik, dan peralatan listrik, menikmati permintaan terbesar. Dengan demikian, menurut hasil kuartal keempat tahun 2020, indikator volume penjualan mobil di dunia kembali ke nilai pra-pandemi setelah penurunan tajam (lebih dari 40% pada April 2020). Hal ini sebagian besar dijelaskan oleh keinginan konsumen untuk menjaga jarak aman dan menghindari transportasi umum serta karena adanya promosi penjualan yang diperkenalkan. Peningkatan permintaan akan elektronik dan peralatan listrik telah menyebabkan transisi ke pendidikan jarak jauh, pekerjaan daring jarak jauh, dan masa tinggal di rumah yang lebih lama. Selain itu, permintaan akan produk industri tekstil, produk plastik, dan karet (sektor-sektor ini menyumbang sekitar 10% dari produksi industri dunia) sebagai sumber utama peralatan pelindung diri, meningkat.

Fluktuasi tajam dalam produksi industri seperti ini belum pernah tercatat dalam perekonomian Tiongkok. Indeks volume produksi industri untuk sebagian besar industri hanya sedikit menurun pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal kedua dan ketiga tahun 2020. Namun, perlu dicatat bahwa jika dibandingkan dengan nilai indeks pada kuartal keempat tahun 2019, menurut hasil kuartal keempat tahun 2020, terjadi peningkatan nilai di hampir semua cabang industri, yaitu dari 107 menjadi 111 untuk industri makanan, dari 100 menjadi 107 untuk industri tekstil, dari 116 menjadi 125 untuk industri kimia, dari 111 menjadi 120 untuk metalurgi, dari 133 menjadi 156 untuk elektronik dan peralatan listrik, dari 140 menjadi 157 untuk industri otomotif, dan dari 102 menjadi 105 untuk sektor pertambangan.





Gambar 10.2 Indikator indeks volume produksi industri menurut industri, 2020–2021 (indeks untuk Desember 2019 = 100; tidak termasuk Tiongkok).

Dengan demikian, China terbukti menjadi hampir satu-satunya negara di dunia yang menunjukkan peningkatan volume produksi industri di tengah pandemi, meskipun tingkat pertumbuhannya paling rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi yang cepat setelah gejala yang disebabkan oleh pandemi dapat dikaitkan dengan respons cepat terhadap ancaman, penerapan langkah-langkah karantina yang ketat, dan penggunaan sarana dan alat anti-pandemi yang efektif. Peringkat teratas dalam hal PDB di antara negara-negara tidak berubah, misalnya, pada tahun 2018, lima besar termasuk Amerika Serikat (Rp205,30 Kuadriliun), China (Rp138,90 Kuadriliun), Jepang (Rp50,30 Kuadriliun), Jerman (Rp39,70 Kuadriliun), dan Inggris Raya (Rp28,70 Kuadriliun). Menurut hasil tahun 2022, yaitu dua tahun setelah pandemi, lima besar juga termasuk Amerika Serikat (Rp208,90 Kuadriliun), Tiongkok (Rp147,20 Kuadriliun), Jepang (Rp50,60 Kuadriliun), Jerman (Rp38,50 Kuadriliun), dan Inggris Raya (Rp26,70 Kuadriliun).

Salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah sektor jasa, yang telah menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi dunia selama sepuluh tahun terakhir. Secara khusus, industri pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan bagi anggaran negara di banyak negara, adalah yang paling terdampak. Misalnya, pariwisata menempati peringkat kedua dalam tingkat pertumbuhan setelah sektor keuangan untuk negara-negara Eropa. Namun, sebagai akibat dari pandemi, terjadi penurunan tajam nilai tambah di bidang jasa pariwisata – lebih dari dua kali lipat.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pada tahun 2021, jumlah wisatawan di dunia menurun satu miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dan pendapatan dari ekspor jasa pariwisata antar negara di dunia menurun hampir Rp10,00 Kuadriliun. Meskipun, menurut indikator Januari–Juli 2022, pendapatan dari jasa pariwisata di dunia meningkat sebesar 172% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, indikatornya lebih rendah sebesar 43% dibandingkan hasil tahun 2019. Pandemi juga berdampak negatif pada sektor jasa transportasi, khususnya pada jasa transportasi penumpang kota dan antar kota. Konsekuensi utama pandemi adalah penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi dan penurunan volume transportasi transit.



Sebagai contoh, menurut hasil April 2020 dibandingkan dengan Januari 2020, penurunan volume transportasi transit mencapai 87,9% di Madrid, 80,5% di San Francisco, 71,2% di Chicago, 71,7% di Washington, dan 76,8% di Toronto. Sektor jasa keuangan, secara umum, terbukti lebih tangguh terhadap konsekuensi pandemi, terutama karena alat regulasi yang diperkenalkan setelah krisis keuangan global 2008. Dengan demikian, bank terbukti lebih tahan terhadap guncangan ekonomi daripada perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan asuransi terpaksa meninjau kembali ketentuan program yang ada untuk menghindari risiko kegagalan dalam menanggung klaim asuransi.

COVID-19, perdagangan internasional, dan FDI

Pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan pada perdagangan internasional, yang tercermin dalam penurunan ekspor barang dan jasa. Indikator volume investasi asing langsung (FDI) juga menunjukkan dinamika negatif (Tabel 10.1). Penurunan volume perdagangan internasional sebagian besar disebabkan oleh langkah-langkah pembatasan yang diberlakukan pada aktivitas ekonomi oleh pemerintah nasional. Penangguhan penawaran bisnis oleh China memiliki efek negatif yang signifikan, akibatnya negara-negara lain juga terpaksa membatasi ekspor mereka sendiri, terutama di sektor manufaktur.

Di sisi lain, dinamika negatif perdagangan internasional disebabkan oleh penurunan permintaan baik dari sisi usaha kecil dan menengah. Jenis usaha ini secara signifikan mengurangi, dan terkadang sepenuhnya berhenti, menerima pesanan barang baru dari konsumen karena penurunan pendapatan mereka. Selain itu, banyak negara berkembang menghadapi hambatan tambahan dalam pelaksanaan ekspor karena kenaikan nilai tukar dolar AS dan, akibatnya, devaluasi mata uang mereka sendiri karena hal ini menyebabkan peningkatan biaya perdagangan dengan mitra asing dan negara ketiga.

Sektor kegiatan investasi internasional juga terkena dampak negatif pandemi. Investasi internasional merupakan bidang independen dan sangat penting dalam hubungan ekonomi internasional yang ditandai tidak hanya oleh pertumbuhan pesat dan persaingan signifikan dalam perdagangan dunia, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan daya saing mereka. Akibat pandemi COVID-19, banyak proyek investasi yang direncanakan untuk tahun 2020–2021 ditunda atau dibatalkan karena penerapan langkah-langkah pembatasan, ketidakpastian di pasar keuangan, dan ekspektasi investor yang tidak menguntungkan.

Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), aliran FDI global menurun sebesar Rp5,00 Kuadriliun pada tahun 2020, yang hampir 35% lebih rendah dari volume FDI pada tahun 2019. Penurunan terjadi di semua kelompok negara, dengan kecenderungan yang lebih besar terhadap negara-negara maju, di mana penurunan hampir 58% menjadi Rp3,47 Kuadriliun karena pengurangan aliran keuangan intra-perusahaan dan restrukturisasi perusahaan. Perlu dicatat bahwa penurunan tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 1996. Di negara-negara berkembang, FDI hanya turun sebesar 8%, sebagian besar karena stabilitas arus di kawasan Asia. Karena ekspor FDI dari Hong Kong (China) dan Thailand, Asia menjadi satu-satunya kawasan di mana terjadi peningkatan volume arus FDI, dan China menjadi investor terbesar di dunia pada tahun 2020



dengan volume FDI sebesar Rp1,33 Kuadriliun dibandingkan Rp1,37 Kuadriliun pada tahun 2019.

Perlu diperhatikan bahwa, secara umum, pandemi tidak memengaruhi peringkat negara-negara di antara para pemimpin dalam menarik dan mengeksport FDI. Jadi, sebelum krisis virus corona, pada tahun 2018, pemimpin investor FDI adalah Jepang (Rp1,43 Kuadriliun), China Rp1,30 Kuadriliun, Prancis (Rp1,02 Kuadriliun), Hong Kong (China) (Rp850 Triliun), Jerman (Rp870 Triliun), dan pemimpin dalam hal menarik FDI adalah Amerika Serikat (Rp2,52 Kuadriliun), China (Rp2,52 Kuadriliun), Hong Kong (China) (Rp1.160 Triliun), Singapura (Rp780 Triliun), dan Belanda (Rp700 Triliun).

Tabel 10.1 Indikator PDB, ekspor barang dan jasa, dan FDI di negara-negara dunia.

	GDP, US\$ billion			Export of goods, US\$ billion			Export of services, US\$ million			FDI, outward, US\$	
	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020
World	87,645.30	85,105.60	-2.90	19,014.30	17,648.50	-7.20	6,348,676.8	5,283,467.8	-17.70	1,244,335.30	836,635.
Australia	1,337.60	1,430.90	7.00	271.06	250.84	-7.50	70,476.2	49,298.5	-29.90	9,263.90	9,168.2
Canada	1,873.80	1,796.50	-4.10	446.17	390.91	-12.40	115,259.3	98,528.9	-13.60	77,479.70	42,437.5
China	23,441.90	24,255.80	3.50	2,496.94	2,558.43	2.50	244,359.2	228,883.4	-6.30	136,910.00	153,720.
France	3,403.20	3,252.20	-4.40	572.60	488.14	-14.80	366,606.2	332,069.4	-17.00	43,811.80	8,428.4
Germany	4,769.30	4,696.70	-1.50	1,492.11	1,376.02	-7.80	295,634.4	245,949.6	-10.80	137,289.00	60,486.4
India	2,831.50	2,667.70	-5.80	324.20	276.11	-14.80	214,761.5	203,145.2	-5.50	13,141.00	11,122.0
Japan	5,357.70	5,241.90	-2.20	705.95	638.82	-9.50	209,453.3	163,790.7	-21.70	232,549.90	95,677.5
Poland	1,327.90	1,338.30	0.80	267.72	274.51	2.50	70,435.0	66,612.0	-5.80	1,673.90	1,150.5
Ukraine	153.90	156.60	1.80	50.10	49.20	-1.80	17,465.0	15,564.0	-10.90	621.00	362.00
UK	3,294.30	3,076.80	-6.60	434.21	376.52	-13.30	431,906.1	398,556.3	-7.40	11,715.20	-78,169.
United States	21,380.90	21,060.50	-1.50	1,642.82	1,428.52	-13.00	891,181.0	726,295.0	-18.50	47,649.00	232,005.

Menurut hasil tahun 2021, investor utama di dunia adalah Amerika Serikat (Rp4.030 triliun), Jerman (Rp1.520 triliun), Jepang (Rp1.470 triliun), Tiongkok (Rp1.450 triliun), Inggris Raya (Rp1.080 triliun), dan negara-negara terkemuka dalam menarik FDI termasuk Amerika Serikat (Rp3.670 triliun), Tiongkok (Rp1.810 triliun), Hong Kong (Tiongkok) (Rp1.410 triliun), Singapura (Rp990 triliun), dan Kanada (Rp990 triliun). Dengan demikian, Tiongkok dan Amerika Serikat belum kehilangan posisi terdepan mereka di pasar investasi global.



COVID-19 dan Pasar Energi Global

Akibat pandemi COVID-19, terjadi fluktuasi signifikan di pasar energi sebagai fondasi utama produksi global. Perlu dicatat bahwa selama dekade terakhir, konsumsi sumber daya energi, dan khususnya produk minyak, dapat dikarakteristikan sebagai indikator yang stabil dan dapat diprediksi, yang pada saat yang sama sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan penduduk. Perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan signifikan dalam aktivitas bisnis terbukti menjadi ancaman serius bagi fungsi stabil pasar energi global. Menurut hasil tahun 2020, volume konsumsi energi global menurun sebesar 4,5% dibandingkan tahun 2019, yang merupakan penurunan konsumsi energi pertama sejak tahun 2009.

Pemberlakuan langkah-langkah pembatasan ketat pada transportasi internasional, mode operasi perusahaan, dan pembatasan karantina oleh pemerintah nasional berdampak pada pasar energi global segera setelah dimulainya pandemi. Akibatnya, terjadi gangguan signifikan dalam rantai produksi dan penjualan serta penurunan permintaan global untuk sumber daya energi. Pasar minyak adalah yang paling terpengaruh karena sebagian besar permintaan global berada di segmen ini. Selain itu, pasar minyak dan produk petroleum sangat bergantung pada sektor transportasi, dan pembatasan perjalanan pribadi dan bisnis telah menyebabkan penurunan permintaan bahan bakar.

Perusahaan di sektor energi, yang memiliki biaya operasional tinggi dan beban utang yang signifikan, paling menderita akibat krisis virus corona. Produsen minyak serpih dari Amerika Serikat dan perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi sumber daya energi dengan biaya proses produksi yang tinggi adalah yang paling rentan di antara mereka. Terjadi penurunan daya tarik investasi sektor minyak dalam hal potensi pendapatan dan risiko terkait akibat fluktuasi harga minyak (Gambar 10.3).

Selama pemulihan ekonomi global setelah pandemi COVID-19, ketidakseimbangan tertentu tetap ada di pasar energi global yang, pada gilirannya, sangat memengaruhi stabilitas harga energi. Selain itu, gejolak dan ancaman baru, seperti perang Rusia melawan Ukraina, telah mengharuskan pemerintah nasional untuk mengembangkan pendekatan komprehensif dan seimbang untuk memastikan keamanan energi nasional dan global. Saat ini cukup sulit untuk memprediksi dampak sanksi terhadap Rusia oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris Raya terhadap produksi dan ekspor minyak dan produk minyak Rusia dan, pada akhirnya, terhadap harga minyak. Karena produksi tambahan yang tersedia secara global akan mampu menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh minyak Rusia yang dikenai sanksi, faktor lain adalah kesulitan dalam memperkirakan penurunan permintaan yang diperlukan untuk membawa keseimbangan energi global ke dalam stabilitas.

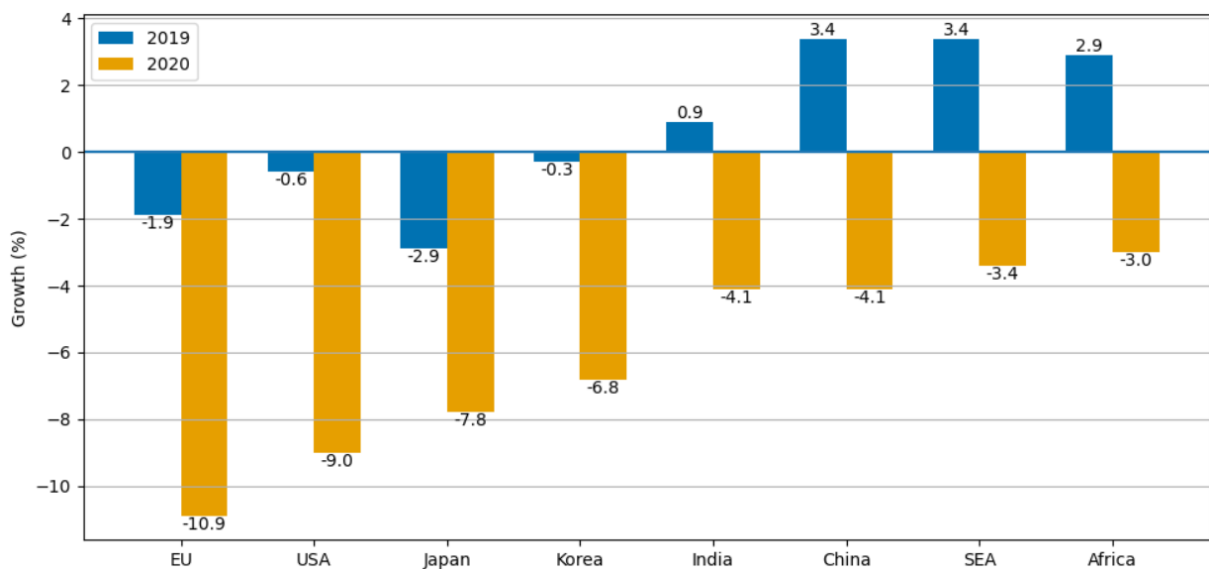
COVID-19 dan digitalisasi

Pandemi COVID-19 memengaruhi laju perkembangan teknologi digital dan khususnya menyebabkan percepatan transformasi digital dalam ekonomi global. Ekonomi digital adalah mesin terpenting inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Produk utama ekonomi digital adalah barang dan jasa yang sama dengan ekonomi tradisional yang disediakan oleh peralatan komputer dan sistem digital, seperti internet global. Solusi digital telah menjadi



alat yang memungkinkan rumah tangga dan bisnis untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan sosial mereka dari jarak jauh.

Segmen telekomunikasi dan bidang layanan yang terkait dengan kerja dan pembelajaran jarak jauh telah menjadi yang paling terpengaruh. Hal ini telah memengaruhi pertumbuhan skala format kerja jarak jauh, volume e-commerce, penggunaan platform konferensi video, hiburan digital, dan aplikasi lainnya. Namun, selama pandemi, proses percepatan pengembangan sektor TIK tidak merata karena pembatasan dari pemerintah nasional berbeda antar negara dan diperkenalkan pada waktu yang berbeda.

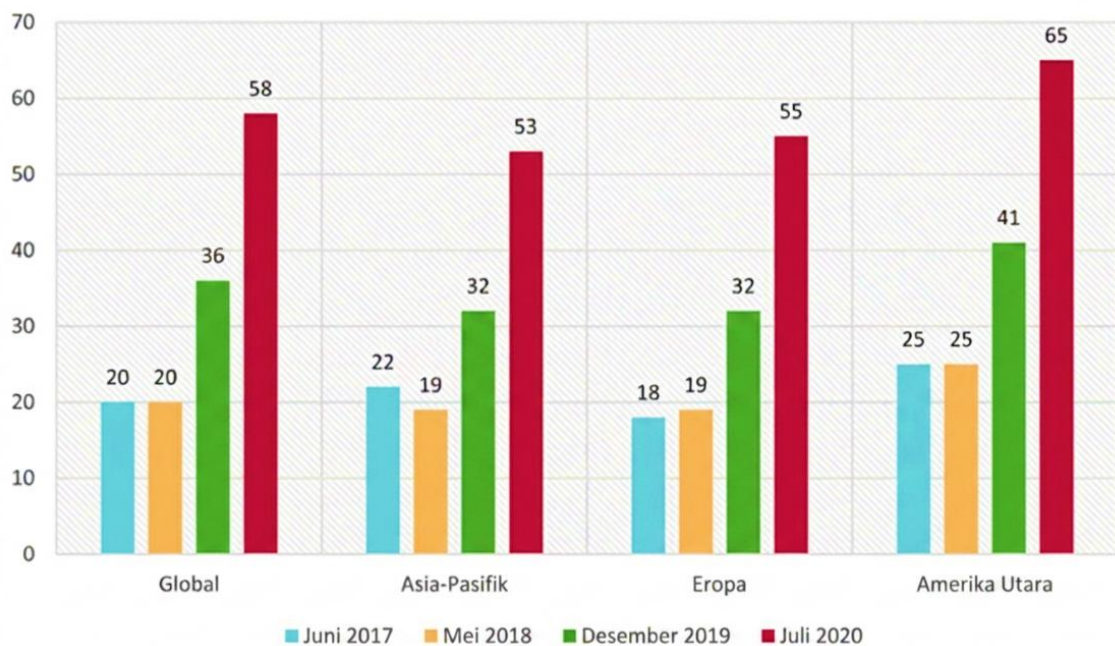


Gambar 10.3 Dinamika perubahan permintaan sumber daya energi, menurut wilayah, %.

Dalam konteks pandemi, transformasi digital telah menjadi alat penting untuk mengatasi resesi ekonomi di banyak negara. Meskipun teknologi digital yang memungkinkan kerja jarak jauh secara online sudah ada dan digunakan sebelum pandemi, perusahaan tidak terburu-buru untuk secara aktif menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sebaliknya, mereka secara signifikan mempercepat pengenalan alat-alat online untuk aktivitas ekonomi sebagai akibat dari pembatasan karantina. Hal ini berlaku untuk perusahaan dari berbagai industri, di mana hanya kerja jarak jauh yang memungkinkan.

Misalnya, restoran dan supermarket harus memperkenalkan model interaksi baru dengan konsumen. Mereka membuat aplikasi seluler sendiri atau terhubung ke platform digital siap pakai untuk mengirimkan produk mereka sendiri langsung ke konsumen. Akibatnya, banyak perusahaan mampu menggunakan pandemi COVID-19 sebagai peluang baru untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri (Gambar 10.4). Misalnya, pada Agustus 2020, The New York Times mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pendapatan dari langganan digital lebih besar daripada dari penjualan versi cetak.





Gambar 10.4 Rata-rata pangsa interaksi pelanggan yang bersifat digital (dalam %).

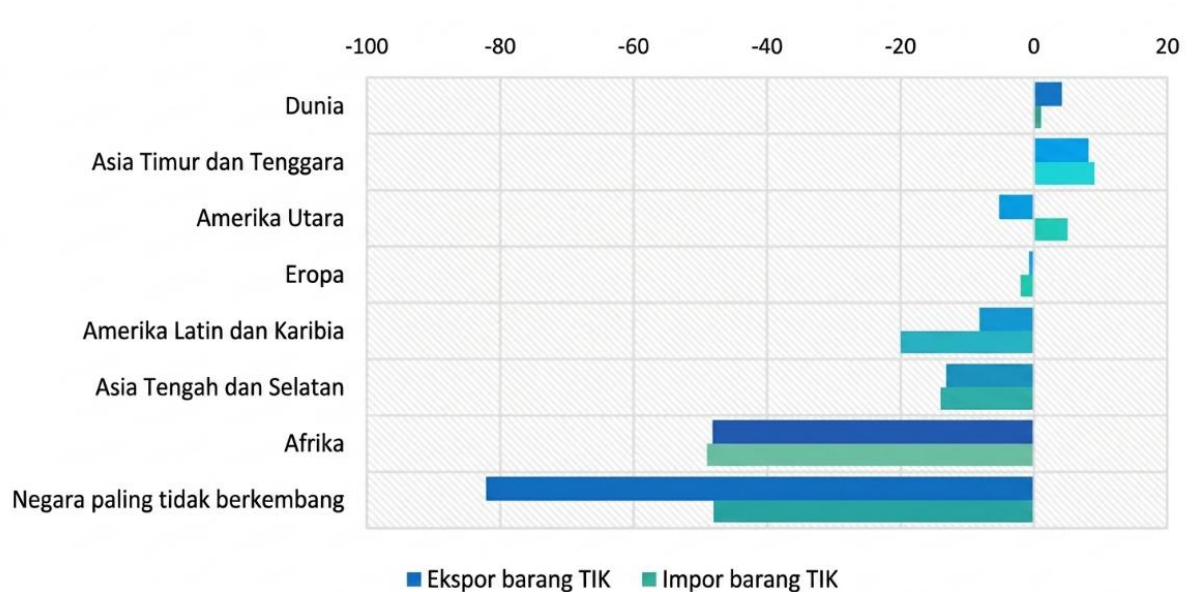
Prevalensi penggunaan alat digital dalam aktivitas ekonomi telah meningkat secara signifikan sejak pandemi bagi perusahaan di semua wilayah, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yang menjadi ciri khas negara-negara maju dan negara-negara Asia. Pengenalan teknologi digital telah menjadi lompatan signifikan bagi banyak perusahaan, baik di tingkat organisasi maupun industri. Selama krisis, perusahaan-perusahaan mengarahkan kembali penawaran mereka ke arah produk dan layanan digital. Namun, tidak semua industri mampu memanfaatkan alat digital. Tingkat digitalisasi produksi yang relatif rendah tercatat untuk perusahaan di industri otomotif, sementara kemajuan signifikan dicapai oleh perusahaan di bidang perawatan kesehatan dan farmasi, jasa keuangan, dan jasa profesional.

Sayangnya, tidak semua negara mampu menggunakan alat digitalisasi sepenuhnya untuk mengatasi resesi ekonomi, yang bergantung pada tingkat digitalisasi ekonomi nasional. Perlu dicatat bahwa ekspor produk sektor TIK cukup terkonsentrasi – pemimpinnya adalah Asia Timur dan Asia Tenggara (dipimpin oleh Tiongkok), yang menyumbang lebih dari tiga perempat dari total volume ekspor TIK dunia. Di wilayah ini, pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2019, tercatat peningkatan volume ekspor dan impor produk sektor TIK dengan latar belakang penurunan indikator untuk negara-negara Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Asia Tengah dan Selatan, serta negara-negara Afrika (Gambar 10.5).

Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara juga menjadi pemimpin dalam peringkat eksportir dan importir produk sektor TIK (Tabel 10.2), yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Pada tahun 2020, Asia Timur dan Asia Tenggara secara umum menyumbang 57% dari impor barang TIK global, dan wilayah maju menyumbang 40%. Mengingat penurunan signifikan dalam ekspor dan impor barang TIK di negara-negara kurang berkembang (masing-masing 82% dan 49%), perlu dicatat bahwa percepatan digitalisasi yang terkait dengan pandemi mengancam akan semakin memperburuk kesenjangan digital, yang mengakibatkan



negara-negara kurang berkembang kehilangan peluang tambahan untuk pertumbuhan ekonomi.



Gambar 10.5 Perubahan ekspor dan impor TIK, 2019–2020.

Pandemi COVID-19 dan krisis yang menyertainya telah secara radikal menarik perhatian pada bagaimana perusahaan modern dapat menggunakan alat digital untuk mengatasi konsekuensi resesi ekonomi. Teknologi digital telah menjadi alat penting bagi sebagian besar bisnis untuk mengatasi keterbatasan pandemi sambil memastikan keberlanjutan dan interaksi dengan konsumen. Selain itu, selama krisis virus corona, teknologi digital menciptakan kondisi untuk lapangan kerja bagi penduduk usia kerja dan menjadi sumber pendapatan yang penting. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi selama pandemi COVID-19 dapat memengaruhi perubahan struktural dalam ekonomi dunia dan, khususnya, berkontribusi pada daya tarik investasi tambahan dalam aset tidak berwujud, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Namun, mungkin ada ancaman tambahan – penurunan jumlah perjalanan (terutama perjalanan bisnis) karena pekerjaan daring jarak jauh, peningkatan tingkat inflasi karena peningkatan pesat volume penjualan daring, dan peningkatan persaingan antar negara di bidang pengenalan teknologi digital.

Tabel 10.2 Importir dan eksportir utama barang TIK pada tahun 2020.

10 Negara Pengekspor Terbesar Barang TIK Tahun 2020			
	<i>Ekspor (Dalam Rp. X0. Miliar)</i>	<i>Perubahan 2019–2020</i>	<i>Pangsa Pasar Global</i>
China	701,868	6.0%	30.0%
Hong Kong SAR China	319,619	5.0%	14.0%
Taiwan (Provinsi China)	182,938	20.0%	8.0%



Republik Korea	148,113	6.0%	6.0%
Amerika Serikat	138,375	-4.0%	6.0%
Singapura	126,411	11.0%	5.0%
Vietnam	109,091	18.0%	5.0%
Malaysia	81,359	5.0%	3.0%
Jerman	70,960	-3.0%	3.0%
Meksiko	64,354	-6.0%	3.0%
10 Negara Pengimpor Terbesar Barang TIK Tahun 2020			
	<i>Impor (Dalam Rp. X0. Miliar)</i>	<i>Perubahan 2019–2020</i>	<i>Pangsa Pasar Global</i>
China	516,389	11.0%	21.0%
Amerika Serikat	347,415	5.0%	14.0%
Hong Kong SAR China	325,552	5.0%	13.0%
Singapura	108,346	12.0%	4.0%
Jerman	103,334	-0.4%	4.0%
Jepang	89,726	2.0%	4.0%
Taiwan (Provinsi China)	89,104	18.0%	4.0%
Republik Korea	83,576	5.0%	3.0%
Vietnam	80,044	23.0%	3.0%
Belanda	72,605	4.0%	3.0%

COVID-19, pengangguran, dan tren sektor konsumen

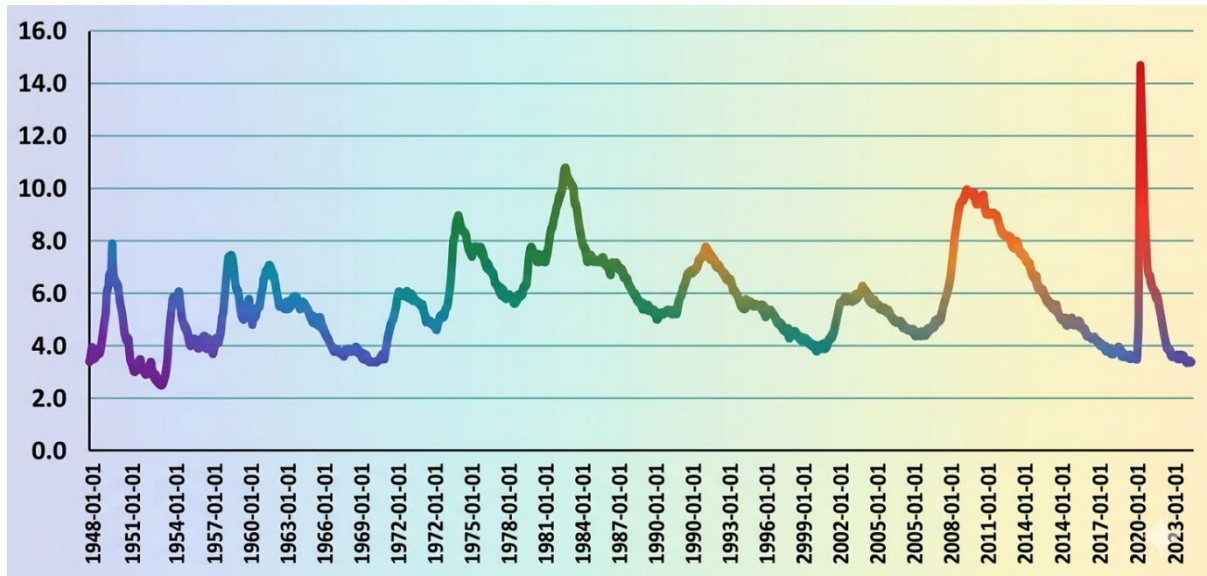
Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada dinamika harga barang konsumsi, pendapatan penduduk, dan menyebabkan lonjakan inflasi di banyak perekonomian nasional. Penguncian global, pemutusan hubungan kerja akibat penghentian produksi, pengurangan jam kerja, dan perubahan tarif upah per jam telah menyebabkan penurunan tajam pendapatan pekerja upahan di banyak negara. Penurunan upah riil paling terlihat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, penurunan tersebut tidak setajam itu karena skema pelestarian pekerjaan dan subsidi upah berhasil, memungkinkan pekerjaan dan upah nominal maupun aktual tetap terjaga selama karantina, bahkan dengan pengurangan jam kerja.

Menurut perkiraan Organisasi Buruh Internasional (ILO), selama tahun pertama pandemi, lapangan kerja global turun dari 1,75 miliar orang pada tahun 2019 menjadi 1,69 miliar orang pada tahun 2020.²¹ Selain itu, tingkat pengangguran yang tercatat pada April 2020 adalah 14,7%, yang tidak lazim untuk ekonomi dunia sejak tahun 1930-an (Gambar 10.6).

Pada Desember 2020, indikator tersebut turun menjadi 6,3% karena para pekerja terus kembali bekerja. Pada Oktober 2021, terdapat 4,2 juta pekerjaan lebih sedikit dibandingkan Februari 2020 dalam ekonomi global. Sekitar 59% pekerjaan hilang antara Februari 2020 dan Oktober 2021. Sebagian besar kehilangan pekerjaan terjadi di industri dengan upah rendah. Industri dengan upah terendah menyumbang 30% dari semua pekerjaan dan paling terpukul



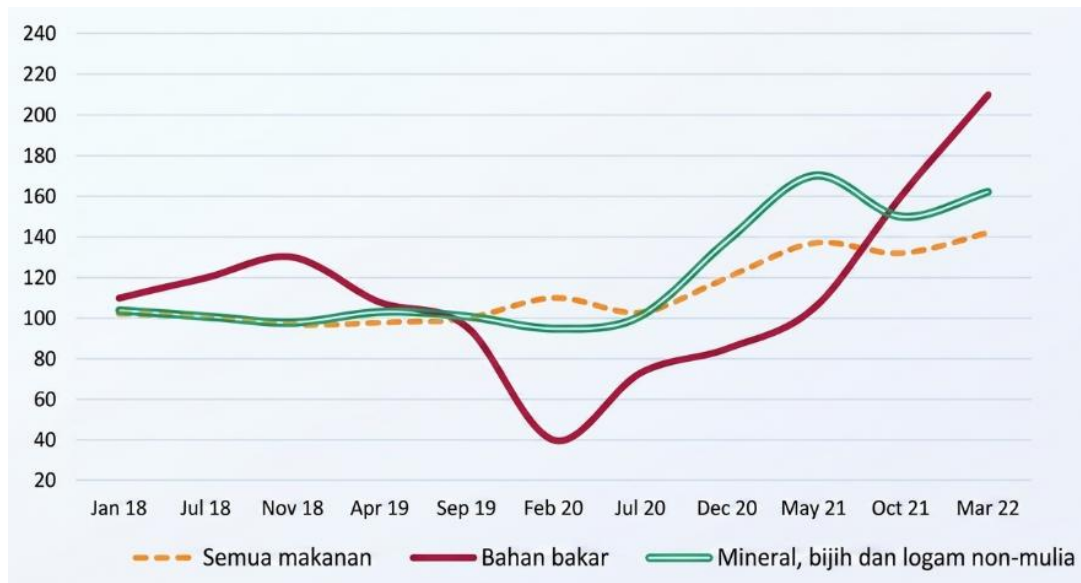
oleh pandemi. Pengurangan lapangan kerja terendah tercatat di industri dengan gaji tertinggi – sebesar 0,3%, di industri dengan tingkat gaji menengah – sebesar 2,6%, di industri dengan gaji terendah – sebesar 4,5%, yang hampir 15 kali lebih banyak dibandingkan dengan sektor dengan industri bergaji tertinggi.



Gambar 10.6 Tingkat pengangguran, 1948–2022 (dalam %).

Perlu dicatat bahwa terdapat heterogenitas tertentu dalam dampak krisis COVID-19 terhadap tingkat upah di berbagai negara di dunia. Pada tahun 2020, upah rata-rata lebih tinggi dari biasanya di Amerika Utara (naik 4,3%), Amerika Latin dan Karibia (naik 3,3%), dan Eropa Timur (naik 4%). Penurunan signifikan dalam upah rata-rata tercatat untuk negara-negara Afrika (–10,5%), Asia Tengah dan Barat (–1,6%), dan Asia dan Oseania (tidak termasuk Tiongkok –1,7%); untuk negara-negara Eropa Utara dan Barat, nilai indikator mendekati 0,23. Peningkatan upah rata-rata untuk beberapa wilayah dapat dijelaskan oleh efek gabungan, di mana hilangnya pekerjaan bagi jutaan pekerja berupah rendah akibat krisis virus corona menyebabkan peningkatan tajam dalam upah riil rata-rata. Tetapi efek ini menghilang setelah kembalinya sejumlah besar pekerja berupah rendah ke pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi, yang secara signifikan memengaruhi upah riil pekerja upahan. Perubahan juga terjadi dalam struktur konsumsi selama pandemi (Gambar 10.7).





Gambar 10.7 Dinamika indeks harga menurut kategori produk, Januari 2018 hingga Maret 2022 (Indeks, 2019 = 100).

Perubahan terbesar dalam struktur pengeluaran konsumen harus dicatat dalam kategori seperti pengeluaran di tempat makan umum, minuman beralkohol, pakaian, dan jasa. Kategori-kategori ini telah menunjukkan perubahan dengan fluktuasi besar, baik negatif maupun positif. Penurunan terbesar adalah penurunan pengeluaran untuk makan di luar (sebesar 53,7% pada kuartal kedua tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019). Sebaliknya, kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang tajam pada tahun 2021 – sebesar 91,2% pada kuartal kedua tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (Tabel 10.3).

Tabel 10.3 Perubahan struktur pengeluaran konsumen sebelum dan selama pandemi COVID-19 (dalam %).

Kategori Pengeluaran	Dari Triwulan I 2019 ke Triwulan I 2020	Dari Triwulan II 2019 ke Triwulan II 2020	Dari Triwulan I 2020 ke Triwulan I 2021	Dari Triwulan II 2020 ke Triwulan II 2021
Makanan di luar rumah	-8.0%	-53.7%	-14.7%	91.2%
Pakaian dan jasa	-14.3%	-48.6%	5.3%	70.3%
Minuman beralkohol	-1.6%	-29.0%	-12.6%	61.9%
Hiburan	-13.0%	-21.0%	24.2%	27.7%
Transportasi	0.1%	-19.3%	2.3%	23.3%
Makanan di rumah	10.1%	-2.6%	7.8%	9.7%
Perumahan	4.7%	-0.2%	3.0%	8.0%
Kesehatan	2.8%	-1.9%	1.1%	7.9%



Volume arus migrasi di dunia juga terpengaruh secara negatif oleh pandemi. Migrasi internasional memainkan peran penting dalam perubahan ekonomi, antar-etnis, dan demografis dalam perkembangan komunitas dan seluruh masyarakat. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan budaya. Menurut perkiraan PBB, jumlah migran internasional di dunia menurun hampir dua juta orang antara pertengahan 2019 dan pertengahan 2020. Penurunan arus migrasi tersebut, yang disebabkan oleh pembatasan karantina, juga memiliki konsekuensi demografis bagi negara-negara yang bergantung pada migrasi untuk pertumbuhan populasi mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2020, populasi Jerman tidak meningkat untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, terutama karena penurunan jumlah imigran. Proporsi warga negara asing dalam total populasi Jerman pada akhir tahun 2020 hanya 1,8%, yang merupakan indikator terendah dalam dekade terakhir. Situasi serupa juga terjadi di Australia. Akibat pandemi dan pembatasan mobilitas, jumlah mahasiswa asing menurun, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris (negara-negara paling populer bagi mahasiswa internasional) masing-masing mengeluarkan izin studi 69% dan 40% lebih sedikit pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Pandemi COVID-19, perawatan kesehatan, dan pendidikan

Pandemi ini berdampak signifikan pada distribusi pengeluaran publik. Hampir semua pemerintah negara-negara dengan perekonomian nasional terpaksa meninjau program perawatan kesehatan dan mengalihkan dana tambahan dari anggaran negara untuk memerangi pandemi yang tiba-tiba melanda dunia. Dalam sembilan bulan, COVID-19 menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara, dan pada akhir September 2020, lebih dari 30 juta kasus penyakit ini telah dilaporkan di seluruh dunia dan lebih dari 1 juta orang meninggal. Dalam menghadapi ancaman seperti itu, perekonomian nasional dihadapkan pada tugas untuk memastikan penyediaan layanan medis yang tidak terputus untuk mengatasi konsekuensi pandemi dan, pada saat yang sama, mengambil langkah-langkah untuk mencegah kasus baru penyakit tersebut.

Perlu dicatat bahwa, sebelum pandemi COVID-19, pengeluaran perawatan kesehatan global dalam perekonomian dunia menunjukkan dinamika positif, meskipun tingkat pertumbuhannya agak melambat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal pandemi, perekonomian nasional terpaksa mengarahkan sumber daya keuangan dalam skala besar untuk memerangi COVID-19, meskipun terdapat perbedaan signifikan antar negara dalam alokasi anggaran untuk perawatan kesehatan, tergantung pada tingkat pendapatan. Di sebagian besar negara berpenghasilan tinggi, alokasi maksimum per kapita untuk langkah-langkah memerangi COVID-19 adalah Rp8.860.000, sedangkan di negara berpenghasilan menengah jumlah ini adalah Rp2.150.000, dan di negara berpenghasilan rendah hanya Rp282.500. Pada tahun 2020, anggaran perawatan kesehatan di negara berpenghasilan rendah sangat terpengaruh oleh langkah-langkah untuk melawan pandemi. Sebelum pandemi, alokasi anggaran untuk perawatan kesehatan mencapai 8% dari pengeluaran publik di negara berpenghasilan tinggi, 13% di negara berpenghasilan menengah, dan 36% di negara berpenghasilan rendah. Secara absolut, pengeluaran rata-rata per kapita lebih tinggi di negara



berpenghasilan tinggi (Rp2.050.000) daripada di negara berpenghasilan menengah (Rp200.000) dan negara berpenghasilan rendah (Rp30.000) (Gambar 10.8).



Gambar 10.8 Distribusi pengeluaran publik untuk perawatan kesehatan dan bagian pengeluaran untuk memerangi pandemi dalam anggaran agregat negara, menurut kelompok.

Pada saat yang sama, porsi terbesar pengeluaran dalam anggaran negara yang ditujukan untuk memerangi COVID-19 dialokasikan untuk kelompok negara berpenghasilan rendah. Namun, mengingat peningkatan jumlah pasien dan kematian akibat virus corona, kita dapat berbicara tentang penggunaan alokasi anggaran yang tidak memadai di antara negara-negara berpenghasilan rendah dan beberapa negara dari kelompok berpenghasilan menengah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan yang ada dalam sistem manajemen keuangan publik, kesulitan dalam implementasi anggaran, kekurangan dalam prosedur pengadaan publik, atau masalah di antara agen langsung penyedia layanan medis. Oleh karena itu, biaya aktual dari langkah-langkah untuk memerangi dan menanggulangi COVID-19 mungkin berbeda secara signifikan dari biaya yang disetujui dalam anggaran negara.

Salah satu bidang yang paling sensitif terhadap konsekuensi pandemi COVID-19 terbukti adalah bidang pendidikan. Di 188 negara di dunia, keputusan dibuat untuk menangguhkan sementara fungsi lembaga pendidikan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekolah, perguruan tinggi, dan universitas terpaksa mengirim siswa pulang, mengikuti pembatasan karantina yang diterima. Akibatnya, lebih dari 168 juta siswa terpaksa belajar mandiri di rumah. Selain itu, sekitar 214 juta anak di seluruh dunia – satu dari tujuh – kehilangan lebih dari tiga perempat pendidikan penuh waktu mereka. Dari Maret 2020 hingga Februari 2021, sekolah tetap tutup di 14 negara di seluruh dunia. Sebagian besar berada di Amerika Latin dan Karibia – dua pertiga dari jumlah sekolah yang tutup di dunia dan 98 juta siswa.

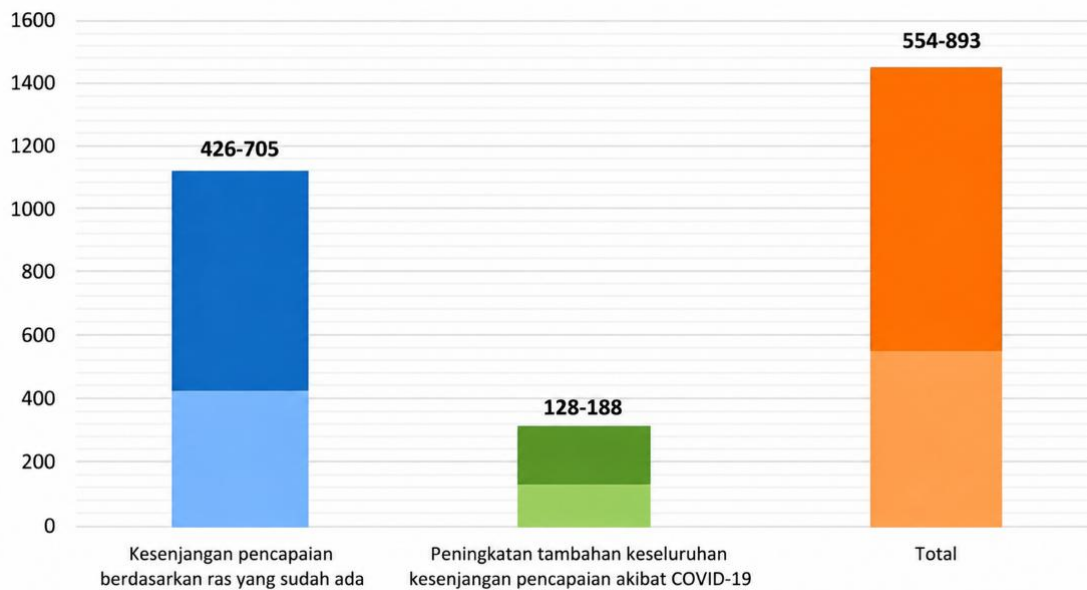


Penutupan sekolah memiliki konsekuensi negatif yang besar bagi proses pendidikan dan kesejahteraan anak-anak serta keterlibatan sosial mereka. Bagaimanapun, bagi banyak anak, sekolah bukan hanya tempat mereka belajar tetapi juga kesempatan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, belajar tentang dunia, dan terkadang mendapatkan akses ke layanan medis, imunisasi, dan nutrisi. Yang paling rentan adalah anak-anak yang tidak memiliki akses ke pembelajaran jarak jauh. Menurut UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), lebih dari 888 juta anak di seluruh dunia terus menghadapi gangguan dalam pendidikan mereka karena penutupan sekolah secara penuh atau sebagian. Pandemi telah memperlebar kesenjangan pembelajaran di antara anak-anak sekolah, dengan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan paling tertinggal. Menurut McKinsey, pada akhir tahun ajaran 2020–2021, siswa Amerika rata-rata tertinggal lima bulan dalam matematika dan empat bulan dalam membaca.

Akibat pandemi, bukan hanya anak-anak sekolah yang menderita tetapi juga mahasiswa. Menurut UNESCO, lebih dari 1,5 miliar siswa di 165 negara tidak dapat mengikuti kelas karena COVID-19. Pandemi memaksa komunitas akademik global untuk beralih ke metode pembelajaran baru termasuk pembelajaran jarak jauh dan daring. Hal ini terbukti sulit bagi siswa, mahasiswa, dan guru, yang dipaksa untuk mengatasi konsekuensi emosional, fisik, dan ekonomi negatif dari penyakit tersebut, sementara pada saat yang sama berkontribusi dalam memerangi penyebaran virus.

Di antara konsekuensi negatif pandemi, dapat diidentifikasi penurunan tingkat kehadiran siswa di kelas (termasuk daring). Masih belum jelas apakah siswa akan kembali aktif belajar setelah mengatasi dampak pandemi atau apakah hal ini akan tercermin dalam jumlah anak muda yang memasuki pendidikan tinggi di masa mendatang. Situasi seperti ini di bidang pendidikan dapat berdampak negatif pada seluruh sistem ekonomi. Berkurangnya jumlah orang berpendidikan akan menyebabkan upah yang lebih rendah. Penurunan tingkat pendidikan dapat memengaruhi penurunan tingkat inovasi dalam ekonomi modern, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Jadi, menurut perkiraan para ahli, pada tahun 2040 sebagian besar siswa yang saat ini mendapatkan pendidikan tinggi pada tingkat yang tidak memadai atau tidak belajar sama sekali, akan bekerja. Sebagai akibat dari penurunan kualifikasi mereka, potensi kerugian tahunan PDB dari US\$128 miliar hingga US\$188 miliar dimungkinkan karena pelatihan yang tidak lengkap terkait dengan pandemi (Gambar 10.9).





Gambar 10.9 Potensi ekonomi yang hilang per tahun dalam miliar dolar AS.

Oleh karena itu, jika dibiarkan tanpa pengawasan, pembelajaran yang tidak lengkap dapat memiliki konsekuensi serius bagi peluang dan prospek pendidikan siswa. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada perekonomian.

10.4 DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PASAR SAHAM REGIONAL DAN NASIONAL

Penulis mengusulkan untuk mempertimbangkan masalah pandemi COVID-19 dari sudut pandang yang berbeda, yaitu, menggunakan metode pemodelan ekonomi dan matematika modern bersama dengan pendekatan klasik untuk analisis keadaan ekonomi modern, fenomena krisis di dalamnya dan, sebagai hasilnya, pergeseran tertentu dalam struktur tatanan dunia. Sistem ekonomi yang dicirikan oleh basis data besar paling cocok untuk analisis ini. Dalam konteks pembahasan kami, ditemukan bahwa pasar saham global, regional, dan nasional merupakan komponen penting dalam analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global. Dinamika pasar-pasar ini mencerminkan dampak krisis virus corona dengan sangat jelas. Pasar saham adalah cermin ekonomi. Jika ekonomi "hidup", hal itu tercermin tidak hanya dalam pelaporan statistik indikator mikro dan makro tetapi juga dalam indeks pasar saham. Ekonomi yang stabil dan berfungsi menarik investor yang siap berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat yang sama, investor mendapatkan dividen, dan ekonomi menerima dorongan lebih lanjut untuk pembangunan dan stabilitas. Proses-proses ini melambat atau berhenti sama sekali dalam kasus fenomena krisis.

Metode statistik sering digunakan untuk menganalisis deret waktu. Namun, pasar saham yang menghasilkan deret waktu ini merupakan objek studi khusus yang menunjukkan perilaku non-linier. Karena deret waktu dianalisis, metode yang tepat harus dipilih. Dalam pembahasan sebelumnya, kami menggunakan metode analisis entropi pasar saham untuk mempelajari daya tarik investasi negara, memodelkan fenomena krisis, dan lain-lain. Pembahasan ini mengusulkan untuk menggunakan metode pemodelan seperti analisis fraktal,



yang memungkinkan untuk menyelidiki perilaku pasar saham regional, pasar minyak, dan pasar gas selama pandemi COVID-19. Metode analisis entropi, fraktal, dan multifraktal telah kami gunakan untuk memantau dan memodelkan pasar mata uang kripto dan telah mengkonfirmasi efektivitasnya.

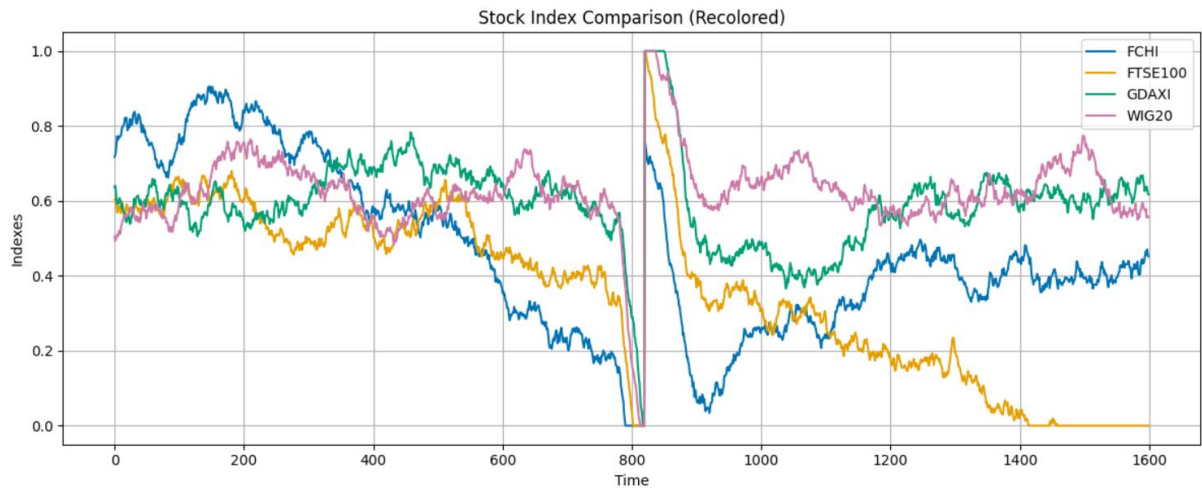
Metode analisis R/S diusulkan oleh B. Mandelbrot dan didasarkan pada metode analisis hidrologi Hurst. Koefisien Hurst (koefisien H) memungkinkan kita untuk memperoleh perkiraan minimal dan mengklasifikasikan deret waktu. Jika $0,5 < H < 1$, deret tersebut persisten atau tahan tren. Persistensi melekat pada deret waktu ekonomi dan keuangan. Semakin dekat nilai koefisien Hurst ke 1, semakin tahan tren deret waktu tersebut. Jika $0 < H < 0,5$, deret tersebut anti-persisten, yaitu, deret tersebut variabel (volatil). Karena deret waktu mengandung bagian persisten dan anti-persisten, metode DFA lokal digunakan. Dengan menggunakan metode ini, koefisien Hurst lokal dihitung, analisis dinamikanya memungkinkan deteksi perubahan dalam sistem ekonomi.

Negara-negara dengan ekonomi yang kuat dan pengaruh pada proses ekonomi global dipilih untuk pembahasan ini. Jadi, pasar Eropa termasuk FCHI (Prancis), GDAXI (Jerman), FTSE100 (Inggris Raya), dan WIG20 (Polandia). Pasar Amerika Utara meliputi DJIA (AS), GSPTSE (Kanada). Pasar Australia dan Asia termasuk SP/ASX all 200 (Australia), BSE Sensex (India), HSI (Hong Kong), dan 000001.SS (China). Deret waktu mencakup periode dari 1 Januari 2017 hingga 4 Februari 2023. Gambar 10.10 hingga 10.12 menyajikan dinamika komparatif dari pasar saham yang disebutkan di atas. Panah pada gambar menunjukkan awal tahun 2020, yaitu periode penyebaran pandemi yang cepat.

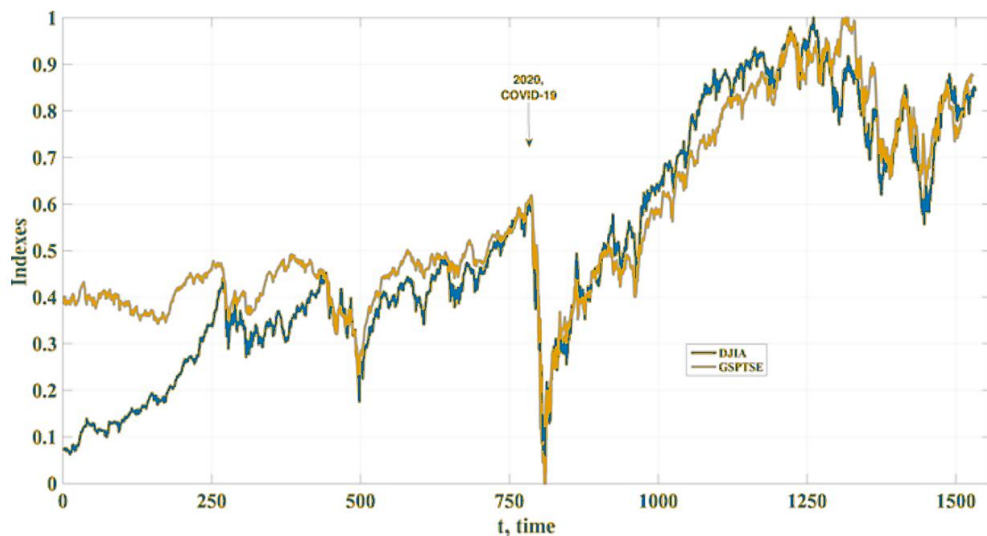
Analisis Gambar 10.10 menunjukkan bahwa negara-negara Eropa memiliki dinamika indeks pasar saham yang cukup mirip baik sebelum awal tahun 2020 maupun setelahnya. Terjadi penurunan tajam pada indeks saham di sekitar titik 850.

Dinamika indeks pasar saham Amerika Serikat dan Kanada (Gambar 10.11) serupa satu sama lain dan dengan dinamika pasar negara-negara Eropa. Gambar 10.12 menunjukkan bahwa pasar saham Australia, India, Hong Kong, dan Tiongkok memiliki dinamika yang berbeda sebelum dimulainya pandemi. Pada saat pengumuman pandemi COVID-19 (sekitar titik 760), fluktuasi terbesar diamati pada pasar Australia dan India. Kami juga mencatat fluktuasi signifikan di pasar saham Hong Kong. Pasar saham Tiongkok mengalami sedikit penurunan indeks, tetapi pasar pulih dengan cukup cepat dan kembali ke keadaan sebelum pandemi.

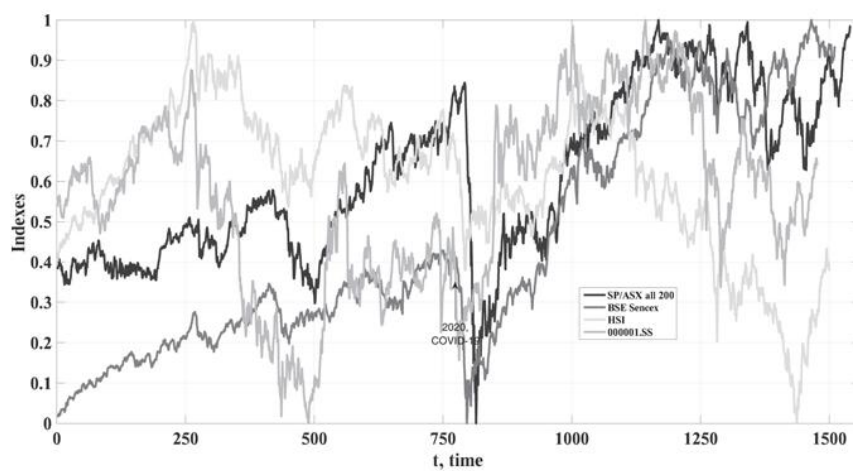




Gambar 10.10 Dinamika komparatif indeks pasar saham Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Polandia.

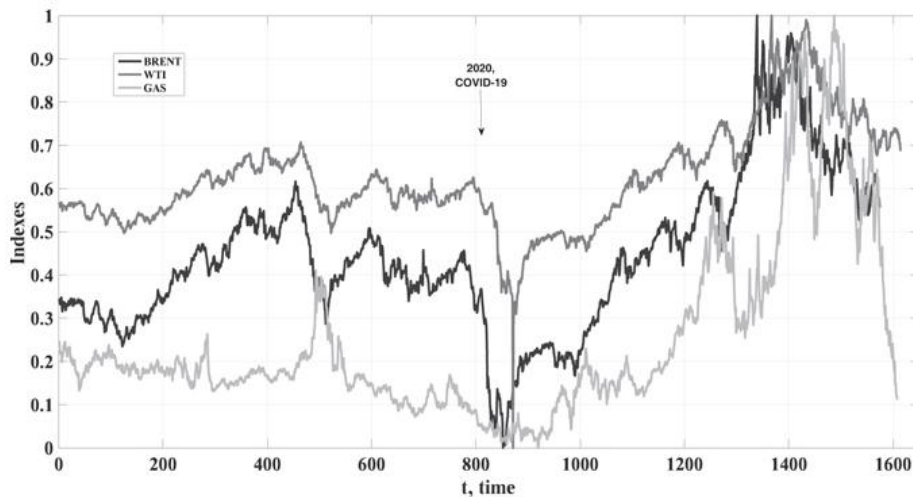


Gambar 10.11 Dinamika komparatif indeks pasar saham Amerika Serikat dan Kanada.



Gambar 10.12 Dinamika komparatif indeks pasar saham Australia, India, Hong Kong, dan Tiongkok.



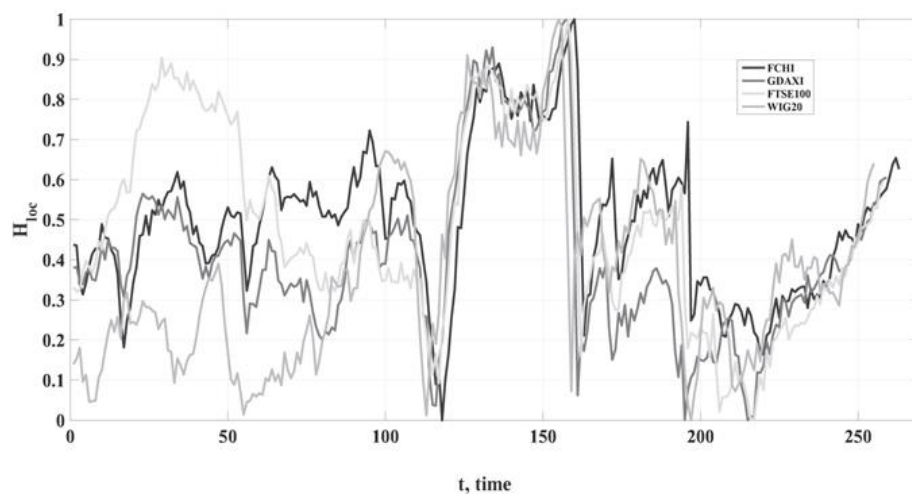


Gambar 10.13 Dinamika komparatif indeks pasar minyak dan gas.

Pasar energi juga terbukti sensitif terhadap konsekuensi pandemi COVID-19 (Gambar 10.13). Sektor energi terkait erat dengan sektor ekonomi lain yang secara langsung bergantung pada sumber daya energi. Pasar energi termasuk yang pertama merasakan dampak pandemi virus corona segera setelah pemerintah mulai memberlakukan pembatasan pada transportasi internasional, jam kerja, dan bidang lainnya (Gambar 10.13).

Pasar minyak (Gambar 10.13) juga mengalami penurunan pada awal tahun 2020, yang mungkin merupakan konsekuensi dari langkah-langkah karantina dan penurunan kebutuhan akan produk minyak bumi. Pasar gas, secara umum, sama sekali tidak bereaksi terhadap awal pandemi.

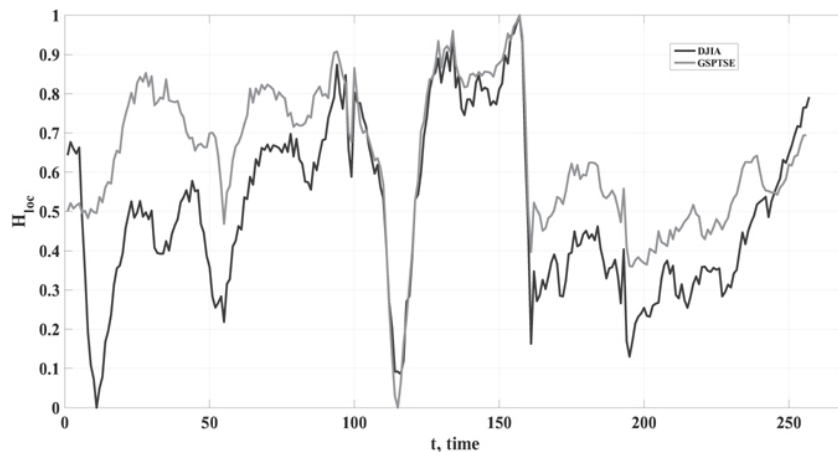
Gambar 10.14, Gambar 10.15, Gambar 10.16 menunjukkan hasil perhitungan koefisien Hurst lokal untuk pasar saham Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia. Perhitungan dilakukan dalam paket program Matlab untuk analisis numerik. Perhitungan dilakukan menggunakan prosedur jendela bergerak. Parameter perhitungan: lebar jendela – 250 titik, langkah jendela – 5 titik.



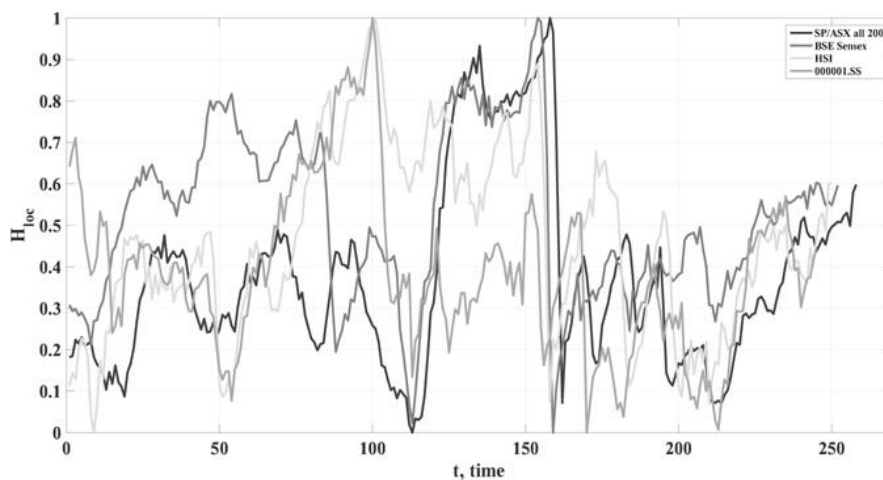
Gambar 10.14 Dinamika komparatif koefisien Hurst lokal untuk pasar saham Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Polandia.



Hasil perhitungan koefisien Hurst lokal untuk negara-negara Eropa (Gambar 10.14) menunjukkan bahwa semua pasar saham bereaksi terhadap krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nilai koefisien Hurst lokal turun tajam (sekitar titik 120), dan kemudian naik tajam. Perilaku indeks ini merupakan indikator fenomena krisis. Kita dapat mencatat situasi yang sama sekitar titik 160 (sesuai dengan awal tahun 2021), yang mungkin terkait dengan manifestasi pandemi yang seperti gelombang.



Gambar 10.15 Dinamika komparatif koefisien Hurst lokal untuk pasar saham Amerika Serikat dan Kanada.



Gambar 10.16 Dinamika komparatif koefisien Hurst lokal untuk pasar saham Australia, India, Hong Kong, dan Tiongkok.

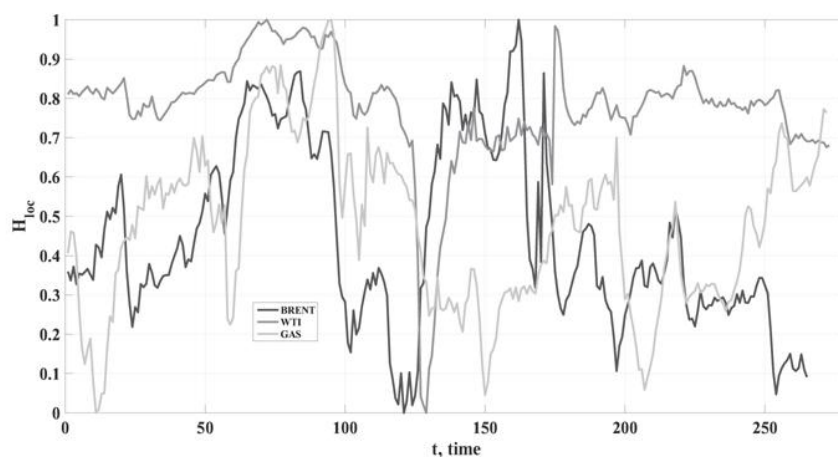
Pasar saham Amerika Serikat dan Kanada (Gambar 10.15) memiliki dinamika yang mirip dengan pasar Eropa. Kita dapat mengamati perilaku karakteristik indikator di sekitar titik 120 dan 160 (awal tahun 2020 dan 2021, masing-masing).

Gambar 10.16 menunjukkan reaksi berbeda dari pasar saham Australia, India, Hong Kong, dan Tiongkok pada awal tahun 2020 (sekitar titik 120). Untuk pasar Australia, kita melihat penurunan bertahap pada indikator koefisien Hurst lokal, yang tidak menunjukkan



adanya keadaan krisis. Hal ini mungkin disebabkan oleh letak geografis benua yang jauh dan masuknya ke dalam lingkaran pandemi dengan jeda waktu tertentu. Untuk pasar saham Hong Kong, koefisien Hurst lokal mengalami sedikit penurunan. Pasar saham India merespons pandemi. Untuk pasar saham Tiongkok, kita mengamati penurunan tajam pada nilai koefisien Hurst lokal, yang menunjukkan reaksi terhadap krisis, tetapi juga dapat dicatat bahwa Tiongkok mencoba memperlambat manifestasi negatif sebisa mungkin. Respons terhadap gelombang COVID-19 berikutnya untuk negara-negara ini lebih menonjol. Sekitar titik 160, kita melihat penurunan nilai koefisien Hurst lokal untuk pasar Asia dan Australia.

Dinamika koefisien Hurst lokal untuk pasar energi ditunjukkan pada Gambar 10.17. Analisis dinamika koefisien Hurst untuk pasar minyak dan gas (Gambar 10.17) menunjukkan kurangnya reaksi pasar minyak Brent dan pasar gas. Untuk minyak WTI, terdapat perilaku karakteristik indikator koefisien Hurst lokal sekitar titik 125 (awal tahun 2020).



Gambar 10.17 Dinamika komparatif koefisien Hurst lokal untuk pasar minyak dan gas.

Dengan demikian, untuk meringkas hasil analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa pandemi memengaruhi semua pasar saham yang dipelajari hingga tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ini mungkin merupakan konsekuensi dari proses globalisasi yang mendalam yang terjadi dalam ekonomi dunia. Pasar minyak dan gas terkena dampak buruk pandemi. Jelas bahwa stagnasi ekonomi dan produksi menyebabkan penurunan sumber daya yang digunakan. Namun, pasar-pasar ini, dalam kebanyakan kasus, tunduk pada hukum operasi yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat mengamati dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pasar saham. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat ini perang Rusia-Ukraina dan langkah-langkah OPEC+ berdampak signifikan pada pasar energi.

Koefisien Hurst (Tabel 10.4) dihitung untuk pasar yang diteliti untuk mengklasifikasikan deret waktu berdasarkan jenis dan kedalaman memori serta memahami tren pasar pada saat pembahasan.

Analisis hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua pasar bersifat persisten. Artinya, pada saat pembahasan, deret waktu menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti nilai besar deret setelah nilai besar lainnya (atau sebaliknya). Pasar saham dan pasar gas menunjukkan tren naik. Pasar minyak menunjukkan perilaku tidak stabil dan tren turun. Perlu dicatat bahwa



pasar minyak dan pasar saham Polandia, Amerika Serikat, Kanada, dan India memiliki nilai koefisien Hurst terbesar yang merupakan konfirmasi tren dan stabilitasnya. Pasar yang paling tidak tahan terhadap tren adalah pasar saham Tiongkok dan pasar gas.

Tabel 10.4 Hasil perhitungan koefisien Hurst untuk pasar saham.

Kawasan / Pasar		H
Eropa		
FTSE100		0.57168
FCHI		0.58351
GDAXI		0.58086
WIG20		0.66401
Amerika Utara		
DJIA		0.61896
S&P/TSE		0.64187
Asia		
BSE Sensex		0.66737
000001.SS		0.53544
HSI		0.60328
Australia		
S&P/ASX All 200		0.597
Pasar Minyak dan Gas		
Brent		0.64367
WTI		0.7969
Natural Gas Futures		0.53086

10.5 RINGKASAN

Pemodelan pasar saham regional dan pasar energi melalui analisis fraktal memungkinkan kita untuk menentukan karakteristik non-linier tambahan. Hasil pemodelan sejalan dengan kesimpulan analisis statistik, yaitu, dampak pandemi COVID-19 berdampak negatif pada indikator efisiensi bidang ekonomi dan sosial di negara-negara dunia. Hal ini tercermin dalam penurunan PDB, perdagangan internasional, investasi, kebangkrutan perusahaan, meningkatnya pengangguran, penghentian pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas karena pembatasan karantina, dan beban yang signifikan pada sektor kesehatan, yang tidak siap menghadapi ekspansi cepat COVID-19 di banyak negara berkembang. Struktur sistem ekonomi, hubungan antar industri, dan metode serta pendekatan terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan secara umum telah berubah.

Sulit untuk menarik kesimpulan apakah tatanan dunia itu sendiri telah berubah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Negara-negara yang menunjukkan keunggulan dalam hal tingkat pembangunan ekonomi, khususnya Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris Raya, Jerman, dan Jepang, tetap berada di antara pemimpin dunia. Kawasan Asia, karena indikator



pertumbuhan ekonomi yang positif di Tiongkok, terbukti paling stabil di tengah resesi global yang disebabkan oleh pandemi.

Tidak diragukan lagi, krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi perekonomian dunia, tetapi pemulihan ekonomi global lebih cepat daripada setelah krisis ekonomi tahun 2008. Kesimpulan penting dari krisis COVID-19 adalah bahwa perubahan terjadi lebih cepat daripada yang diprediksi atau diharapkan. Oleh karena itu, negara-negara yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan baru di ruang global akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem ekonomi dan mempercepat proses pengambilan keputusan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Negara-negara yang terjebak pada jalur pembangunan ekonomi dan digital dan lambat beradaptasi dengan perubahan di lingkungan modern tidak akan mampu berhasil di dunia pasca-COVID. Selain itu, tantangan modern yang terkait dengan perang Rusia-Ukraina dapat menyebabkan transformasi baru sistem sosial-ekonomi dan tantangan terhadap tatanan ekonomi dunia, yang merupakan perspektif untuk pembahasan lebih lanjut.



BAB 11

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA-PANDEMI

11.1 PENDAHULUAN

Secara umum, model sosio-ekonomi mengacu pada jaringan kompleks lembaga dan peraturan yang memungkinkan sebagian besar masyarakat untuk memahami dan sepenuhnya menguasai masalah ekonomi dan sosialnya. Dalam kebanyakan kasus, model tersebut melibatkan bentuk kerja sama antar warga untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Dengan demikian, sangat umum untuk melihat negara-negara menghadapi masalah sosial atau ekonomi yang serupa dan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasinya. Selain itu, banyak perbedaan dalam lembaga ekonomi, nilai-nilai budaya, dan norma-norma sosial menjelaskan perbedaan pola pertumbuhan ekonomi global. Namun fokus pembahasan ini bukanlah model sosio-ekonomi itu sendiri, tetapi bagaimana model tersebut merangkul konsep pembangunan berkelanjutan.

Meskipun diskusi tentang subjek khusus ini telah ada sejak akhir abad ke-20 (dengan implementasi praktis yang terbukti cukup kompleks), minat utama kami adalah untuk menunjukkan perkembangan terkini, yaitu yang lebih terlihat pada periode pasca-pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tujuan bab ini bukanlah untuk merumuskan teori yang kompleks dan komprehensif, tetapi untuk menunjukkan tren utama dalam model sosio-ekonomi arus utama (terutama dengan fokus Eropa) yang dapat memfasilitasi pengorganisasian informasi yang lebih baik untuk pembahasan lebih lanjut dan lebih kompleks. Bab ini juga menggambarkan bagaimana pandemi memunculkan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan yang memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, bagian pertama bab ini akan berfokus pada karakteristik model sosio-ekonomi teoretis, menekankan fondasi negara kesejahteraan Eropa. Diskusi di bagian ini menguraikan fitur-fitur model sosio-ekonomi dan relevansinya dengan konteks Eropa. Bagian kedua akan membahas berbagai jenis model sosio-ekonomi di Eropa. Diskusi akan berkonsentrasi pada karakteristik utama setiap model, menyoroti fitur-fiturnya. Bagian ketiga akan menghubungkan model sosio-ekonomi dengan dimensi pembangunan berkelanjutan; bagian ini juga akan menyajikan berbagai pendekatan untuk memecahkan trilema eko-sosial-pertumbuhan, yaitu tantangan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Terakhir, bagian keempat akan menganalisis upaya spesifik Uni Eropa pasca-pandemi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagian ini akan mengkaji berbagai langkah dan rencana yang telah diimplementasikan Uni Eropa untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.

11.2 MEMAHAMI MODEL SOSIO-EKONOMI

Model sosio-ekonomi dapat dianggap sebagai visi bersama tentang bagaimana masyarakat seharusnya diorganisir, yang, di mata banyak orang, berbeda dari satu negara ke



negara lain. Perbaikan kondisi hidup dan kerja di Eropa baru-baru ini, akses yang lebih baik ke pendidikan dan perawatan kesehatan, tingkat buta huruf yang lebih rendah, dan layanan publik berkualitas tinggi semuanya dapat dikaitkan dengan Model Sosio-Ekonomi Eropa (atau ESEM). Program kesejahteraan telah membuktikan saling ketergantungan antara kemajuan ekonomi dan sosial sambil memastikan stabilitas dan harmoni sosial. Dimensi sosial ini telah membantu membentuk identitas Eropa dan telah membawanya lebih dekat untuk menjadi "ekonomi berbasis pengetahuan yang paling kompetitif dan dinamis di dunia".

Salah satu definisi pertama yang dirumuskan tentang model sosial Eropa muncul dalam Buku Putih tentang Kebijakan Sosial, yang menyajikannya dalam bentuk normatif. Konsep tersebut didefinisikan sebagai seperangkat "nilai-nilai bersama yang mencakup demokrasi dan hak-hak individu, perundingan kolektif yang bebas, ekonomi pasar, kesetaraan kesempatan bagi semua, serta kesejahteraan sosial dan solidaritas".

Jacques Delors pertama kali menggunakan konsep model sosial Eropa pada pertengahan tahun 1990-an untuk menggambarkan alternatif terhadap model kapitalis murni, menggarisbawahi gagasan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial harus berjalan beriringan, menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kohesi sosial. Meskipun tiga dekade telah berlalu sejak saat itu, gagasan tersebut terus diperdebatkan di kalangan politik dan akademis dan tetap tidak tepat. Sejak tahun 1990-an, banyak negara telah melakukan reformasi panjang terhadap jaminan sosial dan kebijakan sosial sebagai respons terhadap tekanan dari pergeseran demografis, lanskap ekonomi yang berubah, pengangguran struktural, dan kekhawatiran keberlanjutan jangka panjang.

Meskipun banyak yang telah ditulis tentang Model Sosial Eropa (digunakan secara bergantian dengan model sosio-ekonomi Eropa), belum ada kesepakatan tentang definisi yang diterima secara umum. Esensinya tampaknya kurang dalam sebagian besar literatur yang ada tentang subjek ini (dan definisi yang ada sejauh ini tidak selalu konvergen). Meskipun demikian, ada konsensus antara berbagai jenis model sosio-ekonomi Eropa, yang akan dibahas kemudian.

Salah satu cara untuk mendefinisikan model sosio-ekonomi Eropa adalah melalui lembaga-lembaga negara kesejahteraan dan dalam hal kapasitas untuk regulasi politik ekonomi pasar. Dengan demikian, meskipun negara-negara Eropa tidak semuanya menggunakan satu model yang dapat diidentifikasi, negara kesejahteraan mereka cenderung memiliki ciri-ciri umum tertentu. Ciri-ciri ini biasanya melibatkan dedikasi terhadap lapangan kerja penuh, memberikan perlindungan sosial bagi semua warga negara, mempromosikan integrasi sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara kesejahteraan mengacu pada berbagai program dan inisiatif yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara mereka dengan mengurangi risiko ekonomi dan sosial. Dalam model sosial-ekonomi Eropa, negara kesejahteraan dipandang sebagai komponen kunci dari masyarakat yang adil dan merata. Negara kesejahteraan didanai melalui kombinasi pajak dan kontribusi sosial, dan dirancang untuk menyediakan standar hidup dasar bagi semua warga negara, tanpa memandang pendapatan atau status sosial mereka.



Negara kesejahteraan

Pada dasarnya, negara kesejahteraan mengacu pada sistem program dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke kebutuhan dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, dan untuk menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri karena pengangguran, disabilitas, atau faktor lain. Dengan demikian, negara kesejahteraan merupakan lembaga penting dalam setiap masyarakat modern. Di Eropa, pilar-pilar pertama perlindungan sosial muncul pada tahun 1900-an, dan – sejak istilah tersebut diciptakan pada tahun 1940-an – perlindungan sosial diperluas ke berbagai layanan yang lebih luas. Negara kesejahteraan di Eropa telah berevolusi dari waktu ke waktu, dengan berbagai negara menerapkan program dan kebijakan yang berbeda, tergantung pada prioritas politik dan ekonomi mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar negara kesejahteraan telah mengalami restrukturisasi dan transformasi yang signifikan; namun, karakteristik umum masih tetap ada.

Salah satu definisi pertama untuk negara kesejahteraan diberikan oleh Briggs, yang menyatakan bahwa ada tiga arah di mana negara menggunakan kekuasaannya untuk memodifikasi kekuatan pasar, dengan menjamin individu dan keluarga pendapatan minimum terlepas dari nilai pasar pekerjaan atau properti mereka, dengan mempersempit tingkat ketidakamanan dengan memungkinkan individu dan keluarga untuk memenuhi "kontingensi sosial" tertentu (misalnya, sakit, usia lanjut, dan pengangguran) yang jika tidak akan menyebabkan krisis individu dan keluarga, dan dengan memastikan bahwa semua warga negara tanpa membedakan status atau kelas ditawarkan standar terbaik yang tersedia dalam kaitannya dengan berbagai layanan sosial yang disepakati.

William Beveridge dalam laporannya tahun 1942 yang berjudul *Asuransi Sosial dan Layanan* Terkait mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sistem di mana pemerintah memikul tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dasar warganya, termasuk menyediakan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, serta jaring pengaman bagi mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Laporan Beveridge berpengaruh dalam membentuk perkembangan negara kesejahteraan di Inggris Raya dan negara-negara lain setelah Perang Dunia II. Laporan tersebut berpendapat bahwa negara kesejahteraan diperlukan untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah kemiskinan serta pengucilan sosial, dan menyerukan pembentukan sistem asuransi dan bantuan sosial yang komprehensif. Definisi negara kesejahteraan yang dikemukakan Beveridge membantu mempopulerkan konsep tersebut dan menjadikannya sebagai komponen kunci kebijakan sosial dan ekonomi modern. Saat ini, negara kesejahteraan tetap menjadi alat penting untuk mempromosikan kesetaraan sosial dan stabilitas ekonomi di banyak negara di seluruh dunia.

Definisi lain yang relevan dari konsep ini adalah "Sistem di mana negara menyediakan berbagai layanan kesejahteraan", "Model ideal di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya", atau "Kesejahteraan disediakan oleh negara serta oleh kombinasi layanan independen, sukarela, mutualis, dan pemerintah".



Sejak saat itu, berbagai definisi negara kesejahteraan telah muncul dan beberapa tujuan utama dapat diidentifikasi, yaitu (1) melindungi individu dan kelompok dari risiko ekonomi dan sosial kehidupan serta perubahan dalam masyarakat; (2) menjamin pendapatan dan kondisi untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dengan partisipasi penuh dalam masyarakat; (3) memerangi diskriminasi dan ketidaksetaraan; (4) mendorong kohesi dan inklusi sosial serta menghindari marginalisasi; dan (5) memerangi kemiskinan dan kesenjangan ekstrem dalam distribusi kekayaan di masyarakat.

Oleh karena itu, melalui kebijakan sosial, negara kesejahteraan menyiratkan proses redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Dengan demikian, hak-hak sosial merupakan inti dari negara kesejahteraan dan memastikan standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kondisi hidup harus menjadi prioritas pemerintah. Hal ini juga membantu menyelesaikan banyak masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan risiko, kegagalan pasar, norma etika, kemiskinan dan ketidaksetaraan, keadilan, dan lain-lain., melindungi individu dan berupaya untuk integrasi sosial.

Literatur membedakan tiga model dasar rezim negara kesejahteraan, yaitu liberal, konservatif, dan sosial demokrat. Model liberal berorientasi pasar, dengan ketentuan terbatas bagi masyarakat melalui redistribusi. Rezim ini mendorong kemandirian karena dalam kebanyakan kasus, tunjangan diuji berdasarkan kemampuan ekonomi, dan kemiskinan diatasi melalui upah minimum yang menunjukkan fokus yang berkurang pada kesetaraan. Model kesejahteraan konservatif atau korporatis menampilkan layanan sosial berdasarkan perbedaan pekerjaan dan status. Dengan demikian, hanya dialokasikan kepada pekerja; terkait dengan pendapatan dan sangat menekankan tanggung jawab keluarga. Model sosial demokrat menganggap kesejahteraan sosial sebagai hak universal, sehingga dicirikan oleh pengeluaran sosial yang tinggi.

Meskipun model ini dibiayai melalui pajak, akses terhadap penyediaan layanan sosial terbuka karena partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif. Sejak akhir abad ke-20, negara-negara kesejahteraan Eropa terus-menerus ditantang oleh globalisasi, perubahan demografis, dan risiko sosial baru, yang menekan mereka untuk beradaptasi.

Model sosial-ekonomi Eropa

Istilah "Model Sosial Eropa" (ESM) dan "Model Sosial-Ekonomi Eropa" (ESEM) sering digunakan secara bergantian, dan tidak ada konsensus yang ketat tentang definisi tepatnya. Gagasan (ESM) yang melambangkan pengalaman Eropa tentang kohesi sosial dan kemajuan ekonomi, lebih banyak digunakan dalam literatur, akademisi, dan pembuatan kebijakan. Sementara kepemimpinan Uni Eropa menggambarkan model sosial ini sebagai kisah sukses, beberapa penulis berpendapat bahwa itu tidak lebih dari versi sederhana dari model sosial Amerika.

Namun, tidak ada definisi resmi tunggal untuk ESM (atau ESEM) karena ini adalah konsep yang kompleks dan multifaset yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu upaya untuk mendefinisikan konsep tersebut muncul dari KTT Nice pada tahun 2000, yang mengusulkan bahwa ESM berasal dari "inti nilai bersama", merujuk pada perlunya mendorong



kohesi sosial sebagai salah satu komponen kunci dari proses integrasi Eropa, penyediaan tingkat perlindungan sosial yang tinggi, dan pentingnya komunikasi antara mitra sosial.

Di Lisbon, negara-negara anggota mengadopsi sikap bahwa transformasi ekonomi pengetahuan harus didukung oleh Model Sosial Eropa, dengan sistem perlindungan sosial yang telah dikembangkan. Terlepas dari upaya-upaya ini, konsep tersebut tetap tidak jelas dan sangat diperdebatkan karena berbagai sarjana telah mengidentifikasi ESM melalui berbagai aspek. Beberapa penulis menganggapnya sebagai strategi komprehensif yang menggabungkan aspek-aspek kebijakan sosial, ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Yang lain melihatnya sebagai model yang didasarkan pada lembaga dan nilai-nilai bersama. Namun, ESM dianggap oleh para pendukungnya sebagai cara untuk, “membangun penyeimbang progresif terhadap ideologi pasar global yang semakin meluas”.

Selain itu, ada beberapa fitur dan prinsip umum yang biasanya dikaitkan dengan ESM. Salah satu fitur utama ESM adalah penekanan pada kesejahteraan sosial dan penyediaan jaring pengaman bagi warga negara. Ini mencakup berbagai program dan layanan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, tunjangan pengangguran, dan pensiun, yang dirancang untuk memastikan standar hidup dasar bagi semua warga negara dan untuk menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Fitur penting lainnya adalah komitmen terhadap kesetaraan sosial dan ekonomi. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. ESM juga dicirikan oleh tingkat perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja yang tinggi, termasuk sistem perundingan kolektif yang kuat dan peraturan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan keamanan kerja. Selain itu, ESM sangat menekankan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, dengan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, mempromosikan energi terbarukan, dan melindungi sumber daya alam.

ESM juga dapat dibedakan oleh kelengkapannya karena bertujuan untuk mencakup jumlah orang terbanyak dan semua bidang sosial yang signifikan, sebuah pencapaian yang telah dilakukan selama beberapa dekade dan yang berhasil dicakup oleh enam pilar utama (Gambar 11.1).

Seperti yang terlihat sebelumnya, terkait dengan ESM, konsep ini cenderung lebih fokus pada kebijakan sosial dan program kesejahteraan, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, serta perlindungan hak-hak pekerja dan standar ketenagakerjaan. Konsep ini menekankan pentingnya mempromosikan kesetaraan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan, dan seringkali mencakup komitmen terhadap negara kesejahteraan yang kuat.





Gambar 11.1 Enam pilar utama ESEM.

Di sisi lain, ESEM mencakup berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas, termasuk yang terkait dengan manajemen makroekonomi, kebijakan industri, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi. Konsep ini menekankan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan sosial dan lingkungan, dan seringkali mencakup komitmen terhadap ekonomi campuran yang menggabungkan mekanisme berbasis pasar dengan intervensi pemerintah. Secara keseluruhan, meskipun ESM dan ESEM memiliki banyak kesamaan, ESM cenderung lebih fokus pada kebijakan sosial dan program kesejahteraan, sedangkan ESEM mencakup berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

11.3 MODEL SOSIO-EKONOMI ARUS UTAMA

Beberapa akar sejarah

Di Eropa, organisasi kelembagaan berbagai jenis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan anggotanya berkembang seiring masyarakat menjadi lebih kompleks secara ekonomi dan sosial, dan seiring pertanian terpencil digantikan oleh kota dan desa. Serikat dagang yang didirikan oleh pedagang atau pengrajin sepanjang Abad Pertengahan mungkin merupakan kelompok paling awal dari kelompok-kelompok ini. Orang-orang yang memiliki profesi atau bidang pekerjaan yang sama bergabung untuk membentuk serikat dagang atau organisasi saling membantu. Serikat dagang tersebut mengendalikan produksi dan lapangan kerja selain menawarkan berbagai keuntungan kepada anggotanya, seperti bantuan keuangan di saat dibutuhkan atau sakit dan sumbangan untuk membantu menutupi biaya pemakaman.

Perkumpulan persahabatan lahir dari tradisi serikat dagang. Pada abad ke-16, organisasi-organisasi tersebut pertama kali muncul di Inggris. Perkumpulan persahabatan akan berkembang menjadi apa yang sekarang kita sebut sebagai organisasi persaudaraan dan



merupakan cikal bakal serikat pekerja kontemporer, yang sekali lagi dibentuk di sekitar perdagangan atau bisnis yang sama. Organisasi persaudaraan dan beberapa serikat pekerja mulai menawarkan asuransi jiwa berbasis aktuaria kepada anggotanya di samping jenis perlindungan ekonomi yang ditawarkan oleh serikat pekerja. Setelah Revolusi Industri, perkumpulan persahabatan dan organisasi persaudaraan mengalami pertumbuhan yang pesat.

Akar model sosial Eropa dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16, namun langkah-langkah yang lebih jelas baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Sejak awal abad ke-16, berbagai tradisi jaminan sosial mulai berkembang di Eropa, secara progresif menetapkan teori dan pendekatan terhadap berbagai masalah sosial. Mengutip Dixon, tiga tradisi jaminan sosial yang sangat signifikan bagi Eropa dapat diidentifikasi, yaitu tradisi hukum kemiskinan, tradisi asuransi sosial, dan tradisi negara kesejahteraan.

Tradisi Hukum Kemiskinan didasarkan pada liberalisme ekonomi dan prinsip-prinsip Kristen, yang membahas tanggung jawab pribadi dan etika kerja. Undang-Undang Hukum Kemiskinan Inggris tahun 1601 adalah upaya pertama untuk secara sistematis memformalkan pandangan Inggris tentang peran negara untuk memastikan kesejahteraan individu, dengan keamanan ekonomi dianggap sebagai tantangan utama bagi orang miskin. Tradisi Asuransi Sosial dianggap sebagai reaksi terhadap pengalaman hukum kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tantangan terhadap tatanan sosial yang disebabkan oleh meningkatnya ketidakpuasan pekerja dalam menghadapi meningkatnya ketidakamanan sebagai akibat dari industrialisasi.

Tradisi asuransi dibangun di atas akuntabilitas individu dan solidaritas yang tersirat dalam pembagian risiko, dengan hak penghargaan berdasarkan kontribusi sebelumnya. Sejarah asuransi sosial telah secara fundamental mengubah cara pandang masyarakat terhadap jaminan sosial. Namun, karena kelayakan manfaat bergantung pada pekerjaan sebelumnya, program asuransi sosial terutama diciptakan untuk melindungi individu yang bekerja penuh waktu dari kemiskinan, sehingga mereka yang berada di luar angkatan kerja reguler tidak terlindungi. Tradisi Negara Kesejahteraan memiliki fokus yang berbeda, berdasarkan konsep humanistik bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan semua anggotanya. Melalui tindakan negara, pengeluaran sosial dimaksudkan untuk memajukan integrasi sosial dan transisi menuju masyarakat di mana setiap orang diperlakukan setara dan terdapat lapangan kerja penuh.

Strategi

Berdasarkan tiga tradisi yang telah dijelaskan sebelumnya, tiga strategi ideal telah berkembang. Strategi Bantuan Sosial memiliki fondasi tradisi hukum kemiskinan yang kuat. Dalam hal ini, negara menyediakan pendanaan dan mitigasi kemiskinan dapat digunakan untuk mengekspresikan tujuan redistribusi. Tujuan bantuan sosial adalah untuk mengurangi biaya jaminan sosial dengan memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria berbasis kebutuhan tertentu. Namun, karena kemungkinan adanya jebakan kemiskinan dan tabungan, para ekonom berpendapat bahwa hal itu dapat menghambat pasar tenaga kerja dan meningkatkan biaya administrasi dan pengawasan. Lebih lanjut, sosiolog dan ilmuwan politik



telah memperingatkan tentang penurunan dukungan terhadap kebijakan sosial di kalangan kelas menengah dan atas karena mereka cenderung tidak akan mendapatkan manfaat dari langkah-langkah jaminan sosial yang diberikan secara bersyarat berdasarkan uji kelayakan. Selain itu, mengklasifikasikan manfaat yang diberikan kepada mereka yang bukan bagian dari pasar tenaga kerja arus utama sebagai "kurang terhormat" semakin memperdalam kesenjangan sosial.

Strategi Asuransi Sosial didasarkan pada redistribusi horizontal yang bertujuan untuk mentransfer kekayaan dari kelas pekerja ke lansia atau pensiunan, dari keluarga tanpa anak ke keluarga dengan anak, dari yang sehat ke yang sakit, dan sebagainya. Kelayakan manfaat didasarkan pada dan dipengaruhi oleh kontribusi atau upah sebelumnya. Strategi ini berkonsentrasi pada kelompok sosial tertentu dan dibiayai melalui kontribusi, sementara pencegahan kemiskinan adalah tujuan utamanya. Karena strategi asuransi sosial, jaminan sosial sekarang lebih memperhatikan pencegahan kemiskinan daripada mitigasinya. Namun, pekerja penuh waktu tidak tetap, seperti mereka yang bekerja sendiri atau di bawah jenis kontrak yang tidak biasa, tidak tercakup. Selain itu, rencana asuransi terbukti tidak memadai untuk mengatasi semua masalah jaminan sosial karena meningkatnya jenis pekerjaan yang tidak biasa dan kurangnya perlindungan bagi orang-orang yang daya penghasilannya tidak pernah berkembang.

Strategi Tunjangan Sosial berfokus pada redistribusi vertikal untuk cakupan universal dan memandang memiliki jaminan pendapatan minimum sebagai hak dasar kewarganegaraan dalam negara bangsa. Strategi ini didasarkan pada cita-cita humanistik tentang hak-hak sosial dan tanggung jawab bersama bagi semua warga negara yang muncul dari wacana negara kesejahteraan. Sistem ini didanai negara dan memandang jaminan pendapatan dasar sebagai komponen fundamental kewarganegaraan negara-nasional. Dibandingkan dengan metode bantuan sosial, tunjangan sosial didistribusikan terutama berdasarkan faktor demografis, seperti usia dan jumlah anak, tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Meskipun berkontribusi untuk meminimalkan kesenjangan sosial, model ini menghadirkan banyak risiko, terkait dengan terciptanya kelas yang bergantung pada kesejahteraan.

Model Konvensional

Semua negara Uni Eropa memiliki sistem jaminan sosial yang serupa yang didasarkan pada kontribusi, perundingan kolektif, dan undang-undang yang mengatur kebijakan pasar tenaga kerja dan sosial. Secara luas, Model Eropa lebih dari sekadar model sosial. Selain itu, model ini memengaruhi output, lapangan kerja, dan produktivitas, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan, daya saing, dan semua tujuan kebijakan ekonomi lainnya. Model Eropa dianggap inklusif dibandingkan dengan model Amerika dan Asia. Dengan demikian, model ini didasarkan pada tiga elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi, kebebasan politik, dan kohesi sosial, dan kinerja setiap negara dapat dievaluasi berdasarkan karakteristik rezim kesejahteraan. Empat model ideal telah diidentifikasi dan diterima dalam literatur, membagi negara-negara anggota menjadi empat kelompok utama (Tabel 11.1).



Tabel 11.1 Jenis-jenis utama model sosial-ekonomi di Eropa.

ESEM	Negara	Fitur Spesifik
Model Skandinavia/Universalis/Nordik	Denmark, Finlandia, dan Swedia	• Kesetaraan sosial • Tingkat redistribusi yang tinggi • Inklusi sosial • Perlindungan dan bantuan sosial • Universalitas dan komprehensif
Model Kontinental atau Korporatis/Asuransi Sosial	Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, dan Austria	• Manfaat yang berkurang • Tingkat pengangguran yang tinggi • Peningkatan perpajakan • Upaya redistribusi yang rendah • Pelestarian status sosial
Model Anglo-Saxon atau Liberal	Britania Raya dan Irlandia	• Individualisme dan berbasis pasar • Liberalisme kesejahteraan • Bantuan sosial yang lemah • Skema asuransi swasta • Pengeluaran sosial yang rendah
Model Mediterania atau Rezim Kesejahteraan Selatan atau Berorientasi Keluarga	Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Malta, dan Siprus	• Berbasis keluarga dan jaringan • Tingkat transfer sosial yang rendah • Intervensionisme negara yang terbatas • Pasar tenaga kerja yang kaku • Ketimpangan gender yang tinggi
Model Mengejar Ketertinggalan (<i>Catching-up model</i>)	Bulgaria, Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia	• Proses transisi pada skala dan kecepatan yang berbeda • Berbagai tingkat pengeluaran perlindungan sosial: tinggi (Hungaria, Slovenia) atau rendah (negara-negara Baltik) • Regulasi pasar tenaga kerja yang moderat • Rendahnya kehadiran institusi dialog sosial • Tingkat pengangguran yang berbeda-beda

Model Skandinavia, Universalistik, atau Nordik adalah model yang paling komprehensif, dengan penekanan signifikan pada universalitas, inklusi sosial, dan redistribusi. Semua penduduk berhak atas perlindungan sosial yang seragam dan relatif tinggi, yang berarti ketergantungan mereka pada ekonomi dan pekerjaan mereka berada pada tingkat terendah. Manfaat kerja, yang disepakati oleh mitra sosial dan pada dasarnya mencakup seluruh angkatan kerja, melengkapi perlindungan tersebut. Jaringan layanan sosial yang komprehensif direncanakan agar murah dan berkualitas tinggi. Sistem pajak digunakan untuk mendanai



sistem kesehatan dan tunjangan pengangguran dengan tingkat penggantian yang tinggi. Meskipun pajak perusahaan sangat rendah, pajak lainnya cukup progresif.

Perlindungan kerja agak lemah, meskipun tunjangan pengangguran cukup besar dan ada strategi proaktif untuk reintegrasi ke dalam angkatan kerja. Selain itu, model ini efektif dalam meningkatkan tingkat pekerjaan serta meminimalkan kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ideal ini (Denmark, Finlandia, dan Swedia) dibedakan oleh dialog sosial yang dinamis, koordinasi pemerintah yang erat dengan mitra sosial, dan peran penting serikat pekerja dalam perekonomian secara keseluruhan.

Model Asuransi Sosial Kontinental atau Korporatis mencakup transfer sosial berdasarkan pekerjaan dan terkait dengan pendapatan dengan manfaat pada tingkat yang lebih sederhana. Dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia, inisiatif redistributif sistem pajak kurang menonjol. Dalam hubungan industrial, mitra sosial sangat penting, dan negosiasi upah terpusat. Di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, dan Austria, perlindungan pekerjaan yang kuat dan tunjangan pengangguran yang besar merupakan bagian dari rencana tersebut.

Model Anglo-Saxon atau Liberal menekankan transfer sosial kecil, yang ditargetkan dan "diuji berdasarkan kemampuan", dan menggarisbawahi tanggung jawab individu atas diri mereka sendiri. Kaum miskin menerima perlindungan sosial minimum, yang dilengkapi dengan asuransi yang disediakan oleh pemberi kerja atau asuransi swasta. Dengan demikian, kebijakan sosial biasanya melayani demografi berpenghasilan rendah sebagai kliennya. Pemerintah mengizinkan konsumen untuk memilih antara penyedia layanan publik dan swasta sambil mendorong pelaku pasar untuk bersama-sama menyediakan layanan. Seringkali, langkah-langkah negara yang saling melengkapi digunakan untuk mendukung asuransi swasta dan rencana tabungan.

Rezim kesejahteraan Mediterania atau Selatan, atau model berorientasi keluarga, menyiratkan tingkat transfer sosial yang rendah dan menyoroti peran pendukung jaringan keluarga. Negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Italia, dan Yunani terus mempraktikkan beberapa norma sosial paternalistik, termasuk kesenjangan gender yang signifikan. Kebijakan sosial dalam Model Selatan ditandai oleh karakteristik partikularistik dan klientelistik, berbeda dengan Model Nordik yang universalistik. Meskipun perlindungan pekerjaan relatif substansial, tunjangan pengangguran terbatas, dengan tingkat pekerjaan yang rendah.

Selain model konvensional, ada juga model kelima dalam literatur, yang menggambarkan negara-negara Uni Eropa yang baru bergabung. Model Mengejar Ketertinggalan ini terlihat di negara-negara yang telah mengalami proses transisi ke ekonomi pasar; namun terdapat variasi yang signifikan dalam cara pemerintah mengelola kekayaan mereka. Selain itu, negara-negara ini mencoba mengejar ketertinggalan dengan negara atau wilayah yang lebih maju dalam hal pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Gagasan dasar model ini adalah bahwa negara-negara berkembang ditemukan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka dengan meniru kebijakan dan praktik ekonomi yang lebih maju. Sementara beberapa negara, seperti negara-negara Baltik, mengandalkan pengeluaran untuk jaminan sosial yang rendah dan mendorong pembangunan ekonomi



dengan menerapkan pajak penghasilan yang mirip dengan Sub-Model Anglo-Saxon, negara-negara lain, seperti Hongaria dan Slovenia, memilih untuk meningkatkannya. Meskipun tingkat pekerjaan tertinggi berada di Slovenia dan Republik Ceko, pertumbuhan yang paling signifikan terlihat di Bulgaria dan negara-negara Baltik, di mana tingkat hunian mendekati model kontinental.

Salah satu aspek kunci dari Model Mengejar Ketertinggalan adalah gagasan "belajar sambil melakukan". Ini berarti bahwa negara-negara berkembang dapat belajar dari pengalaman ekonomi yang lebih maju dengan mengamati praktik dan strategi mereka dan menyesuaikannya dengan keadaan mereka sendiri. Misalnya, sebuah negara berkembang dapat mengirim manajer dan pekerjanya ke negara lain untuk mempelajari keterampilan dan teknik baru, atau dapat bermitra dengan perusahaan asing untuk mengakses teknologi dan pasar baru. Elemen penting lainnya dari Model Mengejar Ketertinggalan adalah peran pemerintah. Negara-negara berkembang seringkali membutuhkan pemerintah yang kuat dan aktif untuk menyediakan infrastruktur, pendidikan, dan dukungan pembahasan dan pengembangan yang diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan dan inovasi, seperti dengan mengurangi birokrasi, mendorong investasi swasta, dan melindungi hak kekayaan intelektual.

Keempat (ditambah satu) model tersebut masih terus berkembang seiring dengan tersedianya tunjangan kesehatan dan tunjangan keluarga secara lebih luas; dan negara-negara di benua Eropa telah mulai menerapkan upah minimum. Mitra sosial yang berbeda digunakan dalam masing-masing dari keempat model tersebut, dan beberapa sistem diatur oleh pemerintah dan yang lainnya oleh mitra sosial.

11.4 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MODEL SOSIO-EKONOMI

Konsep pembangunan berkelanjutan (SD) muncul pada tahun 1980-an dengan Laporan Brundtland, yang menyatakan fakta yang sudah dikenal bahwa SD berarti "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Tiga konsep fundamental yang menjadi dasar definisi Brundtland sangat penting. Ia menekankan pentingnya melindungi sumber daya yang terbatas, menyadari dampak generasi saat ini terhadap kesejahteraan generasi mendatang, dan menciptakan infrastruktur serta modal sosial untuk masa depan. Akibatnya, terlepas dari tantangan dan keterbatasan yang jelas dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan, perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ketika menilai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sering diartikan sebagai tujuan lingkungan, terutama perubahan iklim dan kualitas hidup di negara-negara kaya, meskipun visi awalnya juga sangat berfokus pada pembangunan ekonomi dan tujuan sosial. Saat ini, aspek fisik (terutama berbagai tujuan lingkungan), ekonomi (organisasi kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran), dan sosial-politik (prioritas normatif seperti distribusi pendapatan yang adil atau kesetaraan



gender) semuanya merupakan bagian dari apa yang ingin dipertahankan oleh masyarakat Eropa.

Pembangunan berkelanjutan (SD) mengacu pada campuran tujuan fisik, ekonomi, dan sosial-politik yang menurutnya merupakan ambisi yang agak kabur yang hanya dapat diterjemahkan ke dalam serangkaian nilai yang dapat diadopsi untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup. Ia menganggap persamaan "berkelanjutan-hijau" yang terkenal tidak cukup untuk analisis yang benar tentang SD sebagai fiskal; dimensi makroekonomi dan sosial juga harus diperhitungkan.

Oleh karena itu, keberlanjutan keuangan publik dapat lebih dari sekadar respons terhadap krisis atau resesi karena dapat menjadi alat dalam menangani ancaman terhadap stabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Keberlanjutan makroekonomi menunjukkan keseimbangan yang diperlukan antara daya saing dan pola pertumbuhan. Namun, diperlukan hubungan antara keberlanjutan makroekonomi dan lingkungan karena pendekatan berbasis konsumsi tidak berkontribusi pada pengurangan penggunaan sumber daya dan alternatif inovatif yang "hijau" dapat mendukung layanan sebagai penggerak utama pertumbuhan di negara-negara maju. Keberlanjutan sosial lebih kompleks, karena dalam wacana Eropa hal itu diterjemahkan ke dalam istilah-istilah seperti kohesi, kesetaraan, pengurangan kemiskinan, dan lapangan kerja. Degradasi lingkungan sosial dapat dipicu oleh pergeseran budaya, tradisi, hubungan, dan kondisi kehidupan.

Dalam wacana kebijakan, pembangunan berkelanjutan kurang memiliki interpretasi yang jelas yang menawarkan peluang untuk berbagai aplikasi tetapi juga memungkinkan perspektif yang berbeda. Pembangunan berkelanjutan awalnya dimasukkan dalam agenda sebagai termasuk daya saing dan kohesi sosial sementara tujuan lingkungan ditambahkan untuk struktur tiga pilar. Kelemahan konseptualisasi tersebut karena menempatkan dimensi sosial di pinggir dan dengan demikian muncul pertanyaan apakah dukungan politik yang cukup ada untuk Eropa sosial yang lebih kuat.

Pembangunan berkelanjutan menyioroti isu-isu tata kelola di tingkat Eropa. Oleh karena itu, salah satu tantangannya adalah mengadaptasi sistem tata kelola terhadap wacana keberlanjutan dan kebutuhan untuk fokus pada tata kelola ketidakpastian. Salah satu ketidakpastian yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah risiko peristiwa atau faktor tertentu menjadi tidak berkelanjutan, seperti tingkat polusi atau perubahan sosial, yang dapat berubah menjadi masalah besar dan akan membutuhkan respons kebijakan yang kuat. Keadilan motivasi kebijakan sosial dan lingkungan, negara kesejahteraan jauh lebih maju daripada negara lingkungan dan oleh karena itu perlu dianalisis apakah beberapa model sosial lebih terbuka terhadap keberlanjutan daripada yang lain.

Rekonsiliasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi

Masalah seputar tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya rumit dan beragam, serta ditandai dengan saling ketergantungan, pertukaran, dan dampak yang tidak terduga (termasuk berbagai pemangku kepentingan). Kurangnya kesepakatan tentang bagaimana ketiga sistem tersebut berinteraksi merupakan salah satu tantangan utama dalam menciptakan kerangka kerja konseptual



bersama untuk masalah ekologi, ekonomi, dan sosial. Menurut para ekonom, aspek lingkungan dan sosial juga dapat dijelaskan dalam istilah ekonomi atau pasar, sementara masyarakat dan ekosistem dianggap sebagai bagian dari ekonomi global. Beberapa sarjana bahkan berpendapat bahwa pasar dapat memberikan solusi untuk semua masalah ekologi dan sosial. Namun, para pemerhati lingkungan percaya bahwa masyarakat dan ekonomi manusia dibatasi oleh batas-batas ekologis karena pertumbuhan ekonomi dan demografis dapat merusak sistem ekologis. Ilmuwan sosial menganggap bahwa masalah sosial mencakup masalah lingkungan dan ekonomi dan berpendapat bahwa ekologi dan ekonomi tidak dapat mengatasi tantangan spesifik seperti kesetaraan dan keadilan dengan tepat.

Ketiga sistem ini – ekologi, ekonomi, dan sosial – saling bergantung dan terus-menerus dipengaruhi oleh tantangan global. Tingkat keterkaitan antara ketiga sistem tersebut berarti bahwa setiap upaya untuk mengatasi masalah hanya dalam satu sistem saja membawa bahaya meningkatnya kekhawatiran di sistem lain dan juga dapat mengakibatkan efek umpan balik dari sistem lain yang dapat melebihi efek positif dari intervensi awal. Namun, ketiga sistem tersebut dicirikan oleh keragaman, stabilitas, ketahanan, dan pengaturan diri. Gagasan pembangunan berkelanjutan telah menjadi kerangka kerja yang paling banyak diakui untuk memahami keterkaitan isu ekologis, ekonomi, dan sosial. Para sarjana berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan ulang sebagai "rekonsiliasi tiga imperatif" – ekologis, ekonomi, dan sosial, dengan mempertimbangkannya sebagai konsep normatif.

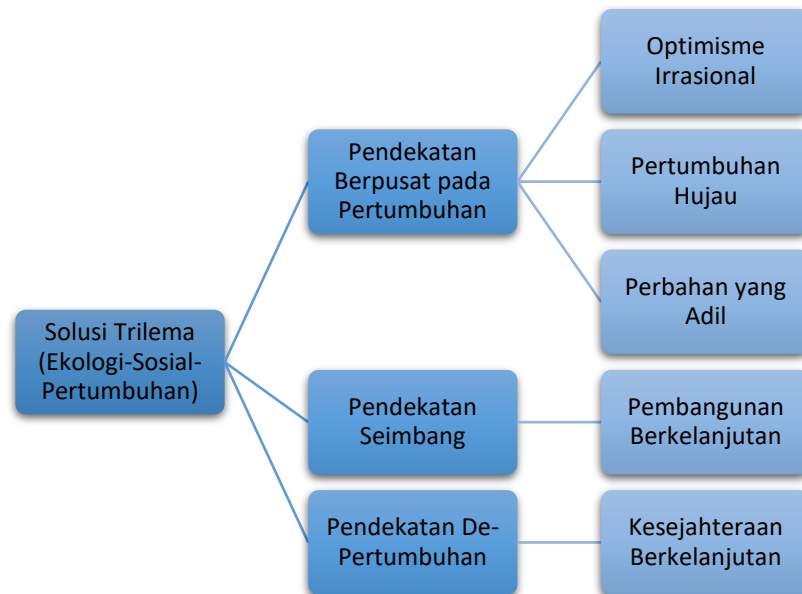
Memecahkan trilema pertumbuhan ekososial

Yang disebut trilema pertumbuhan ekososial menggambarkan kerumitan dan keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini adalah kerangka kerja konseptual yang berasal dari pembahasan tentang apa yang disebut triple bottom line. Hubungan antara tujuan sosial dan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari trilema tersebut. Kebijakan sosial diciptakan sebagai penyesuaian distribusi terhadap pasar bebas dan ekspansi ekonomi; dengan demikian, kebijakan ini tidak menentang tren neoliberal tetapi berfungsi sebagai pelengkap.

Lebih lanjut, dengan berupaya mengatur eksternalitas ekologis yang merugikan dari aktivitas ekonomi, perjanjian lingkungan, pajak, subsidi, peraturan, dan larangan menantang pandangan konvensional tentang pertumbuhan tanpa batas. Produksi dan konsumsi harus dijaga dalam kapasitas daya dukung sistem planet agar jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dapat berkelanjutan secara lingkungan. Namun, karena menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan keuangan program kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk keadilan distribusi. Untuk mencapai tujuan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan, pemerintah harus mengembangkan kebijakan secara terkoordinasi.

Lima strategi utama untuk menyelesaikan trilema ekososial-pertumbuhan (Gambar 11.2). Metode-metode ini berbeda, pertama, dalam peran pertumbuhan, dan kedua dalam bagaimana domain sosial dan lingkungan berinteraksi.





Gambar 11.2 Solusi untuk trilema ekososial-pertumbuhan.

Pendekatan yang berpusat pada pertumbuhan

Optimisme irasional, sebagai pendekatan neoliberal, menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pasar bebas secara otomatis akan menyelesaikan trilema tersebut. Pendekatan Pertumbuhan Hijau dipromosikan oleh organisasi internasional (OECD, Bank Dunia, PBB) dan menyiratkan transisi "hijau", yang berarti pemisahan ekonomi dari emisi karbon dan penggunaan sumber daya. Dalam perspektif ini, tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial saling terkait. Transisi yang Adil menggarisbawahi potensi dampak negatif dari ekonomi hijau dan berfokus pada mitigasi dampak ini, memastikan bahwa transisi tersebut adil, yang berarti memenuhi kriteria kesetaraan dan redistribusi.

Pendekatan yang seimbang

Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pendekatan yang seimbang untuk menyelesaikan trilema karena berupaya menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam gambaran yang lebih luas. Sejak Laporan Brundtland tahun 1987, konsep ini terus-menerus didefinisikan ulang. Dengan demikian, dari perspektif PBB, pembangunan berkelanjutan menyiratkan perpaduan tiga tujuan – pembangunan ekonomi, kesetaraan sosial, dan perlindungan lingkungan – yang saling terkait. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat sebagai tujuan utama karena harus memfasilitasi pencapaian dua tujuan lainnya untuk generasi sekarang dan masa depan.

Pendekatan de-pertumbuhan

Kesejahteraan berkelanjutan dipandang sebagai pendekatan alternatif yang berasal dari prinsip distribusi. Pendekatan ini mendorong distribusi kesejahteraan yang adil antara negara atau populasi kaya dan miskin, serta antara generasi sekarang dan masa depan. Selain itu, sementara pola konsumsi modern tidak sesuai dengan tujuan lingkungan, kesejahteraan dan kemakmuran dianggap harus diprioritaskan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.



11.5 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA-PANDEMI

Sejak dimasukkan ke dalam perjanjiannya pada tahun 1997, pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep panduan bagi Uni Eropa dan tujuan utama bagi urusan internal dan luar negerinya. Uni Eropa berkomitmen untuk mencapai SDGs dan sepenuhnya memasukkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kerangka kebijakan Eropa setelah menyambut persetujuan Agenda 2030. Keberlanjutan telah dianggap sebagai tujuan politik tertinggi untuk pekerjaan Komisi von der Leyen. Sementara dewan Komisioner secara kolektif bertanggung jawab untuk mewujudkan Agenda 2030, setiap Komisioner bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang berada di bawah kompetensinya mencerminkan SDGs.

Dalam konteks pandemi COVID-19 (terutama setelah akhir tahun 2019), Komisi baru telah meluncurkan sejumlah langkah inovatif yang dimaksudkan untuk memajukan keberlanjutan dan berbagai tujuan lainnya baik di dalam Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa. Pandemi telah menyoroti keterkaitan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menggarisbawahi perlunya sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, pandemi telah mengungkap kelemahan dalam model sosio-ekonomi yang ada (di seluruh Eropa, tetapi tidak terbatas pada ini), seperti ketidaksetaraan, kurangnya kesiapan, dan jaring pengaman sosial yang terbatas. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 juga telah menciptakan peluang untuk perubahan dan inovasi.

Beberapa negara dan organisasi telah menggunakan pandemi sebagai katalis untuk beralih ke model sosio-ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh, seperti berinvestasi dalam energi terbarukan, mempromosikan pertanian berkelanjutan (dengan inisiatif seperti program pertanian yang didukung komunitas dan pasar petani), memperkuat jaring pengaman sosial (seperti memperluas tunjangan pengangguran atau memberikan transfer tunai langsung kepada populasi rentan), menghidupkan transportasi (seperti memperluas jalur sepeda atau menerapkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik), atau inisiatif Ekonomi Sirkular (misalnya, beberapa perusahaan telah menerapkan rantai pasokan tertutup untuk mengurangi limbah dan mempromosikan keberlanjutan).

Pendekatan Kelembagaan

Sebagai tanggapan terhadap kelemahan dalam tata kelola ekonomi Uni Eropa yang terungkap oleh krisis keuangan dan ekonomi, Uni Eropa menerapkan Semester Eropa. Krisis tersebut menunjukkan bahwa dalam persatuan ekonomi yang sangat terintegrasi, koordinasi kebijakan yang lebih baik diperlukan untuk mencegah akumulasi ketidakseimbangan dan untuk menjamin konvergensi dan stabilitas. Semester Eropa didasarkan pada tiga pilar:

- Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang Direformasi (kebijakan fiskal);
- Prosedur Ketidakseimbangan Makroekonomi (kebijakan makroekonomi);
- Strategi Eropa 2020, yang didukung oleh Pedoman Terpadu untuk pertumbuhan dan lapangan kerja.

Komisi Eropa menerbitkan Survei Pertumbuhan Tahunan setiap tahunnya, yang menyajikan tantangan kebijakan utama dan prioritas Uni Eropa. Negara-negara anggota mengajukan *Program Reformasi Nasional* mereka, yang menetapkan reformasi struktural yang diimplementasikan atau diharapkan untuk tujuan Eropa 2020. Setiap tahun, pada musim semi,



Komisi melakukan analisis menyeluruh terhadap rencana reformasi makroekonomi, fiskal, dan struktural negara-negara anggota Uni Eropa dan kemudian mengajukan proposal untuk 12–18 bulan ke depan untuk dipertimbangkan oleh Dewan. Rekomendasi tahunan untuk zona euro, yang disetujui melalui prosedur serupa di awal tahun, sebagian besar tercermin dalam rekomendasi kepada Negara Anggota sejak tahun 2016.

Pada tingkat kelembagaan Uni Eropa, para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat berinteraksi dalam tiga cara berbeda.

Koordinasi intra-kelembagaan

Prosedur koordinasi internal ada di dalam Komisi, Parlemen, dan EESC, menurut responden. Namun, mereka mengakui bahwa prosedur tersebut dapat ditingkatkan. Mengenai Komisi Eropa, tampaknya ada sedikit koordinasi formal antara Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab atas masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Alih-alih merujuk pada rencana keseluruhan, koordinasi merujuk pada proyek atau bagian legislasi tertentu yang berada dalam lingkup lebih dari satu Direktorat Jenderal. Setiap Direktorat Jenderal dapat berkontribusi pada situasi ini. Proses penilaian dampak yang dilakukan Komisi pada semua tindakan legislatifnya adalah cara lain untuk mengintegrasikan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi (alih-alih memiliki sejumlah dokumen yang menilai dampak suatu inisiatif pada berbagai domain kebijakan di masa lalu, sekarang ada satu dokumen terintegrasi). Dalam kasus Parlemen Eropa (EP), komunikasi antara berbagai komite Parlemen secara teratur dilakukan melalui struktur koordinasi dan undang-undang tertentu menjadi subjek kerja sama ini.

Sebuah Observatorium Pembangunan Berkelanjutan didirikan oleh Komite Ekonomi dan Sosial Eropa untuk mengkoordinasikan upaya berbagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Observatorium Pasar Tenaga Kerja dan Observatorium Pasar Tunggal, yang keduanya didirikan oleh EESC, bekerja sama dengan Observatorium ini. Lebih lanjut, EESC dapat membentuk subkomite yang terdiri dari anggota beberapa komite untuk menetapkan pendapatnya tentang topik yang lebih luas dan lintas sektoral (misalnya, lingkungan, urusan ekonomi, dan sosial dan ketenagakerjaan). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengetahuan yang relevan dan lintas sektoral diterapkan pada masalah-masalah ini.

Koordinasi antarlembaga

Menurut fakta yang ada, terdapat pola kerja sama ad hoc yang konsisten pada proyek-proyek tertentu dan usulan legislatif. Pembahasan mendalam tentang masing-masing langkah legislatif diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai struktur koordinasi, yaitu, kapasitas mereka untuk secara efektif mempertimbangkan dan mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan sosial.

Koordinasi sosial

Hubungan antara para pemangku kepentingan (LSM, serikat pekerja, dan industri) dan lembaga-lembaga Uni Eropa menyerupai taktik lobi yang khas dan dibenarkan oleh upaya para pemangku kepentingan untuk memengaruhi undang-undang tertentu. Komisi Eropa (selama tahap pra-legislatif) dan Parlemen Eropa adalah target utama para pemangku kepentingan dalam hal ini. Koalisi para pemangku kepentingan bertindak pada beberapa topik spesifik



(misalnya, koalisi Energi untuk Semua). Di masa lalu, upaya untuk membentuk koalisi seputar isu-isu yang lebih umum (seperti integrasi lingkungan dan sosial yang melampaui program-program spesifik) telah dilakukan. Salah satu tantangannya adalah kesulitan dalam membangun konsensus pandangan, baik di dalam maupun di luar organisasi individual. Entitas sosial yang berbeda (LSM, serikat pekerja, dan organisasi komersial) tidak boleh dipandang sebagai satu kesatuan yang selalu memiliki pandangan yang sama.

Tindakan spesifik Eropa

Strategi pertumbuhan baru Uni Eropa yang bertujuan untuk mengubah Uni Eropa menjadi masyarakat yang adil dan makmur adalah Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal), yang diadopsi pada Desember 2019. Kesepakatan Hijau Eropa bercita-cita untuk membangun ekonomi modern, efisien sumber daya, dan kompetitif di mana, pada tahun 2050, tidak akan ada emisi gas rumah kaca bersih dan di mana pembangunan ekonomi akan independen dari penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya alam Uni Eropa serta untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara dari risiko dan dampak lingkungan. Dipandang sebagai bagian integral dari Agenda 2030 Komisi dan sehubungan dengan SDGs, Kesepakatan Hijau menyoroti perlunya transisi yang adil dan inklusif. Kesepakatan Hijau bertujuan untuk mengubah model sosial-ekonomi Eropa saat ini dengan menempatkan keberlanjutan sebagai pusat dari semua kebijakan dan tindakan (melalui langkah-langkah di bidang-bidang seperti keadilan sosial, pekerjaan dan keterampilan hijau, ekonomi sirkular, dan kerja sama internasional).

Strategi "Dari Ladang ke Meja Makan", yang diadopsi pada Mei 2020, merupakan bagian integral dari Kesepakatan Hijau Eropa, yang bertujuan untuk menjadikan sistem pangan di Uni Eropa adil, sehat, dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, dengan meminimalkan pemborosan makanan. Model sosial-ekonomi utama Eropa kemungkinan besar akan beradaptasi dengan strategi baru ini untuk mencakup pertanian berkelanjutan, inisiatif untuk mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan, program untuk mendukung pertanian kecil dan menengah, tindakan yang dibuat untuk mengurangi pemborosan makanan, dan lain-lain.

Rencana Target Iklim 2030, diperkenalkan pada September 2020, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030, melengkapi tujuan Uni Eropa untuk netralitas iklim pada tahun 2050 (juga merupakan komponen penting dari Kesepakatan Hijau Eropa). Tujuan spesifiknya meliputi stimulasi penciptaan lapangan kerja hijau dan mendukung tindakan Uni Eropa untuk mengurangi emisi sambil mengembangkan ekonominya serta menetapkan pola yang lebih hemat biaya dan ambisius untuk mencapai netralitas iklim. Melalui tindakannya, rencana ini ingin mendorong mitra internasional untuk meningkatkan upaya dan ambisi mereka untuk membatasi dampak perubahan iklim. Strategi Mobilitas Berkelanjutan dan Cerdas meletakkan dasar bagi transformasi hijau dan digital sektor transportasi Uni Eropa dan peningkatan ketahanannya terhadap krisis di masa depan. Tujuan Uni Eropa untuk tahun 2030 meliputi transisi netral iklim



dari 100 kota, peningkatan dan modernisasi lalu lintas kereta api dan maritim, serta mendorong penggunaan mobil tanpa emisi di Eropa.

Rencana Aksi Nol Polusi, yang merupakan bagian integral dari Kesepakatan Hijau Eropa, menganjurkan pengurangan polusi di udara, air, dan tanah hingga tingkat yang tidak dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia atau ekosistem alami, sambil juga menghormati batasan kemampuan adaptasi dunia dan dengan demikian menciptakan lingkungan bebas racun. Tujuan Uni Eropa adalah untuk meminimalkan risiko kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara (sebesar 55%), mengurangi limbah, sampah plastik di laut (sebesar 50%), dan mikroplastik yang dilepaskan ke lingkungan (sebesar 30%), mengurangi tingkat kehilangan nutrisi dan penggunaan pestisida kimia (sebesar 50%), serta menurunkan pangsa kebisingan transportasi dan limbah perkotaan.

Pada Maret 2020, Komisi Eropa mengadopsi Rencana Aksi Ekonomi Sirkuler, yang memperkenalkan langkah-langkah di sepanjang siklus hidup produk untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkuler. Rencana ini berfokus pada desain dan produksi, sejalan dengan praktik ekonomi sirkuler, memastikan bahwa sumber daya yang digunakan tetap berada dalam perekonomian Uni Eropa selama mungkin. Langkah-langkah yang diusulkan diarahkan untuk memastikan lebih sedikit limbah, mempromosikan praktik dan norma berkelanjutan di seluruh Uni Eropa, dan memberdayakan konsumen dan pembeli publik. Selain itu, mereka bertujuan untuk membuat ekonomi sirkular bermanfaat bagi masyarakat, kota, dan wilayah, dengan fokus pada industri yang memiliki penggunaan sumber daya tertinggi dan potensi ekonomi sirkular (yaitu baterai, kendaraan, plastik, tekstil, makanan, air) dan secara keseluruhan, berkontribusi pada upaya global untuk meningkatkan ekonomi sirkular. Pendorong utama perubahan Rencana Aksi yang berkaitan dengan model sosial-ekonomi Eropa arus utama adalah integrasi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, mendukung inovasi dan kewirausahaan, meningkatkan lapangan kerja hijau, dan mendorong kerja sama internasional.

Pada Juli 2019, Komisi Eropa mengadopsi Strategi Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk menyalurkan modal swasta ke arah investasi berkelanjutan, menyelaraskan sistem keuangan dengan tujuan keberlanjutan Uni Eropa. Strategi ini dirancang untuk mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan di Uni Eropa (termasuk langkah-langkah seperti taksonomi untuk kegiatan berkelanjutan dan standar obligasi hijau), dengan menciptakan kerangka kerja untuk investasi berkelanjutan dan memastikan bahwa risiko dan peluang keuangan yang terkait dengan keberlanjutan dipertimbangkan dengan benar. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan tujuan sosial dan lingkungan di Uni Eropa, dengan menciptakan insentif bagi investor untuk mengalokasikan modal ke proyek dan kegiatan berkelanjutan yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan (suatu bidang yang juga menjadi target model sosial-ekonomi Eropa arus utama, dalam upaya mereka untuk mempromosikan tujuan sosial dan lingkungan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi).



11.6 RINGKASAN

Pandemi COVID-19 telah membawa rasa darurat baru untuk lebih mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam model sosial-ekonomi arus utama. Krisis ini telah mengungkap kerentanan model sosial-ekonomi saat ini dan kebutuhan akan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pandemi ini juga telah mengganggu rantai pasokan global dan menyebabkan fokus baru pada rantai pasokan lokal dan ekonomi sirkular. Inilah sebabnya mengapa banyak bisnis mulai memprioritaskan pengadaan lokal, pengurangan limbah, dan penggunaan kembali produk. Dampak lain dari pandemi ini berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen, dengan banyak orang memprioritaskan produk berkelanjutan dan etis (dipicu oleh peningkatan permintaan akan makanan organik, fesyen berkelanjutan, dan produk ramah lingkungan).

Saat dunia keluar dari krisis, ada peluang untuk "membangun kembali dengan lebih baik" dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil melalui implementasi kebijakan (yang akan dibahas lebih lanjut) yang mempromosikan produksi dan konsumsi berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil.

Berbagai kebijakan sosial-ekonomi dapat dieksplorasi dan diimplementasikan untuk lebih mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam model sosial-ekonomi yang ada. Misalnya, investasi infrastruktur hijau dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah dapat berinvestasi dalam paket stimulus hijau yang mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Paket tersebut dapat mencakup pendanaan untuk energi terbarukan, transportasi hijau, pertanian berkelanjutan, dan inisiatif ramah lingkungan lainnya.

Praktik ekonomi sirkular dapat diatasi oleh kebijakan sosial-ekonomi di masa depan untuk mengurangi limbah dan mempromosikan produksi dan konsumsi berkelanjutan. Kebijakan yang mempromosikan ekonomi sirkular, seperti skema tanggung jawab produsen yang diperluas dan standar produk yang mendorong penggunaan bahan daur ulang, dapat membantu mengurangi limbah dan mempromosikan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung masyarakat pedesaan, sementara penetapan harga karbon dapat memberi insentif kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi bersih dan mengurangi emisi mereka. Kebijakan penetapan harga karbon, seperti pajak karbon atau sistem perdagangan emisi, dapat membantu merangsang pengurangan emisi dan mempromosikan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Selain itu, kebijakan yang memperluas jaring pengaman sosial dapat diusulkan, seperti pendapatan dasar universal atau jaminan pekerjaan, untuk membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pekerja untuk beralih ke pekerjaan ramah lingkungan dapat membantu mengatasi pengangguran sekaligus mendukung peralihan ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.



Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan mereka, serta mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan dan regulasi keuangan yang mempromosikan keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau dan pedoman investasi berkelanjutan, dapat membantu memobilisasi modal swasta menuju pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam model sosial-ekonomi arus utama di dunia pasca-COVID-19 kemungkinan akan membutuhkan kombinasi kebijakan dan pendekatan yang mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif dan terintegrasi, membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.



BAB 12

SISI GELAP PAJAK PENGHASILAN DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DUNIA

12.1 PAJAK PENGHASILAN DI NEGARA-NEGARA OECD

Dalam sistem pajak modern, pajak penghasilan masih sangat penting. Peran jenis pajak ini tidak hanya terkait dengan jumlah pendapatan anggaran, yang sedikit bervariasi dalam beberapa dekade terakhir. Pajak semacam itu harus menjalankan fungsi non-fiskal lainnya, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Perpajakan yang adil dengan pajak penghasilan telah menjadi titik fokus kebijakan di masing-masing negara¹ dan secara internasional. Lebih lanjut, negara-negara tanpa pajak penghasilan dipandang dengan curiga, bahkan ketika pendapatan anggaran mereka tidak terutama didasarkan pada pendapatan pajak.

Pajak penghasilan pribadi (PIT) adalah salah satu sumber utama pendapatan pajak untuk anggaran negara-negara OECD. Pendapatan rata-rata OECD dari sumber ini sebagai persentase dari total pendapatan pajak berjumlah sekitar 24%. Tentu saja, tarif pajak ini bervariasi dari satu negara ke negara lain, dari yang terendah di Kosta Rika – sebesar 6,8% hingga yang tertinggi di Denmark – sebesar 54,2%. Tidak diragukan lagi bahwa jenis pajak ini signifikan bagi anggaran entitas publik. Tarif pajak sangat bervariasi, tetapi biasanya ada pajak progresif. Tarif pajak resmi tertinggi ada di Jepang, Denmark, Prancis, dan Austria, dan yang terendah – di Kosta Rika, Estonia, Republik Ceko, dan Hongaria.

Perlu disebutkan bahwa pendapatan anggaran pajak penghasilan perusahaan tidak begitu tinggi. Pendapatan rata-rata OECD dari sumber ini sebagai persentase dari total pendapatan pajak tidak lebih dari sekitar 9%. Pendapatan pajak yang paling stabil dan efisien di negara-negara OECD adalah pajak pertambahan nilai (sekitar 20%) dan pajak konsumsi lainnya (sekitar 12%).

Di sini, perlu disebutkan beberapa tindakan terkait pencegahan penghindaran pajak. Bertahun-tahun pengabaian dan kurangnya kerja sama antar negara di tingkat pemerintahan dan antar administrasi pajak negara-negara yang bersangkutan menyebabkan kesenjangan pajak penghasilan yang sangat besar. Seperti yang diperkirakan dalam laporan OECD dan G20 tahun 2015, besarnya kesenjangan pajak berkisar antara 4% hingga 10% dari pendapatan global, yaitu antara Rp1 kuadriliun dan Rp2,4 kuadriliun per tahun. Para penulis laporan tersebut mencatat bahwa kesenjangan tersebut muncul karena sejumlah alasan, seperti perencanaan pajak yang agresif, kurangnya transparansi dan koordinasi antar negara, keterbatasan kemampuan penegakan hukum, dan praktik-praktik yang merugikan, yang menyebabkan perlunya tindakan terkoordinasi di tingkat internasional dan Uni Eropa. Dua laporan lain juga perlu diperhitungkan, yaitu, Persaingan Pajak yang Merugikan: Isu Global yang Muncul, yang diterbitkan oleh OECD pada tahun 1998, dan Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak, yang diterbitkan pada tahun 2009. Langkah selanjutnya adalah Rencana Aksi BEPS (BEPS – Base Erosion Profits Shifting, selanjutnya disebut: BEPS).



Namun, langkah-langkah tersebut tidak terlalu penting dalam mencegah erosi basis pajak dalam pajak penghasilan pribadi – hanya beberapa langkah yang mempertimbangkan masalah tersebut, misalnya, Instrumen Multilateral untuk Memodifikasi Perjanjian Pajak Bilateral. Konvensi tersebut menetapkan perjanjian internasional dalam arti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan dibuat untuk secara bersamaan mengubah sejumlah perjanjian pajak berganda dan menerapkan langkah-langkah hukum yang diatur dalam laporan BEPS. Perubahan yang sangat penting adalah pengabaian pengecualian dengan metode progresif dan beralih ke metode kredit. Ditemukan bahwa metode yang digunakan selama ini dapat menyebabkan situasi penghindaran pajak ganda, yang diputuskan untuk ditentang.

Selain tindakan internasional yang disebutkan di atas, Uni Eropa juga mengambil tindakan legislatif untuk mengurangi penghindaran pajak. Dicatat bahwa setiap negara memiliki lingkungan hukum dan ekonomi spesifiknya sendiri, sehingga instrumen internasional dapat merugikan dalam situasi tertentu. Uni Eropa, di sisi lain, memiliki kemungkinan untuk memperkenalkan undang-undangnya sendiri dan kemudian memeriksa penerapan yang benar oleh Negara Anggota sehingga reformasi dapat disesuaikan dengan konteks Uni Eropa, dan dengan demikian setiap inkonsistensi dapat dihilangkan di tingkat Uni. Sebagai hasil langsung dari itu, Sistem Pajak Perusahaan yang Adil dan Efisien di Uni Eropa: Lima Area Utama untuk Bertindak diterbitkan pada 17 Juni 2015.

Selanjutnya, beberapa arahan Dewan Uni Eropa dikeluarkan yang sebagian besar berkaitan dengan penghindaran pajak penghasilan perusahaan. Selain itu, beberapa dokumen lebih lanjut juga dibahas yang berfokus pada erosi basis pajak dalam pajak penghasilan pribadi. Di sini, perlu ditekankan Arahan Dewan (EU) 2016/1164 tentang Penghindaran Pajak, yang mulai berlaku pada 12 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Arahan ATAD (Arahan Anti-Penghindaran Pajak). Arahan ini mengatur, antara lain, hal-hal berikut: pajak keluar, pajak keluar, aturan anti-penyalahgunaan umum (GAAR), dan aturan CFC serta perhitungan pendapatan dan ketidaksesuaian hibrida mereka. Beberapa arahan dikeluarkan untuk meningkatkan pertukaran informasi. Yang pertama adalah Arahan Dewan 2011/16/EU tentang kerja sama administratif di bidang perpajakan, juga disebut sebagai DAC. Arahan Dewan 2014/107/EU (dikenal sebagai DAC2) diadopsi pada 9 Desember 2014, yang secara signifikan memperluas cakupan pertukaran informasi otomatis wajib di bidang perpajakan. Perlu juga disebutkan Arahan Dewan (UE) 2016/2258 tanggal 6 Desember 2016 (DAC5), yang – tidak seperti arahan yang disebutkan di atas – tidak memperluas cakupan pertukaran informasi otomatis tetapi memberikan akses ke informasi kepemilikan manfaat bagi otoritas pajak berdasarkan aturan anti pencucian uang. Tindakan lain yang dikeluarkan sebagai bagian dari paket anti penghindaran pajak adalah Arahan Dewan (UE) 2018/822 tanggal 25 Mei 2018, yang mengubah Arahan 2011/16/UE. Instrumen hukum tersebut memperkenalkan kewajiban untuk melaporkan pengaturan perencanaan pajak lintas batas (Aturan Pengungkapan Wajib (selanjutnya disebut MDR)) kepada otoritas pajak, yang juga dapat relevan untuk penghindaran pajak penghasilan pribadi.

Semua tindakan tersebut mungkin telah mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terutama oleh wajib pajak penghasilan pribadi. Persaingan pajak yang tinggi, mobilitas



modal, dan saat ini, mobilitas tenaga kerja menunjukkan bahwa tidak ada tujuan bersama di antara negara-negara anggota OECD.

Hal ini menunjukkan berkurangnya minat pada pajak penghasilan pribadi dan paling banter – pada penggelapan pajak. Penghindaran pajak atas pajak yang tinggi masih diperbolehkan secara hukum.

12.2 KETIDAKADILAN PAJAK DALAM SISTEM PPH SCHEDULAR

Dalam sebagian besar sistem pajak modern, pajak penghasilan dibebankan kepada individu dan badan hukum, serta kepada beberapa entitas tanpa badan hukum. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus wajib pajak penghasilan badan usaha, situasi pribadi wajib pajak tidak relevan; dengan demikian, tidak dibenarkan untuk membedakan beban pajak. Karena alasan ini, saat ini, perpajakan penghasilan mengambil bentuk perpajakan terpisah atas penghasilan orang perseorangan dan badan usaha.

Pajak penghasilan tidak hanya memiliki fungsi fiskal yang penting, tetapi yang terpenting digunakan untuk redistribusi pendapatan dan stimulasi fenomena yang diinginkan. Dengan demikian, pajak penghasilan juga dimaksudkan untuk melayani prinsip keadilan pajak dengan lebih baik. Itulah mengapa unsur personalisasi sangat penting, yang memengaruhi tidak hanya besaran tarif pajak (skala pajak), tetapi juga besaran beban pajak akhir, yaitu setelah menerapkan keringanan pajak, pengecualian, dan aturan pajak penghasilan preferensial lainnya. Penyesuaian besaran beban pajak dengan situasi pribadi wajib pajak dicapai dengan memperkenalkan solusi seperti jumlah bebas pajak atau menjadikan besaran pajak bergantung pada sumber penghasilan.

Pajak penghasilan modern ditandai dengan kompleksitas yang cukup besar. Secara khusus, banyaknya tujuan pengenaan pajak penghasilan pribadi telah mengakibatkan diperkenalkannya banyak pengecualian dan keringanan pajak (misalnya, keringanan pro-keluarga, amal, pendidikan, atau tunjangan penitipan anak). Peraturan ini menjadi tidak dapat dipahami tidak hanya bagi wajib pajak sendiri, tetapi bahkan bagi entitas yang secara profesional menangani konsultasi pajak. Dalam sistem yang berbasis pada penilaian pajak sendiri, risiko yang terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang benar dialihkan kepada wajib pajak. Kemungkinan perubahan domisili pajak juga memengaruhi keberadaan persaingan pajak, khususnya mengingat kemudahan perubahan domisili di dalam Negara Anggota Uni Eropa. Selain itu, salah satu ciri pajak penghasilan modern adalah fenomena penghindaran dan penggelapan pajak.

Di negara-negara OECD, kita dapat membedakan dua sistem dasar perpajakan penghasilan pribadi. Dalam model cedular (juga disebut analitis), kategori pendapatan individu ditetapkan ke dalam kategori yang berbeda (disebut cedula), yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam sistem global (juga disebut sintetis), total pendapatan dikenakan pajak tanpa memandang sumber pendapatannya. Biasanya, ini adalah perpajakan progresif.

Sistem pajak penghasilan yang berlaku di berbagai negara merupakan modifikasi dari model perpajakan sintetis yang telah dikembangkan, yang membebani jumlah pendapatan wajib pajak dan pendapatan analitis, dalam bentuk beberapa pajak yang dikenakan pada



masing-masing sumber pendapatan. Pada abad ke-20, sistem umum (global) mendominasi, tetapi banyak negara memodifikasi sistem mereka ke arah lain. Secara khusus, perpajakan atas total pendapatan dengan tarif progresif ditinggalkan, prinsip perpajakan pendapatan dari pekerjaan dan modal dibedakan, dan aturan perpajakan yang lebih menguntungkan diperkenalkan untuk banyak sumber pendapatan.

Dengan mempertimbangkan pendekatan perpajakan pendapatan dari pekerjaan dan modal, dapat dibedakan dua jenis pajak penghasilan pribadi. Yang pertama berlaku untuk semua pendapatan dari berbagai sumber yang biasanya dikenakan tarif progresif. Dalam model kedua, tarif proporsional berlaku untuk pendapatan dari modal, dan tarif progresif – untuk pendapatan dari pekerjaan. Di negara-negara yang telah mengadopsi model sintetis perpajakan pendapatan pribadi, pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan terpisah. Dasar pengenaan pajak adalah pendapatan bersih tahunan dari berbagai sumber, salah satunya adalah remunerasi yang diperoleh berdasarkan kontrak kerja. Dalam sistem lain, misalnya di Jerman, pajak penghasilan terdiri dari tiga bagian bentuk perpajakan yang terpisah, di antaranya adalah pajak gaji. Ini bukan kategori pajak terpisah atau pajak independen, melainkan pembayaran di muka pajak penghasilan.

Dalam beberapa sistem, pendapatan dari pekerjaan tidak dipisahkan sebagai sumber pendapatan terpisah. Aturan khusus diberlakukan di Belgia, di mana pendapatan dari hubungan kerja bukanlah sumber pendapatan terpisah. Namun, pendapatan tersebut termasuk dalam sumber yang disebut "pendapatan yang diperoleh", yang juga mencakup pendapatan, antara lain, dari operasi bisnis atau dari pelaksanaan profesi liberal.

Solusi berbeda telah diberikan dalam sistem pajak di negara-negara dengan "model pajak penghasilan ganda". Sistem pajak penghasilan seperti itu pertama kali diperkenalkan di negara-negara Nordik. Namun, tampaknya sistem pajak ini semakin umum. Negara-negara ini mengenakan pajak penghasilan dari pekerjaan secara terpisah dari penghasilan dari modal dan terkadang sumber lain. Di bawah sistem ini, pendapatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu "pendapatan yang diperoleh" (di Denmark disebut "pendapatan pribadi") dan "pendapatan modal". Pada prinsipnya, pendapatan dari pekerjaan akan termasuk dalam kelompok pertama dan dikenakan pajak dengan tarif progresif, berbeda dengan pendapatan modal yang dikenakan pajak dengan tarif tetap.

Di negara-negara di mana solusi didasarkan pada model pajak cedular, solusi lain diadopsi. Sebagai contoh, Belanda memiliki "sistem kotak". Sumber pendapatan dibagi menjadi tiga kategori dan dikenakan pajak terpisah berdasarkan aturan yang berbeda. Pendapatan dari pekerjaan termasuk dalam kategori pertama, "pendapatan dari pekerjaan dan tempat tinggal". Dalam kategori ini, pendapatan dikenakan pajak dari, antara lain, aktivitas bisnis dan pendapatan yang diperoleh dari penyewaan real estat. Dua kategori lainnya terdiri dari pendapatan dari keuntungan modal dan bunga tabungan. Namun, pajak dihitung berdasarkan total pendapatan dari semua kategori pendapatan.

Solusi serupa telah diadopsi di Polandia dengan memisahkan sumber pendapatan, yang untuknya ditetapkan aturan yang berbeda untuk menghitung pendapatan. Namun, hanya beberapa di antaranya yang digabungkan untuk tujuan perpajakan bersama. Beberapa kotak



dikenakan pajak dengan tarif progresif, yang lain – proporsional; namun, untuk beberapa, dasar pajaknya adalah pendapatan. Selain itu, jenis pendapatan tertentu digabungkan untuk menghitung dasar pajak untuk tarif pajak tambahan, yang dikenal sebagai pungutan solidaritas.

Masing-masing solusi ini dapat dinilai secara berbeda karena penerapan prinsip keadilan pajak. Pajak cedular dapat mengarah pada distribusi beban pendapatan yang lebih merata dari berbagai sumber. Dimungkinkan untuk menyesuaikan elemen struktural serta teknik pengukuran dan pengumpulan dengan jenis pendapatan. Namun, dalam situasi seperti itu, aspek yang berkaitan dengan wajib pajak tidak diperhitungkan sehubungan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh mereka dari berbagai sumber. Hal ini dapat menyebabkan penentuan beban pajak tanpa memperhitungkan pendapatan global, yaitu, kemampuan wajib pajak untuk membayar. Selain itu, pembuat undang-undang dapat secara sewenang-wenang membagi pendapatan ke dalam berbagai sumber dan kemudian membedakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Secara khusus, ia dapat membedakan tarif untuk pendapatan dari kerja, kekayaan, dan modal. Karena alasan ini, sistem ganda atau, "sistem kotak", melanggar dasar-dasar prinsip keadilan pajak, baik secara horizontal maupun vertikal. Perbedaan jumlah beban pajak hanya disebabkan oleh perbedaan sumber pendapatan dan tidak terkait dengan situasi individu wajib pajak.

Karena kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan, model pajak penghasilan umum lebih bermanfaat untuk penerapan prinsip keadilan pajak. Hanya penentuan pendapatan global wajib pajak yang dapat menjadi penentu kemampuan wajib pajak untuk membayar. Hal ini dapat memastikan pengenaan pajak yang sama kepada orang-orang dalam situasi yang sama.

Keuntungan penting dari model pajak penghasilan umum adalah transparansi yang lebih besar dari aturan pajak penghasilan. Tidak diragukan lagi, ini membatasi distribusi beban pajak yang tidak merata sebagai akibat dari klasifikasi pendapatan yang berbeda ke sumber pendapatan yang sesuai.

Penolakan model umum pajak penghasilan murni dikondisikan oleh pertimbangan lain selain memastikan distribusi beban pajak yang universal dan adil. Secara khusus, karakteristiknya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah, biasanya linier, terhadap pendapatan dari modal. Hal ini biasanya dibenarkan oleh ciri khas modal, yaitu mobilitasnya. Oleh karena itu, kelemahan terbesar dari jenis pajak penghasilan ini terlihat, yaitu kemudahan menghindari atau mengurangi beban pajak.

Bukan hanya model perpajakan itu sendiri yang relevan untuk menentukan apakah pajak penghasilan memastikan implementasi prinsip keadilan pajak. Sama pentingnya untuk membentuk institusi pajak ini. Salah satu elemen struktural terpenting di bidang pajak penghasilan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Bagaimana model ini dibangun memengaruhi jumlah beban pajak efektif. Jika pembuat undang-undang mengecualikan sejumlah besar biaya dari biaya yang dikeluarkan untuk tujuan memperoleh pendapatan, meskipun tarif pajaknya rendah, jumlah efektifnya akan lebih tinggi. Hal ini juga dapat membatasi jumlahnya atau memperkenalkan penyelesaian sekaligus.



Faktanya, semua sistem perpajakan penghasilan individu menyediakan berbagai jenis pengecualian pajak, dan sebagian besar menyediakan pengecualian keluarga. Selain itu, di negara-negara Eropa, terdapat sistem keringanan pajak yang luas dalam pajak penghasilan pribadi. Keringanan tersebut dapat bersifat pro-keluarga, sosial, investasi, atau murni teknis.

Dengan mengambil tarif pajak yang diterapkan sebagai kriteria dalam pajak penghasilan, kita dapat membedakan antara sistem perpajakan progresif dan proporsional di mana pajak tetap telah diperkenalkan. Dalam kasus pajak progresif, jumlah tarif dan jumlahnya dapat sangat bervariasi. Misalnya, di Luksemburg, terdapat 17 tarif pajak yang ditetapkan dalam penyusunan pajak penghasilan pribadi.

Terlepas dari perbedaan mendasar dalam sistem pajak masing-masing Negara Anggota OECD, kita dapat menyimpulkan bahwa semua sistem tersebut dicirikan oleh kebebasan untuk membentuk basis pajak, dan kemudian jumlah tarif pajak untuk berbagai pos pendapatan. Pada saat yang sama, pendapatan dari pekerjaan dan aktivitas pribadi dikenakan pajak tertinggi, biasanya secara progresif, sedangkan pendapatan dari modal dikenakan pajak tetap dengan tarif yang lebih rendah. Akibatnya, pajak penghasilan tidak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar, dan penetapan pajak merupakan hasil dari keputusan sewenang-wenang otoritas politik.

12.3 PAJAK PENGHASILAN PRIBADI – PENEKANAN POLITIK YANG KUAT

Pajak penghasilan adalah hasil dari keputusan politik berikut: berapa tarif pajak yang seharusnya (terutama seberapa kuat progresi pajaknya), siapa yang berhak atas pajak tarif tetap, apa saja pengecualian dan pengurangan pajak yang seharusnya, tunjangan bebas pajak, dan banyak lainnya. Tanpa pajak penghasilan, administrasi pajak akan jauh lebih kecil, dan penasihat pajak akan kehilangan sebagian besar pekerjaan mereka. Bagi semua kelompok ini, semakin rumit sistemnya, semakin baik. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar untuk tetap menjadi pemain penting dalam pembentukan dan kemudian penerapannya melalui interpretasi dan penegakan hukum.

Keputusan politik dan keutamaan fungsi fiskal mengakibatkan pelanggaran terhadap universalitas perpajakan, tetapi di atas segalanya prinsip kesetaraan, dan akibatnya prinsip perpajakan yang adil atas pendapatan yang sama. Para legislator di semua negara OECD secara bebas membentuk elemen struktural pajak penghasilan pribadi. Tentu saja, sistem individual menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi kita dapat menunjukkan setidaknya beberapa fitur umum yang penting.

Pertama, para legislator secara sewenang-wenang membentuk elemen struktural pendapatan. Dalam hal subjek, mereka secara bebas menentukan aturan perpajakan dari sumber-sumber individual (misalnya, pemegang saham berbagai jenis perusahaan). Selanjutnya, dalam lingkup materiil, mereka membedakan prinsip-prinsip perpajakan penghasilan untuk berbagai jenis sumber pendapatan. Sulit untuk menentukan kriteria apa yang digunakan untuk memisahkan sumber pendapatan individual dan menggabungkannya menjadi kelompok-kelompok individual, dan kemudian apakah ada justifikasi untuk menetapkan aturan perpajakan yang berbeda. Namun, ada kecenderungan pengenaan pajak



yang lebih tinggi, bahkan progresif, terhadap penghasilan dari pekerjaan sendiri, dan pengenaan pajak linier atau bahkan preferensial terhadap modal.

Sebagai konsekuensi dari pemisahan sumber pendapatan yang sewenang-wenang, pembuat undang-undang secara bebas menciptakan aturan yang berbeda untuk penyelesaian biaya pajak, dan untuk beberapa jenis pendapatan, ia menetapkan penyelesaian biaya preferensial (dipilih untuk) dan untuk yang lain diskriminatif (penghasilan dari pekerjaan).

Selanjutnya, pembuat undang-undang secara bebas membedakan besaran tarif pajak untuk masing-masing jenis sumber pendapatan, termasuk menetapkan pengenaan pajak tarif tetap. Selain itu, hanya jenis pendapatan tertentu yang dikenakan pajak secara progresif, tetapi juga dasar pajak untuk pungutan solidaritas tidak mencakup semua jenis pendapatan (misalnya dari dividen). Terakhir, pemberian pengecualian pajak tertentu, terutama ketika bersifat diskriminatif, sangat dipertanyakan.

Dalam membentuk elemen struktural pajak, para legislator tidak menghormati prinsip keadilan pajak. Sulit untuk menemukan informasi bahwa analisis semacam itu pernah dilakukan dalam proses legislatif. Dampak dari keputusan politik yang diskresioner adalah bahwa pajak penghasilan pribadi tidak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk membayar, dan penilaian pajak merupakan hasil dari hal-hal berikut: keputusan sewenang-wenang dari legislator, jenis sumber pendapatan, kemungkinan perencanaan pajak yang sah, dan bahkan jenis pekerjaan atau pendidikan yang dilakukan (profesi yang disukai). Dengan demikian, pajak penghasilan pribadi ditandai dengan pelanggaran berat terhadap prinsip pajak yang sama, yaitu keadilan pajak, bahkan dalam pengaturan horizontal.

Semua pajak dipungut oleh legislator, yaitu oleh kekuasaan politik. Namun, pajak penghasilan pribadi merupakan hasil dari berbagai perselisihan politik, seringkali akibat demagogi dan populisme. Bahkan Partai Sosial Demokrat, dengan menyerukan pajak progresif, yang seringkali mendekati pajak penyitaan, tidak menunjukkan kepada para pemilih dampak nyata dari keputusan-keputusan ini – pajak yang lebih tinggi dibayarkan oleh orang-orang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan pribadi yang tidak mampu atau tidak ingin menghindari pajak tersebut.

12.4 KETIMPANGAN BEBAN PAJAK DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Dalam situasi konflik kepentingan antara individu dan kepentingan publik, perselisihan adalah hal yang wajar, tetapi juga ada upaya untuk menghindari pajak. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh alasan moral, politik, ekonomi, dan teknis. Perlu dicatat bahwa tidak ada kesepakatan umum tentang perubahan fungsi perpajakan termasuk, khususnya, peningkatan besar dalam pentingnya fungsi redistributif dan pembiayaan kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penolakan dari orang-orang yang, menurut pendapat mereka, membayar pajak publik yang tidak adil. Namun, reaksi serupa dapat terjadi akibat pengenaan pajak yang sama kepada semua wajib pajak, contohnya adalah upaya untuk memperkenalkan apa yang disebut pajak kepala (poll tax). Tentu saja, perasaan ini mungkin subjektif, tetapi kita telah melihat perpajakan progresif dalam sejarah yang bersifat menyita. Dalam situasi seperti



itu, ada persetujuan sosial untuk penghindaran pajak, terutama pajak langsung. Terlebih lagi karena keengganan psikologis untuk membayar pajak terletak pada sifat setiap manusia.

Perlu juga ditekankan bahwa tarif pajak yang sangat efektif, yaitu, baik pembentukan basis pajak yang salah maupun progresi pajak, memengaruhi penerimaan psikologis terhadap penghindaran pajak. Pada saat yang sama, peluang untuk menghindari pajak tersebut semakin sedikit bagi orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber-sumber seperti kontrak kerja, penunjukan, atau aktivitas yang dilakukan secara pribadi. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan bisnis oleh para profesional yang "lebih baik", di mana kemungkinan optimalisasi atau pelarian ke zona abu-abu jauh lebih besar. Perlu juga diingat bahwa orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber-sumber tersebut tidak dapat mengakumulasi modal dan mengembangkan kegiatan bisnis mereka dengan pembentukan basis pajak dan progresi pajak yang salah. Secara khusus, ketika progresi ini berubah menjadi pajak yang bersifat menghukum (misalnya, pajak 75%), hal itu menyebabkan migrasi massal para penerima pendapatan tertinggi dan dengan demikian erosi basis pajak.

Sayangnya, bahkan di abad ke-21, kita masih dapat mengamati pandangan mengenai legitimasi pajak yang bersifat menyita. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan ketidaktahuan yang terang-terangan tentang metode penghindaran pajak modern. Jelas juga bahwa kemungkinan, tetapi juga keinginan psikologis untuk menghindari pajak "hukuman", yaitu, menyita pendapatan "di atas standar", meningkat seiring dengan peningkatan basis pajak dan tarif pajak. Justru perpajakan represif semacam itulah yang menyebabkan penghindaran pajak oleh kelompok sosial berpenghasilan tinggi.

Perilaku seperti itu juga dapat didorong oleh persaingan pajak yang merugikan antar negara, termasuk Negara Anggota Uni Eropa. Selama beberapa dekade, pasar konsultasi orang kaya telah berkembang pesat, yang tujuannya adalah untuk menggunakan surga pajak dan kerahasiaan perbankan untuk menyembunyikan pendapatan yang dihasilkan dari operasi ilegal, tetapi juga pendapatan orang kaya yang tidak menerima tarif pajak tinggi. Selain itu, sangat sering hal itu sudah merupakan penghindaran pajak ilegal.

Saat ini, kerja sama administrasi pajak sangat maju sehingga penghindaran pajak menjadi sangat sulit, dan tentu saja tidak menarik. Tidak hanya risiko mendeteksi praktik tersebut sangat tinggi, tetapi hukuman untuk kejahatan tersebut telah meningkat berkali-kali. Di kalangan orang kaya, apa yang disebut migrasi pajak telah menjadi cukup meluas. Perubahan tempat tinggal atau kantor terdaftar untuk mengurangi atau menghilangkan pajak sepenuhnya, terutama pajak penghasilan, berlaku tidak hanya untuk orang perseorangan tetapi juga untuk badan hukum. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari persaingan pajak yang merugikan antar negara, termasuk Negara Anggota Uni Eropa. Namun, jika terjadi perubahan tempat tinggal pajak yang nyata, itu bukanlah tindakan ilegal, tetapi mengakibatkan terkikisnya basis pajak di negara asal migrasi tersebut. Banyak negara telah memperkenalkan solusi yang menguntungkan bagi orang-orang yang berpenghasilan tinggi, terutama dari modal. Tentu saja, kriteria pajak tidak harus menjadi satu-satunya alasan untuk mengubah tempat tinggal karena semakin sering hal itu juga dipengaruhi oleh standar hidup di negara tertentu atau keamanan orang kaya.



Pada saat yang sama, individu (keluarga) tidak dapat dicabut haknya untuk bergerak bebas, termasuk pilihan tempat tinggal tetap. Namun, jika terjadi perubahan tempat tinggal pajak yang nyata, basis pajak terkikis di negara dengan tingkat pajak yang lebih tinggi. Ada banyak persaingan pajak, bahkan di antara negara-negara Eropa. Tidak hanya Swiss, tetapi juga Portugal, Italia, Yunani, dan bahkan Polandia, yang menerapkan pajak tarif tetap bagi orang yang mengubah tempat tinggal dan memperoleh penghasilan dari sumber di luar negara tersebut.

Di sebagian besar Negara Anggota OECD, pendapatan dari modal sudah dikenakan pajak lebih rendah (langsung) di bawah sistem nasional, tetapi sekarang, sebagai hasil dari persaingan pajak internasional, pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak dengan tarif tetap dan seringkali mendapat manfaat dari tidak dikenakan pajak di negara mana pun.

12.5 RINGKASAN

Namun, sebagian besar wajib pajak tidak menyadari betapa singkatnya sejarah pengenaan pajak penghasilan pribadi, terutama mengenai tarif tinggi, dengan fokus khusus pada progresi pajak. Generasi baru lahir di dunia yang didominasi oleh pesan tentang pentingnya perpajakan, terutama penghasilan tinggi, dan kebutuhan untuk meratakan pendapatan ini, dan akhirnya mengurangi ketidaksetaraan melalui redistribusi pendapatan yang adil. Pajak penghasilan telah menjadi sesuatu yang wajar, dan diskusi tentang perlunya perpajakan yang adil telah menjadi agenda pertemuan tidak hanya para pengacara atau ekonom, tetapi juga semua warga negara. Mereka yang menganjurkan penghapusan pajak penghasilan dianggap tidak sesuai dan pandangan mereka merupakan contoh perdebatan yang tidak rasional. Sementara itu, jenis pajak ini tidak hanya jelas tidak adil tetapi juga telah kehilangan fungsi dasarnya, yaitu fungsi redistribusi.

Dengan pajak penghasilan, penentu perpajakan yang adil adalah solvabilitas wajib pajak berdasarkan kriteria pendapatan. Dalam pandangan akademisi dan komentator hukum pajak, aturan "kemampuan membayar" adalah dasar dari prinsip perpajakan yang adil. Legislatif perpajakan harus berupaya menilai situasi pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajak sesuai dengan kemampuan mereka membayar.

Legislatif perpajakan memiliki banyak kebebasan dalam membentuk beban pajak. Namun, hal ini tidak boleh menyebabkan perbedaan yang tidak beralasan di antara situasi wajib pajak, khususnya terkait dengan perbedaan pengenaan pajak terhadap orang-orang dalam situasi yang sama. Hal ini akan mengakibatkan pelanggaran prinsip keadilan pajak.

Pajak penghasilan pribadi cedular justru menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda untuk jumlah penghasilan yang sama. Di semua negara OECD, penghasilan dari pekerjaan dikenakan pajak lebih tinggi daripada penghasilan dari sumber lain, terutama modal. Progresi pajak tidak berlaku untuk orang terkaya, tetapi hanya untuk mereka yang tidak dapat menghindari pajak yang lebih tinggi.

Dalam model pajak penghasilan pribadi saat ini, sumber masalah mendasar adalah konstruksinya. Biasanya memiliki karakteristik perpajakan campuran, tetapi sebenarnya bertujuan pada konstruksi yang sesuai untuk pajak cedular (analitis). Dalam sistem model,



tujuannya adalah untuk mengenakan pajak atas penghasilan global individu. Hal ini akan memungkinkan untuk menentukan kemampuan menanggung beban pajak. Lebih jauh lagi, hal ini juga dapat berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip perpajakan universal dan setara. Hanya untuk pendapatan global, solusi seperti jumlah bebas pajak, pengaturan keluarga preferensial, pengecualian, dan keringanan pajak dapat digunakan. Tidak ada justifikasi untuk menentukan kemampuan membayar berdasarkan pendapatan dari sumber pendapatan tertentu.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak mungkin menerapkan model pajak pendapatan global (sintetis) murni. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, tetapi pertama-tama perlu untuk menunjukkan teknik perhitungan dan pengumpulan pajak. Oleh karena itu, perlu untuk memisahkan sumber pendapatan dan menetapkan prinsip-prinsip penghasilan untuk masing-masing sumber, memperhitungkan biaya perolehannya, dan dengan demikian menghitung pendapatan. Meskipun demikian, konstruksi ini tidak dapat berasal dari keputusan sewenang-wenang dari pembuat undang-undang. Pemisahan cedula individu dan penentuan prinsip-prinsip perhitungan pendapatan untuk masing-masing cedula harus merupakan hasil dari keputusan yang jelas dan beralasan.

Pajak yang lebih tinggi, bahkan progresif, atas kerja mandiri dan transfer sosial tunai langsung berarti bahwa pajak penghasilan pribadi telah kehilangan fungsi redistributifnya. Namun, pajak tersebut masih merupakan instrumen populisme politik. Itulah mengapa para politisi di semua negara OECD menyembunyikan fungsi sebenarnya, yaitu fungsi politik dan sedikit fungsi fiskal. Sudah saatnya sistem pajak penghasilan, terutama untuk individu, ditinjau ulang.

Singkatnya, keputusan politik dan keutamaan fungsi fiskal mengakibatkan pelanggaran terhadap universalitas perpajakan, tetapi yang terpenting adalah prinsip kesetaraan dan, akibatnya, prinsip perpajakan yang adil atas pendapatan yang sama. Pajak, terutama dengan tarif progresif, hanya dibayar oleh mereka yang tidak menginginkannya atau tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, sistem saat ini terutama melayani demagogi politik, dan implementasi fungsi fiskal pajak ini untuk membiayai peningkatan pengeluaran biasanya bersifat sosial. Oleh karena itu, sistem ini harus segera diubah, tetapi para politisi, dan organisasi yang mereka ciptakan, yaitu OECD, tidak akan pernah menerimanya.



BAB 13

MENDANAI GLOBAL COMMONS DI ERA ANTROPOSEN

Jika kita mulai meneliti secara detail puluhan agenda Kesepakatan Hijau secara global, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB secara khusus, dan menindaklanjuti perdebatan selama 50 tahun yang diprakarsai pada tahun 1968 tentang tragedi sumber daya bersama, kita akan menemukan bahwa sekitar dua pertiga dari aset yang kita bahas tidak berkaitan dengan barang pribadi tetapi dengan sumber daya bersama global. Mengingat fakta bahwa sebagian besar kekayaan global kita telah diprivatisasi, dan kita memiliki banyak likuiditas di pasar modal, kita perlu mempertimbangkan dengan cermat bagaimana kita dapat menghasilkan modal yang kita butuhkan tanpa memprivatisasi sisa planet kita. Teks berikut menguraikan rekayasa keuangan dan kebijakan moneter baru untuk mengatasi tantangan ini.

13.1 EKONOMI BERBEDA DI ERA ANTROPOSEN

Konsep lama "kepemilikan bersama" mengacu pada pasar umum yang menjadi milik kita semua. Kepemilikan bersama memberikan hak dan hak penggunaan di satu sisi, sementara di sisi lain membebankan kewajiban dan tanggung jawab. Kepemilikan bersama dapat dikontraskan dengan properti pribadi, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada individu atau perusahaan. Secara global, 85–90% kekayaan kita sudah diprivatisasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh Konsensus Washington tahun 1992, di mana diputuskan untuk memprivatisasi, meliberalisasi, dan menderegulasi planet ini. Namun, ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh meninggalkan prinsip kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama kita memastikan stabilitas politik, membantu mengumpulkan risiko swasta, melindungi dari ketidakpastian sistemik, dan meningkatkan kinerja alokatif masyarakat secara keseluruhan. Jika didanai dan dikelola dengan benar, maka keamanan nasional, sanitasi, perawatan kesehatan, sistem pendidikan, dan cagar alam dapat memberikan dasar yang kuat untuk kekayaan, kemakmuran, keuntungan, dan pertumbuhan berkelanjutan yang lebih besar.

Mungkinkah mekanisme yang selama ini kita gunakan untuk mendanai sumber daya bersama kita hanya berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang stabil dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tata kelola yang kuat, eksternalitas yang rendah, dan interkoneksi minimal? Kita sekarang hidup di era baru, di mana suku bunga nol, utang publik yang tinggi, dan hiperlikuiditas swasta menjadi norma, di mana kesenjangan kekayaan meningkat, di mana kekuatan baru – kapitalisme yang didanai negara Tiongkok – menghancurkan persaingan pasar bebas, dan di mana serangkaian guncangan ekologis (pandemi, pemanasan global, dan hilangnya spesies) telah menantang masyarakat. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini telah secara fundamental mengubah lanskap dalam hal pembiayaan, pendanaan, lindung nilai, dan pengamanan sumber daya bersama (global) kita.

Di era Antroposen, kita telah dihadapkan dengan risiko sistemik yang tidak dapat sepenuhnya diprivatisasi atau diquantifikasi. Hal yang sama berlaku untuk sumber daya, seperti udara segar dan cagar alam, dan tantangan, seperti konsentrasi CO₂ atmosfer,



kelaparan, dan kemiskinan. Pada saat yang sama, kita telah menyaksikan peningkatan kompleksitas dan interkoneksi antara aktivitas lokal dan global, antara ranah pribadi dan profesional, serta antara sektor swasta dan publik. Hal ini sangat relevan sekarang karena kita harus beroperasi dalam batasan planet, yang memaksa kita untuk secara fundamental memikirkan kembali cara kita berbisnis dan menciptakan kekayaan untuk masa depan delapan miliar orang di planet ini. Situasi baru ini memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang seharusnya menjadi "pribadi" dan apa yang seharusnya menjadi "bersama", dan itu berarti kita harus menantang paradigma lama jika kita ingin dapat membiayai, mendanai, dan mengelola semua langkah yang diperlukan.

Kerusakan yang telah kita sebabkan (hilangnya spesies, degradasi lahan, atau perubahan iklim) telah menciptakan dampak eksternal sosial dan ekologis yang besar yang pasti akan meningkatkan biaya kita di masa depan. Dengan kata lain, kita telah menikmati hasilnya dan mencoba melarikan diri tanpa membayar tagihannya. Kita lupa membersihkan dan meninggalkan kekacauan bagi negara-negara di belahan bumi selatan, generasi mendatang, atau alam itu sendiri untuk ditangani. Kita telah menyebabkan kerusakan dan sekarang kita mulai mengalami dampak negatif dalam bentuk peningkatan risiko, kejadian buruk, dan guncangan. Dalam bidang kedokteran, pendekatan yang direkomendasikan di sini dikenal sebagai "pencegahan sekunder"; ada penyakit atau gangguan primer, dan kita harus mencoba meminimalkan penderitaan, biaya, dan kerugian yang akan ditimbulkannya. Jika seorang pasien menderita diabetes, pendekatan pencegahan sekunder mencoba menggunakan pengobatan dan perubahan gaya hidup untuk meminimalkan biaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh diabetes ini. Pendekatan semacam ini diperlukan dalam bidang keuangan, khususnya dalam hal pendanaan dan lindung nilai aset bersama kita.

Pendanaan, lindung nilai, dan pengelolaan aset bersama kita adalah masalah yang sangat sulit. Di satu sisi, sumber daya bersama dapat menghasilkan ROI yang luar biasa sebesar 1:15 atau lebih tinggi jika diimplementasikan dengan benar, sementara di sisi lain, sektor publik mengalami kelebihan utang di sebagian besar negara OECD dan negara berkembang. Selain itu, era Antroposen ditandai oleh ketidakpastian dan guncangan asimetris. Hal ini mempersulit mobilisasi triliunan likuiditas sektor swasta dan menghasilkan triliunan tambahan dari sektor publik yang dibutuhkan untuk sumber daya bersama global kita. Saat ini tidak ada skema perpajakan yang koheren di mana pun di dunia yang mampu mendanai sumber daya bersama kita, melindungi dari risiko terkait, dan/atau mengarahkan perekonomian kita secara keseluruhan menuju masa depan yang lebih hijau. Selain itu, skema perpajakan apa pun, baik itu pajak kekayaan atau warisan, pajak pertambahan nilai, pajak tenaga kerja, atau pajak perusahaan, akan selalu menarik likuiditas dari rantai nilai, yang sangat dibutuhkan untuk membiayai transisi hijau itu sendiri.

Sekalipun kita melakukan uji stres, mempertimbangkan taksonomi ESG baru, akuntansi standar, filantropi, dan amal, intervensi yang lebih linier ini terlalu lambat dan terlalu kecil dalam hal volume untuk membangunkan raksasa yang tertidur. Dengan pendekatan tradisional ini, keuangan masih menggerakkan sumber daya bersama kita. Seharusnya sebaliknya; sumber daya bersama kita yang menggerakkan keuangan. Pertama, kita harus mulai berpikir berbeda



tentang bagaimana mengamankan sumber daya bersama kita. Dua tugas pendanaan sumber daya bersama dan pengurangan risiko ketidakpastian sistemik untuk memobilisasi triliunan likuiditas sektor swasta saling terkait, tetapi keduanya membutuhkan pendekatan baru terhadap uang dan keuangan. Alih-alih intervensi linier dan proporsional (subsidi, perpajakan) atau dinamis (materialitas ganda, lingkaran umpan balik, dan penundaan), kita harus mulai berpikir dengan cara yang lebih kompleks dan mempertimbangkan perubahan paradigma moneter untuk mengamankan sumber daya bersama kita (lihat Gambar 13.2).

13.2 KEPEMILIKAN BERSAMA SEBAGAI KONVENSI SOSIAL

Secara tradisional, kita mendefinisikan kepemilikan bersama kita sebagai barang atau jasa yang tidak dapat dikecualikan, mudah digunakan secara berlebihan atau diabaikan, dan menyebabkan banyak efek penumpang gelap yang pada akhirnya merusak aset bersama kita. Tetapi pandangan ini tidak lengkap dan menyesatkan. Kepemilikan bersama bukanlah suatu benda atau hukum alam, melainkan sebuah konvensi, seperti kontrak pernikahan, aturan klub, atau kode hukum yang mengatur penggunaan atau akses kita terhadap barang atau jasa tertentu. Kita, sebagai masyarakat, menentukan apakah suatu barang atau jasa menjadi milik bersama atau pribadi, tergantung pada sifat barang atau jasa yang bersangkutan, dengan penentuan ini diatur oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini juga berlaku untuk udara segar, konservasi spesies, atau akses ke perawatan kesehatan, pendidikan prasekolah, atau informasi pribadi di platform digital. Oleh karena itu, kita dapat memberikan definisi berikut:

Kepemilikan bersama (sosial atau alami) adalah hak, layanan, atau aset yang dapat diakses oleh semua orang, dan diatur oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat. Tergantung pada sifatnya, barang dan jasa bersama dapat berskala lokal, regional, nasional, atau global.

Terdapat beberapa karakteristik yang memungkinkan kita untuk membedakan antara barang dan jasa bersama dan barang atau jasa pribadi. Pada bagian selanjutnya dari bab ini, saya akan menyebut karakteristik ini sebagai "enam ciri" dari barang dan jasa bersama kita.

1. *Barang atau jasa yang tidak dapat diperdagangkan*: Secara umum, barang dan jasa bersama mungkin memiliki label harga untuk tujuan akuntansi dan dokumentasi; namun, barang dan jasa tersebut tidak boleh dapat diperdagangkan seperti halnya barang dan jasa pribadi.
2. *Mencakup kebutuhan dasar*: Barang dan jasa bersama mencakup kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan keamanan, tetapi tidak mencakup barang dan jasa mewah (posisional), seperti kolam renang, SUV, atau tukang kebun.
3. *Efek batas atas*: Salah satu perbedaan yang paling mencolok dari barang pribadi, yang memiliki kapasitas intrinsik untuk pertumbuhan tanpa batas, adalah bahwa barang dan jasa bersama merupakan tujuan itu sendiri. Kita dapat memiliki mobil, aset, kolam renang, dan rumah tanpa batas dalam kepemilikan pribadi, tetapi sifat barang dan jasa bersama adalah bahwa mereka memiliki batas atas. Setelah perlindungan



keanekaragaman hayati tercapai, pemanasan global terkendali, akses universal terhadap layanan kesehatan terorganisir, dan pendidikan prasekolah tersedia untuk setiap anak, maka sumber daya bersama ini lengkap. Dengan kata lain, kita dapat secara pribadi mengumpulkan lusinan SUV, kolam renang, lukisan, dan perhiasan, tetapi begitu kita menyediakan akses ke tempat penitipan anak, layanan kesehatan kolektif, pendidikan tinggi, keamanan, dan tempat tinggal, pekerjaan selesai.

4. *Ekonomi regeneratif*: Setelah diterapkan dan semua orang memiliki akses ke sana, sumber daya bersama membutuhkan mekanisme untuk memperbaiki, mendaur ulang, memelihara, memperbarui, mengganti, dan menggunakannya kembali berulang kali. Sementara itu, barang pribadi pada dasarnya dapat disimpan, diganti, diperdagangkan, dan dikumpulkan tanpa batas. Barang bersama bersifat sirkular dan regeneratif. Barang bersama adalah sarana untuk mencapai tujuan dan tidak memaksa komunitas untuk tumbuh guna mempertahankan status mereka. Sebaliknya, barang pribadi melibatkan proses akumulatif yang berkelanjutan dari pertumbuhan linier, eksponensial, dan tak terbatas serta keinginan yang tak terpuaskan. Singkatnya, udara segar dan bersih akan selalu tetap segar dan bersih, dan bersekolah di tempat penitipan anak akan selalu hanya bersekolah di tempat penitipan anak. Setelah kita semua memiliki udara segar dan bersih dan semua anak memiliki akses ke pendidikan prasekolah, maka sumber daya bersama ini telah tercapai. Hal yang sama berlaku untuk hak atas pendapatan dasar universal, akses ke air dan energi bersih, dan semua hak asasi manusia dasar.
5. *Keuangan publik*: Karena sumber daya bersama adalah milik semua orang, pembiayaan dan pendanaan sumber daya bersama kita sangat penting. Secara tradisional, sumber daya bersama selalu bergantung pada sumber pendanaan swasta – pajak, biaya, filantropi, dan ekuitas swasta. Secara historis, sumber daya bersama (global) karenanya selalu kekurangan dana. Akibatnya, hal ini membutuhkan instrumen keuangan yang berbeda.
6. *Kode hukum publik*: Sedangkan barang dan jasa privat diatur di bawah kode hukum privat, barang dan jasa bersama dikelola bersama oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penilaian risiko, kewajiban, dan akuntabilitas yang terkait mengikuti kode hukum publik.

Ciri khas dari barang dan jasa bersama bukanlah sifat non-rivalnya, karena hal itu juga berlaku untuk beberapa barang dan jasa pribadi. Misalnya, jika setiap orang memiliki sikat gigi, maka setiap orang memiliki akses ke sikat gigi; namun, barang dan jasa tersebut tetap merupakan barang pribadi. Baik efek penumpang gelap maupun efek bahaya moral bukanlah hal yang eksklusif bagi barang dan jasa bersama; barang pribadi, secara umum, menunjukkan efek ini dalam bentuk eksternalitas negatif. Sebaliknya, yang membedakan barang dan jasa bersama kita adalah "enam fitur" yang dijelaskan sebelumnya.

Jika suatu barang atau jasa tidak dapat diperdagangkan, memenuhi kebutuhan dasar, memiliki batasan, memicu aktivitas ekonomi regeneratif, didanai dan dikelola melalui sumber yang berbeda dari modal swasta, dan diatur oleh hukum publik

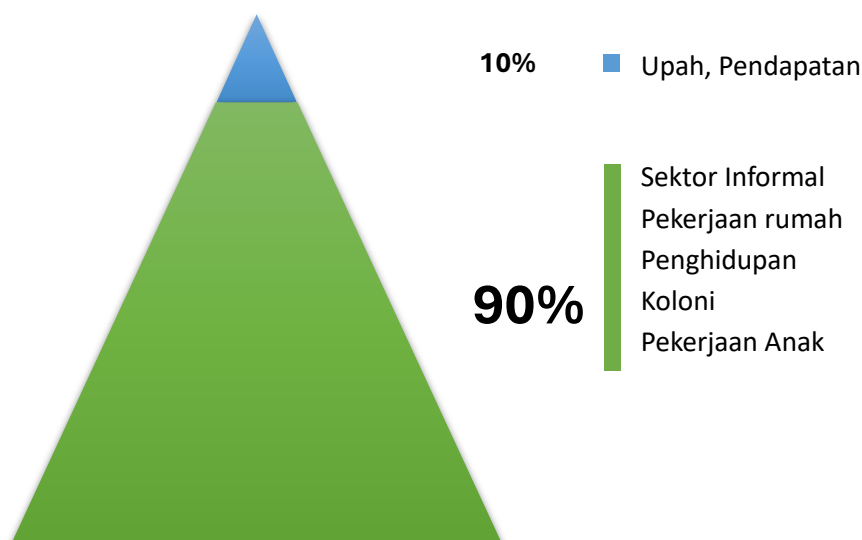


daripada hukum swasta, maka kita dapat menggambarkan sebagai barang dan jasa bersama.

Yang lebih mencolok lagi adalah bahwa sebagian besar barang dan jasa bersama memiliki ROI (Return on Investment) yang mengesankan. Jika kita mengambil SDGs PBB sebagai pembahasan kasus, untuk setiap dolar yang dibelanjakan, pengembalian rata-rata aritmatika adalah Rp150 ribu, yang hingga 100 kali lebih besar daripada ROI pada saham S&P (pengembalian tahunan 10%) atau surat utang negara (pengembalian tahunan 3–5%). Ini berarti bahwa investasi Rp1 kuadriliun dalam barang publik menghasilkan Rp15 kuadriliun barang sosial dan ekologis yang setara, manfaat setidaknya 10–15 kali lebih besar daripada dolar yang diinvestasikan awalnya – untuk kita semua. Inilah saatnya kita mulai membangunkan raksasa yang tertidur.

Ada perbedaan signifikan tambahan antara barang pribadi dan barang publik. Barang publik merupakan prasyarat untuk barang pribadi, bukan sebaliknya. Itu berarti sektor swasta hanya dapat melepaskan potensi penuhnya ketika barang publik yang dibutuhkan telah tersedia dengan benar. Jika kita mengakui bahwa barang publik merupakan prasyarat dari setiap inisiatif swasta, maka kita perlu melihat lebih dekat dan serius bagaimana cara membiayainya. Membiarkan raksasa yang tertidur ini terus tertidur berarti kita tidak memanfaatkan potensi penuh dari sumber daya bersama kita maupun sektor swasta kita. Secara ekonomi, kita tetap berada dalam keseimbangan Pareto-inferior dengan kekayaan yang lebih rendah, produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah, serta biaya sosial dan ekologis yang lebih tinggi. Gambar 13.1 mengilustrasikan hal ini.

Mengingat bahwa barang dan jasa bersama berbeda dari barang dan jasa swasta dalam banyak hal,¹⁴ maka perlu didanai, dikelola, dan dilindungi secara berbeda. Sebelum kita mengusulkan instrumen moneter baru, kita harus melihat cara kita melakukan sesuatu secara tradisional. Tabel 13.1 merangkum fitur-fitur pembeda dari sumber daya bersama global kita.



Gambar 13.1 Efek gunung es: sumber daya bersama merupakan prasyarat untuk barang-barang swasta, bukan sebaliknya. Secara tradisional, pekerja anak, koloni, alam, dan sektor



informal seringkali berfungsi sebagai sumber daya bersama ilegal untuk mendorong upah dan pendapatan swasta.

Tabel 13.1 Ciri-ciri khas dari sumber daya bersama kita.

Linear	Dinamis	Kompleks	Pergeseran Paradigma
Uji stres (<i>Stress tests</i>)	Ikut umpan balik (<i>Feedback loops</i>)	Aturan main (<i>Rules of the game</i>)	Tujuan sistem (<i>Goals of the system</i>)
Perpajakan	Penundaan (<i>Delays</i>)	Barang pribadi vs publik (<i>Private vs common goods</i>)	Nilai-nilai (<i>Values</i>)
Subsidi	Risiko dan ketidakpastian	Mandat Bank Sentral	Rekayasa keuangan baru
Penyesuaian regulasi			

13.3 INEFISIENSI DAN KELEMAHAN METODE TRADISIONAL

Pada tahun 1992, komunitas global memutuskan untuk mengalokasikan 0,7% dari PDB global, yang pada tahun 2023 mewakili sekitar Rp5 kuadriliun per tahun, untuk membiayai barang dan jasa bersama. Sebagian besar negara di dunia belum pernah mencapai target 0,7% ini. Tetapi bahkan jika semua negara berhasil, jumlah ini terlalu rendah untuk membiayai barang dan jasa bersama global kita. Jika kita mengambil SDGs PBB sebagai peta jalan masa depan, sekitar dua pertiga dari tujuan dan target yang disetujui berkaitan dengan barang dan jasa bersama global dan membutuhkan pendanaan sekitar sepuluh kali lebih banyak daripada kesepakatan awal sebesar 0,7% dari PDB. Secara total, kita membutuhkan sekitar tambahan Rp50 kuadriliun per tahun untuk membiayai barang dan jasa bersama global kita.

Cara yang paling umum dianjurkan untuk membiayai barang dan jasa bersama kita adalah apa yang dikenal sebagai pembiayaan bersama. Pembiayaan bersama didasarkan pada prinsip bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan secara bebas di pasar dikenakan pajak, dan pendapatan pajak ini menjadi sumber utama pembiayaan untuk barang publik. Dengan pandangan yang diterima secara luas ini, barang publik bersifat sekunder dan tunduk pada aktivitas pasar bebas. Hanya jika pasar menghasilkan imbal hasil dan likuiditas yang cukup dan kemauan politik cukup kuat, barang publik dapat dibiayai. Dengan kata lain, kita menciptakan dampak negatif dan kekurangan dana untuk barang publik terlebih dahulu, kemudian menerapkan skema pembiayaan ulang yang sebagian mengkompensasi kerusakan tersebut. Kita menarik (pajak, biaya, dan filantropi) atau mengalihkan (ekuitas swasta) likuiditas dari proses ekonomi yang ada untuk membiayai, mendanai, dan mengelola barang publik kita. Dengan pendekatan tarik-ulur ini, di mana uang ditarik dan dialihkan, kita akan selalu berakhir dengan barang publik yang kekurangan dana dan bergantung pada barang dan jasa swasta untuk menyediakan likuiditas yang diperlukan.

Titik Pengungkit untuk Sektor Keuangan

Jika kita melihat persimpangan antara keuangan dan keberlanjutan dari perspektif sistemik, kita akan menemukan bahwa perlu untuk membedakan setidaknya empat titik



pengungkit untuk sektor keuangan. Tabel 13.2 merangkum beberapa intervensi utama yang dapat dilakukan sektor keuangan untuk mengelola sumber daya bersama kita.

Semua intervensi ini memiliki titik pengungkit yang berbeda, seperti yang diilustrasikan oleh Gambar 13.2. Semakin tinggi titik pengungkit, semakin sedikit upaya yang dibutuhkan, tetapi semakin mendasar perubahan yang akan terjadi menuju pencapaian masa depan berkelanjutan bersama. Sebaliknya, semakin rendah titik pengungkit, semakin banyak upaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

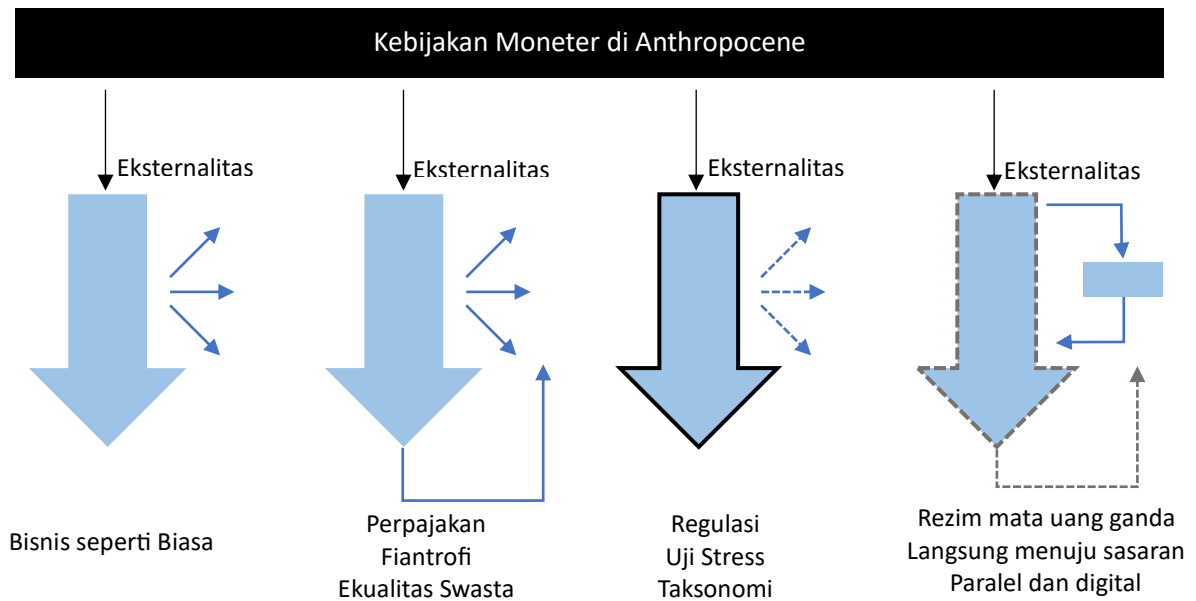
Namun, ekonomi dan keuangan sumber daya bersama berbeda. Dengan demikian, udara segar, akses dasar ke layanan kesehatan, dan keanekaragaman hayati selalu tetap sama, terlepas dari bentuk kegiatan ekonomi kita. Mungkinkah kita menggunakan mekanisme keuangan yang salah untuk masalah bersama yang sebenarnya? Mungkinkah kita perlu memasang mekanisme pendanaan yang berbeda untuk mengamankan sumber daya bersama kita?

Tragedi sebenarnya dari sumber daya bersama kita bukanlah penggunaan berlebihan atau pengabaianya, bukan pula bahaya moral atau efek penumpang gelap, tetapi insentif keuangan yang mendasarinya yang mencegah pasokan yang memadai.

Tabel 13.2 Intervensi utama sektor keuangan untuk mengelola sumber daya bersama kita.

Kategori	Deskripsi
Kebutuhan dasar	Sumber daya bersama mencakup kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, keamanan), bukan barang dan jasa mewah (<i>positional</i>).
Efek plafon	Berbeda dengan barang dan jasa pribadi, sumber daya bersama memiliki batas atas (plafon) setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi.
Regeneratif	Pada tingkat plafon; perbaikan, pembangunan kembali, pemeliharaan, dan restorasi mewakili aspek sirkular dan regeneratif dari ekonomi sumber daya bersama.
Keuangan publik	Pendanaan, lindung nilai (<i>hedging</i>), dan pembiayaan utamanya tidak boleh bergantung pada sumber daya pribadi (filantropi, perpajakan, biaya, hutang, atau ekuitas swasta).
Hukum publik	Penilaian risiko, liabilitas, dan akuntabilitas hukum publik harus mengikuti kode hukum publik, bukan kode hukum pribadi.
Prasyarat	Sumber daya bersama adalah prasyarat bagi aktivitas sektor swasta.
Raksasa tidur	Sumber daya bersama memiliki laba atas investasi yang sangat besar bagi komunitas yang terlibat, jauh melampaui pendapatan kompetitif dari barang dan jasa pribadi.
Tidak dapat diperdagangkan	Sumber daya bersama mungkin memiliki label harga, tetapi secara umum tidak boleh diperdagangkan.





Gambar 13.2 Titik-titik pengungkit bagi sektor keuangan untuk mengelola, mendanai, dan melindungi aset bersama kita: linier, dinamis, kompleks, dan pergeseran paradigma.

Mengingat bahwa uang dan keuangan bukanlah hukum alam tetapi konstruksi sosial, keduanya dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan skema keuangan yang, pertama-tama, menghormati "enam faktor" aset bersama kita, yaitu enam faktor yang membedakannya dari barang dan jasa pribadi. Hal ini kemudian akan memungkinkan kita untuk mendanai, melindungi, dan mengelola aset bersama kita secara memadai. Kontrak sosial baru semacam ini dijelaskan di bagian selanjutnya. Tujuannya bukanlah untuk merumuskan arsitektur keuangan ideal-tipikal seperti eksperimen baru, tetapi lebih untuk menetapkan langkah terbaik selanjutnya yang berbasis bukti untuk membiayai aset bersama kita dalam 15-20 tahun ke depan.

13.4 TRIANGULASI STRATEGIS YANG RAMAH

Secara tradisional, kita menganggap pasar bebas dan intervensi negara sebagai hal yang berlawanan, dengan penyebut umum terkecil memberikan hasil terbaik. Namun, pada akhirnya kita berakhir dengan pasar yang terlalu diatur dan lembaga publik yang terlalu banyak berutang, yang pada akhirnya menyebabkan hasil yang suboptimal bagi kita semua (Pareto-inferior). Sebagai pandangan alternatif, kami mengusulkan triangulasi strategis yang ramah yang dapat menawarkan alat tambahan untuk menghindari penyebut umum terkecil dan hasil yang suboptimal. Ini melibatkan pengenalan pihak ketiga yang dapat mengatasi polaritas dan malah membuka potensi penuh bagi kedua pihak.

Triangulasi strategis yang ramah semacam itu dapat mengarah pada pendekatan yang lebih sistematis untuk pemecahan masalah dan memungkinkan kita untuk mengatasi pemikiran silo. Misalnya, suatu masyarakat memutuskan untuk menghabiskan 35% dari PDB-nya untuk barang publik. Jika masyarakat tersebut pertama-tama memiliki kedaulatan atas proses penciptaan uangnya (yaitu, jika dapat mencetak uang), yang berarti tidak harus bergantung pada utang luar negeri yang didenominasikan dalam mata uang asing, dan kedua

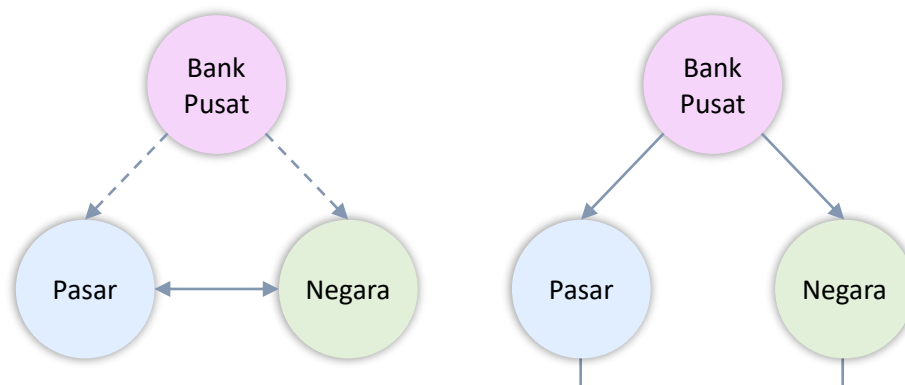


memiliki sumber daya manusia dan alam yang diperlukan, maka pada akhirnya dapat menghasilkan jumlah uang yang dibutuhkan.

Akibatnya, subsidi dan skema pajak untuk sektor swasta yang awalnya diperkenalkan untuk membiayai barang publik ini akan dihapuskan secara bertahap dari waktu ke waktu. Kita kemudian akan memiliki sistem pasar bebas dan kompetitif, yang memungkinkan alokasi barang dan jasa secara optimal, dan pada saat yang sama memiliki sektor publik yang berfungsi tinggi, di mana otoritas negara memungkinkan pengelolaan aset bersama kita. Namun, baik sektor swasta maupun publik membutuhkan pihak ketiga untuk terlibat dalam mengatasi kendala tersebut. Bank sentral dan regulator, yang beroperasi secara proaktif, preventif, dan restoratif, dapat memainkan peran ini. Ini berarti bahwa kebijakan moneter akan lebih unggul daripada kebijakan fiskal dalam hal pembiayaan aset bersama kita. Gambar 13.3 mengilustrasikan tiga serangkai moneter yang sangat diperlukan:

Kesimpulannya, kita membutuhkan negara yang lebih kuat dan desain pasar yang adil dan kompetitif agar dapat memperoleh manfaat dari kedua institusi tersebut secara bersamaan. Tantangan kita bukanlah untuk memprivatisasi aset bersama, tetapi untuk menyesuaikan sistem keuangan kita dengan sifat aset bersama. Singkatnya, kita membutuhkan lebih banyak dan lebih baik pembiayaan. Dan sebenarnya, ini sudah terjadi dalam bentuk yang masih baru dan eksperimental. Regulator moneter dan bank sentral saat ini sedang menguji apa yang dikenal sebagai mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk menyediakan likuiditas tambahan yang ditargetkan.

Hal ini kemudian meningkatkan kapasitas pengarahan mereka, menghindari penarikan dana besar-besaran dari bank, memperkuat stabilitas harga, dan menghasilkan ribuan lapangan kerja hijau baru serta pendapatan publik, dan beroperasi secara anti-siklik. Jika dilakukan dengan benar, kita akan memiliki mekanisme moneter yang tepat untuk membiayai SDGs PBB dan sumber daya bersama yang terkait. Pada akhirnya, kita akan memiliki alat yang tersedia untuk bentuk rekayasa keuangan baru yang hampir tak terbatas untuk mendanai dan melindungi risiko yang terkait. Singkatnya, kita dapat membangunkan raksasa yang tertidur ini.



Gambar 13.3 Tiga serangkai yang sangat diperlukan. Kiri: Bank sentral tetap netral; pasar dan negara mencari penyebut terkecil. Kanan: Bank sentral menjadi proaktif, memungkinkan, dan memfasilitasi alokasi pasar yang kuat dan negara yang kuat secara bersamaan.



13.5 KEUNGGULAN PARETO DALAM TREN SOLUSI MODERN

Di era Antroposen, kita perlu bekerja, hidup, dan berbisnis secara berbeda dari yang telah kita lakukan selama ini. Ketidakpastian sistemik dan keterkaitan semakin meningkat, dan ini juga akan memengaruhi cara kita menangani sumber daya bersama kita. Sumber daya bersama global telah menjadi prasyarat untuk setiap inisiatif swasta. Untuk menghindari kendala pendekatan tradisional kita terhadap pembiayaan, pendanaan tambahan dan instrumen rekayasa keuangan baru diperlukan untuk mengamankan sumber daya bersama kita. Alih-alih mendanai, melakukan lindung nilai, dan mengelolanya hanya menggunakan uang pembayar pajak, investasi swasta, atau filantropi, pandangan yang disarankan di sini adalah bahwa bank sentral harus menjadi proaktif daripada reaktif dan mencegah masalah sebelum terjadi daripada memperbaiki kerusakan setelahnya. Bank pembangunan publik domestik mungkin dapat mengelola layanan keuangan yang diperlukan. Negara-negara yang memiliki kedaulatan untuk mencetak mata uang mereka sendiri dan memiliki mata uang yang sangat mudah dikonversi seperti USD, EURO, atau YEN, memiliki kemungkinan untuk menyediakan likuiditas tambahan secara langsung dan digital (CBDC: Central Bank Digital Currencies).

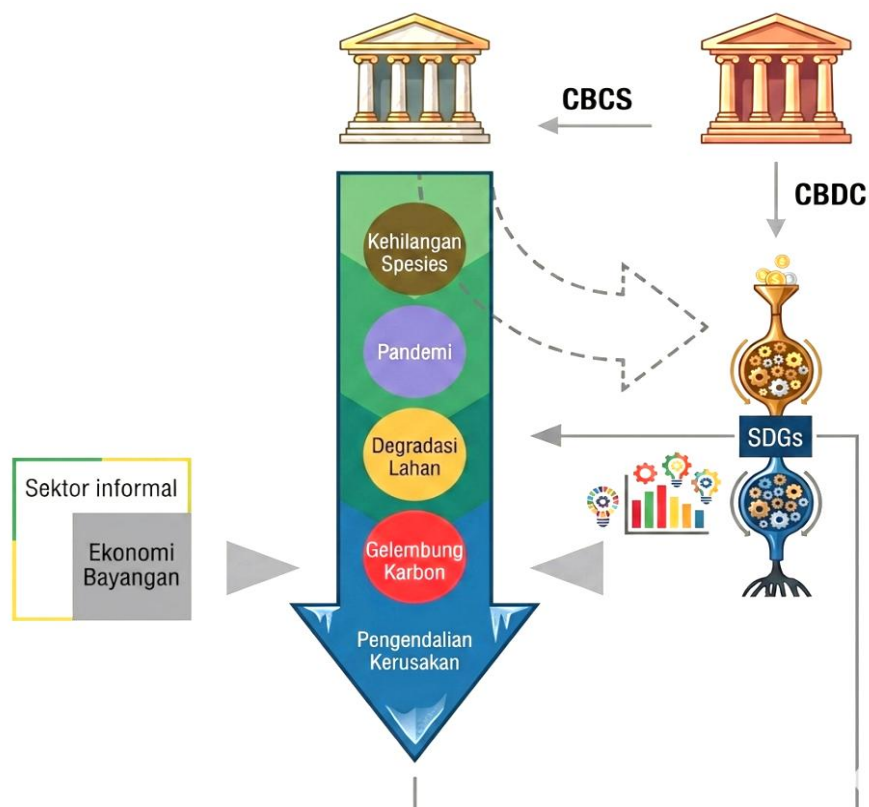
Bahkan, lebih dari 90 bank sentral sudah bereksperimen dengan CBDC (mata uang digital bank sentral). CBDC dibuat dalam kerangka hukum hak kedaulatan setiap negara untuk menciptakan mata uangnya sendiri. Jika CBDC dikaitkan dengan kontrak pintar digital yang mengharuskan uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan bersama dan menyediakan likuiditas tambahan untuk melindungi risiko terkait, maka kita akan memiliki likuiditas yang diperlukan untuk mengamankan kepentingan bersama kita. Tergantung pada lokasi, kita mungkin menyebut mata uang ini sebagai "USD hijau", "euro hijau", "yen hijau", atau "renminbi hijau". Mekanisme ini akan memungkinkan kita untuk mulai memparalelkan sistem mata uang kita dan mengarahkannya ke ekonomi hijau.

Mendigitalkan mata uang kita akan membantu mencegah penipuan, korupsi, kebocoran keuangan, dan pencucian uang pasar gelap, dan kita dapat mulai melakukan transaksi langsung. Selain uang pembayar pajak dan ekuitas swasta untuk perusahaan rintisan, UKM, dan korporasi, kita akan mendukung bank sentral untuk menyediakan likuiditas tambahan guna membiayai masa depan kita bersama. Bank Dunia, IMF (melalui Hak Penarikan Khusus), bank pembangunan regional (EIB, ADB, dan lain-lain.), dan IGO, seperti WHO, tiba-tiba akan memiliki cukup dana yang tersedia untuk mengatasi krisis berikutnya, untuk menerapkan respons manajemen bencana, untuk mulai berinvestasi dalam pendidikan prasekolah, rumah sakit, dan universitas, untuk melakukan reboisasi Sahara, untuk menciptakan cagar alam di seluruh dunia dan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan. Semua dicapai dengan alat rekayasa keuangan tambahan di persimpangan antara sektor swasta dan publik. Kita kemudian akan memasuki dunia di mana kebijakan moneter mengalahkan kebijakan fiskal, di mana sektor swasta dan publik adalah kembar yang beroperasi secara paralel, di mana bank sentral memiliki neraca yang lebih besar dan kepentingan bersama global kita terjamin, di mana keberlanjutan akhirnya mendorong



keuangan, dan di mana kita telah mulai berpikir di luar kotak. Gambar 13.4 mengilustrasikan konsep ini.

Panah oranye besar mewakili rantai nilai global, yang terganggu oleh berbagai guncangan dan kelemahan asimetris (gelembung karbon, hilangnya spesies, degradasi lahan, pandemi, dan pengendalian kerusakan). Kotak hitam mewakili aktivitas pasar gelap yang masuk ke dalam rantai nilai global tetapi menariknya ke arah yang salah. Panah hijau tipis mewakili strategi tradisional "ujung pipa" dan pembiayaan bersama untuk mendanai sumber daya bersama kita. Panah hijau besar mewakili bank sentral yang menciptakan mata uang digital hijau yang berjalan paralel dengan mata uang yang ada, dan dirancang untuk mendanai dan membiayai sumber daya bersama kita, menginternalisasi eksternalitas, dan menciptakan pasar hijau untuk masa depan kita bersama.

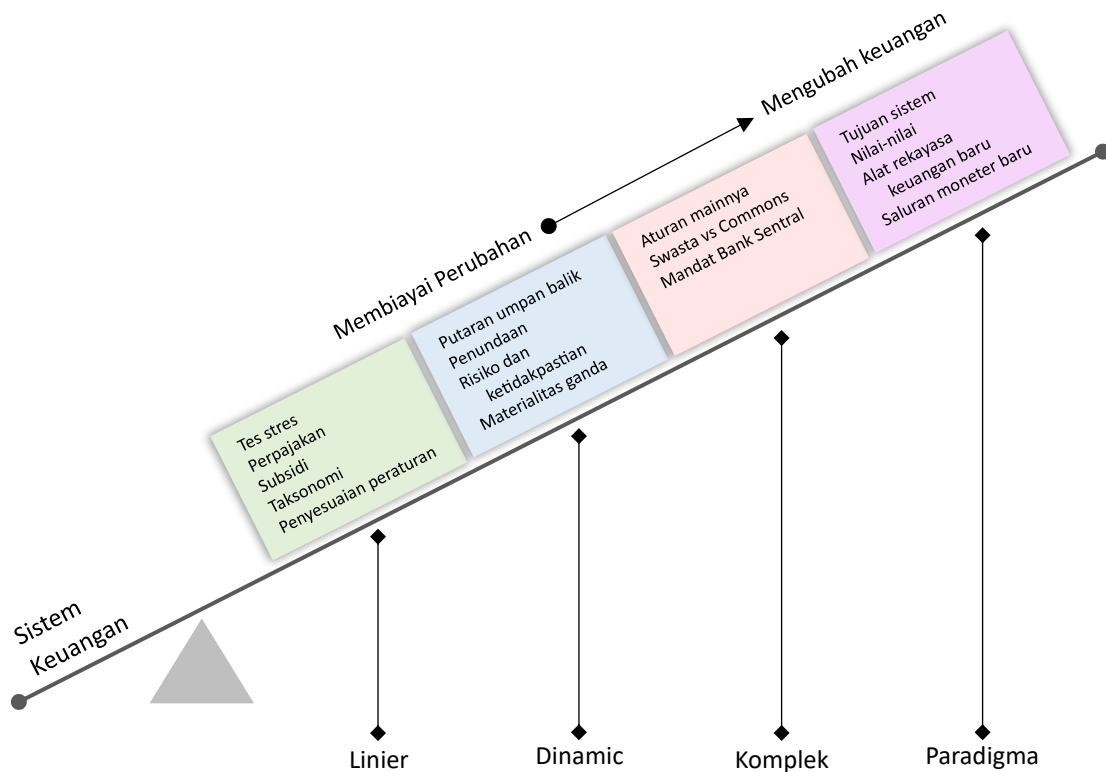


Gambar 13.4 Permainan baru yang sedang populer adalah sistem mata uang digital paralel untuk mengatasi eksternalitas, mendanai sumber daya bersama kita, dan menciptakan pasar masa depan yang ramah lingkungan.

Apa dampaknya terhadap ekonomi konvensional? Likuiditas tambahan senilai Rp50 kuadriliun per tahun tidak akan merugikan ekonomi konvensional. Bahkan, justru sebaliknya. Perencanaan perusahaan dan negara, produksi, dan tingkat harga akan menjadi lebih kuat dan andal dengan visi jangka panjang. Lebih lanjut, langkah ini akan menstabilkan ekonomi siklikal yang mengalami pasang surut secara anti-siklikal. Terlepas dari argumen yang bertentangan, kita membutuhkan lebih banyak finansialisasi (keuangan/PDB). Singkatnya, untuk membiayai sumber daya bersama kita, (a) kebijakan moneter harus mengalahkan kebijakan fiskal; lebih



lanjut, regulator, bank sentral, dan lembaga keuangan pembangunan (DFI) harus (b) langsung, (c) digital, dan (d) paralel. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan berbagai instrumen rekayasa keuangan baru dan memungkinkan kita untuk melakukan lindung nilai, pendanaan, pengelolaan, dan pembiayaan aset bersama kita. Gambar 13.5 merangkum berbagai pendekatan untuk mengelola aset bersama kita, yaitu, bisnis seperti biasa, perpajakan, filantropi dan ekuitas swasta, upaya regulasi, dan sistem mata uang ganda yang berjalan langsung, digital, dan paralel.



Gambar 13.5 Ringkasan berbagai pendekatan untuk mengelola sumber daya bersama kita.

13.6 RINGKASAN

Tampaknya setiap sumber daya bersama akan menyebabkan pengabaian atau penggunaan berlebihan dan efek bahaya moral atau efek penumpang gelap. Tetapi pandangan ini, yang dianut oleh G. Hardin, menyesatkan. Pandangan ini hanya berlaku untuk kasus khusus yang unik, di mana barang atau jasa posisional swasta bersaing dengan sumber daya bersama, dan sumber daya bersama ini pada saat yang sama kekurangan dana. Hanya dalam kasus ini, sumber daya bersama akan diabaikan atau digunakan secara berlebihan.

Namun, sifat sebagian besar sumber daya bersama berbeda. Sumber daya bersama memiliki batas atas, seharusnya tidak dapat diperdagangkan, membutuhkan ekonomi yang lebih regeneratif untuk pemeliharannya dan merupakan prasyarat untuk sebagian besar, jika tidak semua, aktivitas swasta. Dengan kata lain, efek bahaya moral atau efek penumpang gelap hanya terjadi di dunia sumber daya bersama jika pasokannya tidak memadai. Ketidaksiharian antara sistem moneter kita saat ini dan sumber daya bersama global telah mencegah potensi ekonomi penuh keduanya tercapai untuk kebaikan umat manusia.



Tugas kita adalah menyesuaikan ekonomi agar sesuai dengan sifat kepemilikan bersama (commons). Dan inilah mengapa kita perlu merevisi teori tragedi kepemilikan bersama Hardin. Tragedi kepemilikan bersama yang sebenarnya bukanlah bahwa kepemilikan bersama terlalu banyak digunakan atau diabaikan, atau bahwa efek penumpang gelap dan efek limpahan yang ditimbulkannya, tetapi lebih merupakan insentif dan disinsentif keuangan yang mendasarinya. Namun, ada empat persyaratan: (1) kebijakan moneter harus lebih unggul daripada kebijakan fiskal dan likuiditas tambahan (2) harus digital untuk menghindari penipuan dan transaksi ilegal; (3) harus berjalan paralel sehingga memungkinkan tingkat konversi (cokelat ke hijau) yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan umum, dan (4) harus dihasilkan langsung dari bank sentral atau lembaga keuangan pembangunan (DFI) alih-alih bergantung pada pasar ekuitas swasta, filantropi, atau perpajakan.

Dengan menggabungkan keempat instrumen kebijakan ini, kita akan sampai pada keseimbangan Pareto-superior, di mana kepemilikan bersama kita didanai secara memadai, eksternalitas sosial dan lingkungan negatif dikelola, dan pasar alternatif hijau baru tersedia. Mata rantai yang hilang dan sangat penting dalam debat tentang keberlanjutan adalah sistem moneter. Sistem yang ada terlalu rapuh, lambat, dan volumenya rendah untuk membiayai sumber daya bersama global kita dan untuk melindungi risiko planet yang terkait.

Melepaskan monokultur moneter kita saat ini, dalam jangka panjang, akan menstabilkan pasar keuangan internasional, memperkuat upaya regulasi moneter, mengurangi eksternalitas negatif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menstabilkan demokrasi. Ini akan mengarah pada pendekatan multi-pemangku kepentingan tanpa penyesalan bagi semua pihak yang terlibat.

Berbagai dampak positif yang terbukti secara empiris dapat diidentifikasi, yang memungkinkan kita untuk melampaui kendala ekonomi berbasis bahan bakar fosil, mengatasi berbagai pertukaran dan eksternalitas sosial/ekologis, dan mengatasi tragedi ganda sumber daya bersama dan cakrawala pada saat yang bersamaan. Alih-alih memprivatisasi lebih lanjut sumber daya bersama kita, kita dapat mulai mengidentifikasi instrumen keuangan baru yang (hampir) tak terbatas dan inovatif serta bentuk-bentuk rekayasa keuangan, termasuk pembiayaan campuran, derivatif dan swap, transfer uang digital langsung, dan jaminan negara baru.

Dengan pendekatan ini, keuangan tidak akan menggerakkan kepentingan bersama kita, melainkan sebaliknya; kepentingan bersama kita pada akhirnya akan menggerakkan keuangan. Pada akhirnya kita akan memasuki dunia di mana kebijakan moneter mengalahkan kebijakan fiskal; di mana sektor swasta dan publik adalah kembar yang beroperasi secara paralel; di mana bank sentral memiliki neraca yang lebih besar dan kepentingan bersama global kita terjamin; di mana keberlanjutan akhirnya menggerakkan keuangan; dan di mana kita mulai berpikir di luar kotak.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, K., Hafa, G., Syahputra, R., & Kinanti, F. (2025). Signifikansi Organisasi Internasional G-20 Dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Dan Prabowo. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(1), 67-76.
- Aliza, S. W., Jufani, A. P., Putri, S. A., & Candra, M. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional. *Hikamatzu | Journal Of Multidisciplinary*, 2(1).
- Andini, S., Nurdin, I., & Harikesa, I. W. A. (2025). Dampak Trade War Republik Rakyat Tiongkok Dan Amerika Serikat Terhadap Ekonomi Vietnam. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(2).
- Andrena, C. (2025). Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(1).
- Annisa, N., Sapa, N. B., & Lutfi, M. (2025). Dinamika Ekonomi Dinasti Fatimiyah: Strategi Kebijakan, Peran Tokoh, Dan Faktor Kemajuan Serta Kemundurannya. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 117-137.
- Aulia, R. D., Putri, I. R., & Arianthony, S. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Internasional Dan Teori Perdagangan Internasional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Avedish, D., Wibowo, F. T., Azmi, N. U., Nada, Q., & Sarpini, S. (2025). Peran Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Valuta Asing Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 223-235.
- Ayu, R. M., Alfitri, N., & Astuti, R. P. (2025). Perjalanan Sejarah Bank Sentral: Peran, Tantangan, Dan Adaptasi Dalam Sistem Ekonomi Global. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 402-409.
- Bahari, S. (2025). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi Internasional: Tinjauan Terhadap Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(5), 51-60.
- Damanik, F. H. S., Sirait, H., Minarsi, A., Abae, I., Hendratni, T. W., & Purba, J. H. V. (2025). Transformasi Ekonomi: Inovasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Global Di Abad Ke-21. *Star Digital Publishing*.
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).



- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).
- Fauzian, R., & Istianah, R. (2025). Pendidikan Islam Dan Tantangan Era Globalisasi: Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Dan Reorientasi Kebijakan. *Cv. Intake Pustaka*.
- Firansyah, M. S., Cevia, I., Khasanah, L. N., Wibowo, I., Mariba, I. P., Salim, M., & Malik, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 113-123.
- Hati, A. K., Isnainiah, N., Oktavianingrum, T. P., & Astuti, R. P. (2025). Peran Kebijakan Moneter Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 250-256.
- Judijanto, L. (2025). Regulasi Dan Kebijakan Untuk Ekonomi Sirkular: Tinjauan Literatur Global Dan Lokal. *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 9-16.
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika Dan Tantangan Abad 21*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kalauw, S. M., Nurinaya, N., & Siswatiningrum, E. (2025). Kerja Sama Indonesia–Korea Melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ik-Cepa) Terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 2046-2057.
- Lubis, A. H., Wahyudi, A. Z., Siregar, A. W., & Sundawa, M. A. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun: Relevansinya Dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 188-194.
- Muarif, I. (2025). Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 961-967.
- Nasution, A. N., Arafah, A., Ritonga, A. U., Puspita, D., Syahdila, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (Wto) Dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 13-22.
- Nirwana, E. H., Sapa, N., & Lutfi, M. (2025). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Mughal: Kajian Berbasis Literature Review. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 272-281.
- Nugraha, J. A. (2025). Ekonomi Syariah, Mcda-Wdma Dan Pentahelix Collaboration Di Kota Tasikmalaya. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 71-93.



- Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 5(1), 19-23.
- Pahlawan, H. F. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan Asean. *Padjadjaran Journal Of International Relations*, 7(1), 134-146.
- Pane, N. S. R., Siregar, R. A., Nasution, N., & Harahap, A. H. (2025). Studi Kajian Teori Perdagangan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pembangunan Negara Berkembang. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 286-293.
- Pasaribu, N., Purba, B., Ujung, S., Sembiring, G. B., & Sitorus, M. (2025). Kebijakan Ekonomi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3895-3910.
- Prasetyo, D. Y., Norrahman, F. H., Ramadhani, A. D., Hilmiyah, N., Nurharizah, S., Malika, V., & Fuad, M. Y. (2025). Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, Dan Hubungan Internasional. Penerbit: Kramantara Js.
- Purba, S. S. B. (2025). Evaluasi Stabilitas Harga Komoditas Pertanian Dalam Sistem Ekonomi Terbuka. *Circle Archive*, 1(7).
- Purrohman, P. S., Ruslan, A., Lidiaputri, H., & Azizah, Z. N. (2025). Dinamika Perdagangan Internasional Dan Transformasi Ekonomi Global. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Quddus, M. S. Q. (2025). Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean. *Equality: Journal Of Law And Justice*, 2(1), 62-88.
- Rohmah, M., Basyir, T., Abror, D., Masitoh, F. N., & Azmiyati, A. (2025). Dampak Globalisasi, Kemiskinan, Dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(01), 1-25.
- Rosyidi, L., & Rofiq, A. (2025). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Penguatan Kesenjangan Gender. *Jurnal Istiqro*, 11(1), 20-34.
- Salsabila, D. N., Ayyasi, S., & Pangestoeti, W. (2025). Protectionism In Economic Policy: Peran Pajak Perdagangan Internasional Dalam Perlindungan Industri Dalam Negeri. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 8(1), 371-377.
- Sari, I. H., Sinambela, K., Hasibuan, R. U., Ramadhana, S., Ramadhini, S., & Sakuntala, D. (2025). Peran Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1).



- Savilia, I., Af, I., Khasanah, K., & Sarpini, S. (2025). Ekonomi Terbuka Dan Ketahanan Ekonomi: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 133-140.
- Sofiaturohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2025). Keadilan Fiskal Dan Ekuitas Sosial: Pilar Daya Saing Ekonomi Makro Perdagangan Internasional. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(2), 243-257.
- Suriansha, R. (2025). Dampak Tarif Impor Trump Terhadap Harga Pedagangan Internasional. *Journal Of Economics And Business Ubs*, 14(3), 239-248.
- Susanto, D. (2025). Perkembangan Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 72-79.
- Sutrisno, A. (2025). Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump Terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. *Iblam Law Review*, 5(2), 69-77.
- Syofya, H., Yanita, P., Efrianto, E., Rosi, A. I., & Anugrah, F. (2025). *Perekonomian Internasional Teori, Kebijakan Dan Kasus Kontemporer*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Venessa, C. (2025). Implikasi Ketegangan Geopolitik Terhadap Stabilitas Bisnis Internasional: Pergeseran Hegemoni Tunggal Menuju Dunia Multipolar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11117-11131.
- Yulianingsih, D. I., & Heriyawan, M. S. (2025). Peran Etika Ekonomi Islam Dalam Perdagangan Internasional: Telaah Kritis Atas Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04).
- Yurni, C. A., Sanjaya, N., Nurhayati, S., & Rohmi, M. L. (2025). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2021. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 485-499.
- Zubair, M. F., Argenti, G., & Marsingga, P. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia-China: Studi Kasus Kerjasama Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6275-6288.



KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL: Saat Terjadi Poli-Krisis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-18-5 (PDF)



9

786347

695185